Abid Rohmanu, Aksin Wijaya, Anis Afifah, Antis Rachmayanti,
Eny Supriati, Iza Hanifudin, Luhur Prasetyo, Lukman Hakim,
Nanang Rosyidi, Nurkolis, Rizka Eliyana Maslihah,
Tiara Widya Antikasari, Wahid Hariyanto, Yusmicha Ulya Afif

PERCIKAN PEMIKIRAN

Intelektual Muda IAIN Ponorogo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

Percikan Pemikiran
Intelektual Muda IAIN Ponorogo

Penulis:
Abid Rohmanu, Aksin Wijaya, Anis Afifah,
Antis Rachmayanti, Eny Supriati, Iza Hanifudin,
Luhur Prasetyo, Lukman Hakim, Nanang Rosyidi, Nurkolis
Rizka Eliyana Maslihah, Tiara Widya Antikasari
Wahid Hariyanto, Yusmicha Ulya Afif

nadi pustaka

IAIN PONOROGO

Percikan Pemikiran
Intelektual Muda IAIN Ponorogo

Ukuran Buku: 15,5 x 23 cm

Penulis:
Abid Rohmanu, Aksin Wijaya, Anis Afifah, Antis Rachmayanti,
Eny Supriati, Iza Hanifudin, Luhur Prasetyo, Lukman Hakim,
Nanang Rosyidi, Nurkolis Rizka Eliyana Maslihah,
Tiara Widya Antikasari, Wahid Hariyanto, Yusmicha Ulya Afif

Tata Letak:
Saepul

Desain Cover:
Audina

ISBN: 978-623-94519-6-7

Copyright © 2021 oleh Nadi Pustaka
Hak cipta dilindungi undang-undang *All rights reserved*

Diterbitkan pertama kali oleh:
Nadi Pustaka
Jl. Nakulo No. 19A Pugeran Maguwoharjo Depok
Sleman Yogyakarta
Tlpn. 0274-489130 - 081578626131
e-mail: redaksinadipustaka@gmail.com

Bersama

IAIN Ponorogo Pascasarjana
Jln. Pramuka 156, Po. Box 116, Ronowijayan, Siman, Ponorogo,
Jawa Timur
Tlpn. (0352) 481277/Fax: (0352) 461893.
e-mail: pasca@iainponorogo.ac.id

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Pengantar Penyunting

Buku di tangan Pembaca ini adalah kumpulan tulisan Pengelola Pascasarjana IAIN Ponorogo pada masa bakti 2017-2021. Sebagai sebuah kumpulan tulisan, warna-warni topik, isu, dan gaya penulisan terlihat jelas. Warna-warni tulisan ini disatukan dalam kolase percikan pemikiran intelektual muda IAIN Ponorogo sebagaimana dinyatakan dalam judul. Kumpulan tulisan ini juga disatukan dalam spirit dan proliferasi literasi perbukuan. Idenya barang kali sederhana, di perguruan tinggi banyak sumber tulisan yang bisa dijadikan buku yang bisa mendukung publikasi dan diseminasi gagasan. Setiap mahasiswa menghasilkan karya akhir penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis. Dosen dan fungsional lainnya secara periodik menulis hasil penelitian ataupun artikel. Sayangnya, tak banyak dari sumber-sumber ini yang kemudian dikemas dalam bentuk buku. Dari sini lah, buku ini diharapkan biasa menginspirasi mahasiswa Pascasarjana untuk mempublikasikan karya (utamanya

tesis) tidak saja dalam bentuk artikel jurnal (rangkuman eksekutif tesis) tetapi juga dalam bentuk buku.

Buku ini adalah penerbitan antologi tahun yang pertama yang terpilah menjadi seri I dan II. Seri I antologi mewadahi rangkuman eksekutif penelitian tesis mahasiswa, sementara antologi seri II berisi kumpulan tulisan Pengelola Pascasarjana. Antologi seri II ini secara garis besar mengusung topik tentang "Islam dan Kearifan Lokal", "Ekonomi dan Ekonomi Islam", dan "Pendidikan dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan". Artikel-artikel dalam payung topik-topik di atas tidak saja berbicara pada aspek teoritik-konseptual, tetapi sebagian besar bersifat praktis. Maksudnya sebagian besar artikel adalah refleksi para penulisnya terhadap realitas empirik yang dilihat dan digelutinya dalam kehidupan. Sebagai intelektual, mereka mencoba mendialogkan realitas empirik tersebut dengan pendekatan dan perspektif tertentu untuk menjawab kegelisahan akademik mereka.

Sebagai penutup, terima kasih diucapkan kepada Direktur Pascasarjana, Dr. Aksin, M.Ag. yang telah memberikan masukan dan motivasi luar biasa untuk hadirnya buku ini. Rasa terima kasih juga disampaikan kepada para kontributor tulisan yang tidak bisa disebut satu persatu *by name*; kepada para anggota Tim Penyunting (Wahid Hariyanto, Lukman Hakim, dan Eny Supriati); dan tidak lupa kepada Tim Administrasi dan Keuangan Pascasarjana yang telah men-*support* program ini.

Sebagai program awal penulisan buku, tentu banyak kekurangan terutama pada aspek penyuntingan. Kritik

konstruktif dirindukan untuk perbaikan pada episode-episode penulisan berikutnya. Selamat membaca!

Royal Bukit Asri, 25 Januari 2021

Abid Rohmanu

Daftar Isi

Kata Pengantar Penyunting iii
Daftar Isi vii

Bagian I Islam dan Kearifan Lokal 1

Akulturasi Islam Jawa dan Melayu dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Etnik Jawa di Selangor Malaysia 3
Oleh: Abid Rohmanu

Mêgêngan: Sebuah Islamisasi Ritus Warisan Majapahit 31
Oleh: Nanang Rosyidi

Konstruksi Pemikiran Tasawuf Wujudiyah Di Tanah Banjar: Studi atas Naskah Ambulung Martapura Kalimantan Selatan 41
Oleh: Nur Kolis

Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan 85
Oleh: Aksin Wijaya

Bagian II Sistem Ekonomi dalam Perspektif Islam 103

Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi 105
Oleh: Iza Hanifuddin

Akuntansi dalam Metafora *Rasūl*: Formulasi Akuntabilitas dalam Tujuan Dasar Akuntansi Sharī'ah 141
Oleh: Luhur Prasetiyo

Analisis Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Return on Invesment terhadap Harga Saham pada PT. Akr Corporindo Tbk 159
Oleh: Tiara Widya Antikasari

Bagian III Pendidikan dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan 179

Membangun Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Pesantren 181
Oleh: Rizka Eliyana Maslihah

Literasi Informasi dan Keterampilan Berbahasa dalam Konteks Kurikulum Perguruan Tinggi Islam 207
Oleh: Lukman Hakim dan Muhammad Heriyudanta

Implementasi Metode *Inquiry* dan *Hypnosis* Perspektif Pendidikan Islam Klasik di Sekolah Menengah Atas 231
Oleh: Yusmicha Ulya Afif

Blanded Learning Alternatif Pembelajaran untuk Peserta didik Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi Covid-19 . 267
Oleh: Anis Afifah

Aktualisasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan 283
Oleh: Wahid Hariyanto

Meningkatkan Literasi Digital Melalui Perpustakan Sekolah..... 313
Oleh: Eny Supriati

Urgensi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Usaha Peningkatan Layanan Perpustakaan..... 349
Oleh: Antis Rachmayanti

Tentang Penulis 367

Bagian I

Islam dan Kearifan Lokal

Akulturasi Islam Jawa dan Melayu dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Etnik Jawa di Selangor Malaysia*

Oleh: Abid Rohmanu

Pendahuluan

Malaysia merupakan negara yang multi etnik.[1] Tiga etnik terbesar adalah Jawa, China dan India. Imigran Jawa banyak berasal pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang berasal dari Jawa Timur umumnya berasal dari Ponorogo, Madiun, Pacitan dan daerah-daerah lain.[2] Kedatangan imigran Jawa ke Malaysia pada awalnya

---

* Tulisan ini telah terbit dalam bahasa Inggris dengan judul "Acculturation of Javanese and Malay Islam in Wedding Tradition of Javanese Ethnic Community at Selangor Malaysia", dalam *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24 No. 1. Hal. 52-66. 5

1 Menurut salah satu sumber, ada 84 bahasa yang dipertuturkan di kepualauan Melayu sesuai dengan etnik mereka, walalupun bahasa Melayu tetap menjadi bahasa pengantar secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia adalah negara yang majemuk dan multietnik. Lihat Rozeyta BT. Omar dan Paimah BT. Atoma, "Pluraliti Budaya dan Etnik di Alam Melayu Zaman Awal", dalam *Hubungan Etnik di Malaysia: Perspektif Teori dan Praktek,* 56-57, Lihat eprint.utm.my/14774/ (Akses, 23 September 2015).

2 Kajian Etnik Jawa di Malaysia, hissham66.blogspot.com. (Akses 25 April 2015)

tidak dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi semata, akan tetapi juga faktor sosio-politik dan sosio-keagamaan negara Indonesia pada masa itu. Awal abad ke-20, yakni sebelum tahun 1945, Indonesia berada di bawah cengkeraman penjajah Belanda. Penjajahan tersebut sangat membatasi ruang gerak dan menjadi ancaman keselamatan setiap penduduk kala itu. Sebagian imigran juga dipengaruhi oleh faktor keagamaan, yakni kedatangan di Malaysia untuk berdakwah dan mencari bekal dalam menunaikan ibadah haji.[3]

Etnis Jawa di Malaysia sekarang ini menjadi generasi ketiga dan keempat dari nenek moyang mereka. Sebagai keturunan etnis Jawa, mereka mempunyai budaya yang unik dibandingkan masyarakat Melayu dari etnis lain. Mereka masih mempertahankan tradisi leluhur mereka, pada sisi yang lain mereka juga menyerap tradisi lokal, Melayu-Malaysia yang sangat kental warna keislamannya. Dalam bahasa komunikasi keseharian, mereka terbiasa untuk memakai bahasa Jawa "Ngoko" di antara mereka.[4] Bahasa merupakan simbol budaya yang sangat penting bagi masyarakat. Komitmen untuk mempertahankan tradisi

[3] Harith Faruqi Sidek, "Sejarah Pembukaan Penempatan Orang Jawa di Selangor", dalam harithsidek.blogspot.com. (Akses 25 April 2015)

[4] Ada enam Negara yang bahasa Jawa dikenal dan dipakai sebagai bahasa harian oleh sebagian penduduknya. Ini disebabkan oleh imigran Jawa ke enam Negara ini untuk kepentingan ekonomi atau karena perbudakan yang dilakukan oleh Negara Penjajah kala itu. Ke-enam Negara itu adalah: Republik Suriname, Singapore, Malaysia, Belanda, Kaledonia Baru (bekas jajahan Perancis), Cocos Island. Lihat "6 Negara di Dunia yang Memakai Bahasa Jawa" dalam http://www.cuap-cuap.net/2014/11/6-negara-di-dunia-yang-menggunakan.html (Akses, 8 April 2015).

nenek moyang ini juga tercermin dari pepatah mereka: "Tak kan Jawa hilang di Dunia".

Prinsip kesetiaan terhadap tradisi dan budaya nenek moyang ini juga tercermin dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu etnik Jawa. Walaupun secara umum tradisi pernikahan sudah dibungkus dengan tradisi Melayu, berdasar pengamatan Penulis, sebagian dari tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor Malaysia masih terlihat nuansa budaya Jawa di dalamnya. Ini misalnya bisa dilihat dalam tradisi "gotong royong" dalam mempersiapkan upacara pernikahan pada masyarakat etnik Jawa di Selangor. Tradisi gotong royong ini secara subtantif tidak berbeda dengan tradisi *rewang* pada masyarakat Jawa. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang lebih suka menyebutnya dengan *rewang*. Mereka juga menyebut *gotong royong* dengan istilah *kenduri kahwin* (atau disebut juga *selametan*), istilah yang juga cukup populer pada masyarakat Jawa.[5] Walaupun setiap tradisi akan mengalami perubahan tatkala harus berhadapan dengan budaya lain, Sorokin menegaskan bahwa akan selalu ada elemen yang bersifat langgeng atau dalam bahasanya *continuity within change*.[6] Seandainya tampilan fisik tradisi berubah, paling tidak ruh dan semangat tradisi tetap dipertahankan karena terkait dengan filosofi hidup sebuah masyarakat dan etnis. Hal di atas menunjuk pada adanya akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Melayu-Malaysia.

---

[5] Observasi, 20-23 Maret 2015.

[6] Sebagaimana dikutip oleh Nur Syam, *Madzab- Madzab Antropologi* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 138.

Pernikahan adalah hal sakral dalam sebagian besar budaya, sebagaimana kelahiran dan kematian (tiga siklus penting dalam kehidupan). Selain itu pernikahan juga lekat dengan dimensi sosial-kemasyarakatan. Karena itu banyak prosesi dan upacara adat yang mengiringi sebuah perkawinan pada masyarakat keturunan Jawa di Malaysia.

Sakralitas dan sosialitas pernikahan sebagaimana tergambar di atas, terlihat dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu. Salah satu sumber menyatakan bahwa sakralitas dan sosialitas pernikahan menjadikan tradisi yang mengiringi pernikahan Melayu terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena konsep perkawinan dalam tradisi melayu harus mendapatkan restu dari orang tua dan mendapatkan pengakuan secara sosial dari keluarga, tetangga dan masyarakat secara umum. Karena itulah, meski bukan menjadi rukun pernikahan, banyak prosesi pernikahan, adat dan upacara yang mengiringi pernikahan yang intinya bersifat sosial, yakni terkait bagaimana menyosialisasikan pernikahan kepada masyarakat secara luas.[7]

Berdasar hal di atas, tulisan ini akan mengkaji bagaimana masyarakat Melayu keturunan etnis Jawa di Malaysia mencoba untuk mempertahankan tradisi pernikahan Jawa, dan bagaimana tradisi tersebut diadaptasikan dengan budaya dan tradisi lokal di Malaysia. Menurut teori budaya, setiap budaya mempunyai keunikan sebagaimana keunikan individu. Keunikan budaya pernikahan masyarakat melayu keturunan Jawa di Malaysia adalah bahwa budaya

[7] Adat Perkawinan Melayu dalam http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545 (Akses, 8 April 2015).

pernikahan tersebut diyakini merupakan negosiasi budaya Jawa terhadap budaya Melayu.

Metode Penelitian dan Teori Akulturasi

Penelitian pada dasarnya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Data utama (primer) dalam penelitian ini adalah tradisi dan praktik pernikahan masyarakat Selangor Malaysia etnis Jawa dan bagaimana mereka memaknai tradisi pernikahan tersebut. Karena itu sumber data utama ini adalah praktik tradisi pernikahan masyarakat Selangor Malaysia dan para pelaku tradisi tersebut. Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, penelitian ini hendak menggali makna-makna budaya dan tradisi pernikahan masyarakat Islam keturunan Jawa di Selangor Malaysia. ini dilakukan untuk melihat akulturasi budaya Islam Jawa dan Melayu dalam tradisi pernikahan mereka. Karena itulah penelitian berparadigma humanis (nonpositivistik), dengan pendekatan Antropologis.

Pendekatan antropologis Penulis nilai relevan dengan karakteristik topik dan tujuan penelitian, yakni untuk menggambarkan bagaimana akulturasi budaya Islam-Jawa dan Islam-Melayu dalam tradisi pernikahan Etnik Jawa di Selangor Malaysia. Di antara ciri pendekatan antroplogis adalah: 1) deskriptif, tidak normatif, 2) *local practices,* (praktik lokal), 3) *connections accross social domains* (keterhubungan antar domain kehidupan), 4) *comparative* (komparasi).[8]

[8] Amin Abdullah, "Urgensi Pendekatan Antropologi Untuk studi Agama dan Studi Islam", dalam aminabd.wordpress.com (Akses 23 Oktober 2015).

Berdasar karakter pendekatan antropologis di atas, penelitian ini bermaksud mendeskripsikan amalan-amalan, ritus-ritus yang mengiringi peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yakni pernikahan. Karena itu yang menjadi titik tekan adalah praktik lokal (*local practices*) budaya pernikahan etnik Jawa-Islam di Selangor, dan bagaimana budaya tersebut terkait dengan domain-domain kehidupan lain (agama, sosio-budaya, dan sosio-ekonomi). Penelitian ini juga mengandung unsur komparatif, yakni membandingkan tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor dengan tradisi pernikahan Jawa. Komparasi ini, selain untuk melihat keunikan tradisi pernikahan Etnik Jawa di Selangor dalam kaitannya dengan tradisi pernikahan Jawa, juga untuk melihat bagaimana tingkat akulturasi tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor dengan tradisi Melayu-Islam.

Sementara itu, teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah akulturasi. Akulturasi merupakan salah satu proses sosial, yakni pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi, dan akhirnya kebudayaan mereka mengalami perubahan bentuk. Para peneliti budaya sejak lama telah tertarik dengan proses akulturasi budaya untuk memahami sejauhmana proses tersebut menyebabkan terjadinya perubahan, baik perubahan sosial atau budaya.[9]

Koentjaraningrat menyatakan bahwa akulturasi adalah proses sosial untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan sendiri,

[9] Sebagaimana dikutip oleh Arkanudin, "Akulturasi sebagai Mekanisme Perubahan Budaya", dalam Arkandien.blogspot.com/2010/06/ (Akses, 23 Oktober 2015).

tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan sendiri. Koentjaraningrat dalam hal ini mencontohkan sejak dahulu dalam sejarah kemanusiaan ada gerak migrasi, yakni perpindahan suku-suku bangsa dari satu wilayah ke wilayah lain. Migrasi ini menyebabkan terjadinya pertemuan kelompok-kelompok manusia dari *background* budaya yang berbeda-beda. Ketika satu kelompok budaya dihadapkan pada kelompok budaya lain, maka terjadilah interaksi dan kontak budaya, atau pertemuan dua budaya.[10] Pertemuan dua budaya inilah yang melahirkan akulturasi budaya, yakni proses mengintegrasikan budaya lain ke dalam budaya sendiri tanpa mengorbankan kejatidirian budaya. Atau dapat dikatakan bahwa akulturasi budaya adalah peleburan dua kebudayaan yang berbeda kemudian menghasilkan kebudayaan baru, tetapi tidak menghilangkan kepribadian atau sifat kebudayaan asli. Ia merupakan bentuk adaptasi individu dalam sebuah lingkungan kebudayaan yang baru.

Ahli antropologi menyatakan bahwa akulturasi terjadi apabila kontak antara dua kebuadayaan atau lebih berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. Berkaitan dengan tingkat intensitas kontak antar kebudayaan ini, para ahli antropologi mengajukan beberapa klasifikasi konsep:[11]

1. Subtitusi: jika unsur atau kompleks unsur-unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti dengan unsur-unsur baru yang memenuhi fungsinya yang melibatkan perubahan struktural dalam tingkat yang lebih kecil.

[10] Ibid.
[11] Ibid.

2. Sinkretisme: menunjuk pada adanya percampuran unsur-unsur lama dengan yang baru dan membentuk sebuah sistem yang baru. Dalam konteks ini dimungkinkan adanya perubahan yang berarti.
3. Adisi: untuk menunjuk pada tingkat perpaduan kebudayaan, yakni unsur atau kompleks unsur-unsur baru ditambahkan pada kebudayaan lama.
4. Dekulturasi: menunjuk pada perpaduan kebudayaan yang menghilangkan subtansi sebuah kebudayaan tertentu.
5. Orijinasi: menunjuk pada tingkat perpaduan budaya, unsur-unsur baru ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru karena perubahan situasi.
6. Penolakan: menunjuk pada kondisi perubahan yang sangat cepat, sehingga sejumlah besar orang tidak menerimanya. Penolakan ini bisa mewujud dalam berbagai bentuk dari yang ringan hingga yang ekstrim seperti pemberontakan.

Dari sudut antropologi, setiap tradis dan budaya akan mengalami perubahan ketika dihadapkan pada dunia sosial yang terus berubah. Ini digambarkan secara teoretik dengan tahapan "disorganisasi" ke "integrasi", atau mirip dengan mazhab dialektiknya Hegel, tahapan perubahan budaya adalah integrasi, disintegrasi, dan reintegrasi.[12]

Walaupun begitu, setiap perubahan selalu menyisakan sesuatu yang bersifat langgeng. Sorokin dalam hal ini menyatakan bahwa selalu ada elemen yang berlaku lang-

[12] Syam, *Madzab- Madzab Antropologi*, 137.

geng di setiap perubahan atau *continuity within change.*[13] Konsep ini bisa dipakai sebagai kerangka sejauh mana akulturasi tradisi Jawa dan Melayu dalam konteks tradisi pernikahan yang berkembang pada masyarakat Etnik Jawa di Selangor Malaysia.

Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Keturunan Jawa

Salah satu karakter pendekatan antropologis dalam penelitian adalah deskriptif-komparatif. Komparasi dalam tulisan ini diarahkan pada perbandingan antara tradisi pernikahan masyarakat etnik Jawa di selangor Malaysia dengan tradisi pernikahan masyarakat Jawa. Komparasi ini sekaligus nanti akan bisa menunjukkan bagaimana tingkat akulturasi tradisi pernikahan etnik Jawa Islam di Selangor terhadap tradisi Melayu. Komparasi akan dilakukan terhadap berbagai ritus dan upacara yang mengiringi pernikahan.

1. Upacara-upacara Pra Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan berisikan janji yang sangat kuat (*mithaqan ghaliza*) antara pasangan suami-istri. Karena itu pernikahan dalam konsep Islam diharapkan hanya dilakukan sekali seumur hidup oleh pelakunya. Perceraian secara normatif dinilai sebagai suatu yang dibenci dan tercela dan hanya bia dilakukan dalam kondisi yang sangat darurat. Prinsip normatif ini kemudian mewujud dalam berbagai upacara yang mengiringi pernikahan, di antaranya adalah adat "merisik

[13] Ibid.

dan meninjau". Subtansi dari tradisi merisik dan meninjau ini adalah, ***pertama,*** untuk melihat apakah calon yang dikehendaki memang benar-benar lajang dan tidak dalam tunangan orang lain; ***kedua,*** untuk melihat segenap latar belakang calon pasangan. Sebagaimana dalam tradisi Jawa, penting untuk melihat *bibit, bebet* dan *bobot* dari masing-masing calon pasangan. Semuanya ini disebabkan karena pernikahan sangat diharapkan bisa abadi (sampai *kaken-ninen*) dan bisa *sakinah mawaddah wa rahmah.* Dalam tradisi Jawa merisik dan meninjau mempunyai kesamaan dengan adat *nontoni*. *Nontoni* dalam masyarakat Jawa memberikan kesempatan kedua calon pasangan dan kedua keluarga masing-masing untuk melihat latar belakang pihak keluarga lain. Walaupun kedua tradisi ini mempunyai kesamaan subtansi, akan tetapi tidak ada keterangan yang meyakinkan bahwa telah terjadi akulturasi dalam budaya dan tradisi ini. Besar kemungkinan ini disebabkan karena kedua masyarakat mempunyai nilai yang sama dalam melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Karenanya kehati-hatian dalam memilih pasangan menjadi sesuatu yang penting. Kesamaan nilai lain adalah bahwa pernikahan pada dasarnya bukan semata berkaitan dengan pelaku yang hendak menikah (calon mempelai), tetapi bahwa pernikahan juga sangat terkait dengan keluarga. Pernikahan pada dasarnya tidak hanya mengawinkan pasangan calon mempelai, akan tetapi juga mengawinkan dua keluarga. Dalam konteks ini keterlibatan keluarga menjadi penting dalam semua prosesi pernikahan, utamanya dalam tradisi

merisik dan *meninjau* (pada masyarakat Selangor) dan *nontoni* (pada masyarakat Jawa).

Setelah prosesi merisik dan meninjau, jika kedua belah pihak sudah memahami dan menerima kondisi calon, maka sesuai dengan konsep adat Melayu, upacara-upacara berikutnya adalah *merasi*, pelamaran dan peminangan, gotong royong, pembacaan *barzanzi* dan persediaan jamuan. Upacara-upacara ini pada masyarakat etnik Jawa di Selangor sudah mengalami penyederhanaan-penyederhanaan. Tradisi merasi misalnya, sudah tidak banyak dipakai oleh masyarakat etnik Jawa di Selangor karena dinilai tidak sesuai lagi dengan alam keyakinan mereka.

Di antara upacara-upacara pra pernikahan di atas, ritus sosial gotong royong dapat dinilai sebagai bentuk pengaruh adat Jawa. Dalam pandangan hidup Jawa, gotong royong merupakan manifestasi dari aspek kerukunan yang sangat penting. Gotong royong berkaitan dengan upacara perkawinan disebut dengan *rewang. Rewang* adalah bentuk gotong royong yang dilaksanakan untuk mempersiapkan upacara pernikahan, atau yang lazim disebut juga dengan majlis "kenduri kahwin". Gotong royong ini dilakukan utamanya sebelum kegiatan inti pernikahan oleh saudara-saudara tuan rumah dan juga masyarakat sekitar.[14] Sebagian

[14] Tradisi gotong royong ini tidak terbatas pada persoalan pernikahan, atau yang disebut dengan *rewang* pada masyarakat Jawa. Gotong royong juga dilakukan pada persoalan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Gotong royong dalam persoalan ekonomi misalnya adalah membuat parit, membuka lahan, mengerjakan kebun dan semisalnya (disebut dengan istilah *kerigan* pada masyarakat Jawa). Sementara gotong royong terkait persoalan sosial misalnya adalah membangun surau atau masjid, jalan, jembatan, mendirikan rumah dan sebagainya (disebut dengan *sambatan* pada masyarakat Jawa). Lihat Awang

etnik Jawa di Malaysia bahkan masih menyebut dengan istilah *rewang*.

Tradisi "nyumbang" berkaitan dengan pernikahan disinyalir merupakan bagian dari pengaruh tradisi masyarakat Jawa, yakni gotong royong. Nyumbang adalah pemberian dalam bentuk uang kepada tuan rumah yang mengadakan majlis perkawinan. Lazimnya yang memberikan pemberian ini adalah para tamu yang hadir pada majlis pernikahan dan tidak terlibat dalam *rewang*.[15] Sebagaimana dalam tradisi Jawa sekarang, pemberian sumbangan dilakukan dalam bentuk uang. Tradisi "nyumbang" pada tradisi pernikahan masyarakat Selangor kelihatan lebih eksplisit dibandingkan dengan yang di Jawa. Pada tradisi pernikahan masyarakat etnik Jawa di Selangor, sumbangan diberikan langsung kepada orang tua mempelai tatkala acara resepsi pernikahan. Dalam hal ini orang tua mempelai berdiri di depan rumah untuk menyambut kedatangan para tamu. Pada kesempatan itulah para tamu memberikan sumbangan sambil bersalaman dengan tuan rumah. Ini berbeda dengan tradisi sumbangan pada masyarakat Jawa yang tidak diberikan secara langsung, tetapi disediakan kotak tersendiri. Sementara tuan rumah duduk menemani kedua mempelai di panggung utama.

Dalam pernikahan etnik Jawa di Selangor juga dikenal tradisi *lek lekan,* yakni tidak tidur hingga larut malam bersama saudara dan tetangga sebagai bagian dari rangkaian tradisi

Sariyan, "Persepsi Keturunan Jawa di Malaysia terhadap Bangsa Jawa di Tanah Induknya dakam Konteks Keserumpunan Tamadun" dalam Universitu Pendidikan Sultan Idris, *Kertas Kerja,* dalam pustaka2.upsi.edu.my/eprints/298/cgi/ex (Akses, 17 september 2015).

[15] Ibid.

pernikahan. Pada masyarakat Jawa ini dikenal dengan *malam tirakatan* sebagai bagian dari acara *midodareni.* Tradisi *lek lekan* pada tradisi pernikahan masyarakat Selangor ini Penulis yakini menjadi bagian dari akulturasi tradisi Jawa dan etnik Jawa di Malaysia. ini bisa dilihat dari bahasa *lek lekan* sendiri yang merupakan bahasa Jawa.

Tradisi kenduri mengiringi tradisi pernikahan juga merupakan titik pertemuan antara budaya Jawa dan etnik Jawa di Selangor. Tradisi kenduri dengan nasi ambeng merupakan tradisi yang masih setia dipertahan oleh masyarakat etnik Jawa di Selangor, tidak saja pada rangkaian tradisi pernikahan, akan tetapi peristiwa-peristiwa penting lain dalam daur kehidupan manusia, yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. Menurut penuturan Muhajir, masyarakat etnik Jawa menyebutnya dengan *nasi ambang. Nasi Ambang* dalam kenduri biasanya dibelah empat setelah sebelumnya ditunaikan doa keselamatan. Nasi tersebut kemudian dibawa pulang atau di-*berkat*.[16]

Tradisi dan upacara-upacara di atas menurut Penulis bisa dinilai sebagai bentuk akulturasi budaya Islam-Jawa dengan etnik Jawa di Selangor. Tidak menutup kemungkinan upacara-upacara yang lain pada dasarnya juga terjadi titik singgung akulturasi walaupun sudah dikemas dengan budaya melayu atau budaya tempatan. Ini disebabkan karakteristik masyarakat Jawa adalah toleran dengan budaya lain, apalagi posisi mereka sebagai pendatang. Selain itu, bahwa masyarakat Jawa dan Selangor sesungguhmya mempunyai banyak kesamaan tata nilai. Kedua masyarakat

[16] Muhajir, wawancara, 21 Maret 2015.

ini berafiliasi pada rumpun budaya yang sama, yakni budaya Melayu, dan kedua masyarakat mempunyai sistem keyakinan yang sama, yakni Islam. sejauh yang Penulis lihat, bahwa tradisi keagamaan masyarakat Selangor banyak mempunyai kesamaan dengan masyarakat Jawa. Mereka menganut Mazhab Syafi'iyyah sebagaimana mazhab ini dianut oleh mayoritas masyarakat Jawa. Mazhab ini juga dikenal sangat toleran dengan budaya lokal. Karena itu tak mengherankan bila tradisi semisal *barzanzi* dan *khatm al-Qur'an* juga biasa mengiringi tradisi pernikahan. Dua tradisi keagamaan ini juga lazim ditemui pada masyarakat Jawa.

2. Upacara Pernikahan

Inti dari rangkaian upacara-upacara pernikahan adalah akad nikah dan majlis pernikahan. Dalam akad nikah relatif tidak berbeda dengan yang berlaku pada masyarakat Jawa. Ini disebabkan karena kedua masyarakat menganut tradisi keagamaan yang sama, yakni tradisi keagamaan Mazhab Syafi'iyah. Hanya dalam hal wali menikahkan sendiri anak perempuannya agak berbeda dengan masyarakat Jawa. Pada etnik Jawa di Selangor, sangat dipentingkan wali menikahkan anak perempuannya, dan kadi membimbing pelaksanaannya. Sementara pada masyarakat Jawa, orang yang awam (tidak mempunyai *backgorund* pendidikan agama) umumnya mewakilkan saja hal tersebut pada petugas pencatat nikah (naib) atau pada kiai. Hal ini dinilai lebih praktis dibandingkan menikahkan sendiri.

Sementara itu, upacara majlis pernikahan terlihat simpel sebagaimana Penulis lihat pada tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor. Inti pada majlis pernikahan adalah perjamuan, perjamuan untuk tamu, dan keluarga besan dengan model *standing party.* Ini agak berbeda dengan masyarat Jawa, majlis pernikahan atau *temu manten,* tidak hanya berkaitan dengan perjamuan, tapi juga berisi serangkaian acara dan sambutan serta khutbah nikah. Walaupun masyarakat Jawa sekarang sebagian sudah bergeser ke model *standing party,* tetapi pada masyarakat pedesaan model tersebut belum begitu lazim.

Ini selaras dengan pernyataan mereka bahwa tradisi pernikahan (utamanya majlis pernikahan) pada masyarakat Selangor bersifat kompleks dan biaya tinggi. Sementara pada masyarakat Jawa masih banyak tradisi pernikahan yang dilakukan secara sederhana atau *climen.* Pada masyarakat Jawa besar kecilnya pesta pernikahan disesuaikan dengan tingkat ekonomi yang punya hajat. Ini tak terlepas dari tingkat ekonomi masyarakat Selangor-Malaysia yang rata-rata adalah sejahtera.

Karena itulah perjamuan pada majlis pernikahan melibatkan katering dengan *waiter*. Pada saat majlis pernikahan, selain makan yang lazim, tuan rumah juga memesankan kambing guling untuk para tamunya. Walaupun sudah ada katering, tuan rumah juga masih menyediakan banyak makanan, utamanya untuk rangkaian lain dari pernikahan. Ini dilakukan dengan "gotong royong" yang melibatkan saudara dan tetangga. Mereka umumnya menyembelih

sendiri sapi atau kerbau untuk kepentingan konsumsi dalam berbagai rangkaian upacara pernikahan.

Hal di atas merupakan perbedaan perjamuan makan dalam resepsi pernikahan antara masyarakat Jawa dan etnik Jawa di Selangor. Sementara dalam beberapa hal yang lain terdapat titik singgung, semisal dalam tradisi kompangan dalam menyambut temanten. Ini besar kemungkinan disebabkan karena tradisi keagamaan yang sama antara masyarakat Jawa dan masyarakat Selangor.

Bentuk Akulturasi: Aspek Spiritual, Sosial, dan Ekonomi dalam Tradisi Pernikahan Melayu Etnis Jawa

Migrasi orang Jawa ke Selangor Malaysia merupakan faktor utama terjadinya akulturasi budaya Jawa dan Melayu. Ada saling pengaruh-mempengaruhi antara budaya Jawa dan Melayu Selangor-Malaysia dalam konteks tradisi pernikahan, walaupun ini harus diakui bahwa pengaruh budaya Melayu cukup dominan. Kapasitas orang Jawa sebagai pendatang di perantauan Selangor Malaysia menuntut mereka untuk bisa beradaptasi secara sosial dengan budaya setempat. Apalagi orang Jawa dikenal sangat toleran dengan budaya asing, bahkan untuk diintegrasikan dengan budaya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan kejatidirian budaya, atau tanpa kehilangan kepribadian budaya sendiri. Kontak budaya orang Islam Jawa dan masyarakat Melayu menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan sama sekali kepribadian dan sifat kebudayaan asli. Ini sebagai terlihat adanya kampung-

kampung Jawa di Selangor Malaysia yang mempunyai budaya unik dibanding masyarakat lain.

Bentuk-bentuk akulturasi antara budaya Islam-Jawa dan Melayu dalam tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor Malaysia telah dipaparkan sebelumnya. Bentuk-bentuk akulturasi tersebut lebih merupakan simbolisasi kasat mata dalam bentuk upacara-upacara pernikahan. Dalam sub bab ini akan dipaparkan beberapa titik temu akulturasi antara dua entitas kebudayaan tersebut.

1. Dimensi Spiritualitas Tradisi Pernikahan Etnik Jawa di Selangor

Salah satu karakter etnik Jawa di Selangor secara umum adalah religiusitas mereka. Masyarakat Jawa sendiri secara sosial bisa dipilah menjadi santri, abangan dan priyayi, akan tetapi nenek moyang yang melakukan migrasi ke Malaysia umumnya adalah dari kalangan santri. Ini karena sebagian motivasi migrasi ke tanah Melayu adalah untuk berdakwah dan transit untuk menunaikan ibadah haji. Seandainya ada yang bermigrasi dari kalangan abangan untuk motif ekonomi, kesadaran keberagamaan mereka bertambah tatkala berada di tanah Melayu, karena tanah Melayu sendiri kental dengan nuansa keagamaan Islam.

Religiusitas etnik Jawa di Selangor Malaysia ini terlihat dalam tradisi pernikahan mereka. Pernikahan bagi mereka bukan hanya persoalan hubungan keperdataan antara dua pasangan, akan tetapi merupakan manifestasi dari menjalankan perintah agama. Ini sebagaimanan Nabi Muhammad Saw. sendiri menyatakan bahwa pernikahan

adalah bagian dari tradisi (sunnah) beliau, dan barang siapa yang tidak menyukai tradisi ini dinilai sebagai bukan dari golongan umat beliau. Lebih lanjut pernikahan adalah bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah,* yakni penjagaan keturunan. Karena pernikahan adalah yang pertama perintah agama, dan bukan semata hubungan keperdataan yang bersifat duniawiyah, maka agama menegaskan bahwa pernikahan adalah satu ikat kuat nan suci (*mithaqan ghaliza*).

Karena hal di atas, maka dalam rangkaian upacara-upacara yang mengiringi tradisi pernikahan bisa kita jumpai nuansa keagamaan yang kental. Maka dalam upacara-upacara pra pernikahan terdapat upacara *khatam al-Qur'an,* tradisi *kenduri,* dan *barzanzi.* Selain itu, umumnya terdapat pandangan bahwa inti pernikahan adalah pada akad nikah (*aqd al-nikah*) yang dilaksanakan sesuai dengan Mazhab Syafi'iyah yang dianut. Walaupun inti pernikahan ada pada akad, akan tetapi mereka tidak bisa melepaskan dari tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat.

Nuansa spiritualitas dan keagamaan dalam tradisi pernikahan juga terlihat dari pemakaian seni "kompang" dalam menyambut temanten. Seni ini adalah khas tradisi Islam sebagaimana juga dikenal pada masyarakat Jawa. Melantunkan doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama juga terlihat selalu mengiringi upacara-upacara pernikahan. Masyarakat yang datang ke majlis pernikahan pun juga memakai kostum yang khas agama, yakni umumnya mereka memakai "baju takwa" dan berkopyah, kecuali sebagian anak muda di antara mereka, atau tuan rumah yang memakai pakaian adat setempat.

2. Dimensi Sosial Tradisi Pernikahan Etnik Jawa di Selangor

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Etnik Jawa di Selangor juga sangat sarat dengan dimensi sosial-kemasyarakatan. Upacara-upacara yang mengiringi tradisi pernikahan ataupun upaca intinya, yakni akad nikah dan majlis pernikahan juga bermakna menyosialisasikan adanya pernikahan pada semua masyarakat dan karib kerabat. Dalam konsep masyarakat etnik Jawa di Selangor, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi hanya akan menimbulkan desas-desus di masyarakat. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sering dilakukan untuk menutupi aib, yakni pergaulan bebas yang dilakukan pasangan sebelum akad pernikahan. Sementara dalam tradisi masyarakat Melayu, pergaulan bebas sebagai sesuatu yang tercela dan bertentangan dengan ajaran agama.

Dimensi sosial pernikahan juga bermakna keserasiannya dengan adat yang berlaku pada masyarakat. Masyarakat secara adat mempunyai cara tersendiri bagaimana tahapan-tahapan sebuah pernikahan dilaksanakan. Dalam hal ini pernikahan tidak cukup hanya dilakukan secara agama dan mengabaikan aturan adat yang tak tertulis. Dalam hal ini harmonisasi dengan aturan-aturan sosial (adat) penting untuk dilakukan. Ketika adat pernikahan ini dilanggar, adat biasanya sudah menentukan mekanisme sanksi sosialnya. Nuansa kehidupan komunal dalam hal ini masih begitu dominan, sementara kehidupan yang bersifat individualistik

sebagai tercermin dalam budaya Barat dinilai tidak sesuai dengan budaya Timur.

Dimensi sosial (adat) ini – secara normatif - dalam tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor Malaysia terlihat begitu kompleks. Ini bisa dilihat banyaknya rangkaian upacara-upacara, baik yang pra pernikahan maupun pasca pernikahan. Akan tetapi dalam praktiknya, sesuai dengan perkembangan zaman, upacara-upacara ini mengalami penyederhanaan-penyederhanaan sehingga kerumitan pernikahan secara adat bisa dikurangi. Sepanjang penyederhanaan ini merupakan hasil dari kesepakatan sosial (konvensi), maka hal ini tentu bisa diterima. *Vice versa* jika penyederhanaan dilakukan secara individual.

Berdasar penelitian Asmidar, adat perkawinan Melayu sudah tidak sepenuhnya dilaksanakan lagi. Seandainya dilaksanakan, pelaksanaan-pelaksanaan tersebut terkesan sebagai syarat atau sekedar menggugurkan kewajiban sosial/adat. Ini antara lain menurut Asmidar, karena masyarakat sekarang pada umumnya menuntut semuanya serba praktis, berbeda dengan masyarakat nenek moyang dahulu.[17]

Asmidar mengidentifikasi beberapa upacara dalam tradisi pernikahan yang telah mengalami perubahan, di antaranya adalah berkaitan dengan perjodohan, merisik,

[17] Walaupun penelitian ini terbatas pada Desa Bantayan Hilir, tetapi menurut penulis fenomena mulai mencairnya tradisi merupakan fenomena yang bersifat umum. Ini mengingat tradisi adalah sesuatu yang sangat cair dan dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Lihat Asmidar, "Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu di desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Hilir", http://download.portalgaruda.org/article.php? (Akses, 19 Oktober 2015).

upacara menggantung, upacara berinai, dan upacara berandam. Pada masyarakat Melayu kontemporer, kebanyakan muda-mudi mendapatkan pasangan tidak lewat perjodohan, akan tetapi mencari sendiri. Pergeseran ini pada akhirnya berimplikasi pada upacara-upacara yang lain. Karena pernikahan tidak lewat perjodohan, pasangan mencari sendiri dan biasanya sudah kenal lama dengan calonnya, maka upacara merisik dan meninjau nyaris dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan formalitas adat. Upacara menggantung juga mengalami pergeseran, yakni karena kebanyakan peralatan terkait dengan pernikahan adalah sewa, maka upacara menggantung mengalami penyederhanaan tidak sebagaimana masa dahulu.[18]

3. Dimensi Ekonomi Tradisi Pernikahan Etnik Jawa di Selangor

Upacara dan tradisi pernikahan tidak bisa lepas dari dimensi ekonomi. Dalam konteks tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor Malaysia, bahwa pernikahan membutuhkan dana yang tidak kecil. Hal ini terlihat dari kompleksnya upacara-upacara yang mengiringi tradisi pernikahan, dan dana dari semua upacara-upacara ini harus ditutupi oleh tuan rumah. Karena dana pernikahan ini cukup besar, maka tidak bisa dipungkiri, bahwa tuan rumah mempunyai harapan besar mendapatkan "sumbangan" (Jawa: *buwuh*) dari para tamu yang bisa menutup biaya pernikahan, atau bahkan bisa lebih.

[18] Penjelasan lebih lengkap bisa diLihat di Ibid.

Karena dana yang dibutuhkan cukup besar, tuan rumah jauh hari secara bertahap mempersiapkan dana dan segala kebutuhan upacara pernikahan. Mereka juga melakukan ikhtiyar secara spiritual dengan harapan segala yang dipersiapkan bisa *berkah,* dalam makna apa yang dipersiapkan bisa mencukupi keperluan pernikahan atau bahkan bisa berlebih, serta mendapatkan sumbangan dalam jumlah yang signifikan. Ikhtiyar ini dirupakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu (*slametan*), *istighatsah* dengan mengundang seorang *kyai.*

Karena keterikatan yang masih kuat dengan Jawa, sebagian meluangkan waktu untuk berkunjung ke saudara-saudara di Jawa untuk mengabarkan dan meminta restu berkaitan dengan acara mereka. Dalam kunjungannya ke Jawa ini, mereka juga sempatkan untuk berkunjung ke kiai tertentu untuk meminta do'a kesuksesan acara.

Penutup

Berdasar semua pembahasan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tradisi pernikahan masyarakat Melayu-Malaysia secara normatif bersifat kompleks. Ini bisa terlihat dari banyaknya rangkaian upacara-upacara yang mengiringi pernikahan. Kompleksitas tradisi pernikahan tersebut karena tradisi ini merupakan cermin dari harmonisasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, bahkan dengan alam. Upacara-upacara tersebut adalah *merisik* dan *meninjau, melamar* dan *meminang, gotong royong, dan barzanzi* yang dilakukan pra pernikahan. Sementara pernikahannya sendiri masih terdiri dari

upacara-upacara: upacara *mengantung*, *berinai*, *berandam*, *khatam al-Qur'an*, akad nikah, dan majlis pernikahan. akan tetapi upacara-upacara sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaannya disederhanakan, atau bahkan sebagian tidak dilaksanakan. Normativitas tradisi tidak lagi dinilai sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan, tetapi dalam tingkat tertentu bisa disesuaikan. Artinya bahwa telah terjadi pergeseran tradisi dan budaya pernikahan sebagai akibat perkembangan sosial-budaya, termasuk dalam hal ini adanya kontak budaya antara etnik Jawa dan etnik Melayu di Selangor.

Selain secara normatif kompleks, tradisi pernikahan etnik Islam Jawa di Selangor menunjuk pada tingkat akulturasi yang tinggi. Dalam bahasa antropologi, akulturasi tersebut mengarah pada "subtitusi" dan "sinkretisme". ***Pertama,*** Subtitusi dalam makna tradisi Jawa untuk sebagian besarnya diganti dengan budaya baru (melayu) yang memenuhi fungsinya. Artinya, dalam banyak hal karena banyak kesamaan subtansi budaya, maka penggantian budaya lama relatif tidak menimbulkan permasalahan. Misalnya, baik tradisi pernikahan Jawa maupun Melayu sama-sama melihat pernikahan sebagai bernilai sakral sekaligus sosial. Karena itulah banyak upacara yang mengiringi pernikahan, walaupun dalam perkembangannya banyak mengalami penyederhanaan-penyederhanaan. Subtansi tradisi pernikahan etnik Jawa di Selangor Malaysia paling tidak bertemu pada tiga dimensi: dimensi spiritual pernikahan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. ***Kedua***, Akulturasi juga bisa dikatakan mengarah pada sinkretisme budaya,

yakni percampuran dua budaya menjadi budaya baru yang sifatnya khas. Kampung-kampung Jawa di tanah Melayu/ Selangor tentu mempunyai tradisi yang sedikit "berbeda" dengan kampung-kampung lain yang penduduknya relatif heterogen. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa kampung Jawa di Melayu pun tingkat keterikatannya dengan tradisi Jawa semakin lama mencair seiiring dengan semakin jauhnya generasi dari nenek moyang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin. "Urgensi Pendekatan Antropologi Untuk studi Agama dan Studi Islam", dalam aminabd. wordpress.com (Akses 23 Oktober 2015).

Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia.* Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia; Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rinika Cipta, 1997.

Arkanudin, "Akulturasi sebagai Mekanisme Perubahan Budaya", dalam Arkandien.blogspot.com/2010/06/ (Akses, 23 Oktober 2015).

Asmidar, "Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu di desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Hilir", http://download.portalgaruda.org/ article.php? (Akses, 19 Oktober 2015).

Astrini, Isabella. "Akulturasi Budaya Cina dan Betawi dalam Busana Pengantin Wanita Betawi" dalam Eprint.binus.ac.id/25834/ (Akses, 23 Oktober 2015).

Azra, Azyumardi. "Santri-Abangan *Revisited*" dalam Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa.* Ciputat: Pustaka Alvabet, 2009.

Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* Terj. A. Soehardi. Bandung: Vor Kink – Van Hoeve, t.t..

Ember, Carol R. dan Melvin Ember. *Cultural Anthropology.* America: Prentice Hall, 1996.

Endraswara, Suwandi. *Metode, Teori Teknik Penelitian Kebudayaan.* Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java.* Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

Hadikusuma, Hilman. *Perkawinan Adat.* Bandung: Alumni, 1983.

Hazairin. *Hendak Ke Mana Hukum Islam.* Jakarta: Tinta Mas, 1976.

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa, "Suku Jawa" (Akses 20 Agustus 2015).

http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545 (Akses 4 September 2015).

http://www.cuap-cuap.net/2014/11/6-negara-di-dunia-yang-menggunakan.html (Akses, 8 April 2015).

https://ms.wikipedia.org/wiki/Selangor (Akses 4 September 2015).

Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 114.

Kajian Etnik Jawa di Malaysia, hissham66.blogspot.com. (Akses 25 April 2015)

Koentjaraningrat dkk., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1977), 341.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI Press, 1987), 213.

Lindayanti, et al., "Harmoni Kehidupan di Provinsi Multi Etnis: Studi Kasus Integrasi antara Penduduk Pendatang dan Penduduk Asli di Jambi" dalam Repository.unand.ac.id/ (Akses, 23 Oktober 2015)

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis.* California: Sage Publications, 1994.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya paramita, 1999.

Projodikuro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Rozeyta BT. Omar dan Paimah BT. Atoma, "Pluraliti Budaya dan Etnik di Alam Melayu Zaman Awal", dalam *Hubungan Etnik di Malaysia: Perspektif Teori dan Praktek,* 56-57. Lihat eprint.utm.my/14774/ (Akses, 23 September 2015).

Sariyan, Awang. "Persepsi Keturunan Jawa di Malaysia terhadap Bangsa Jawa di Tanah Induknya dakam Konteks Keserumpunan Tamadun" dalam Universitu

Pendidikan Sultan Idris, *Kertas Kerja,* dalam pustaka2. upsi.edu.my/eprints/298/cgi/ex (Akses, 17 september 2015).

Sholikin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa.* Yogyakarta: Narasi, 2010.

Sidek, Harith Faruqi. "Sejarah Pembukaan Penempatan Orang Jawa di Selangor", dalam harithsidek.blogspot.com. (Akses 25 April 2015).

Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Bandung: Alumni, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat.* Jakarta: Rajawali, 1984.

Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat; Bekal Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 1991.

Susanto, Happy dan Mahyudin Al-Mudra, "Adat Perkawinan Melayu", dalam http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545 (4 September 2015).

Syam, Nur. *Madzab- Madzab Antropologi.* Yogyakarta: LKiS, 2007.

T. O. Ihromi (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta: Gunung Agung, 1985.

www.academia.edu/8703173/asimilasi_budaya_pasca_pernikahan_etnik_jawa (akses 7 April 2015).

Mêgêngan: Sebuah Islamisasi Ritus Warisan Majapahit

Oleh: Nanang Rosyidi

Pendahuluan

Masyarakat Jawa dikenal dengan masyarakat yang memiliki keunikan tradisi dan budaya. Diantara keunikan tradisi yang sampai saat ini dipelihara adalah tradisi *'mêgêngan'*. Tradisi *mêgêngan* merupakan tradisi makan-makan yang dilakukan secara bersama-sama dengan warga lain yang diawali dengan pembacaan doa-doa secara bersama-sama. Prosesi tradisi ini biasanya dilakukan di masjid atau musala setempat dengan setiap warga membawa nasi *berkat*, buah-buahan atau berbagai jajanan pasar dari rumah masing-masing. Dalam prosesinya, apabila seluruh warga sudah berkumpul, pemimpin keagamaan setempat (kiai) memimpin doa-doa yang dilakukan secara bersama dengan warga yang ada. Dan akhir dari prosesi mêgêngan ini diikuti dengan makan bersama hidangan yang telah dibawa sebelumnya. Apabila hidangan tersebut tidak habis dimakan di tempat, maka biasanya warga akan membawa

pulang siswa dari yang telah dimakan dalam bentuk '*berkat*'. Tradisi semacam ini dilakukan masyarakat Jawa ketika menjelang bulan Ramadhan sebagai tanda akan memasukinya bulan yang mulia tersebut.

Melihat tradisi yang semacam ini hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sisi kearifan lokal yang terkandung di dalam tradisi mêgêngan ini. Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk mengkaji asal-usul tradisi *mêgêngan*.

Mêgêngan Sebagai Sebuah Tradisi Ritual Masyarakat Jawa

Tradisi '*mêgêngan*' dapat dikatakan sebagai salah satu tipologi (corak) dari tradisi '*slamêtan*' atau '*kênduri*' yang didasarkan atas siklus waktu (penanggalan Jawa). Ricklefs berpendapat bahwa '*slamêtan*' atau '*kênduri*' merupakan salah satu ritual Jawa yang merepresentasikan solidaritas masyarakat pedesaan. Sementara Geertz mengatakan bahwa '*slamêtan*' atau '*kênduri*' merupakan upacara keagamaan sekaligus pesta komunal sebagai simbol kesatuan mistik dan sosial masyarakat Jawa. Adapun '*mêgêngan*' menurut Geertz berasal dari kata '*pêgêng*' yang artinya 'menyapih'; adalah rangkaian '*slamêtan*' yang berpusat di sekitar puasa dan dimaksudkan untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Ritual ini dilakukan setelah orang Jawa pergi ke makam untuk berdo'a dan menyebarkan bunga di kuburan orang tuanya.

Tradisi seperti ini ternyata sudah ada sejak zaman Majapahit (1293–1500 M). Menurut catatan Nāgarakertāgama (1365 M), Rājasanāgara atau Hayam Wuruk (1350–1389 M)

mengadakan upacara *śraddā*, yaitu ritual memperingati 12 tahun kematian neneknya, Śrī Rājapātni (wafat 1350 M), atas perintah sang ibu Sri Tribuwana Wijayatunggadewi, yang dilaksanakan pada bulan *Bhadrapada* (Agustus–September), tahun 1284 Saka (1362 M). Upacara tersebut dihadiri oleh empat penguasa daerah, yaitu, Bhre Paguhan (Singhawardhana), Bhre Matahun (Rājasawardhana), Bhre Wengker (Wijayarajāsa), dan Bhre Tumapel (Krtāwardhana). Hal ini sebagaimana tercatat dalam Kitab Nāgarakertāgama yang telah dialihaksarakan oleh Pigeaud dalam karyanya '*Java in The 14th Century*' berikut ini:

Pupuh 63

- *ājñā śrī nātha sang śrī tribhūwana wijayottuṅgadewī ….śradḍā śrī rājapātni wkasana gawayĕn/ śrī narendreṅ kaḍatwan,*
- *sidḍāniṅ kāryya ring śāka diwaśa maśiraḥ warṇna ring bhadramāsa,*
- *sakweḥ śrī nātha rakwāwwata taḍah iriṅĕn de para wṛdḍamantrī.*
- atas perintah Sang Rani Sri Tribuwana Wijayatunggadewi,
- (supaya upacara) Srada Sri Rajapatni dilangsungkan di istana Sri Baginda
- yang berlangsung pada tahun saka bersirah empat (1284) bulan Badrapada,
- semua pembesar dan *wredda menteri* (menteri yang dituakan) diharap memberikan sumbangan.

Pupuh 65

- *ṅkā ta śrī nṛpatin/ paṛng maṛk amuspa saha tathanaya dāra sādā,*
- *milwang mantri apatiḥ gajamada makādinika paḍa masomahān maṛk,*
- *mwang mantryākuwu ring pamiṅgir atawā para ratu sahaneng digantarā,*
- *sāmpunyān/ paḍa bhakti amūrṣita paliṅgihan ikā tinitah yathākramā.*
- berikut para raja, parameswari dan putera mendekati arca,
- kemudian para mantri dan patih dipimpin Gajah Mada maju ke muka berdatangan sembah, para bupati pesisir dan pembesar daerah dari empat penjuru,
- habis berbakti sembah, kembali mereka semua duduk rapi teratur.
- *śrī nātheng paguhan sirekhi rumuhun/ humaturakĕn anindya bhojanā,*
- *sang śrī handiwa-handiwa lwir i tapĕl niran amawa dukūla len/ sĕṛḥ,*
- *śrī nātheng matawun tapĕlnira sitawṛṣabha hanam aminḍa nandinī,*
- *yekāmĕtwakĕn ārtha bhojana mijil/ saka ri tutuk apūrwwa tan/ pgat.*
- Sri Nata Paguhan paling dahulu menghaturkan sajian makanan sedap,
- bersusun-susun seperti pohon dan sirih yang bertutupkan kain sutera,

- Persembahan raja Matahun arca banteng putih seperti lembu Nandini,
- yang terus-menerus memuntahkan harta dan makanan dari mulutnya.
- *sang śrī nātha ri wĕṅkĕr apnĕd awawān/ yaśa pathani taḍaḥnirāḍikā,*
- *sarwwendaḥ racananya mūlya madulūr danawitaraṇa wartta ring sabhā,*
- *śrī nātheṅ tumapĕl tapĕlnira kaṅ endah araras aśarira kāmini,*
- *kāpwā teki matuṅgalan/ dina sirān pawijil i kawicitraning manah*.
- Raja Wengker mempersembahkan sajian berupa rumah dengan taman bertingkat,
- disertai penyebaran harta yang serba indah di lantai balai besar berhambur-hamburan,

….

- *ndan naṅkĕn dina salwiring tapĕl asing lwih adika niwedya donikā,*
- *mwang sang kṣatriya wanḍawa nṛpati mukya sira rinawĕhān sasāmbhawā,*
- *len saṅkeng wara bhojanedĕriděr edran i sabala narendrā ring sabhā*.
- setiap hari persajian makanan yang dipersembahkan dibagi-bagi,
- supaya para wanita, menteri, pendeta dapat makanan sekenyangnya,
- tidak terkecuali para *ksatria*, *arya* dan abdi di pura,
- tak putusnya makanan sedap nyaman diberikan kepada bala tentara.

Di sisi lain, pada akhir Majapahit mulai berkembang kepercayaan Bhairawa Tantra–salah satu sekte sinkretisasi Syiwa-Buddha–dengan ritual ekstrimnya yang disebut dengan *pañcamakara* (lima laku suci). Moens dalam jurnalnya mencatat *pañcamakara* terdiri dari lima rangkaian ritual, diantaranya '*maṃṣa*' (menyantap daging), '*matṣa*' (menyantap ikan), '*madya*' (meminum arak), '*maiṭuna*' (bersenggama), dan '*muḍra*' (bersemadhi). Pada kasta yang lebih tinggi, daging yang dimakan tidak hanya dari hewan tetapi juga dari manusia (kanibalisme) dan darah manusia sebagai pengganti arak. Manusia yang 'dikorbankan' (*tumbal* atau *wadal*) dalam rangka ritual tersebut tentu berasal dari rakyat bawah. Upacara atau ritual tersebut dilakukan dengan duduk membentuk lingkaran (*cakra*) di atas tanah suci yang disebut *ksetra* (yang terbesar di pusat kekuasaan dengan nama *ksetralaya*, sampai orang menyebutnya 'Troloyo').

Sampai pada Sunan Bonang (1465–1525?) melakukan upaya pendekatan asimilatif dengan menyisipkan corak Islam terhadap ritual *pañcamakara* dengan memodifikasinya yang ditandai dengan rakyat bawah–sebab mereka menghindar atau takut menjadi korban '*tumbal*'–duduk melingkari berbagai makanan di tengahnya bersama dengan pemimpin ritual dengan membacakan doa-doa (Islam) yang disebut sebagai *cakraiswara* atau *cakrawati* (pemimpin lingkaran *cakra*), sehingga Sunan Bonang dijuluki pula dengan sebutan Prabu Anyakrawati. Ritual yang diadaptasi dari *pañcamakara* ini kemudian dikenal dengan '*slametan*',

atau dalam arti selamat dari petaka ritual yang 'meminta' korban itu.

Istilah lain dari yang identik dengan *slametan*, tentunya *kenduri* yang berasal dari bahasa Persia (*kanduri*), yang menunjuk pada tradisi makan-makan di Persia untuk memperingati Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad Saw. Tradisi ini diperkirakan dibawa oleh Sunan Ampel (1401–1481?) yang mengakulturasikan tradisi Islam Champa untuk memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 dengan pembacaan doa-doa disertai makan-makan. Adanya kesamaan dengan upacara *śradḍā* atau memperingati 12 tahun kematian pemuka Majapahit membuat tradisi *kenduri* diterima di kalangan rakyat.

Adapun *mêgêngan* itu sendiri yang merupakan bagian dari corak *slametan* atau *kenduri* sebagaimana tradisi keagamaan yang didasarkan pada siklus waktu yang lain, seperti *Suran* (Muharam), *Muludan* (Rabiul Awal), *Rejeban* (Rajab), atau *Ba(k)dan* (Syawal), dimaknai sebagai 'tanda' masuknya bulan Ramdhan, dimana umat Islam–tak terkecuali di Jawa–menunaikkan ibadah puasa.

Penutup

Mêgêngan sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, paling tidak merefleksikan dua hal yang berhubungan dengan dua ritual pra-Islam di Jawa (*śradḍā* dan *pañcamakara*). ***Pertama,*** *megengan* sebagai ingatan/memori kolektif atas kematian. Peringatannya di sekitar bulan Ramadhan–yang secara dogmatis 'bulan suci'

pada ajaran Islam–dengan sebelumnya mendatangi atau menziarahi makam dari keluarga yang sudah meninggal yang tidak terlepas dari makan secara bersama-sama yang tampaknya mirip dengan upacara *śradḍā* seperti yang diungkapkan dalam Nāgarakṛtāgama yang diteruskan secara akulturatif pada tradisi *kenduren*. ***Kedua,*** *megengan* sebagai kesadaran kolektif-simbolis atas perlindungan sosial. Tujuannya untuk dikuatkan dan diselamatkan–melalui doa-doa–kepada Tuhan dari nafsu-nafsu atau bentuk kejahatan-kejahatan lahir-batin selama melaksanakan ibadah puasa dan secara umum seterusnya sebagaimana terlindungi dari ritual *pañcamakara* yang digantikan secara asimilatif pada tradisi *slametan*.

DAFTAR PUSTAKA

Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

Moens, J.L. "Het Boeddhisme op Java en Sumatra in zijn Laatse Bloeiperiode", *Tijdschrift van de Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, No. 64 (1924).

Pigeaud, Th. G. Th. *Java in The 14th Century: a Study in Cultural History. The Nāgara-Kĕrtāgama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D.*, Vol. I. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960.

Ricklefs, M.C. *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to early Nineteenth Century.* Norwalk: EastBridge, 2006.

Konstruksi Pemikiran Tasawuf Wujudiyah Di Tanah Banjar: Studi atas Naskah Ambulung Martapura Kalimantan Selatan

Oleh: Nur Kolis

Pendahuluan

Tasawuf yang selama ini dianggap sebagai konstruksi pemikiran ortodoks tidak selalu tepat mengingat telah terjadi transformasi pemikiran tasawuf menjadi semakin kontekstual. Pada abad kedelapan belas terjadi peralihan dari pemikiran ortodoks ke pemikiran rasional-filosofis sebagaimana tampak pada naskah Ambulung.[19] Konsep ketuhanan,[2021] misalnya, yang semula dianggap berjarak

[19] Nur Kolis, "Nur Muhammad Dalam Pemikiran Sufistik Datu Abulung Di Kalimantan Selatan," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* (2012).

[20] Richard J. Petts, "Parental religiosity and youth religiosity: Variations by family structure," *Sociology of Religion: A Quarterly Review*, 2015, https://doi.org/10.1093/socrel/sru064.

[21] Syamsun Ni'am, "Tasawuf Di Tengah Perubahan Sosial (Studi Tentang Peran Tarekat Dalam Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia)," *Harmoni* (2016); Mustaffa Mohamed Zain et al., "Corporate Ibadah : An Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility," *Middle-East Journal* (2014); Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Spirituality*, *Islamic Spirituality*, 2013; Said Aqiel Siradj, "Tauhid Dalam Perspektif Tasawuf," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* (2014).

dengan manusia kemudian dianggap menjadi bagian dari manusia. Sebagaimana didukung,[22] pemikiran tasawuf selalu menempatkan manusia dengan tuhan secara berjarak. Posisi tasawuf Ambulung berbeda dengan temuan-temuan terdahulu.

Sejauh ini studi tasawuf cenderung melihat tasawuf sebagai, ***pertama,*** sumber pembelajaran agama yang statis dan orthodox;[23] ***kedua,*** menempatkan tasawuf sebagai satu Gerakan politik keagamaan;[24] ***ketiga,*** tasawuf sebagai solusi

---

[22] Samee-Ullah Bhat, "Concept of Tawhid (Unity of God) in Islam: A Study of Relevant Qur'anic Text," *AGU International Journal of Research in Social Sciences & Humanities (AGUIJRSSH) 2018*, 2018.

[23] Lloyd Ridgeon, "Mysticism in medieval sufism," in *The Cambridge Companion to Sufism*, 2014, https://doi.org/10.1017/CCO9781139087599.009; Muhammad Djakfar, "BUSINESS BEHAVIOR OF TARIQA FOLLOWERS IN INDONESIA: The Relation of Religion, Sufism, and Work Ethic," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2018, https://doi.org/10.18860/ua.v19i2.5571; Ali Mas'ud, "Ortodoksi Sufisme K.H. Shalih Darat," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2014, https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.24-43; Danial Hilmi, "POTRET NILAI KESUFIAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT," *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 2012, https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2017; Ahmad Muttaqin, "From occultism to hybrid Sufism: The transformation of an Islamic-hybrid spiritual group in contemporary Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2014, https://doi.org/10.18326/ijims.v4i1.81-104. Ali Masrur, "Pemikiran Tasawuf Ortodoks di Asia Tenggara (Telaah Atas Kontribusi al-Ranirî, al-Singkilî, dan al-Makasarî)," *Syifa al-Qulub*, 2017, https://doi.org/10.15575/saq.v1i2.1431. Christopher Melchert, "Origins and early sufism," in *The Cambridge Companion to Sufism*, 2014, https://doi.org/10.1017/CCO9781139087599.003.

[24] Muzaffar Alam, "The Mughals, the Sufi Shaikhs and the formation of the Akbari dispensation," in *Modern Asian Studies*, 2009, https://doi.org/10.1017/S0026749X07003253; Robert Rozehnal, *Islamic Sufism unbound: Politics and piety in twenty-first century Pakistan*, *Islamic Sufism Unbound: Politics and Piety in Twenty-First Century Pakistan*, 2016, https://doi.org/10.1007/978-0-230-60572-5; Peter J. Bertocci, "A Sufi movement in Bangladesh: The Maijbhandari tariqa and its followers," *Contributions to Indian Sociology*, 2006, https://

atas problematika umat pada masa saat ini.[25] Jarang tasawuf dilihat sebagai modal/sumber bagi pembelajaran dan pemahaman yang kontekstual memiliki relevansi dengan persoalan umat pada jaman yang terus berkembang. Studi ini, berbeda dengan studi-studi sebelumnya, melihat secara mendalam dimensi dinamis dari tasawuf dengan memotret transformasi dunia tasawuf,[26] khususnya sebagaimana yang tampak pada naskah Ambulung.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi sebelumnya yang hanya memperlakukan tasawuf, seperti *Naskah Ambulung*, hanya sebagai teks. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dapat dirumuskan (a) Bagaimana dimensi

---

doi.org/10.1177/006996670504000101; Isabelle Werenfels, "Beyond authoritarian upgrading: the re-emergence of Sufi orders in Maghrebi politics," *Journal of North African Studies*, 2014, https://doi.org/10.1080/13629387.2013.858036.

[25] Luthfi Makhasin, "Urban Sufism, Media and Religious Change in Indonesia," *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research* (2016); Arif Zamhari, "Socio-Structural Innovations in Indonesia's Urban Sufism: The Case Study of the Majelis Dzikir and Shalawat Nurul Mustafa," *Journal of Indonesian Islam* (2013); Lilis Andarwati, "Sufisme Perkotaan Dan Pedesaan Di Era Modernisasi Dan Sekularisasi," *Universum* (2016); Rubaidi Rubaidi, "Reorientasi Ideologi Urban Sufism Di Indonesia Terhadap Relasi Guru Dan Murid Dalam Tradisi Generik Sufisme Pada Majelis Shalawat Muhammad Di Surabaya," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* (2016); Howell, Julia Day, "Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New Sufi Networks," in *Sufism and the "Modern" in Islam*, 2007; Muhammad Anis, "Spiritualitas Di Tengah Modernitas Perkotaan," *Jurnal Bayan* (2013).

[26] Sutoyo Sutoyo, "Tasawuf Hamka dan Rekonstruksi Spiritualitas Manusia Modern," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2016, https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.108-136; Salihin, "Pemikiran Tasawuf Hamka Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Modern," *Manthiq*, 2016; William Rory Dickson, "Living Sufism in North America: Between tradition and transformation," *ProQuest Dissertations and Theses* (2012).

kontekstual (transformative) dalam pemahaman tasawuf dalam *Naskah Ambulung* dapat dipetakan; (b) Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya (lahirnya) peralihan konstruksi pemahaman tasawuf dalam naskah (*Naskah Ambulung*) di masyarakat Kalimantan Selatan? (c) Bagaimana naskah Ambulung mengkonstruksi paham ajaran tauhid? Jawaban atas 3 pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini. Pemahaman atas transformasi pemahaman tasawuf memungkinkan diletakkan wacana studi tentang tasawuf secara lebih terbuka dan dinamis.

Naskah Ambulung merupakan manuskrip yang hidup dalam budaya Banjar pada abad ke-18 yang menyimpan informasi penting tentang dinamika pemikiran keagamaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dalam hal konstruksi paham tauhid. Tulisan ini didasarkan pada tiga argument: (a) Dimensi kontekstual (transformative) dalam pemahaman tasawuf dalam *Naskah Ambulung* nampak pada konsep, metode, dan pengalaman spiritual dalam ajaran tasawuf; (b) lahirnya konstruksi pemahaman tasawuf dalam naskah (*Naskah Ambulung*) dipengaruhi oleh ketokohan pengarangnya, dampak perkembangan tasawuf global yang semakin kontekstual, dan doktrin tasawuf falsafi yang mengajak berpikir dinamis; dan (c) Naskah Ambulung mengkonstruksi paham agama melalui ajaran mendasar agama Islam, yaitu tauhid, Naskah Ambulung menyajikan pemikiran actual, dan berpotensi mengubah sikap dalam hal mendorong sikap egaliter.

Konstruksi Agama

Religiusitas seringkali muncul sebagai usaha dalam memenuhi eksistensi untuk menilai keimanan dan pendekatan diri kepada tuhan. Mengutip dari [27], religiusitas merupakan usaha mendeklarasikan tingkatan kesalehan dan ketaatan individu terhadap kepercayaan agama sehingga secara tidak langsung memperlihatkan eksistensi pengabdian secara penuh pada pemahaman dan nilai agama. Dalam tulisan Berger, religiusitas dikonstruksikan dengan realitas sosial yang di uraikan dalam proses internalisasi, objektifikasi dan eksternalisasi perilaku yang telah menjadikan agama sebagai kebutuhan.[28] Oleh sebab itu, religiusitas direpresentasikan dalam praktik, kepercayaan dan kepentingan yang dinamis dan berkelanjutan [29]. Konstruksi religiusitas dihadirkan melalui pengaruh dari struktur keluarga dan lingkungan yang taat akan agama.[30]

---

[27] Esther Chan, "Are the religious suspicious of science? Investigating religiosity, religious context, and orientations towards science," *Public Understanding of Science* 27, no. 8 (2018): 967–84, https://doi.org/10.1177/0963662518781231.

[28] Jochen Dreher, "The Social Construction of Power: Reflections Beyond Berger/Luckmann and Bourdieu," *Cultural Sociology* 10, no. 1 (2016): 53–68, https://doi.org/10.1177/1749975515615623.

[29] Michael D. Barnett, Kylie B. Sligar, dan Chiachih D.C. Wang, "Religious Affiliation, Religiosity, Gender, and Rape Myth Acceptance: Feminist Theory and Rape Culture," *Journal of Interpersonal Violence* 33, no. 8 (2018): 1219–35, https://doi.org/10.1177/0886260516665110.

[30] Petts, "Parental religiosity and youth religiosity: Variations by family structure"; Steven Eric Krauss et al., "Religious socialization among Malaysian Muslim adolescents: A family structure comparison," *Review of Religious Research*, 2012, https://doi.org/10.1007/s13644-012-0068-z; Steven Eric Krauss et al., "Parenting and Community Engagement Factors as Predictors of Religiosity Among Muslim Adolescents From Malaysia," *International Journal for the Psychology of Religion*, 2013, https://doi.org/10.1080/10508619.2012.670039.

Menurut remaja yang dibesarkan dalam keluarga religius lebih cenderung menjadi religius karena seringnya terpapar pemahaman agama dari keluarga mereka terutama hadirnya peran ayah dan ibu yang saling melengkapi. Hal ini karena sosialisasi orang tua sejak kecil mempengaruhi individu untuk takut dan patuh pada aturan yang telah dikontruksikan oleh agama.[31] Sedangkan[32] menuliskan konstruksi religiusitas mengakibatkan terbentuknya kelas sosial sebagai hasil dari pengakuan religiusitas sebagai identitas dan budaya. Maka dari itu, konstruksi religiusitas yang dinamis penting untuk diimbangi dengan pemahaman akan harmonisasi agama.

Sebagai identitas sosial yang berlabuh pada sistem yang membimbing kepercayaan dan simbol, konstruksi agama harus melayani fungsi unik yang kuat dalam membentuk proses psikologis dan sosial. Konstruksi identitas agama menawarkan pandangan dunia "suci" yang khas dan keanggotaan kelompok "abadi", yang tak tertandingi dengan identifikasi dengan kelompok sosial lainnya. Pertimbangan fungsi ganda agama sebagai identitas sosial dan sistem kepercayaan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih besar tentang variabilitas dalam kepentingannya di seluruh individu dan kelompok.[33] Ukuran umum dalam

---

[31] Petts, "Parental religiosity and youth religiosity: Variations by family structure."

[32] Jolanda van der Noll, Anette Rohmann, dan Vassilis Saroglou, "Societal Level of Religiosity and Religious Identity Expression in Europe," *Journal of Cross-Cultural Psychology* 49, no. 6 (2018): 959–75, https://doi.org/10.1177/0022022117737302.

[33] Renate Ysseldyk, Kimberly Matheson, dan Hymie Anisman, "Religiosity as identity: Toward an understanding of religion from a social identity perspective," *Personality and Social Psychology Review*,

konstruksi religiousitas mengacu pada intensitas, arti penting, kepentingan atau sentralitas dalam individu. Ada dua dasar yaitu "seberapa penting agama bagi anda" atau "bagaimana kamu menganggap agama sebagai dirimu sendiri".[34] Konstruksi agama cenderung terjadi sebab adanya dimensi motivasi keagamaan yang digunakan sebagai pengukuran sejauh mana tingkat religiusitas. Analisis komponen utama mengenai lima dimensi motivasi

2010, https://doi.org/10.1177/1088868309349693.religion ought to serve a uniquely powerful function in shaping psychological and social processes. Religious identification offers a distinctive \"sacred\" worldview and \"eternal\" group membership, unmatched by identification with other social groups. Thus, religiosity might be explained, at least partially, by the marked cognitive and emotional value that religious group membership provides. The uniqueness of a positive social group, grounded in a belief system that offers epistemological and ontological certainty, lends religious identity a twofold advantage for the promotion of well-being. However, that uniqueness may have equally negative impacts when religious identity itself is threatened through intergroup conflict. Such consequences are illustrated by an examination of identities ranging from religious fundamentalism to atheism. Consideration of religion's dual function as a social identity and a belief system may facilitate greater understanding of the variability in its importance across individuals and groups. © 2010 by the Society for Personality and Social Psychology, Inc.","author":[{"dropping-particle":"","family":"Ysseldyk","given":"Renate","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Matheson","given":"Kimberly","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Anisman","given":"Hymie","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Personality and Social Psychology Review","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2010"]]},"title":"Religiosity as identity: Toward an understanding of religion from a social identity perspective","type":"article-journal"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

[34] Stefan Huber dan Odilo W. Huber, "The Centrality of Religiosity Scale (CRS)," *Religions*, 2012, https://doi.org/10.3390/rel3030710.

keagamaan: (1) agama sebagai nilai akhir; (2) agama sebagai sarana pemenuhan harapan; (3) agama sebagai sumber kesejahteraan emosional; (4) cita-cita dan moralitas; (5) agama sebagai bagian dari tradisi; dan (5) kecenderungan untuk memenuhi harapan sosial tentang agama.[35]

Tasawuf

Ajaran Islam telah memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam menuntun perilaku manusia di dunia. Salah satu bentuk ajaran Islam yang digunakan sebagai pedoman oleh manusia adalah *Tasawuf (Tasawwuf).* Mengutip dari[36] *tasawuf* merupakan salah satu dimensi dari ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana manusia berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Dalam hal ini, pengikut *tasawuf* mengutamakan kehidupannya pada kemurnian jiwa dan *akhlaq* dalam menyembah Tuhan.[37] Fakta tersebut didukung oleh Kosasih yang menyebutkan bahwa dalam terminologi *tasawuf* salah satu sudut pandang menuliskan bahwa manusia makhluk yang terbatas sehingga manusia diciptakan untuk menyembah dan percaya Tuhan. Dalam perkembangannya, *tasawuf* melahirkan tradisi Islam yang lebih di representasikan pada aliran dalam Sufi.[38] *Tasawuf*

[35] Irena Stojković dan Jovan Mirić, "Construction of a religious motivation questionnaire," *Psihologija*, 2012, https://doi.org/10.2298/PSI1202155S.

[36] Elmansyah Al-Haramain, "Shifting orientation in Sufism: Its development and doctrine adjustment in history," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2011, https://doi.org/10.18326/ijims.v1i2.273-296.

[37] Al-Haramain.

[38] Muzaffar Alam, "The debate within: A Sufi critique of religious law, tasawwuf and politics in Mughal India," *South Asian History and Culture*, 2011, https://doi.org/10.1080/19472498.2011.553490; Abu Bakr

dimaknai sebagai ajaran yang menuntut manusia pada pencarian diri untuk mengenal Tuhan melalui ritual, kesabaran dan disiplin aturan.[39]

Berbeda dengan itu,[40] menuliskan ajaran *tasawuf* bukan hanya sekedar memahami Islam secara spiritualitas melainkan mempengaruhi cara manusia dalam memahami berbagai aspek kehidupan secara mental dan intelektual antara manusia, alam dan Tuhan. Secara konseptual *tasawuf* lebih kepada pendekatan diri terhadap nilai-nilai kesalehan dan kebaikan dari Al-Quran untuk menjauhkan manusia terhadap kefanaan dunia termasuk kedalam kritik terhadap gaya hidup mewah seperti hedonisme dan materialistik.[41]

Tasawuf dijelaskan sebagai perwujudan dari penyucian hati setiap hamba agar terhubung dengan Tuhan melalui ajaran dan nilai yang ada dalam kitab suci. Tasawuf sebagai ajaran yang mengedepankan nilai ketuhanan diwujudkan dalam tiga bentuk. Bentuk ***pertama***, yakni tasawuf sunni (akhlaqi) yang berfokus cara-cara berbuat baik dan menghindari keburukan sehingga tujuannya pada perbaikan akhlak dan budi pekerti. Dalam sunni tingkatan tasawuf terbagi menjadi tiga yakni takhalli, tahali dan tajalli; ***Kedua,*** tasawuf falsafi dijelaskan sebagai bagian dari

Sirajuddin Cook, "Tasawwuf 'Usturaliya Prolegomena to a History of Sufism in Australia," *Australian Journal of Islamic Studies*, 2018.

[39] Karim Mitha, "Sufism and healing," *Journal of Spirituality in Mental Health* 21, no. 3 (2019): 194–205, https://doi.org/10.1080/19349637.2018.1464423.

[40] Mizrap Polat, "Tasawwuf-oriented Educational Philosophy and its Relevance to the Formation of Religion and Ethics Course Curriculum," *Universal Journal of Educational Research*, 2017, https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050514.

[41] Al-Haramain, "Shifting orientation in Sufism: Its development and doctrine adjustment in history."

kehidupan seorang sufi yang diarahkan pada penyucian batin dan ketaatan untuk membangun hubungan kepada Allah Swt.[42]; ***Ketiga,*** tasawuf syi'i yang memiliki pendapat bahwa manusia memiliki kesamaan esensi dengan Allah Swt. sehingga menimbulkan pemahaman bahwa manusia meninggal akan bersama dengan Tuhan. Tasawuf Syi'i dikembangkan oleh aliran Syi'ah sufisme dan cenderung bersifat liberal.[43] Maka dari itu, konsepsi perwujudan tasawuf mengarah pada perbaikan keimanan dan perilaku manusia agar semakin dekat dan percaya terhadap adanya Tuhan dalam agama. Fakta ini didukung oleh[44] yang menuliskan bahwa ajaran tasawuf adalah cerminan dari budi pekerti yang luhur dan jujur atau "*ummata wasatha*".

Faham Tauhid

Tauhid (tawhid) telah menjadi kesatuan konsep dalam ajaran Islam yang melihat secara mendalam konsep singularitas kepercayaan/keesaan Tuhan. Menurut[45] pemahaman akan tauhid didasarkan pada kaidah islam yang melihat realitas bahwa Tuhan adalah satu dalam kesatuan

[42] Amal Fathullah Zarkasyi, "Aqidah Al-Tauhid Baina al-Tasawwuf al-Sunni Wa al-Tasawwuf al-Falsafi," *Tsaqafah* (2010); Fikri Mahzumi, "Prinsip Dan Ajaran Tasawuf 'Abd Allâh al-Haddâd," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* (2015).

[43] Ismail Hasan, "Tasawuf Jalan menuju Tuhan," *An-Nuha* 1, no. 1 (2014): 45–65.

[44] Mohd Faiz et al., "Wasathiyah and Its Implementation among Tasawwuf Scholars in Aceh Wasathiyah and Its Implementation among Tasawwuf Scholars in Aceh" 9, no. 11 (2019): 842–50, https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i11/6604.

[45] Mark Beaumont, "Speaking of the Triune God: Christian Defence of the Trinity in the Early Islamic Period," *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* 29, no. 2 (2012): 111–27, https://doi.org/10.1177/0265378812439957.

dan integrasi ajaran agama yang menuntun kehidupan manusia. Karena Allah adalah satu-satunya sumber realitas dalam Islam maka ia harus disembah. Namun bukan hanya secara teologi melainkan dalam kerangka analisis manusia dimana konteks realitas hadir sebagai kesatuan yang saling berhubungan antara pencipta dan ciptaannya.[46] Oleh sebab itu, menurut Kalin ajaran dan kepercayaan kepada Allah adalah kebenaran dan motivasi yang menandakan manusia memiliki hubungan timbal balik yang baik terhadap Tuhan. Menambahkan Kalin,[47] menuliskan bahwa tauhid adalah prioritas utama dalam Islam yang mencangkup kepercayaan, moralitas, dan ibadah sehingga manusia dapat memahami keberadaan mereka di dunia. Oleh sebab itu, faham tauhid mempengaruhi sikap dan perilaku dengan mendalami pencapaian akan aqidah, fiqh, dan pembentukan akhlak yang sesuai dengan konsep keesaan Allah.[48] Dalam perkembangannya, tauhid dijadikan sebagai pedoman/ standar intelektual dalam mendeklarasikan keimanan dan kepercayaan pemeluk islam untuk menyatakan kebenaran konsepsi tunggal yang telah diyakini sebagai dasar dari ajaran Islam itu sendiri.[49]

---

[46] Ibrahim Kalin, "Religion, unity and diversity," *Philosophy and Social Criticism* 37, no. 4 (2011): 471–78, https://doi.org/10.1177/0191453711399726.

[47] Miftachul Huda et al., "Al-Zarnūjī's Concept of Knowledge ('Ilm)," *SAGEOpen*6,no.3(2016),https://doi.org/10.1177/2158244016666885.\\uc0\\u8220Al-Zarn\\uc0\\u363j\\uc0\\u299\\uc0\\u8217s Concept of Knowledge (\\uc0\\u8216Ilm

[48] Huda et al.the issue of what category of knowledge is permitted for Muslims, the method for imparting this knowledge, and what to impart (content

[49] Ömer Behram Özdemir dan Recep Tayyip Gürler, "Path to become a state: From Jama'at Al-Tawhid Wal-Jihad to the Islamic State," in *Non-*

Pemahaman tauhid secara tegas memutlakkan Allah sebagai suatu kesatuan yang tunggal dan universal. Mengutip dari[50] istilah tauhid berasal dari bahasa Arab "Wahada" yang memiliki arti menyatukan/satu sehingga secara tidak langsung Islam mengakui hanya ada satu Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan duniawi. Dalam hal ini, terdapat lima karakter yang dituliskan[51] merepresentasikan tauhid dalam perspektif agama Islam. (1) Dalam tauhid Allah Swt. merupakan realitas tertinggi, sang pencipta dan penyedia segala sesuatu yang diharapkan semua orang; (2) Penegasan terhadap kesatuan makna Tuhan mengakibatkan konsep monolatry/henotheistik (kepercayaan banyak Tuhan) tidak dapat diterima dalam tauhid islam; (3) Dalam tauhid konsep tanzih menjadi intisari bahwa tidak ada makhluk/sesuatu yang menyerupai Allah baik gambar, atribut, atau tindakan; (4) pelaksanaan ibadah hanya untuk memuliakan Allah S.W.T tidak politeisme; (5) kepercayaan terhadap *unity in god* hanya dapat diturunkan melalui wahyu ilahi (al-wahy). Oleh sebab itu konsep tauhid tidak hanya mengajarkan pada pencipta (al-khaliqiyyah) tetapi penyatuan keseluruhan aspek (uluhiyyah).[52] Melalui ini, tauhid menyiratkan kepercayaan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah/wakil Tuhan untuk tunduk dan

State Armed Actors in the Middle East: Geopolitics, Ideology, and Strategy, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-55287-3_6.

[50] Abdurezak A Hashi, "Between Monotheism and Tawhid: A Comparative Analysis," *Revelation and Science* 3, no. 2 (2013): 23–29.

[51] Hashi.

[52] Muhammad Syukri Salleh, "Philosophical foundations of Islamic development: Khurshid Ahmad's conception revisited," *International Journal of Education and Research* 1, no. 7 (2013): 1–16.

mensejahterakan alam dan manusia.[53] Namun pemahaman akan keesaan yang berbeda antar manusia dapat memicu polemik konsepsi keesaan lain dianggap bertentangan dan tidak rasional.[54]

Peta Dimensi Kontekstual (Transformatif) dalam Pemahaman Tasawuf dalam *Naskah Ambulung*

Tabel 1 Konstruksi Konsep Tasawuf Ortodoks dan Naskah Ambulung

No	Konsep Ortodoks	Konsep Naskah Ambulung	Konstruksi
1	Tekstual	Kontektual	Ajaran tasawuf dalam Naskah Ambulung dikembangkan dari dalil-dalil yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan hadis ditambah pemikiran akal intuitif secara fleksibel

[53] Maszlee Malik, "Constructing an Alternative Concept of Islamic Governance: A Maqāṣidic Approach," *Kemanusiaan the Asian Journal of Humanities* 26, no. Supplement 1 (2019): 89–108, https://doi.org/10.21315/kajh2019.26.s1.5.

[54] Michael Kuhn, "Allāh: Internalized Relationality: Awwaḍ Simʿān on the Trinitarian Nature of God," *Transformation* 36, no. 3 (2019): 173–83, https://doi.org/10.1177/0265378819853176.

No	Konsep Ortodoks	Konsep Naskah Ambulung	Konstruksi
2	Bersifat praktis	Teoretis	Praktik zuhud dikembangkan bukan hanya dilakukan dengan mengasingkan diri dari keramaian, tetapi bagaimana hati ini tetap fokus kepada Allah walau secara fisik terlibat dalam kegiatan-kegiatan soial, politik, ekonomi, dan sebagainya
3	Bersifat etis	Filosofis	Naskah Ambulung mengembangkan ajarannya secara sistematis dan argumentatif yang dalam hal ini muncul teori Perhimpunan Martabat yang mirip dengan teori emanasi

Tasawuf ortodoks mengajarkan ilmu yang bersifat etis dan praktis, sesuai dengan teks agama agar manusia meninggalkan kesenangan dunia dan menghiasi diri dengan akhlak mulia sehingga bisa dekat dengan Tuhan yang Maha Mulia. Naskah Ambulung justru mengenalkan tasawuf sebagai cara untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu dan hidup menjadi manusia mulia adalah akibatnya. Sedangkan untuk mengenal Tuhan hanya dapat direalisasikan dengan cara memahami akan hakikat diri manusia, dari mana asalnya, dan akan ke mana arah tujuannya (Ambulung; 1). Ajaran tentang mengenal diri dalam naskah Ambulung

merujuk kepada satu ungkapan yang popular di kalangan sufi, yaitu:

> **من عرف نفسه فقد عرف ربه, و من عرف ربه فسد الجسد .**
> *Artinya: Barangsiapa mengenal akan dirinya maka ia mengenal akan Tuhannya dan barang siapa mengenal akan Tuhannya maka binasalah wujud dirinya (Ambulung; 2).*

Corak filosofis dalam naskah Ambulung terekam dalam teori Nur Muhammad yang diajarkan untuk merasionalkan bagaimana hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia berlangsung (Ambulung; 9). Teori Nur Muhammad dalam Naskah Ambulung disajikan pada bab "Perhimpunan Martabat" dimana Teori ini dibangun untuk mengantarkan pemahaman tentang hakikat diri manusia dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan (Ambulung; 19-26). Teori ini mirip dengan teori emanasinya Ibnu Sina.

Peralihan Metode Tasawuf

Tabel 2 Perbandingan Metode Tasawuf Ortodoks dengan Tasawuf dalam Naskah Ambulung

No	Metode Tasawuf Ortodok	Metode Tasawuf dalam Naskah Ambulung	Perubahan
1	Zikir khafi	Zikir khafi	-
2	Zikir jali	Zikir jali	-

No	Metode Tasawuf Ortodok	Metode Tasawuf dalam Naskah Ambulung	Perubahan
3	-	Zikir musyahadah	Metode zikir *musyahadah* merupakan pengembangan dari metode zikir lainnya di mana zikir ini dilakukan setelah berhasil melakukan zikir dengan metode *khafi* dan *jali*.
4	-	Zikir tawajjuh	Sedangkan *tawajjuh* artinya berhadapan. Metode zikir ini untuk menghadirkan Tuhan lebih dekat lagi, yaitu di hadapan pezikir. Tentu semua ini dilakukan melalui olah rasa dalam hati

Metode tasawuf di sini maksudnya adalah kegiatan ritual sebagai implikasi dari adanya sebuah ajaran. *Riyadlah* dan *mujahadah* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari metode tasawuf, umumnya berupa zikir baik dengan salat maupun dengan membaca *kalimat-kalimat tayyibah*. Metode zikir dalam naskah Ambulung terekam dalam naskah sebanyak 3 halaman, yaitu halaman 29 sampai 31, "Pasal pada Menyatakan Zikir yang Empat". Naskah Ambulung menyebutkan ada 4 (empat) zikir, sebagai berikut.

Pertama, zikir *jali*, yaitu *lā ilāha illā Allāh*.

Kedua, zikir *khafi*, yaitu tiada dikata dengan lidah hanya ingat Allah, Allah.

Ketiga, zikir *musyāhadah*, yaitu umpama kucing yang fokus mengintai tikus hingga didapatnya, maka ia lenyap pada zikir hatinya.

Keempat, zikir *tawajjuh* yaitu tiada lain seperti zikir musyahadah juga, sebab ia mengenal dan senantiasa berzikir, seperti firman Allah yang Artinya "*di mana hadap kamu di sanalah Dzāt Allah Ta'ālā.* (Ambulung; 29). Jadi apapun yang dilihat hanya Allah saja yang tampak.

Zikir ketiga dan keempat merupakan pengembangan dari zikir pertama dan kedua. Musyahadah menunjukkan pada kekuatan fokus dan konsentrasi, sementara *tawajjuh* merupakan hal yang lebih tinggi lagi yakni menghadirkan tuhan, sehingga antara yang berzikir dengan tuhan seperti berhadap-hadapan. Metode zikir Jali dan Khafi merupakan satu bentuk zikir yang lazim dilakukan oleh para penganut tasawuf ortodoks. Di sini kemudian letak perbedaan antara ortodoks dengan tasawuf yang ditunjukkan dalam naskah Ambulung.

Selain 4 metode zikir sebagaimana disebutkan di atas, Naskah Ambulung mengajarkan zikir taubat, yaitu zikir *kalimah tayyibah* dalam hati yang dilakukan secara terus-menerus sambil menghadirkan Allah pada setiap tarikan dan hembusan nafas namun tanpa suara. Sebagian 'Ārif *bi Allāh* berkata, "taubat sekalian manusia itu sabar daripada segala dosa. Dan ia tiada putus dari segala zikir dan tiada lagi menghendaki huruf dan suara adanya" (Ambulung:). Jadi orang yang ingin taubatnya diterima maka ia harus selalu berzikir secara khafi yakni dalam hatinya mengucapkan kalimah thayyibah *Lā Ilāha Illā Allāh* sambil menghadirkan Allah.

Peralihan Tampak Pada Pengalaman Spiritual

Tabel 3 Pengalaman Spiritual Sufi Ortodoks dengan Spiritual Versi Naskah Ambulung

No	Pengalaman Spiritual Tasawuf Ortodok	Pengalaman Spritiual Versi Naskah Ambulung	Perbedaan
1	Makrifat	Tauhid Wujudiyah	Tasawuf ortodoks mengajarkan bagaimana agar pada akhirnya sufi dapat melihat Tuhan dengan mata hati yang disebut makrifat. Naskah Ambulung mengembangkan konsep makrifat hingga sampai ke taraf hanya Tuhan saja yang tampak dalam pandangan hatinya, sehingga Sufi sendiri pun tidak sadar akan keberadaan dirinya.
2	Taqwa	Taqwa	Taqwa dalam perspektif Naskah Ambulung bukan saja takut kepada Allah, tetapi suatu keadaan hati yang tidak lagi merasa takut dan susah, karena diri yang taqwa adalah yang sudah berada bersama-sama Tuhan kapanpun dan di manapun.

Pada umumnya, tujuan akhir ajaran tasawuf adalah bisa mengalami makrifat. Naskah Ambulung menyatakan bahwa pengalaman makrifat bukan tujuan akhir dari tasawuf. Makrifat justru sebagai pintu gerbang yang harus dimasuki sejak awal melangkahkan kaki dalam perjalanan

panjang menjumpai Allah. Sedangkan pengalaman spiritual yang disasar oleh tasawuf dalam naskah Ambulung adalah bersatu dengan Tuhan (*wahdatul wujud*). Ambulung mengatakan: "asal agama itu ialah *awwal al-din ma'rifat Allāh* Artinya asal agama itu ialah mengenal Allah" (Ambulung; 2).

Adapun makrifat kita kepada *Dhāt* Allah itu ialah seperti kata Syekh Ahmad Wali Sembilan: "Tiada buih melainkan ombak dan tiada ombak melainkan laut dan tiada laut melainkan air jua". Maka dengan misal ini kita pandang tiada buih tiada ombak tiada laut melainkan wujud air semuanya. Inilah ibarat zikir لااله الاالله (*la ilah illa Allah)* maksudnya tiada yang maujud di dunia akhirat hanya Allah. (Ambulung; 16-17)

Berbagai pemikiran tasawuf tentang konsep, metode amaliyah, dan pengalaman kerohanian sebagaimana disebutkan di atas, menjadi indikasi kuat adanya arah baru yang dituju oleh ajaran tasawuf dalam Naskah Ambulung. Apabila memperhatikan kepada ciri-ciri yang dimiliki, seperti konsepnya yang teoretis, metodologis, dan implikasinya berupa tauhid wujudiyah sebagai pegalaman spiritual yang mungkin dapat dicapai, maka transformasi ilmu tasawuf dalam Naskah Ambulung mengarah pada suatu teori tasawuf falsafi dengan coraknya yang dekat dengan tasawuf syi'i.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya (Lahirnya) Peralihan Konstruksi Pemahaman Tasawuf dalam Naskah (*Naskah Ambulung*)

1. Peran Abdul Hamid sebagai tokoh penting dalam naskah Ambulung

Abdul Hamid Ambulung, seorang tokoh sufi Kalimantan Selatan hidup semasa dengan Datu Kelampayan atau Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjāriy (1710-1812 M.). Syeikh Abdul Hamid dilahirkan di Negeri Yaman pada tahun 1148 H./1735 M. dan wafat pada 12 Dhulhijjah 1203 H./1788 M.[55] Masyarakat Banjar memberi gelar Datu dan Syeikh kepada Abdul Hamid. Selain itu, mereka juga memanggil Abdul Hamid dengan nama Ambulung, dinisbatkan kepada kampung "Ambulung" di mana Abdul Hamid mengembangkan ajarannya (Syafruddin, 2019: 7). Abdul Hamid adalah ulama Kalimantan yang terlibat di dalam jaringan ulama Nusantara dan Haramayn abad xviii.[56] Masyarakat Banjar mengenal Ambulung sebagai wali (Amang; 2019). Di antara kekeramatan yang dapat disaksikan hingga sekarang ialah keadaan makamnya yang tetap eksis meskipun tanah sekitarnya tergerus oleh aliran sungai Martapura.

---

[55] Mujiburrahman Mujiburrahman, "Tasawuf di Masyarakat Banjar : Kesinambungan dan Perubahan Tradisi Keagamaan," *Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 3, no. 2 (2013): 153, https://doi.org/10.20871/kpjipm.v3i2.46.

[56] Azyumardi Azra, "Jaringan Ulama Nusantara," in *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, 2016; Maimunah Zarkasyi, "Pemikiran Tasawuf Muh Arsyad al-Banjari dan Pengaruhnya di Masyarakat Kalimantan Selatan," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2014): 76, https://doi.org/10.15642/islamica.2008.3.1.76-95.

Gambar 1 Halaman Muka Naskah Ambulung Versi Muhammad Daman

Terdapat dua versi mengenai asal usul naskah Ambulung ini. ***Pertama,*** bahwa naskah Ambulung ini adalah naskah yang ditulis secara *barzakhy* (melalui mimpi, dalam keadaan setengah sadar) dengan didiktekan kepada Zaini Muhdhar, salah seorang tokoh yang disegani dan merupakan penjaga makam Syaikh Hamid. Namun karena klaim bahwa naskah ini disalin langsung dari syaikh Abdul Hamid, dan masyarakat mempercayai hal ini maka kemudian naskah Ambulung ini disematkan kepada Syaikh Abdul Hamid, bukan Zaini Muhdhar. ***Kedua,*** selain Zaini Muhdhar terdapat satu nama lagi yang disebut-sebut sebagai penulis naskah Ambulung. Beliau bernama Bahrunsyah bin Muhammad

Daman. Namun penulis yang disebut terakhir ini tidak sepopuler yang pertama, karena beliau hanya menulis satu juz saja. Sedangkan Zaini Muhdhar menulisnya secara lengkap, terdiri dari 2 juz.[57] Namun isi kedua naskah ini sama hanya saja jumlah halamannya berbeda karena adanya iluminasi di naskah Muhammad bin Daman.

2. Pengaruh perkembangan tasawuf global yang semakin kontekstual

Pengaruh dari perkembangan tasawuf global yang kontekstual nampak pada naskah Ambulung yang hidup dalam budaya Banjar ini ditulis dalam aksara Jawi dengan bahasa Melayu sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Selain itu, naskah tersebut menggunakan banyak peristilahan yang lazim digunakan dalam tradisi Islam kejawen dan sufisme Aceh pada saat itu. Contoh yang pertama, terdapat terma tentang *madi, mazi, mani, manikam,* dan empat unsur kejadian anak Adam, *camariyah, tubaniyah, tambuniah*, dan *uriah* (Ambulung; 25), terdapat dalam naskah Jawa (Mataram). Beberapa unsur Aceh dalam naskah Ambulung terekam pada pemikiran tentang "Perhimpunan Martabat" (Ambulung;……). Beberapa terma tersebut merupakan informasi baru dalam ilmu tasawuf ketika menjelaskan tentang imanensi Tuhan. Bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan manusia di manapun tempatnya, memberinya kehidupan dan kesejahteraan, bahkan ketika anak manusia masih berada di alam rahim.

[57] Ahmadi, wawancara, 2019.

3. Doktrin tasawuf mengajak umat berpikir dinamis

Doktrin tasawuf falsafi dalam Naskah Ambulung secara tidak langsung mengajak pembacanya berpikir dinamis. Hal ini tercermin pada penjelasan tentang Tuhan sebagai entitas tertinggi yang tak tergambarkan. Dia, sesungguhnya tidak bernama. Eksistensi Dia Yang Maha Tinggi tidak mungkin dapat direduksi oleh apapun, apalagi hanya oleh sebuah nama. Walau begitu, Dia yang Maha Rahman dan Rahim mengenalkan diri-Nya dengan nama "Allah" yang dapat dimengerti oleh manusia. Dalam Naskah Ambulung perkara ini coba diuraikan melalui media simbol *alif, lām, lām, hā'*. (Ambulung; 61)

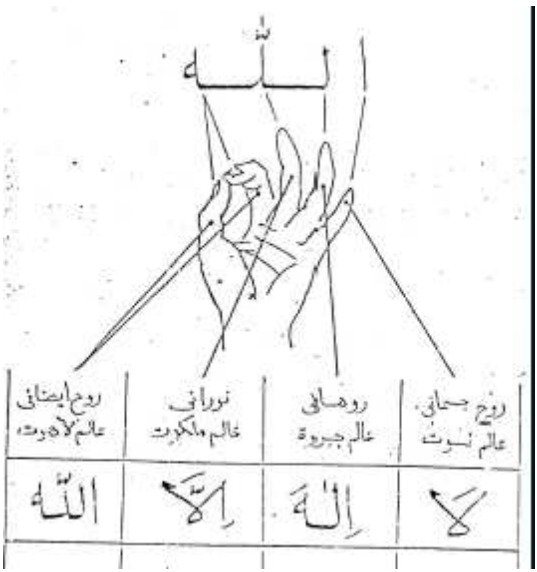

Gambar 2 Nama Allah dalam Jari Manusia dan Penjelasannya

Simbol alif lam lam ha' sebagai media berpikir dinamis menarik pembacanya mengamati simbol tersebut lalu memahami interpretasi yang diberikan. Empat unsur huruf dari lafaz Allah diberi makna yang relevan dengan tauhid,

sehingga apabila disebut nama Allah dengan lisan maka ruang dalam hati langsung terpenuhi oleh sifat-sifat Allah dan tidak menyiisakan ruang sedikitpun untuk selainnya. Di sini Tuhan benar-benar hadir dalam keesaannya yang *la wujud illa Allah*, tidak ada yang wujud selain Allah belaka. Ketika dalam hati tidak ada yang lain selain Allah, maka setiap gerak tubuh mengarah kepada amal perbuatan yang diridlai Allah, tidak melanggar perintah Allah. Individu yang sudah sampai pada peringkat tauhidul wujud seperti ini akan menjadi manusia mulia sebab kemuliaan akhlaknya.

Naskah Ambulung menjelaskan:

> Jika berhimpun yang empat huruf itu maka berbunyi: *Allāh alladhi khalaqa al-samāwāt wa al-ard*. Jika dibuang huruf *alif*-nya maka berbunyi: *Lillāh al-wāhid al-qahhār*. Jika dibuang *lām awwal*-nya maka berbunyi: *Lahū al-mulk wa lahū al-hamd.* Dan jika dibuang huruf *lām akhir*-nya maka berbunyi: *huwa al-awwal wa al-ākhir wa al-zāhir wa al-bātin*. Jika dibuang huruf *hū*-nya maka apa bunyinya dan apa artinya? Hanya orang-orang yang *'ārif bi Allāh*. Ilmu ini lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Itulah kesudahan *ilmu ahli Allah*. Katanya betapa lagi rupa itu melihat akan dirinya, karena telah dikembalikannya *jawhari* yang diterimanya sebanyak tujuh biji kepadanya telah dikembalikan, maka betapa ia melihat Allah, maka hasil tiada melihat akan dirinya dan tiada melihat akan Allah, jadi keduanya *'adam*. Maka tiadalah yang lebih dari ilmu orang ahli sufi (Ambulung; 55-57).

Pada bagian ini Penulis melihat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya peralihan konstruksi pemahaman tasawuf dalam naskah Ambulung yang hidup dalam budaya Banjar di Kalimantan Selatan, ***pertama,*** figur pengarangya

yang alim di bidang tasawuf falsafi yang menjadi bagian dari ulama Banjar yang terlibat dalam jaringan ulama Nusantara abad-18. ***Kedua,*** perkembangan akademik pemikiran tasawuf global pada saat itu mengarah pada doktrin tasawuf falsafi, dan ***ketiga,*** Naskah Ambulung secara tidak langsung mengajak pembacanya berpikir dinamis. Hal ini tercermin pada penjelasan tentang Tuhan sebagai entitas tertinggi yang tak tergambarkan, di mana diskusi tentang wujud Tuhan dan alam sudah lumrah menjadi topiknya dalam filsafat.

Cara Naskah Ambulung Mengkonstruksi Paham Ajaran Agama

1. Naskah Ambulung berpotensi mendorong pemahaman tauhid (yang baru)

Naskah Ambulung mendorong pemahaman tauhid yang baru. Informasi yang diberikan oleh Naskah Ambulung menegaskan bahwa Naskah Ambulung menyajikan ilmu dari ahli sufi (falsafi) kelas tinggi. Naskah juga mengingatkan bahwa ilmu tasawuf tingkat tinggi harus dipelajari dari guru yang sesuai. Malahan, dikatakan dalam naskah Ambulung bahwa pelajaran singkat yang disajikannya memiliki manfaat yang lebih berharga dari pada dunia beserta isinya. Namun demikian, isi kajian tersebut sangat berbahaya apabila disalahgunakan.

> *Bab ini adalah menyatakan ilmu orang tahqīq tiada diperoleh lebih daripada itu walau anbiyā' sekalipun. Maka pikirkanlah olehmu dan cari akan guru yang boleh* menghuraikannya. *Adapun perkataan yang sedikit ini terlebih besar faidahnya dari dunia dan segala isinya. Terlebih keras daripada batu dan terlebih tajam dari*

pedang. Maka inilah Ilmu Shuhūd yakni ilmu orang ahli sufi r.a. (Ambulung; 1)

2. Naskah Ambulung dapat menjadi referensi baru (yang beda) tentang tasawuf falsafi

Naskah Ambulung berisi tentang teori Martabat dengan ciri khasnya yang berbeda dengan Martabat Tujuh dalam *Tuhfat al-Mursalah* karya al-Burhanfuri. Tambahan lagi, menurut Nur Kolis, Naskah Ambulung merupakan naskah otoritatif di bidang tasawuf wujudiyah abad ke-18. Dari segi teksnya, naskah ditulis dengan huruf (Jawi) yang sesuai dengan standar penulisan, menggunakan struktur bahasa (Melayu) yang dapat dipahami, dan tidak banyak terdapat variasi teks yang menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap isi teks. Dari segi isi kandungannya, naskah Ambulung menyajikan topik bahasan yang sangat tinggi, mencakup ajaran tauhid *wujudiyah* yang dikonsep berdasarkan paradigma Nur Muhammad. Sumber ajarannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, yaitu al-Quran, hadis, dan pendapat salafus solih yang diijazahkan secara langsung maupun secara *barzakhi*. Pembahasannya disusun secara sistematis fasal demi fasal yang dijelaskan secara naratif maupun menggunakan media simbol. Dari segi konteksnya, naskah Ambulung membawa pesan keagamaan yang relevan pada masa naskah ditulis, yaitu ajaran tauhid dalam perspektif tasawuf falsafi (Kolis; 2019).

3. Naskah Ambulung berpotensi mengubah sikap dalam hal mendorong sikap moderat (egaliter)

Naskah Ambulung mengajarkan bahwa seluruh makhluk dicipta oleh Tuhan dari satu asal yang sama, yaitu Nur Muhammad, sehingga menurut naskah tersebut seluruh makhluk ciptaan Tuhan berkedudukan sama. Maksud dari makhluk ciptaan Tuhan di sini bukan saja yang bernyawa seperti manusia dan binatang, tetapi juga yang tidak bernyawa seperti pemikiran, keyakinan, dan agama. Dalam perspektif ini Naskah Ambulung mengajarkan satu doktrin kesatuan agama-agama, *wahdatul adyan.* Penjelasan tentang teori Nur Muhammad dapat dirujuk pada hampir seluruh isi naskah.

Naskah Ambulung mengkonstruksi paham ajaran agama dengan tiga hal. ***Pertama,*** dengan motivasi positif kepada pengkaji, yaitu dengan menginformasikan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh pengkaji yang bersedia mengkontruks pemahaman tasawufnya seperti yang dijelaskan dalam Naskah Ambulung. ***Kedua,*** otentisitas naskah Ambulung sangat memungkinkannya dijadikan sumber pengetahuan tentang ajaran tasawuf sesudahnya. ***Ketiga,*** naskah Ambulung memuat teori Perhimpunan Martabat. Pemahaman secara mendalam terhadap teori tersebut dapat melahirkan sikap egaliter.

Pertarungan Tasawuf Ortodoks Versus Non-Ortodoks

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tasawuf dalam naskah Ambulung memiliki perbedaan yang signifikan dengan tasawuf ortodoks yang

eksis dan berlaku pada waktu itu. Naskah Ambulung ini mengajak ke arah pemahaman tasawuf yang lebih filosofis yang merupakan sisa-sisa pemikiran sufisme abad 17. Konteks filosofis ini tampaknya sangat dipengaruhi para pemikir-pemikir sufisme yang kontroversial di jamannya, seperti Al-Hallaj (866M), Ibnu Sina (980M), Ibnu Arabi. Memang sulit memastikan secara langsung bagaimana keterhubungan naskah Ambulung dengan para pemikir kontroversial ini, Rozi[58] menunjukkan bahwa ajaran tasawuf

[58] Syafwan Rozi, "WACANA SUFISTIK : TASAWUF FALSAFI DI NUSANTARA ABAD XVII M: ANALISIS HISTORIS DAN FILOSOFIS," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2017, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v3i2.405.in the 17th century AD it understood to be brought by the Sufi clerics or nomads who came from Persia and India, although the period appears haramain network is considered as a counter that ultimately criticize the ideology of philosophical Sufism that has developed before. The ideology of philosophical Sufism which developed in the archipelago in terms of the essence of the teachings comes from the philosophical Sufi mursia Ibn 'Arabi received by the archipelago of the archipelago through the followers of Ibn'Arabi or learned from his works which are encountered when wandering the middle queue - persia to study. Hamzah Fansuri and Syamsuddin Sumaterani as representenatasi of wujudiyyah in the archipelago is very stressed to maintain the concept of monotheism in an original and really crowded God. Hamzah especially emphasizes the stages of la ta'ayyun as a pure divine element. While Syamsuddin emphasize to his followers to understand al-muwahhidin al-shiddiqin, not equating anatara God with nature but understood by the logic of thinking that the form of nature is majazi or shadow of the form of God. With this understanding Syamsuddin has first clarified.\r \r Wacana sufistik tasawuf falsafi telah berkembang pesat mengiringi perkembangan Islam pada masa pertumbuhan di Nusantara. Dilihat dari sumber atau jaringannya, pada abad ke-17 M, paham tersebut dapat dikatakan dibawa oleh ulama atau pengembara sufi yang datang dari Persia dan India, walaupun kurun itu muncul jaringan Haramain dianggap sebagi tandingan yang akhirnya mengkritik paham tasawuf falsafi yang telah berkembang sebelumnya. Paham tasawuf falsafi yang berkembang di Nusantara dari segi esensi ajaran berasal

falsafi dibawa oleh para sufi Persia dan India, namun data Azra (1994) menunjukkan bahwa Abdul Hamid termasuk dalam kelompok jaringan ulama nusantara Kalimantan abad 18 meskipun ia tidak mengungkap biografinya seacara mendetail. Jadi jaringan ini tampaknya bertemu dan bertali-temali dengan kelompok jaringan ulama yang juga dikenal dengan istilah *Ashabul Jawiyyin* lainnya, seperti yang sezaman dengannya adalah Syekh Arsyad al-Banjari. Syekh yang disebutkan terakhir ini terlibat polemik dengan Abdul Hamid karena paham wujudiyahnya.

Sebelumnya, diskursus dan polemik ajaran ini juga terjadi di Aceh, antara Nuruddin Ar-Raniry dan Hamzah Fansuri[59] di mana terjadi diskusi yang Panjang mengenai pemahaman wahdatul wujud. Dan ini kemudian juga melibatkan guru As-Singkili, Ibrahim al-Kurani dari Mesir untuk turut memberikan satu risalah tersendiri mengenai

dari sufi filosofis mursia Ibn' Arabi yang diterima ulama Nusantara melalui pengikut-pengikut Ibn'Arabi atau dipelajarai dari karya-karyanya yang ditemui ketika mengembara ke timut tengah – persia untuk menuntut ilmu. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumaterani sebagai representasi dari paham wujudiyyah di Nusantara sangat menekankan untuk memahani konsep tauhid secara orisinil dan benar-benar mengesakan Tuhan. Khususnya Hamzah menekanan sekali tahapan la ta'ayyun sebagai unsur ketuhanan yang murni. Sedangkan Syamsuddin menekankan kepada pengikutnya untuk berpaham al-muwahhidin al-shiddiqin, tidak menyamakan anatara Tuhan den…","author":[{"dropping-particle":"","family":"Rozi","given":"Syafwan","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2017"]]},"title":"WACANA SUFISTIK : TASAWUF FALSAFI DI NUSANTARA ABAD XVII M: ANALISIS HISTORIS DAN FILOSOFIS","type":"article-journal"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

[59] Rusdiyanto Rusdiyanto and Musafar Musafar, "Ajaran Wujudiyah Menurut Nuruddin Ar-Raniri," *Potret Pemikiran* (2018).

dispute yang terjadi dalam diskursus pemikiran tasawuf di Indonesia (Azra, 1994). Anshari[60] menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyulut dari pertikaian ideologis ini, ***pertama,*** aspek teologis, ***kedua,*** kepentingan politis, dan ***ketiga,*** kesamaan genealogis. Pertikaian ini juga memiliki pengaruhnya di Kalimantan Selatan. Pertikaian ini pada waktu itu terjadi pada masa Abdul Hamid dan Syeikh Arsyad al-Banjari. Abu Daudi (1996) Syukur (2002) Jahja (1988) menunjukkan bahwa Syeikh Arsyad telah memberi fatwa hukuman mati kepada Abdul Hamid, dikarenakan ajarannya yang dianggap melenceng dan beraliran wujudiyah yang berkeyakinan bahwa wujud Allah dalam kandungan segala makhluk, sekalian makhluk adalah wujud Allah di dalam wujud segala makhluk yang banyak. Kendatipun dispute yang berujung pada fatwa mati kepada Abdul Hamid, namun Naskah Ambulung ini tetap eksis dan dikaji oleh masyarakat Banjar hingga saat ini. Aspek amaliyah berupa zikir musyahadah dan tawajjuh sebagai pengembangan lebih jauh dari metode zikir khafi dan jali merupakan metode baru dalam tradisi tasawuf pada saat itu yang dengan metode tersebut memungkinkan sufi dapat menjalin komunikasi langsung dengan Tuhan, bahkan menyatu dengan wujud Tuhan dalam bentuk hulul seperti yang dialami oleh al-Hallaj maupun wahdatul wujud seperti pengalaman Ibn Arabi.

[60] Muhammad Afif Anshori, "Kontestasi Tasawuf Sunnî Dan Tasawuf Falsafî Di Nusantara," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* (2015).

Syeikh Abdul Hamid: Guru Para Sufi Banjar

Abdul Hamid sebagai pengarang Naskah memainkan peranan yang besar dalam mengkonstruksi pemikiran tasawuf dalam Naskah Ambulung. Beliau adalah seorang ulama Melayu Banjar kharismatik. Kapasitas keilmuannya diakui oleh masyarakat Banjar pada masanya. Masyarakat Banjar bahkan memanggilnya Syeikh. Gelar Syeikh menunjukkan beliau salah seorang pemuka agama yang tinggi ilmunya, memiliki bilangan murid yang banyak, dan juga tokoh sufi, sekurang-kurangnya memiliki jabatan sebagai *khalifah, murshid*, ataupun *badal* dalam tradisi tasawuf (Humaydi, 2003:49). Justeru sebutan Syeikh merupakan Gelar yang dilekatkan kepada orang yang pernah menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah. Pernyataan Azyumardi Azra yang menyebut Abdul Hamid sebagai ulama Kalimantan yang terlibat di dalam jaringan ulama Nusantara dan Haramayn abad XVIII (Azra, 1999) memperkuat argumen ketokohan Abdul Hamid sebagai ulama Banjar yang layak bergelar Syeikh sebagaimana ulama Nusantara alumni Haramain lainnya. Keterlibatan Abdul Hamid dalam jaringan ulama meniscayakannya beradaptasi dengan perkembangan akademik global, khususnya bidang tasawuf yang pada saat itu, abad ke-18 pemikiran tasawuf neo-sufisme sedang menjadi trending topik di Nusantara.

Sebenarnya Abdul Hamid bukan satu-satunya ulama sufi Banjar yang secara aktif mengajarkan corak tasawuf baru di Kalimantan. Dapat dilacak dalam sejarah Islam Banjar abad ke-17 dan 18 nama ulama lain yang sealiran dengan Abdul Hamid yang juga berpengaruh, seperti Syeikh Muhammad

Nafis pengarang kitab al-Durr al-Nafis, Datu Sanggul dari Tatakan, Rantau. Walau begitu, popularitas Abdul Hamid melebihi mereka di mata masyarakat Banjar pada umumnya. Hingga saat ini tidak sedikit dari masyarakat Kalimantan Selatan yang mengkaji dan mengamalkan ajaran Abdul Hamid. Mereka membentuk komunitas yang lazim disebut komunitas Ambulung (Kolis, 2012).

Selama lebih dari satu abad popularitas Abdul Hamid Ambulung tersebar melalui tutur kata dari mulut ke mulut, baik tentang kekeramatan beliau yang dianggap sebagai wali, kharisma beliau sebagai seorang Datu, dan kealiman beliau sebagai seorang Syeikh. Abdul Hamid tidak memiliki karya tulis. Beliau hanya mewariskan sebuah naskah kecil yang mengajarkan satu cabang tasawuf falsafi. Naskah Ambulung menjadi referensi utama dalam pengajian tasawuf sirr di Kalimantan Selatan (Zamani, 2014). Pengajian tasawuf sirr adalah majelis ilmu yang dilaksanakan secara tertutup, karena materi pelajarannya yang tidak boleh disampaikan kepada yang belum memiliki kesiapan akademik. Murid majelis ilmu ini terdiri dari para tuan guru dan ahli sufi yang sudah khatam mengaji "sifat duapuluh", maksudnya hanya murid yang sudah cukup pengetahuan syariat dan dasar-dasar keyakinan Islamnya yang diperkenankan mengkaji Naskah Ambulung. Bukan karena naskah suci, tetapi isi ajarannya yang filosofis intuitif rentan disalahpahami oleh mereka yang tidak siap nalar irfaninya.

Tasawuf Sirr dan Resepsi Pemahaman Baru Pembelajar Sufisme di Banjar

Naskah Ambulung membawa pesan tasawuf dalam perspektif filsafat. Harun Nasution menyebutnya tasawuf falsafi.[61] Salah satu ajaran terpentingnya adalah tentang

[61] Rozi, "Wacana Sufistik : Tasawuf Falsafi Di Nusantara Abad Xvii M: Analisis Historis Dan Filosofis."in the 17th century AD it understood to be brought by the Sufi clerics or nomads who came from Persia and India, although the period appears haramain network is considered as a counter that ultimately criticize the ideology of philosophical Sufism that has developed before. The ideology of philosophical Sufism which developed in the archipelago in terms of the essence of the teachings comes from the philosophical Sufi mursia Ibn 'Arabi received by the archipelago of the archipelago through the followers of Ibn'Arabi or learned from his works which are encountered when wandering the middle queue - persia to study. Hamzah Fansuri and Syamsuddin Sumaterani as representenatasi of wujudiyyah in the archipelago is very stressed to maintain the concept of monotheism in an original and really crowded God. Hamzah especially emphasizes the stages of la ta'ayyun as a pure divine element. While Syamsuddin emphasize to his followers to understand al-muwahhidin al-shiddiqin, not equating anatara God with nature but understood by the logic of thinking that the form of nature is majazi or shadow of the form of God. With this understanding Syamsuddin has first clarified.\r \r Wacana sufistik tasawuf falsafi telah berkembang pesat mengiringi perkembangan Islam pada masa pertumbuhan di Nusantara. Dilihat dari sumber atau jaringannya, pada abad ke-17 M, paham tersebut dapat dikatakan dibawa oleh ulama atau pengembara sufi yang datang dari Persia dan India, walaupun kurun itu muncul jaringan Haramain dianggap sebagi tandingan yang akhirnya mengkritik paham tasawuf falsafi yang telah berkembang sebelumnya. Paham tasawuf falsafi yang berkembang di Nusantara dari segi esensi ajaran berasal dari sufi filosofis mursia Ibn' Arabi yang diterima ulama Nusantara melalui pengikut-pengikut Ibn'Arabi atau dipelajarai dari karya-karyanya yang ditemui ketika mengembara ke timut tengah – persia untuk menuntut ilmu. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumaterani sebagai representasi dari paham wujudiyyah di Nusantara sangat menekankan untuk memahani konsep tauhid secara orisinil dan benar-benar mengesakan Tuhan. Khususnya Hamzah menekanan sekali tahapan la ta'ayyun sebagai unsur ketuhanan yang murni. Sedangkan Syamsuddin menekankan kepada pengikutnya untuk

hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Di satu segi ajaran tersebut mengarahkan pada sikap berserah diri kepada kehendak Tuhan secara bulat. Di satu segi yang lain justru penyerahan diri secara total kepada Tuhan berimplikasi pada dinamika dalam berpikir dan semangat dalam amal kebajikan tanpa pamrih. Hal ini terbukti pada kehidupan para pengkaji Naskah Ambulung yang secara akademik, sosial dan ekonomi berada di atas rata-rata umumnya masyarakat Banjar.

Kajian sirr yang dilakukan oleh komunitas Ambulung telah mengubah aqidah tauhid mengarah kepada pemahaman wujudiyah. Mereka memiliki pola pikir moderat yang dapat memahami perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal misalnya, pemikiran, ekonomi, bahkan perbedaan politik. Di sisi lain, mereka mengatakan bahwa ajaran yang benar, dan mereka mengklaim bahwa seseorang dianggap belum belajar tasawuf bilamana belum belajar Ambulung. Sejarah mengenai polemik dan fatwa dan hukuman mati terhadap Syeikh Abdul Hamid telah mereka lupakan dan mereka tidak terpengaruh atas polemik masa lalu tersebut. Praktik tasawuf wujudiyah ini di perkotaan Banjarmasin dilakukan oleh Guru Yadi (Yanti, 2019) serta pengajian tasawuf lain di Banjarmin. Istilah tasawuf sir

---

berpaham al-muwahhidin al-shiddiqin, tidak menyamakan anatara Tuhan den…","author":[{"dropping-particle":"","family":"Rozi","given":"Syafwan","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2017"]]},"title":"WACANA SUFISTIK : TASAWUF FALSAFI DI NUSANTARA ABAD XVII M: ANALISIS HISTORIS DAN FILOSOFIS","type":"article-journal"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

merupakan istilah yang popular. Ahmad menunjukkan motivasi para peserta pengajian dalam tasawuf sir ini dikarenakan dua faktor, intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan intrinsik di sini, para peserta mengikuti pengajian secara suka rela karena dorongan yang timbul dari dalam dirinya. Sementara ekstrinsik menunjuk kepada pengaruh orang lain atau komunitas sehingga ia mengikuti pengajian tasawuf sirr ini.

Secara lebih jauh Mujiburrahman[62] mencoba memetakan perkembangan tasawuf di Kalimantan Selatan, ***pertama,*** bahwa kajian tasawuf di Banjar adalah perpaduan antara tasawuf etis dan mistis; ***kedua***, tasawuf di Banjar tidak sepenuhnya ada dalam koridor tasawuf ortodoks. Ketiga kepercayaan akan peristiwa ajaib dapat terjadi pada orang-orang saleh, missal konsep wali; keempat, kondisi social politik di masa tertentu sedikit banyak mempengaruhi perkembangan tasawuf di daerah itu. Dari sini kemudian pengaruh beberapa literatur mengenai wujudiyah seperti yang terdapat dalam naskah Ambulung dan *Durar an-Nafis* (karya Syaeikh Muhammad Nafis) tampak mewakili sisi mistis dalam perkembangan tasawuf di Kalimantan Selatan.

Penutup

Tulisan ini menunjukkan bahwa naskah Ambulung merupakan salah satu naskah yang masih eksis di masyarakat Kalimantan Selatan yang poin ajarannya adalah mengenai faham Wujudiyah. Naskah ini memiliki kemiripan dengan ajaran emanasi Ibnu Arabi dan merupakan kelanjutan dari

[62] Mujiburrahman, "Tasawuf di Masyarakat Banjar : Kesinambungan dan Perubahan Tradisi Keagamaan."

diskursus perdebatan panjang dan polemis hingga pada polemik di nusantara seperti Nuruddin ar-Raniry dan Hamzah Fansuri di Aceh atau bahkan Syekh Siti Jenar dengan Walisongo. Oleh karena itu, di Kalimantan Selatan, kitab ini dikaji oleh komunitas sirr yang para pesertanya adalah para guru tasawuf. Kitab ini tidak diajarkan secara umum karena doktrin-doktrinnnya dapat mengarahkan seseorang untuk meninggalkan syariat dan hanya menekankan pada aspek hakikat. Ajaran yang terkandung dalam naskah ini mengajak masyarakat untuk dinamis berpikir moderat dan tidak kaku dalam memahami suatu perbedaan, baik dalam masalah ideologi, agama, politik ataupun ekonomi.

Penggunaan konsep-konsep yang ditunjukkan dalam *literatur review* ini mampu melihat konstruksi Naskah Ambulung mulai dari sejarah kemunculan hingga penggunaannya pada masa sekarang di masyarakat Kalimantan Selatan. Hal ini yang kemudian membedakan kajian mengenai naskah ini dengan kajian yang telah ada. Hanya saja penelitian ini terbatas pada kajian Naskah Ambulung. Pada dasarnya terdapat kitab lain yang muncul seperti Durar an-Nafis atau menekankan pada bagaimana proses resepsi masyarakat terhadap ajaran Wujudiyah di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Penulis menyarankan adanya penelitian lebih lanjut demi mengekplorasi eksistensi faham wujudiyah di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Afif Anshori, Muhammad. "Kontestasi Tasawuf Sunnî Dan Tasawuf Falsafî Di Nusantara." Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam (2015).

Alam, Muzaffar. "The Debate within: A Sufi Critique of Religious Law, Tasawwuf and Politics in Mughal India." South Asian History and Culture, 2011.

———. "The Mughals, the Sufi Shaikhs and the Formation of the Akbari Dispensation." In Modern Asian Studies, 2009.

Al-Haramain, Elmansyah. "Shifting Orientation in Sufism: Its Development and Doctrine Adjustment in History." Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (2011).

Andarwati, Lilis. "Sufisme Perkotaan Dan Pedesaan Di Era Modernisasi Dan Sekularisasi." Universum (2016).

Anis, Muhammad. "Spiritualitas Di Tengah Modernitas Perkotaan." Jurnal Bayan (2013).

Azra, Azyumardi. "Jaringan Ulama Nusantara." In Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan, 2016.

Barnett, Michael D., Kylie B. Sligar, and Chiachih D.C. Wang. "Religious Affiliation, Religiosity, Gender, and Rape Myth Acceptance: Feminist Theory and Rape Culture." Journal of Interpersonal Violence 33, no. 8 (2018): 1219–1235.

Beaumont, Mark. "Speaking of the Triune God: Christian Defence of the Trinity in the Early Islamic Period." Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies 29, no. 2 (2012): 111–127.

Bertocci, Peter J. "A Sufi Movement in Bangladesh: The Maijbhandari Tariqa and Its Followers." Contributions to Indian Sociology (2006).

Bhat, Samee-Ullah. "Concept of Tawhid (Unity of God) in Islam: A Study of Relevant Qur'anic Text." AGU International Journal of Research in Social Sciences & Humanities (AGUIJRSSH) 2018 (2018).

Chan, Esther. "Are the Religious Suspicious of Science? Investigating Religiosity, Religious Context, and Orientations towards Science." Public Understanding of Science 27, no. 8 (2018): 967–984.

Cook, Abu Bakr Sirajuddin. "Tasawwuf 'Usturaliya Prolegomena to a History of Sufism in Australia." Australian Journal of Islamic Studies (2018).

Dickson, William Rory. "Living Sufism in North America: Between Tradition and Transformation." ProQuest Dissertations and Theses, 2012.

Djakfar, Muhammad. "Business Behavior Of Tariqa Followers In Indonesia: The Relation of Religion, Sufism, and Work Ethic." ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam (2018).

Dreher, Jochen. "The Social Construction of Power: Reflections Beyond Berger/Luckmann and Bourdieu." Cultural Sociology 10, no. 1 (2016): 53–68.

Faiz, Mohd, Hakimi Mat, Mohamad Zaidin Mohamad, Ahmad Fauzi, Ahmad Shaharuddin Tahar, and Azhar Yaacob. "Wasathiyah and Its Implementation among Tasawwuf Scholars in Aceh Wasathiyah and Its Implementation among Tasawwuf Scholars in Aceh" 9, no. 11 (2019): 842–850.

Hasan, Ismail. "Tasawuf Jalan Menuju Tuhan." An-Nuha 1, no. 1 (2014): 45–65.

Hashi, Abdurezak A. "Between Monotheism and Tawhid: A Comparative Analysis." Revelation and Science 3, no. 2 (2013): 23–29.

Hilmi, Danial. "potret Nilai Kesufian Dalam Kehidupan Bermasyarakat." El-Harakah (Terakreditasi) (2012).

Howell, Julia Day. "Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New Sufi Networks." In Sufism and the "Modern" in Islam, 2007.

Huber, Stefan, and Odilo W. Huber. "The Centrality of Religiosity Scale (CRS)." Religions (2012).

Huda, Miftachul, Jibrail Bin Yusuf, Kamarul Azmi Jasmi, and Gamal Nasir Zakaria. "Al-Zarnūjī's Concept of Knowledge ('Ilm)." SAGE Open 6, no. 3 (2016).

Kalin, Ibrahim. "Religion, Unity and Diversity." Philosophy and Social Criticism 37, no. 4 (2011): 471–478.

Kolis, Nur. "Nur Muhammad Dalam Pemikiran Sufistik Datu Abulung Di Kalimantan Selatan." Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman (2012).

Krauss, Steven Eric, Azimi Hamzah, Ismi Arif Ismail, Turiman Suandi, Siti Rabaah Hamzah, Dzuhailmi Dahalan, and Fazilah Idris. "Religious Socialization among Malaysian Muslim Adolescents: A Family Structure Comparison." Review of Religious Research (2012).

Krauss, Steven Eric, Ismi Arif Ismail, Turiman Suandi, Azimi Hamzah, Siti Raba ah Hamzah, Dzuhailmi Dahalan, Nor Farahana Mhd Daud, and Fazilah Idris. "Parenting and Community Engagement Factors as Predictors of Religiosity Among Muslim Adolescents From Malaysia." International Journal for the Psychology of Religion (2013).

Kuhn, Michael. "Allāh: Internalized Relationality: Awwaḍ Sim◎ān on the Trinitarian Nature of God." Transformation 36, no. 3 (2019): 173–183.

Mahzumi, Fikri. "Prinsip Dan Ajaran Tasawuf 'Abd Allâh al-Haddâd." Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam (2015).

Makhasin, Luthfi. "Urban Sufism, Media and Religious Change in Indonesia." Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research (2016).

Malik, Maszlee. "Constructing an Alternative Concept of Islamic Governance: A Maqāṣidic Approach."

Kemanusiaan the Asian Journal of Humanities 26, no. Supplement 1 (2019): 89–108.

Masrur, Ali. "Pemikiran Tasawuf Ortodoks Di Asia Tenggara (Telaah Atas Kontribusi al-Ranirî, al-Singkilî, Dan al-Makasarî)." Syifa al-Qulub (2017).

Mas'ud, Ali. "Ortodoksi Sufisme K.H. Shalih Darat." ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (2014).

Melchert, Christopher. "Origins and Early Sufism." In The Cambridge Companion to Sufism, 2014.

Mitha, Karim. "Sufism and Healing." Journal of Spirituality in Mental Health 21, no. 3 (2019): 194–205.

Mohamed Zain, Mustaffa, Faizah Darus, Haslinda Yusoff, Azlan Amran, Hasan Fauzi, Yadi Purwanto, and Dayang Milianna Abang Naim. "Corporate Ibadah : An Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility." Middle-East Journal (2014).

Mujiburrahman, Mujiburrahman. "Tasawuf Di Masyarakat Banjar : Kesinambungan Dan Perubahan Tradisi Keagamaan." Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 3, no. 2 (2013): 153.

Muttaqin, Ahmad. "From Occultism to Hybrid Sufism: The Transformation of an Islamic-Hybrid Spiritual Group in Contemporary Indonesia." Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (2014).

Nasr, Seyyed Hossein. Islamic Spirituality. Islamic Spirituality, 2013.

Ni'am, Syamsun. "Tasawuf Di Tengah Perubahan Sosial (Studi Tentang Peran Tarekat Dalam Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia)." Harmoni (2016).

van der Noll, Jolanda, Anette Rohmann, and Vassilis Saroglou. "Societal Level of Religiosity and Religious Identity Expression in Europe." Journal of Cross-Cultural Psychology 49, no. 6 (2018): 959–975.

Özdemir, Ömer Behram, and Recep Tayyip Gürler. "Path to Become a State: From Jama'at Al-Tawhid Wal-Jihad to the Islamic State." In Non-State Armed Actors in the Middle East: Geopolitics, Ideology, and Strategy, 2017.

Petts, Richard J. "Parental Religiosity and Youth Religiosity: Variations by Family Structure." Sociology of Religion: A Quarterly Review (2015).

Polat, Mizrap. "Tasawwuf-Oriented Educational Philosophy and Its Relevance to the Formation of Religion and Ethics Course Curriculum." Universal Journal of Educational Research (2017).

Ridgeon, Lloyd. "Mysticism in Medieval Sufism." In The Cambridge Companion to Sufism, 2014.

Rozehnal, Robert. Islamic Sufism Unbound: Politics and Piety in Twenty-First Century Pakistan. Islamic Sufism Unbound: Politics and Piety in Twenty-First Century Pakistan, 2016.

Rozi, Syafwan. "Wacana Sufistik : Tasawuf Falsafi Di Nusantara Abad Xvii M: Analisis Historis Dan

Filosofis." Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies (2017).

Rubaidi, Rubaidi. "Reorientasi Ideologi Urban Sufism Di Indonesia Terhadap Relasi Guru Dan Murid Dalam Tradisi Generik Sufisme Pada Majelis Shalawat Muhammad Di Surabaya." Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam (2016).

Rusdiyanto, Rusdiyanto, and Musafar Musafar. "Ajaran Wujudiyah Menurut Nuruddin Ar-Raniri." Potret Pemikiran (2018).

Salihin. "Pemikiran Tasawuf Hamka Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Modern." Manthiq (2016).

Salleh, Muhammad Syukri. "Philosophical Foundations of Islamic Development: Khurshid Ahmad's Conception Revisited." International Journal of Education and Research 1, no. 7 (2013): 1–16.

Siradj, Said Aqiel. "Tauhid Dalam Perspektif Tasawuf." ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (2014).

Stojković, Irena, and Jovan Mirić. "Construction of a Religious Motivation Questionnaire." Psihologija (2012).

Sutoyo, Sutoyo. "Tasawuf Hamka Dan Rekonstruksi Spiritualitas Manusia Modern." ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (2016).

Werenfels, Isabelle. "Beyond Authoritarian Upgrading: The Re-Emergence of Sufi Orders in Maghrebi Politics." Journal of North African Studies (2014).

Ysseldyk, Renate, Kimberly Matheson, and Hymie Anisman. "Religiosity as Identity: Toward an Understanding of Religion from a Social Identity Perspective." Personality and Social Psychology Review (2010).

Zamhari, Arif. "Socio-Structural Innovations in Indonesia's Urban Sufism: The Case Study of the Majelis Dzikir and Shalawat Nurul Mustafa." Journal of Indonesian Islam (2013).

Zarkasyi, Amal Fathullah. "Aqidah Al-Tauhid Baina al-Tasawwuf al-Sunni Wa al-Tasawwuf al-Falsafi." Tsaqafah (2010).

Zarkasyi, Maimunah. "Pemikiran Tasawuf Muh Arsyad Al-Banjari Dan Pengaruhnya Di Masyarakat Kalimantan Selatan." Islamica: Jurnal Studi Keislaman 3, no. 1 (2014): 76.

Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan

Oleh: Aksin Wijaya

Pendahuluan

Di era digital seperti sekarang ini, masyarakat mendapat suguhan beragam berita, baik berita yang berkaitan dengan ekonomi, politik, moral, budaya maupun berita kekerasan, baik kekerasan wacana seperti memberi label kafir, bid'ah, sesat dan penista agama kepada pihak lain ataupun kekerasan fisik seperti pembakaran tempat-tempat ibadah, aksi pemukulan dan pembunuhan. Sasaran kekerasan yang mengatasnamakan agama dan Tuhan pun melibatkan orang-orang non-muslim atau orang-orang Barat dan orang-orang Islam sendiri yang berbeda keyakinan, aliran, pemikiran, pilihan politik, ideologi, atau kewarganegaraan. Yang menjadi perhatian Penulis adalah mengapa mereka begitu yakin dan merasa absah melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan tanpa merasa salah sedikit pun. Bahkan, mereka yakin tindakannya mendapat dukungan dari Tuhan dengan surga sebagai

jaminannya. Mereka pun berani mati untuk membunuh orang lain melalui bom bunuh diri demi meraih tiket masuk surga Tuhan.

Ada yang berpendapat, mereka melegitimasi tindakan kekerasannya itu dengan mengambil contoh peristiwa peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam melawan kaum Yahudi di Madinah, dan melawan orang-orang kafir Makkah pada peristiwa *fathu* Makkah. Peperangan-peperangan yang sebenarnya bersifat sosiologis dan historis itu dijustifikasi secara teologis sebagai *jihād fi sabīlillah* dan kelak mereka dijanjikan masuk surga ilahi bagi mereka yang mati syahid. Mereka menggunakan al-Qur'an dan hadīṯh nabi sebagai justifikasinya dengan cara memilih ayat-ayat dan hadīṯh tertentu yang bernada "keras" seperti ayat tentang *jihād*, *qitāl*, *nahi mungkar* dan lain sebagainya sembari menafsirinya secara tekstual. Jika misalnya secara lahiriah terdapat pertentangan antara ayat-ayat tertentu, mereka menggunakan teori *nasakh* untuk mengatasinya. Misalnya, menyebut ayat yang berbicara tentang tidak adanya paksaan dalam beragama sudah dinasakh oleh ayat-ayat *qitāl* yang berarti boleh bahkan harus melakukan paksaan dalam beragama.[63]

Menurut hipotesis Penulis, mereka meyakini dan merasa absah melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan lebih disebabkan oleh cara mereka "menalar Islam" dan "nalar keislaman

[63] Jadi, mereka berpendapat bahwa al-Baqarah: 256 dinasakh oleh al-Taubah 73, al-Kahfi:28 dinasakh oleh al-Taubah: 29; dan al-Nahl: 125 dinasakh oleh: al-Taubah: 5. Muhammad Shahrūr, *Tajfif Manāb' al-Irhāb* (Lubāb-Beyrut:Dawār a-Hazimiyah, 2008), 59.

yang mengideologi". Jika "cara menalar Islam" itu sendiri membantu mereka memahami Islam dengan benar, "nalar keislaman yang mengideologi" membuat mereka yakin sebagai satu-satunya cara dalam memahami Islam yang paling benar. Nalar keislaman yang mengideologi itu pada akhirnya menjadi sakral, dan hal itu membuat mereka semakin yakin akan kebenaran pemikirannya sendiri, sembari menolak kebenaran pemikiran pihak yang lain. Seolah, pemikiran keislamannya itu adalah Islam itu sendiri. Seseorang yang tidak sejalan dengan pemikiran keislamannya dinilai tidak sejalan dengan Islam. Serentak dengan itu, dia menilai tindakannya sebagai tindakan yang sakral karena lahir dari pemikiran keislaman sakral yang sudah dianggap sama dengan Islam itu sendiri, termasuk tindakan kekerasan. Bukannya merasa bersalah melakukan tindakan kekerasan. Dia malahan semakin merasa absah, yakin dan wajib melakukan kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik, baik terhadap orang yang berbeda atau tidak sejalan dengan pemikirannya atau mereka yang tidak menjalankan pemikiran keislamannya yang sejalan dengan pemikiran keislaman mereka.

Sejalan dengan latar belakang di atas, tulisan ini bermaksud: *pertama,* menyingkap secara kritis argumen mengapa kelompok-kelompok gerakan Islam tertentu merasa yakin dan absah melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan. *Kedua,* menawarkan gagasan tentang bagaimana sejatinya hidup rukun dan tanpa kekerasan dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Karena itu, akan digunakan teori kritik nalar

Muhammad ’Abid al-Jābiri.[64] Tulisan ini melanjutkan tulisan-tulisan yang sudah ada[65] tetapi dengan fokus bahasan yang lebih spesifik yakni “cara menalar Islam” yang ditawarkan oleh tokoh yang menjadi inspirator dan simbol gerakan-gerakan Islam yang berwajah kaku, intoleran dan keras, sehingga kita mampu menyingkap argumen mengapa mereka begitu yakin dan merasa absah

[64] Al-Jābiri membagi pemikiran menjadi dua kategori:*Pertama,* pemikiran sebagai metode (alat); *kedua,* pemikiran sebagai produk (hasil). Keduanya saling berhubungan. Setiap metode (alat) melahirkan bentuk pemikiran tertentu, sebagaimana setiap produk pemikiran tertentu pasti lahir dari metode tertentu. Jika menggunakan metode kritis, hasil pemikirannya juga pasti bersifat kritis, dan jika menggunakan metode deskriptif, hasil pemikirannya pasti juga bersifat deskriptif. Muhammad ‘Abid Al-Jābiri, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī* (Beyrut: Markaz al-Thaqafi al-‘Arabī, 1991), 11-15.

[65] Ada banyak karya yang membahas masalah kekerasan yang mengatasnamakan agama dan Tuhan dalam dunia Islam tetapi mereka lebih fokus pada gerakan, doktrin dan pengaruhnya. Sebagian di antaranya, ada yang ditulis oleh para pemikir Barat seperti, Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki, (Bandung: Mizan, 2007); ada yang ditulis oleh pemikir Timur Tengah seperti Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, terj. al-Fathri Adlin, (Bandung: Mizan, 2016); Muhammad Sa’id al-Ashmawi, *Ma’ālim fī al-Islām*, (Libanon-Beyrut: al-Intishār al-‘Arabi, 2004); Khaled Abou el Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustafa, (Jakarta: Serambi, 2006); Muhammad Shahrur, *Tajfif Manāb’ al-Irhāb,* (Lubāb:Beyrut:Dawar a-Hazimiyah, 2008); dan Muhammad Shahrur, *al-Dīn wa al-Sulṭah*: *Qirā’ah Mu’āṣirah lī al-Hākimiyyah*, (Libanon-Beyrut: Dār al-Sāqi, 2014); Muhammad Arkoun, *al-Fikr al-Uṣūlī wa Istihālāti al-Ta’ṣīl: Nahwa Tārīkh Ākhār lī al-Fikr al-Islāmi,* cet. ke-2 (Libanon-Beyrut:Dār al-Sāqi, 2002); dan ada yang ditulis oleh para pemikir Indonesia sendiri seperti, Imdatun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,* (Jakarta: ErLangga, 2009); M. Abzar, *Teologi Teroris: Konstruksi Reduksi Integratif Ontologik,* (Yogyakarta:LKiS, 2015); Abid Rohmanu, *Jihad dan Benturan Peradaban*: *Identitas Poskolonial Khaled Medhat Abou el Fadl* (Yogyakarta: Qmedia, 2015)

melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan.[66]

Menyingkap Argumen Agamaisasi Kekerasan Gerakan Islam Modern

Selain peristiwa kelahirannya, *Tahkim* di zaman kepemimpinan Ali bin Abī Ṭālib dalam melawan kubu Muawiyah juga sebagai peristiwa fenomenal yang mempengaruhi perjalanan sejarah Islam belakangan. Dari peristiwa itu bisa dipahami tiga hal:

Pertama, gerakan yang mempolitisasi agama (al-Qur'an) yang dilakukan oleh kubu Muawiyah karena menggunakan al-Qur'an sebagai strategi untuk menghindari kekalahan dalam peperangan melawan kubu Ali bin Abi Ṭalib. *Kedua,* gerakan Islam ekstrem dan keras yang dibungkus dengan klaim kebenaran oleh kubu Khawārij yang terkenal dengan jargonnya *"lā hukma illā lillah"*, (Yusuf: 40 dan 67, al-An'am: 57 dan al-Maidah: 44) yang diikuti dengan tuduhan kafir dan pembunuhan terhadap Ali, Muawiyah serta orang-orang yang bergabung dengan keduanya, karena dinilai berhukum dengan hukum manusia (menerima *tahkīm*) dan tidak berhukum dengan hukum Allah (melanjutkan peperangan). *Ketiga,* gerakan Islam pluralis dan toleran yang menghendaki Islam (al-Qur'an) dilepaskan dari kekerasan

[66] Karya-karya yang menulis tentang masalah ini sebagaimana disinggung di atas dijadikan sebagai sumber sekunder. Sedang sumber primernya adalah karya-karya yang ditulis langsung oleh tokoh yang menjadi ikon gerakan Islam, baik yang berwajah keras dan intoleran seperti Abdullah bin Abdul Wahhab, Abul A'la al-Maududi, Sayyid Qutub, maupun yang berwajah damai, pluralis dan toleran seperti Muhammad Sa'id al-Ashmawi, Hāj Hammad, dan Muhammad Shahrūr. Sumber primer karya-karyanya masing-masing akan disebutkan dalam sub bahasan pemikiran mereka.

dan tarikan politik yang semangatnya diambil dari pernyataan Ali bin Abi Ṭalib dalam menyikapi penggunaan al-Qur'an oleh Khawārij, "Pernyataan itu adalah benar, tetapi digunakan untuk tujuan yang tidak benar". Sepupu Nabi Muhammad ini juga mengatakan, "Janganlah engkau berdebat dengan menggunakan al-Qur'an karena ia mengandung banyak wajah".[67]

Masing-masing gerakan Islam itu mempunyai cermin retaknya sendiri-sendiri, dan dari masing-masing cermin retak itu lahir lagi beragam cermin retak lainnya. Cermin retak dari Khawārij yang ekstrem adalah gerakan Islam Khawārijī-Wahhābī, cermin retak dari Muawiyah yang mempolitisasi agama adalah gerakan Islam islamisme, dan cermin retak dari Ali bin Abi Ṭalib adalah Gerakan Islam pluralis. Nalar keislaman mereka, bertumpu pada unsur-unsur berikut yang semuanya saling berhubungan yakni, metode berfikir, metode menalar Islam, dan konsepnya tentang *al-hākimiyyah* dan *jihād fi sabīlillah*. Dua gerakan yang pertama hampir menempuh naar keislaman yang sama, gerakan yang ketiga sebagai antithesis keduanya.

Sebagaimana disinggung di awal, gerakan Islam Khawārijī-Wahhābī dan Islamisme melakukan kekerasan, baik wacana maupun fisik dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan disebabkan oleh caranya dalam "menalar Islam". Mereka menggunakan metode berfikir dialektis-dikotomis, menawarkan nalar Islam teosentris (*tauhid ulūhiyah)*, memaknai konsep *al-hākimiyyah* secara

[67] Kendati pernyataan ini diragukan kebenarannya oleh Yusuf Qardlowi. Yusuf Qardowi, *Kayfa Nata'ammalu ma'a al-Qur'an?*, cet. ke- 7, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2009), 46-48.

politis dalam bentuk berdirinya pemerintahan Tuhan dan menjadikan *jihād fi sabīlillah* sebagai pijakan gerakan revolusionernya dalam merebut kekuasan politik dari tangan manusia yang disebutnya sebagai *ṭaghut*. Ada dua kategori masyarakat, yakni masyarakat muslim dan kafir. Masyarakat muslim harus mengendalikan masyarakat dengan cara mendirikan pemerintahan Tuhan, dan karena saat ini dunia dikuasai orang-orang kafir, kita wajib merebutnya dengan jalan kekerasan yang disebutnya sebagai *jihad fi sablillah*. Jadi, nalar keislaman seperti ini mengabsahkan dilakukannya kekerasan terhadap kelompok lain dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan, sembari mengumandangkan kalimat takbir "Allahu Akbar" pada saat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap pihak lain.

Nalar keislaman mereka pada gilirannya mengalami ideologisasi. Mereka pun semakin yakin akan kebenaran pemikirannya sendiri sembari menutup pintu bagi hadirnya kebenaran pemikiran di pihak lain.[68] Seolah mereka mengatakan "pemikiran saya benar dan tidak ada kemungkinan salah, sedang pemikiran pihak lain salah dan tidak ada kemungkinan benar". Lebih-lebih ketika pemikiran keislaman yang mengideologi itu mengalami sakralisasi (*taqdīs al-afkār al-islāmī*) dan menyamakannya dengan Islam itu sendiri. Kekerasan pun mereka yakini sebagai tindakan yang sakral yang harus dilakukan oleh

[68] Di antara contoh perubahan pemikiran menjadi ideologi adalah pemikiran Ibnu Rushd. Lihat tulisan saya, terutama bab V. Aksin Wijaya: *Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rushd:Kritik Ideologis-Hermeneutis,* (Yogyakarta: LKiS 2009)

umat Islam sebagai bentuk *nahi mungkar,* bukan malah dihindari. Melakukan kekerasan diyakini menjalankan perintah Islam. Karena itu, nalar keislaman yang diajukan Abdul Wahhab, al-Maududi dan Sayyid Qutub yang menjadi inspirator dan simbol gerakan Khawārijī-Wahhābī dan Islamisme sebagaimana dilansir di atas bisa dikatakan sebagai "nalar agamaisasi kekerasan".

Dari Nalar Teosentris ke Nalar Antroposentris

Agamaisasi kekerasan bisa lahir dari para penganut paradigma Islam teosentris[69] sebagaimana dianut gerakan Khawārijī-Wahhābī dan Islamisme. Untuk menghindari agamaisasi kekerasan, nalar beragama harus diubah lantaran dunia saat ini berbeda dengan dunia masa lalu, begitu juga nalar manusia sekarang berbeda dengan nalar masa lalu. Jika paradigma Islam teosentris menfokuskan Islam pada pembicaraan dan pembelaan terhadap Tuhan, paradigma Islam antroposentris menfokuskan Islam pada pembicaraan yang memusat dan membela manusia. Karena agama (al-Qur'an) yang berasal dari Tuhan diperuntukkan bagi manusia[70] berfungsi memberi petunjuk (*hudan li al-*

[69] Tentang nalar Islam teosentris dan antroposentris dapat dilihat buku saya yang lain. Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang tak Kunjung Usai di Nusantara*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka dan Kemenag RI, 2014); Aksin Wijaya, *Satu Islam, Ragam Epistemologi: dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014); Aksin Wijaya, *Menalar Islam: Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush dalam Memahami Islam,* cet. ke-2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017); dan Aksin Wijaya, "Paradigma Islam Antroposentris: Epistemologi Tafsir Maqashidi", akan disampaikan dalam AICIS ke-17, 2017.

[70] Jalaludin Rahmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*, cet. ke-2 (Jakarta: Serambi, Gema Ilmu dan Hikmah Islam,

nās) pada manusia,[71] maka agama hadir untuk membela manusia[72] bukan untuk membela Tuhan. Karena itu, seluruh persoalan yang dihadapi manusia sejatinya mendapat pembelaan dari Tuhan yang direpresentasikan oleh Islam.

Begitu juga sejatinya kita memaknai ulang konsep *al-hākimiyyah.* Gagasan berdirinya pemerintahan Tuhan—terkadang mereka menyebut Negara Islam dan khilafah Islamiyah—tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lemah dari sisi dalilnya.[73] Al-Qur'an memang membicarakan tentang hubungan antar masyarakat, akan tetapi yang menjadi perhatian al-Qur'an adalah prinsip-prinsip etisnya, bukan bentuk pemerintahannya. Al-Qur'an mengapresiasi bentuk pemerintahan apapun, tetapi tidak menawarkan satu bentuk pemerintahan khusus.[74] Negara Madinah yang

---

2006), 118-138.

[71] Muḥammad 'Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm, al-Mashhūr bi Tafsīr al-Manār*, Juz. 1, cet. ke-2 (Libanon-Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 56-59; Ḥasan 'Abbās, *al-Mufassirūn wa Madārisuhum wa Manāhijuhum* (Aman-Urdun: Dār al-Nafā'is, 2007), hlm. 36-37.

[72] 'Abdul Karīm Soroush, *Arhābu Min al-Ideologiyah,* terj ke bahasa Arab: Aḥmad al-Qabbanjī, (Lubnān-Beyrūt: al-Intishār al-'Arabī, 2014), hlm. 307; 'Abdul Karīm Soroush, *al-Qabḍ wa al-Basṭ fi al-Syarī'ah*, terj. ke bahasa Arab: Aḥmad al-Qabbanjī, (Lubnān-Beyrūt: Dār al-Jadīd, 2002), hlm. 106; 'Abdul Karīm Soroush, *Basṭ al-Tajribah al-Nabawiyyah*, terj. bahasa Arab: Aḥmad al-Qabbanjī, (Lubnān-Beyrūt: Dār al-Jadīd, 2009), 15-51.

[73] Lihat, Aksin Wijaya, "Indonesia Islamic Nation: Examining the Authenticity Argument of Khilafah Islamiyah Law in the Context of Indonesia Islam" dalam Nurkholis dan Imas Maisarah (editor), *Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies IAICIS) XII* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel: 5-8 Nopember 2012); Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 81-129; dan Aksin Wijaya, *Hidup Beragama: Dalam Sorotan UUD 45 dan Piagam Madinah* (STAIN Ponorogo Press, 2009)

[74] Ali Abdur Raziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Hukmi, al-Khilāfah wa al-Hukūmah fi al-Islām*, cet.3, (Kairo: Shirkah Mahimah, 1925)

didirikan oleh Nabi Muhammad tentu saja berbeda dengan bentuk-bentuk negara yang ada selama ini, baik yang ada pada masa pra Islam maupun sesudahnya.[75] Kendati Nabi Muhammad menjadi wakil Tuhan di dunia ini, aturan-aturan yang digunakan di dalam Negara Madinah yang tercermin di dalam Piagam Madinah (*mithāq al-madīnah)* lebih mencerminkan kebersamaan dalam posisinya sebagai masyarakat politik, daripada sebagai representasi teologi Islam misalnya masyarakat Islam. Hal itu bisa dilihat dari dihapusnya kalimat "bismillah…" dan diganti dengan kalimat "ini adalah piagam perjanjian antara Muhammad dengan…." yang terdapat di dalam pengantar Piagam Madinah.

Juga disebutkannya dua istilah *ummah* di dalamnya. Istilah *ummah* pertama yang terdapat pada (pasal 1) secara khusus digunakan untuk mengikat umat Islam yang ada di Madinah yang melibatkan kelompok Muhajirin dan Anshar, sedang istilah *ummah* yang terdapat dalam (pasal 25) lebih mencerminkan pluralisme masyarakat Madinah.[76] Karena itu, Donner menyebut Piagam Madinah sebagai "dokumen ummat"[77] dan bisa diapresiasi ketika dia menyebut Nabi Muhammad lebih mengedepankan terbentuknya "umat beriman" (*al-mukminun*)[78] daripada sibuk mendirikan negara Islam, khilafah islamiyah atau pemerintahan Tuhan

[75] *Ibid*., 81-129.

[76] Aksin Wijaya, *Hidup Beragama: Dalam Sorotan UUD 45 dan Piagam Madinah* (STAIN Ponorogo Press, 2009); Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah* (Bandung: Mizan, 2016), 391-396.

[77] Fred M. Donner, *Muhammad dan Umat Beriman: Asal Usul Islam*, terj. Syafaatun al-Mirzanah, (Jakarta: Gramedia, 2015), 49.

[78] Donner, *Muhammad dan Umat Beriman: Asal Usul Islam*, 63-101.

(*al-hākimiyyah al-ilāhiyah*). Meminjam istilah Jamal al-Banna, "Islam adalah ajaran yang membicarakan persoalan hubungan agama dan ummat, bukan membicarakan persoalan hubungan agama dan negara" (*al-dīn wa al-ummah, laytha al-dīn wa al-dawlah)*.[79]

Begitu juga sejatinya perubahan terjadi pada konsep dan penggunaan *jihād fi sabīlillah*. Gagasan *jihād fi sabīlillah* yang dijadikan pijakan revolusioner untuk merebut pemerintahan manusia dan mengembalikannya pada otoritas Tuhan sebenarnya terkandung pesan bahwa mereka menjadikan kekerasan sebagai bagian dari agama, kendati secara eksplisit mereka menyebutnya dengan tujuan untuk meninggikan dan memuliakan agama Allah (*li i'lā'i kalimāt Allah*). Dengan menggunakan bahasa yang sakral berupa *jihād fi sabīlillah* dan tujuan yang sakral pula, yakni untuk meninggikan agama Allah, mereka merasa absah bahkan wajib melakukan kekerasan. Agama bukan lagi sebagai penebar kedamaian dan pencegah kekerasan (*amar ma'rūf* dan *nahī mungkar* secara bersama-sama). Mereka justru menjadikan kekerasan sebagai bagian dari agama. *Amar ma'rūf* dan *nahī mungkar* tidak lagi berjalan beriringan. *Amar ma'rūf* melalui cara-cara yang damai digantikan oleh *nahī mungkar* melalui cara-cara kekerasan.

Padahal, tidak semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Umat Islam sebagai peperangan agama. Ada peperangan yang bersifat politik, dan ada yang bersifat agama. Ketika Nabi Muhammad memerangi dan mengusir kaum Yahudi di Madinah pun lebih dimotivasi

[79] Muhammad Jamal al-Banna, *al-Islām: Dīn wa Ummatun, wa laytha Dīnan wa Dawlatan* (Kairo: Dār Shurūq,2008)

oleh kepentingan politik karena mereka melakukan penghianatan terhadap Piagam Madinah, bukan karena mereka tidak masuk Islam. Peperangan yang dimotivasi agama di antaranya adalah peperangan yang bertujuan menaklukan Makkah dari kekuasaan orang-orang musyrik yang dikenal dengan istilah *fathu Makkah*.[80] Karena itu, jika gugur dalam peperangan, mereka disebut *shuhada'* baik yang gugur dalam peperangan yang bersifat politik maupun agama. Jadi *shuhada'* bukan hanya gugur dalam peperangan yang dimotivasi agama seperti pada peristiwa *fathu Makkah*, tetapi juga peperangan yang bertujuan untuk mempertahankan Negara Madinah, termasuk pengusiran kaum Yahudi yang mengkhianati perjanjian politik.

Begitu juga, *jihād fi sabīlillah* tidak hanya bermakna berperang demi menegakkan, meninggikan dan memuliakan agama Allah, tetapi juga demi mempertahankan wilayah kekuasaan Negara atau rumah kita dari mereka yang hendak menguasai dan mengusir kita dari Negara kita sendiri. Karena itu, berperang untuk mempertahankan wilayah Madinah dari serangan musuh yang dating dari luar maupun musuh dari dalam bisa masuk ke dalam kategori *jihād* sebagaimana tertuang dengan jelas di dalam Piagam Madinah. Kategori jihād seperti ini disebut *jihād waṭaniyah*. Begitu juga masuk kategori *jihād waṭaniyah*, "resolusi *jihād"* yang dikeluarkan K.H. Hasyim Asy'ari yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari jajahan Negara-negara luar.[81] Karena itu, Negara

[80] Wijaya, *Sejarah Kenabian*, 465-480

[81] Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i: Biarkan Kebenaran yang Yang Hampir Punah Setengah Abad Dikabaurkan Catatan Sejarah itu*

Kesatuan Ripublik Indonesia (NKRI) yang merupakan hasil kesepakatan seluruh konfigurasi warganegara Indonesia dengan Pancasila sebagai basis ideologi Negara, yang bermottokan Bhinnika Tunggal Ika harus dipertahankan dari serangan Negara luar atau kelompok tertentu yang hendak menguasai dan menggantinya dengan ideologi lain, baik komunisme yang diusung PKI maupun khilafah Islamiyah atau pemerintahan Tuhan yang diusung oleh gerakan Islam Khawārijī-Wahhabi dan Islamisme, baik Ikhwan al-Muslimin maupun HTI. Sementara itu, para akademisi diharapkan menawarkan pemikiran keagamaan yang lebih humanis dan mengarah pada pembelaan terhadap hak asasi manusia, salah satunya adalah nalar Islam antroposentris yang dipadukan dengan paradigma kebangsaan etis-humanis sebagai metode dan strategi menjinakkan kekerasan agama dan budaya yang banyak terjadi di Indonesia.

Dari sini, kita beralih, dari nalar agamisasi kekerasan yang biasanya lahir dari paradigma Islam teosentris ke nalar agamaisasi kedamaian yang lahir dari paradigma Islam antroposentris. Agama hadir untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan manusia. Islam tidak bisa disebut agama jika ia tidak mengajarkan dan membawa kedamaian. Kedamaian sejatinya menjadi nalar, menjadi strategi dan aksi nyata dakwah Islam. Sebab, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang mengajarkan persaudaraan[82] dan saling berbuat baik (al-Hujurat:13) di antara umat manusia, saling mengasihi,

Terbongkar (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 74-81.

[82] Sālim, *Muhammad Nabiyyu al-Insāniyah*, 97-11

bukan mengajarkan berkonflik dan menggunakan cara-cara kekerasan. Di dalam peperangan (kekerasan) yang diizinkan pun dilarang untuk berlebihan dalam melakukan kekerasan (al-Baqarah:190).[83]

Penutup

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan, Islam mengajarkan kedamaian, dan menolak kekerasan apapun bentuknya. Kekerasan yang dibawa oleh para pemikir khawariji-wahhabi dan Islamisme disebabkan oleh nalar keislaman mereka yang teosentris, dan karena itu perlu ditawarkan nalar keislaman yang menawarkan kedamaian, yakni nalar Islam antroposentris yang bertumpu pada hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

'Abbās, Ḥasan, *al-Mufassirūn wa Madārisuhum wa Manāhijuhum*. Aman-Urdun: Dār al-Nafā'is, 2007.

'Abduh, Muḥammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm, al-Mashhūr bi Tafsīr al-Manār*, Juz. 1, cet. ke-2. Libanon-Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Abdurazik, Ali, *Islam wa Ushul al-Hukmi, Bakhtun fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, cet-3. Kairo: Mathba'ah Mishrah, Syirkah Sahimah, 1925.

[83] Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi bukan Membenci* (Bandung:Mizan, 2017).

Abzar, M., *Teologi Teroris: Konstruksi Reduksi Integratif Ontologik.* Yogyakarta:LKiS, 2015.

Arkoun, Muhammad, *al-Fīkr al-Uṣūlī wa Istihālāti al-Ta'ṣīl: Nahwa Tārīkh Ākhār lī al-Fīkr al-Islāmi*, cet. ke-2. Libanon-Beyrut:Dār al-Sāqi, 2002.

al-Ashmawi, Muhammad Sa'id, *Ma'ālim fi al-Islām*. Libanon-Beyrut: al-Intishār al-'Arabi, 2004.

al-Banna, Muhammad Jamal, *al-Islām: Dīn wa Ummatun, wa laytha Dīnan wa Dawlatan.* Kairo: Dār Shurūq, 2008.

Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki. Bandung: Mizan, 2007.

el Fadl, Khaled Abou, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustafa. Jakarta: Serambi, 2006.

Al-Jābiri, Muhammad 'Abid, *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*. Beyrut: Markaz al-Thaqafi al-'Arabī, 1991.

Maarif, Nurul H. , *Islam Mengasihi bukan Membenci.* Bandung:Mizan, 2017.

Qardowi, Yusuf, *Kayfa Nata'ammalu ma'a al-Qur'an?*, cet. ke-7. Kairo: Dār al-Shurūq, 2009.

Rahmat, Jalaludin, *Islam dan Pluralisme: Akhlak al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*, cet. ke-2. Jakarta: Serambi, Gema Ilmu dan Hikmah Islam, 2006.

Rahmat, Imdatun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia.* Jakarta: ErLangga, 2009.

Rohmanu, Abid, *Jihad dan Benturan Peradaban*: *Identitas Poskolonial Khaled Medhat Abou el Fadl*. Yogyakarta: Qmedia, 2015.

Shahrur, Muhammad, *Tajfif Manāb' al-Irhāb.* Lubāb:Beyrut:Dawar a-Hazimiyah, 2008.

_____, *al-Dīn wa al-Sulṭah*: *Qirā'ah Mu'āṣirah lī al-Hākimiyyah*. Libanon-Beyrut: Dār al-Sāqi, 2014.

Soroush, 'Abdul Karim, *Basṭ al-Tajribah al-Nabawiyyah*, terj. bahasa Arab: Aḥmad al-Qabbanjī. Lubnān-Beyrūt: Dār al-Jadīd, 2009.

____, *al-Qabḍ wa al-Basṭ fi al-Syarī'ah*, terj. ke bahasa Arab: Aḥ mad al-Qabbanjī. Lubnān-Beyrūt: Dār al-Jadīd, 2002.

_____, *Arhābu Min al-Ideologiyah,* terj ke bahasa Arab: Aḥ mad al-Qabbanjī. Lubnān-Beyrūt: al-Intishār al-'Arabī, 2014.

_____, *al-Turath wa al-Ilmāniyah: al-Bun-ya, wa al-Murtakizāt,al-Khalfiyyāt wa al-Mu'thiyāt,* terj. bahasa Arab: Aḥmad al-Qabbanji. Baghdād/Lubnān-Beyrūt: Manshūrāt al-Jumal, 2009.

_____, *al-Siyāsah wa al-Tadayyun, al-'Aqlu wa al-Hurriyah*; *al-Dīn al-'Almānī*, terj. ke bahasa Arab, Aḥmad al-Qabbanjī. Lubnān- Beyrūt: al-Intishār al-'Arabī, 2009.

Tibi, Bassam, *Islam dan Islamisme*, terj. al-Fathri Adlin. Bandung: Mizan, 2016.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*. Jakarta: the Wahid Institute, 2006.

_____, *Islam Kosmopolitan*: *Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: the Wahid Institute, 2007.

_____, (editor) *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia.* Jakarta: the Wahid Institute, 2009.

Wijaya, Aksin, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Pergumulan Islam yang tak Kunjung Usai di Nusantara,* cet. ke-2. Yogyakarta: Nadi Pustaka dan Kemenag RI, 2012.

_____, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

_____, *Teori Interpretasi Al-Qur'an Ibnu Rusyd: Kritik Hermeneutis-Ideologis*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

_____, "Indonesia Islamic Nation: Examining the Authenticity Argument of Khilafah Islamiyah Law in the Context of Indonesia Islam" dalam Nurkholis dan Imas Maisarah (editor), *Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies IAICIS) XII.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel: 5-8 Nopember 2012.

_____, *Hidup Beragama: Dalam Sorotan UUD 45 dan Piagam Madinah*. STAIN Ponorogo Press, 2009.

_____*Menalar Islam: Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush dalam Memahami Islam,* cet. ke-2. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017.

_____, *Nalar Kritis Epistemologi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2014.

_____, *Hidup Beragama: Dalam Sorotan UUD 45 dan Piagam Madinah*. STAIN Ponorogo Press, 2009.

_____*Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Bandung: Mizan, 2016.

Bagian II

Sistem Ekonomi dalam Perspektif Islam

Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi

Oleh: Iza Hanifuddin

Pendahuluan

Kajian tentang penalti dan kompensasi atau denda dan ganti rugi dalam ekonomi syariah biasanya hanya tertumpang pada tema besarnya, misalnya *ijârah* dan *murâbahah.* Tema ini begitu marak dibahas dalam semua tema ekonomi syariah, bahkan menjadi tema utama yang membentuk *icon* batang tubuh ekonomi syariah itu sendiri. Namun, justru sangat disayangkan ketika kajian yang begitu marak tersebut ternyata hanya sekilas saja menyinggung kajian tentang kompensasi dan penalti yang menjadi isu turunannya. Akibatnya, tema *ijârah* dan *murâbahah* dianggap selesai secara fiqh, tetapi isu turunannya ini bisa dipastikan belum selesai pengkajiannya secara fiqh. Sedikit orang yang mengenal isu denda dan ganti rugi dalam bahasa fiqh. Bahkan, nyaris tidak ada buku yang secara tuntas membahas persoalan ini. Hal ini justru disebabkan salah satunya banyak buku ilmiah atau buku *daras* yang

secara umum membahas tema besarnya, yaitu *qard*, *dayn, ijârah,* dan *murâbahah* yang sememangnya tertuang dalam berbagai silabus perkuliahan. Oleh karena itu, penting di sini untuk dilakukan penulisan buku daras yang secara spesifik membahas isu turunan dari apa yang tertuang dalam silabus terkait *ijârah* dan *murâbahah* tersebut, yaitu *fiqh ta'wîd* dan *gharâmah.*

Mata kuliah yang relevan dengan buku ajar ini ialah mata kuliah Fiqh Muamalah, baik klasik maupun kontemporer yang secara khusus dalam silabusnya membahas tema *qard* dan *dayn*, termasuk *ijârah* yang di dalamnya isu denda dan ganti rugi, serta upah dan kompensasi menjadi pembahasan utama, tema *murâbahah* yang di dalamnya isu denda keterlambatan pembayaran cicilan *murâbahah* juga menjadi pembahasan utama yang selalu mendatangkan perdebatan problematik. Sementara itu, kedua tema tersebut akan terus-menerus dikaji dan dibahas dalam berbagai mata kuliah lain karena ia menjadi *core* kajian dalam program studi, khususnya Ekonomi Syariah, dan secara umumnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahkan Fakultas Syariah pada Program Studi Muamalah. Menuangkan tema tersebut ke dalam sebuah buku ajar agaknya menjadi keniscayaan dalam rangka mengantisipasi keterlambatan hadirnya buku ilmiah yang terkait dengan isu tersebut dari para pakar yang kompeten.

Buku ajar ialah *lecture notes* atau di lingkungan perguruan tinggi keagamaan disebut dengan buku *daras.* Istilah lain menyebut buku ajar sebagai sumber pembelajaran sebagaimana disebut oleh Pasal 9 Peraturan

Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Selain itu, Panduan Pengajuan Usul Program Hibah Penulisan Buku Teks Perguruan Tinggi Tahun 2015 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti menyebut buku ajar dengan istilah buku teks. Buku ajar atau buku *daras* merupakan bagian kelengkapan atau sarana bermisikan penghantar materi dalam pembelajaran yang bercirikan ruang lingkup yang sesuai dengan kurikulum dan silabus dengan format tata letak dan sistematika.[84]

Secara umum, buku ajar ditulis layaknya buku ilmiah lainnya, hanya saja konten pembahasan buku ajar lebih mengarah untuk materi pembelajaran. Format tata letak semestinya mengacu pada pedoman penulisan buku ajar di perguruan tinggi tempat buku ajar hendak digunakan. Jika pedoman tersebut belum ada, maka berbagai pedoman tentang hal tersebut bisa digunakan dengan berbagai pertimbangan. Secara umum, sistematika penulisan buku ajar terdiri dari bagian depan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian depan terdiri dari cover luar dan dalam, pengesahan, prakata, daftar isi. Bagian isi terdiri dari beberapa bab menyesuaikan silabus atau salah satu konten silabus sebagai upaya pendalaman materi dan penguatan referensi. Cara terakhir ini menuntut agar semua konten silabus diperlakukan sama, yaitu mesti dibuatkan buku ajarnya pada masa-masa berikutnya. Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan buku daras yang

[84] LKPP-Unhas, *Format Bahan Ajar, Buku Ajar, Modul, dan Panduan Praktik* (Makassar: LKPP-Unhas, 2015), 1-3.

berisi simpulan penutup berupa umpan balik dan daftar pustaka.[85]

Sistematika Penulisan buku ajar pada bagian isi tersusun dalam bab-bab di mana pada Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Tujuan Pembelajaran, dan Peta Konsep, Bab II dan seterusnya berisi konten materi dengan susunan: Standar Kompetensi, Uraian Materi, Rangkuman, Referensi, Latihan, dan Daftar Istilah. Penulisan sistematika dengan cara ini dilakukan dengan menyesuaikan pada jumlah pertemuan pada silabus yang dijadikan acuan. Namun, jika penulisan materi diambil dari salah satu bagian atau bab dalam silabus, maka cara yang serupa bisa dilakukan dengan lebih fleksibel demi sebuah usaha pengayaan materi dan pengembangan referensi.[86] Dalam buku daras ini, Penulis tidak murni menerapkan sistematika di atas, tetapi lebih fokus pada penulisan materi dengan fokus usaha pengayaan konten dan tidak menggunakan pendekatan pembelajaran. Pada tataran ini diserahkan sepenuhnya pada pengajar saat proses pembelajaran berlangsung.

Sebagai basis awal teoretik tentang tema di atas bisa diketengahkan bahwa wajar jika perusahaan, perbankan atau pegadaian misalnya, menerapkan kedisiplinan pada karyawan atau nasabahnya. Pemberian kompensasi atas prestasi dan penalti atas wanprestasi dianggap sebagai salah satu cara pendisiplinan tersebut dalam bentuk *reward* dan *punishment*. Kompensasi biasa diukur berdasarkan

[85] LKPP-Unhas, *Format Bahan Ajar*, 1-3.

[86] Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, *Pedoman Umum Penulisan Buku Daras* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 18-20.

tingkat pendidikan, keterampilan, prestasi kerja, dan ia juga menjadi elemen bagi kepuasan pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan kompensasi menjadi hal yang paling utama jika didasarkan pada acuan tersebut. Ketika keadilan kompensasi dan penalti tidak ada, ketidakpuasan, pergeseran pekerja, dan meningkatnya absen, bahkan berujung pada meningkatnya stres di kalangan pekerja dan nasabah itu pun akan terjadi. Keadilan bukan dari jumlah banyaknya kompensasi atau penalti, tetapi ketidakadilanlah yang justru akan membawa malapetaka pada perusahaan atau karyawan itu sendiri. Keadilan merupakan jantung dari kompensasi. Kompensasi yang tidak adil juga bisa menghantarkan kecemburuan di kalangan karyawan.[87]

Senada dengan itu, penalti merupakan hukuman dalam bentuk pembayaran atau pemotongan sejumlah uang disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan, undang-undang, dan sebagainya sebagai bentuk denda. Denda yang dikenali oleh masyarakat luas ialah denda karena pelanggaran peraturan, misalnya denda tilang (bukti pelanggaran) lalu lintas. Selain itu, denda pelanggaran undang-undang juga sering didengar melalui berbagai pemberitaan tentang putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi. Denda pada kedua pelanggaran ini lebih menjurus pada persoalan perkara pidana.[88] Dalam perkara perdata, denda juga berlaku di dalam hukum sipil meskipun relatif kurang begitu dipopulerkan oleh dunia

[87] Suhartini, "Keadilan dalam Pemberian Kompensasi", *Jurnal Siasat Bisnis*, ISSN 0853-7665, Edisi Khusus JSB on Human Resources, 2005, 103-104; R.N. Kanungo dan M. Menconca, *Compensation: Effective Reward Management* (Kanada: Butterworths, 1992), 25-30.

[88] Pidana bisa berbentuk pelanggaran dan kriminal.

hukum dan cuitan berita. Bagaimanapun, ia memiliki jangkauan isu yang lebih merata di kalangan masyarakat. Denda tersebut ialah denda dalam bidang ekonomi.[89] Kemerataan isu ini disebabkan oleh dominasi transaksi ekonomi masyarakat umum lebih banyak berbasis pada hutang. Meskipun di permukaan nampak adanya transaksi jual beli atau permodalan, tapi basis utama yang mampu dijalankan oleh masyarakat hakikatnya tetap saja tentang hutang. Keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran hutang memastikan diterapkannya denda tersebut. Berbagai obrolan dan keluhan kekecewaan akibat denda yang menimpa sering didengar dalam berbagai kesempatan dan tempat.

Lembaga perbankan syariah yang menerapkan prinsip jual beli di dalam transaksi pembiayaannya memang menerapkan sistem *murâbahah*, yaitu jual beli dengan marjin keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh bank dan nasabah pembiayaan. Namun, karena pembayaran yang berlaku sering menggunakan sistem angsuran atau cicilan, maka bank syariah pun tidak bisa melepaskan diri dari praktik denda ini. Kekecewaan nasabah pembiayaan yang terkena denda keterlambatan pun mengeluh dengan cara yang sama sebagaimana umum berlaku pada bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya.

[89] Kasus ekonomi dikategorikan sebagai perkara perdata di dalam hukum. Kasus ini relatif sedikit yang masuk ke meja pengadilan. Jalan mediasi merupakan amanat undang-undang dan perintah hakim untuk ditempuh terlebih dahulu. Dalam konteks ekonomi syariah pun terjadi hal yang serupa. Sangat sulit mendapatkan kasus baru tentang ekonomi syariah pada berbagai pengadilan agama. Jika ada kasus baru, buru-buru para akademisi dan Penulis segera melacaknya untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Persoalannya, nasabah pembiayaan syariah menumpahkan kekecewaan dengan mempertanyakan mengapa syariah mesti menerapkan prinsip, pola, dan besaran denda serupa dengan konvensional. Keadilan di dalam masalah denda pun menjadi isu yang dipersoalkan oleh para nasabah secara terpisah dengan keadilan kompensasi yang dituntut oleh para karyawan.

Di dalam perbankan konvensional kompensasi dan denda menjadi hal yang secara umum biasa diterapkan dengan sistematika dan standar acuan yang selama ini ada. Denda bagi bank ini merupakan kategori *risk based pricing*. Sebagian lagi ada yang menggunakan istilah *risk informed pricing.* Masalahnya, hal ini menjadi sesuatu yang perlu dipersoalkan ketika ia diterapkan dalam kebijakan perbankan syariah. ***Pertama***, identitas syariah memastikan semua risiko bank harus dieliminir. ***Kedua***, denda menjadi pemasukan yang pelik problematik pada masyarakat yang masih awam tentang perbankan syariah. ***Ketiga***, penanganan risiko berbasis denda uang merupakan model yang biasa diterapkan pada perbankan konvensional yang berbasis hutang dan riba. ***Keempat***, transparansi penggunaan uang hasil denda masih menjadi hal yang dipertanyakan. Acuan dan kompensasi pun tidak jauh berbeda penerapan prinsipilnya dengan denda pada perbankan syariah. Selain karena keadilan kompensasi dan denda perlu menjadi sebuah alternatif tujuan.

Dari berbagai data lapangan dan fenomena perbankan atau pegadaian syariah didapati bahwa denda dibolehkan asal bukan untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan

bagi kedua perusahaan, tetapi untuk kepentingan sosial dan bukan pula sebagai penambah kompensasi bagi karyawan perusahaan itu sendiri. Data dan fenomena ini mesti ditindaklanjuti lebih detil melalui penelitian ini, apakah secara praktik hal ini memang terjadi secara demikian, secara jumlah nominal kompenasi dan penalti tidak membebani perusahaan dan nasabah, secara prestasi, wanprestasi, dan total pembebanan keuangan cukup memberi keadilan yang memenuhi standar kepatutan. Penelitian lebih serius perlu dilakukan guna mendudukkannya pada porsi dan standarisasi kesyariahan perbankan syariah itu sendiri.

Di dalam *fiqh* terdapat banyak istilah yang perlu digali secara sempurna bersumberkan berbagai kitab klasik, yaitu konsep tentang denda dan ganti rugi yang terramu dari perkataan *ta'wîd*, *daman*, *dam*, *diyât*, *gharâmah*, dan sebagainya yang selama ini belum disusun rapi dalam sebuah kajian atau sebuah buku khusus dan spesifik tentang itu. Penulis mencoba menyusun semua itu dalam suatu konsep sistematis berdasarkan berbagai referensi dan menghidangkannya sebagai sajian konseptual yang utuh dan komprehensif dalam format buku daras dengan sedikit dibumbui fenomena praktis di mana secara formal sudah ada regulasi dan norma tentang denda, misalnya denda bagi orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang.[90]

[90] Hadis penundaan hutang zalim, dan hadis tentang boleh denda. Hadis ini hanya menegaskan pada yang mampu membayar, pada yang tidak mampu membayar (*force major*) tentu tidak boleh dikenakan denda. Sanksi denda bagi orang mampu terkategorikan hukuman *ta'zîr* dalam rangka mendisiplinkan pelaku dalam melaksanakan kewajiban.

Denda ini pun disahkan oleh AAOIFI[91] dan juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000.[92]

Macam-Macam dan Pengelompokan Ganti Rugi

Agus Yudha Hernoko membagi ganti rugi menjadi dua macam, yaitu ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti ialah ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya objek atau capaian prestasi (wanprestasi) atas akad atau perjanjian yang seharusnya menjadi hak yang mesti diterima oleh pihak yang dirugikan, meliputi seluruh kerugian yang diderita akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang lain. Ganti rugi pelengkap ialah ganti rugi yang harus dibayar akibat keterlambatan (pembayaran, cicilan) kepada pihak yang dirugikan sebagaimana mestinya.[93] Dilihat dari objek perbuatan yang dikenai ganti rugi, maka macam ganti rugi bisa muncul dari: 1. Pelanggaran norma; 2. Wanprestasi atas perikatan yang bersumberkan perjanjian; dan 3. Perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumberkan undang-undang.[94] Ganti rugi bisa dibebankan kepada perseorangan, misalnya karena kelalaian penyewa telah merusak objek

---

[91] AAOIFI (*Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institution*).

[92] Fatwa ini tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, tertanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000 M yang ditandatangani oleh KH. M. A. Sahal Mahfudh dan Dr. H. M. Din Syamsuddin.

[93] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Kencana, 2010), 264.

[94] Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi* Volume 16, Nomor 14, 2010, 49.

sewa.[95] Ganti rugi juga bisa diterapkan ke negara, misalnya pengambilan tanah *bengkok* desa oleh kementerian terkait untuk kepentingan umum.[96]

Sementara itu, tanggung jawab ganti rugi dalam hukum perdata Islam dibagi menjadi dua macam, yakni tanggung jawab ganti rugi karena akad (*al-mas'ûliyah al-ta'aqqudiyah*) dan tanggung jawab ganti rugi karena teledor (*al-mas'ûliyah al-taqsîriyah*). Contoh tanggung jawab ganti rugi karena menyalahi akad, misalnya penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya, penyewa tidak mau menyerahkan barang sewaannya dan contoh tanggung jawab ganti rugi karena teledor atau ceroboh adalah ketika salah satu pihak menyalahi aturan sehingga terjadi hilangnya barang atau kerusakan benda karena kelalaian tersebut.[97]

Dalam penjelasan lain, ganti rugi jika dilihat dari jenis pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 1. Ganti rugi pidana, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana (*jinâyah*) dengan sanksi *qisâs* atau *diyât;* 2. Ganti rugi perdata, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata (*mu'âmalah*). Ganti rugi jika dilihat dari

---

[95] Sunan Autad Sarjana dan Iza Hanifuddin, "*Ijârah Muntahiyah bi al-Tamlîk:* Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas* (Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2018), Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, 9.

[96] Iza Hanifuddin, "*Waqf al-Irsâd:* Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah "Bengkok" sebagai suatu Fenomena Wakaf Negara", *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas* (Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2019), Volume 4, Nomor 1, Juni 2019, 24.

[97] Ibnu Syahru, "Implementasi Ganti Rugi (*Ta'wid*) dalam Hukum Perdata", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2, November 2010, 140.

bentuk kerugianya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. *al-darar al-adabî* atau ganti rugi bukan berupa harta; 2. *al-darar al-mâddî* atau ganti rugi berupa harta. Ganti rugi dilihat dari pola pengaturanya di dalam KUH Perdata juga ada dua, yaitu: 1. Ganti rugi umum, yaitu ganti rugi yang berlaku pada semua kasus, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum; 2. Ganti rugi khusus, yaitu kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu saja yang bersifat khusus.[98]

Konsep Umum Tentang Ganti Rugi

Gagasan tentang permintaan ganti rugi oleh korban pidana dan perdata sudah sejak awal dinyatakan oleh nash al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh tentang ganti rugi, baik dari *daman, ta'wîd*, dan *gharâmah*. Mesti diakui diakui sejak awal bahwa para fuqaha tidak menggunakan bahasa *mas'ûliyah madaniyah* untuk menerjemahkan istilah tanggung jawab perdata dan *mas'ûliyah al-jinâ'iyyah* untuk istilah tanggung jawab pidana. Namun demikian, sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qarâfî dan Izz al-Dîn Ibn 'Abd al-Salâm memperkenalkan istilah *al-jawâbir* untuk sebutan ganti rugi perdata dan *al-jawâzir* untuk sebutan ganti rugi pidana.[99]

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dengan

[98] Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), 19-21.

[99] A.Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktoret Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

ketentuan Pasal 36 bahwa ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya, seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada perbuatan ingkar janji ini, di dalam Pasal 3 pelakunya bisa dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara.[100]

Ganti Rugi dalam Konsep Ta'wîd

Dalam fiqh kontemporer ganti rugi atau kompensasi disebut dengan istilah التعويض (*al-Ta'wîd*). *Ta'wîd* adalah mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau dengan sesuatu yang sama nilainya.[101] Perkataan *al-Ta'wîd* berasal dari *'iwad* yang artinya ganti atau kompensasi.[102] *Ta'wîd* secara bahasa berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran.[103] Menurut Wahbah al-Zuhaylî, *ta'wîd* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau

[100] Lihat, Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12-20; Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), cet. 2, 22-23.

[101] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

[102] Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 522.

[103] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 635; Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1332.

kekeliruan.[104] *Ta'wîd* ialah ganti rugi atau sesuatu yang ditukar atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang hilang atau tidak ada, sedangkan rugi berarti sesuatu yang dijual di bawah modal sehingga tidak mendapatkan laba.[105]

Istilah yang sepadan dengan *ta'wîɁ* ialan *daman,* yaitu mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis jika *al-Mithliyât* (barang pasaran) atau dengan sesuatu yang sama nilainya jika *al-Qimmiyyât* (barang langka).[106] Ganti rugi juga merupakan hukuman yang bisa diputuskan oleh hakim pada perbuatan dengan ancaman hukum *ta'zîr* dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.[107] Dalam konteks transaksi hutang atau kredit, *ta'wîd* ialah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan kepada pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.[108]

Ta'wîd di era ekonomi kontemporer diartikan sebagai ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi hanya kerugian

---

[104] Wahbah al-Zuhaylî*, Nazariyah al-Damân* (Damsiq: Dâr al-Fikr, 1998), 87; Lihat pula Fatwa DSN-MUI No; 43/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Ganti Rugi (*Ta'wîd*); Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 156.

[105] Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Difa Publisher, 2008), cet. 3, 71.

[106] Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 15.

[107] Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis*, 156.

[108] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 230; Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 635.

riil yang di alami oleh lembaga keuangan syariah dan jelas perhitungannya.[109] *Ta'wîd* menurut *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/MUI/VIII/2004* tentang *Ta'wîd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.[110]

Di dalam fatwa di atas dan berbagai analisis pakar disebukan bahwa:

1. Ganti rugi (*ta'wîꜜ*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wîꜜ* ialah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil ialah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fursah al-dâi'ah*).

---

[109] Anissa Cantika, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di PT Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram* (Mataram: UIN Mataram, 2018), 51.

[110] Nadia Ananda Elsanti, "Penerapan Ta'widh pada Pemegang Syariah Card", *Thesis Magister* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), 148.

5. Ganti rugi (*ta'wîḍ*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), contoh *salam*, *istisnâ'*, *murâbahah* dan *ijârah*.
6. Pada akad *mudârabah* dan *mushârakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *sahib al-mâl* atau satu pihak dalam *mushârakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.[111]
7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayaranya tergantung kesepakatan para pihak.
9. Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam akad.
10. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. [112]

Ta'wîd yang dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, bisa diwujudkan berupa

[111] Nining Herawati, "Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Disertasi Doktor* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 51.

[112] Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2005), 225; Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis*, 154-156; Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 224; Wahhah al-Zuhaylî, *Nazariyah al-Daman* (Damsiq: Dâr al-Fikr, 1998), 87; Nining Herawati, "Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Disertasi Doktor* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 51.

benda atau dapat berupa uang tunai.[113] Dalam penjelasan lain, ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi bisa berupa: 1. Menutup kerugian dalam bentuk benda. 2. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau dengan uang. 3. Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.[114]

Di dalam prinsip kaidah fiqh, kerugian itu harus dihindari, maka sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian, maka pertimbangan berikut menjadi penting, misalnya: "Jika debitur bermaksud melakukan perjalanan atau jika kreditur bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, maka perlu diperhatikan hal berikut: Apabila jatuh tempo utang sebelum masa kedatangan dari perjalanan, maka kreditur boleh melarangnya untuk melakukan perjalanan karena kreditur akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Tapi, jika debitur menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh mengizinkan perjalanan tersebut karena kerugian kreditur dapat dihindarkan". Demikian, intisari

[113] Khoiro Aulit Taufiqo, *Analisis Pengelolaan Data Ta'wid Di BNI Syariah Kota Semarang* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 13.
[114] Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis*, 155-157.

dari pemikiran yang dikutip dari Ibn Qudâmah dalam *al-Mughnî*-nya.[115]

Menurut pendapat *'Abd al-Hamîd Muhammad al- Ba'lî* ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu mesti diukur berdasarkan pada kerugian riil yang terjadi akibat penundaaan pembayaran itu. Hal ini merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.[116] Sementara itu, *Wahbah al-Zuhaylî* menegaskan bahwa *ta'wîd* (ganti rugi) mesti diterapkan demi menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.[117] 'Isâm Anas al-Zaftawî mengatakan bahwa kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah. Kerugian tidak akan hilang kecuali dengan ganti, karena penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.[118] Penundaan pembayaran sama dengan perbuatan meng-*ghasab* hak. Oleh karena itu, seyogyanya kedudukan hukumnya juga mesti sama, yaitu pelaku *ghasab* harus menanggung harga dan nilai barang tersebut.[119]

Ganti Rugi dalam Konsep Gharâmah

Istilah lain yang digunakan untuk denda ialah الغرامة (*al-Gharâmah*) yang secara bahasa berarti denda itu sendiri.[120]

---

[115] Herawati, *Analisis Ta'widh*, 53.
[116] Ibid., 55.
[117] Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 36.
[118] Saputra, *Analisis Pengelolaan*, 36.
[119] Ibid.
[120] Adib Bisri, dkk., Al-Bisri, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressive, 1999), 60.

Gharâmah juga berarti tiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang menyebabkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.[121] Penggantian kerugian tersebut bisa berupa materi atau benda yang harus dibayarkan oleh pelanggarnya, atau membayar harta sebagai sanksi atas perbuatanya.[122]

Secara bahasa, *gharâmah* berarti denda, sedangkan denda dalam bahasa Indonesia mempunyai arti: 1. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa keharusan membayar sejumlah uang dan atau hukuman kurungan. 2. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Jika tidak mau membayar, maka pilihan akan jatuh ke hukuman kurungan.[123] Biasanya, sesuatu yang ditunaikan itu menjadi hutang ketika belum direalisasikan. Oleh karena itu, dari kata *gharâmah* muncul istilah *ghuram* dan *ghârim* yang artinya hutang dan orang yang banyak hutang.[124]

Gharâmah ini mesti ditetapkan oleh syarak dan direalisasikan melalui putusan hakim. Contoh, denda pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya ialah seharga dua kali harga buah tersebut atau hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan pencurian.[125] Denda

[121] Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 12.

[122] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 82.

[123] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

[124] Abû al-Ma'âlî Burhân al-Dîn Mahmûd bin Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin 'Umar bin Mâzah al-Bukhârî al-Hanafî, *al-Muhît al-Burhânî fî al-Fiqh al-Nu'mânî,* Juz 8 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 53.

[125] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penerjemah: Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457.

gharâmah ini sering digunakan oleh Fiqh Muamalah untuk konteks ekonomi yang secara bahasa menjadi sesuatu yang harus ditunaikan.[126] Contoh, dalam sebuah akad *ijârah* (sewa menyewa), bank selaku pihak yang menyewakan tidak seharusnya meminta ganti rugi dari penyewa. Tapi, ketika kerugian atau kerusakan yang timbul itu disebabkan oleh penggunaan dan pengoperasian aset oleh pelanggan, maka wajar dan masuk akal jika bank meminta ganti rugi dari pelanggan tersebut.[127]

Gharâmah ini merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zîr*. *Ta'zîr* menurut bahasa adalah *ta'dîb*, artinya pemberian pelajaran (*lesson learn*) yang dilakukan oleh penguasa.[128] *Ta'zîr* juga diartikan dengan penghinaan (*taubîkh*) atau penjeraan (*al-zajr*), baik berbentuk bentakan, pukulan, cambukan, pemenjaraan, dan lainnya berdasar putusan hakim.[129] *Gharâmah* juga diterjemahkan dengan ganti rugi, yaitu hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zîr.* Caranya adalah dengan membayar harta sebagai sanksi atas perbuatanya. Sanksi dengan cara *ta'zîr* ini telah ditetapkan di dalam Sunnah.[130]

---

[126] Zayn al-Dîn Abû 'Abd Allâh Muhammad bin Abî Bakr, *Mukhtâr al-Sahhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1999), cet. 5, 226.

[127] Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 21.

[128] Abû al-Hasan 'Aliyy bin al-Husayn bin Muhammad al-Sughdî, *al-Nitaf fî al-Fatâwâ.* Juz 2 (Ammân: Muassasah al-Risâlah, 1984), 646.

[129] 'Alâuddîn Abû Bakr bin Mas'ûd bin Ahmad al-Kâsânî, *Badâi' al-Sanâi' fî Tartîb al-Sharâi'.* Juz 7 (Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1986), 58-64.

[130] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukuman Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 82.

Ganti Rugi dalam Konsep Damân

Ganti rugi dalam fiqh dimasukkan dalam kajian hukum perjanjian dan perikatan Islam. Salah satu terminologi fiqh, ganti rugi ada pada konsep الضمان (*damân*) yang secara arti ialah jaminan. Oleh karena itu, *damân* mengandung tiga masalah pokok jaminan, yaitu: 1. Jaminan atas utang seseorang. 2. Jaminan dalam pengadaan barang. 3. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, seperti pengadilan.[131] Dalam terminologi fiqh, ganti rugi dikenal dengan istilah *daman*. meskipun ia juga bisa dimaknai sebagai menanggung pembayaran hutang, menjamin pengadaan barang, atau menjamin menghadirkan seseorang pada tempat yang telah ditentukan.

Daman menurut ulama Hanafî adalah memikul tanggungan atas hal yang dituntut, misalnya baju yang di-*ghasab* atau titipan yang dihilangkan. Maka, tidak ada artinya penanggungan berupa nilai, sementara barang yang hendak ditanggung ternyata masih ada.[132] *Daman* menurut ulama Maliki adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan. Jika bukan sesuatu yang dibenarkan, misalnya membeli barang *ghasab* yang tidak diketahuinya. Maka, hakikat jual beli dan harganya sah, tetapi terkategori *ghullah* (harta dan harga *ghulûl/corrupt*) yang harus ditanggung ketika rusak atau dikembalikan ketika diketahui sumber asalnya, baik pada barang maupun harganya. Berbeda dengan hibah, si penerima hibahlah

[131] Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 14.

[132] Ungkapan yang cukup baik dalam mazhab ini terkait kaidah *damân* ini adalah *lâ mu'tabara fî qîmatin ma'a baqâi 'aynin*. Muhammad bin Ahmad bin Abî Sahl Shams al-Aimmah al-Sarakhsî, *al-Mabsût.* Juz 11 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1993), 98.

yang harus menanggung karena pemberi hibah sudah tidak memilikinya.[133]

Daman menurut ulama Shâfi'î ialah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta. Kewajiban pemenuhan hak harta ini tidak berlaku kecuali jika indikator perbuatan yang melawan hukum. Barang pinjaman dalam akad *'âriyah* tidak ada *damân* (penanggungan atas kerusakan) kecuali memang sengaja dirusak oleh si peminjam.[134] *Daman* menurut ulama Hanâbilah ialah kesediaan seseorang untuk menanggung orang lain atas hutang atau ganti rugi, misalnya tanpa mengharap adanya ganti. Tujuan akad ini ialah untuk menolong orang dari kesusahan, bukan mengambil manfaat atau memanfaatkan kesempatan atas kesusahan orang.[135]

Perkataan *damân* memiliki arti tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta. *Damân* merupakan keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. Muhammad Ya'qûb al-Dahlawî mendefinisikannya sebagai *iltizâm* (akad yang melibatkan keterlibatan peran negara) tentang kesediaan menjaga, menanggung (*kafâlah*) atas harta atau hutang seseorang yang berhutang. Daman terjadi karena empat faktor, yaitu ada akad (*'aqd*), utang (*yad*), ada

---

[133] Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Âmîr al-Asbahî al-Madanî, *al-Mudawwanah al-Kubra.* Juz 4 (t.tp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 199.

[134] Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Basrî al-Baghdâdî al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Madhhab al-Imâm al-Shâfi'î.* Juz 7 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 121.

[135] Sâlih bin Fawzân bin 'Abdillâh al-Fawzân, *al-Mulakhkhas al-Fiqhiyy.* Juz 2 (Riyad: Dâr al-'Âsimah, 1423 H), 75; Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 14-15.

kerusakan (*itlâf*), dan ada pertukaran penanggung.[136] Imâm al-Shawkânî mengatakan bahwa *damân* ialah *'ibâratun 'an gharâmat al-talaf*, yakni mengganti barang yang rusak.[137]

Pembagian ganti rugi dengan konsep *damân* dalam pandangan ulama fiqh, yaitu:

1. Menurut Imâm Mâlik bin Anas, ganti rugi ada tiga, yaitu: *damân al-mâl* (ganti rugi berkaitan kerugian harta), *damân al-wajh* (ganti rugi berkaitan kerugian fisik), dan *damân al-talab* (ganti rugi berkaitan kerugian di luar materi dan fisik, waktu dan kesempatan misalnya).[138]
2. Menurut Imâm Shâfi'î *damân* diartikan kesediaan menjamin, yaitu ada tiga macam: *damân dayn* (kesediaan menjamin hutang seseorang), *damân radd al-'ayn* (kesediaan menjamin penyerahan barang), dan *damân ihdâr shaks* (*al-Badan*) (kesediaan menjamin menghadirkan seseorang).[139]

---

[136] Muhammad Ya'qûb al-Dahlawî, *Damânât Huquq al-Mar'ah al-Zawjiyyah* (Riyâd: Adwâ' al-Salaf, 1424 H), 25.

[137] Muhammad bin 'Aliyy bin Muhammad bin 'Abd Allâh al-Shawkânî al-Yamanî, *al-Fath al-Rabbanî min Fatâwâ al-Imâm al-Shawkânî.* Juz 7 (Sana'a Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadîd, t.th.), 3328; Muhammad bin 'Aliyy bin Muhammad bin 'Abd Allâh al-Shawkânî al-Yamanî, *al-Fath al-Rabbanî min Fatâwâ al-Imâm al-Shawkânî.* Juz 8 (Sana'a Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadîd, t.th.), 3904.

[138] Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Âmir al-Asbahî al-Madanî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ.* Juz 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 439; Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubî, *al-Bayân wa al-Tahsîl wa al-Sharh wa al-Tawjîh wa al-Ta'lîl Limasâil al-Mustakhrajah.* Juz 11 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1988), 375.

[139] Abû al-Hasan 'Aliyy bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Basrî al-Baghdâdî al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr Fî Fiqh Madhhabi al-Imâm al-Shâfi'î.* Juz 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 455; Sulaymân bin Muhammad bin 'Umar al-Bujayramî al-Masrî al-Shâfi'î, *Tuhfah al-Habîb 'Alâ Sharh al-Khatîb.* Juz 3 (t.tp.: Dâr al-Fikr, 1995), 114-118.

3. Menurut Imâm Ahmad bin Hanbal *damân* juga dimaknainya sebagai menjamin hutang, hak, janji atau amanah, dan objek barang dagangan yang terdiri dari: *damân al-dayn al-hâl*, *damân al-a'yân*, *damân al-amânah*, dan *damân 'uhdah al-mabî'*.[140]

Menurut Syamsul Anwar, *damân* dalam arti ganti rugi bisa terjadi karena dua sebab, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan akad dan atau alfa dalam melaksanakan akad.[141] Dalam konteks terakhir di atas, jika suatu akad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini di dalam Ilmu Fiqh disebut dengan istilah *al-ta'addî*, yakni sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan oleh syariah.[142]

Dalam konteks tanggung jawab berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua konsep yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Damân al-'Aqd*, yaitu tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab adanya ingkar akad. Ganti rugi ini didasarkan pada peristiwa akad yang dilakukan oleh dua pihak.

---

[140] Mahfûz bin Ahmad bin al-Hasan Abû al-Khitâb al-Kalwadhânî, *al-Hidâyah 'Alâ Madhhab al-Imâm Abî 'Abd Allâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybânî* (t.tp.: Muassasah Gharrâs li al-Nashr wa al-Tawzî', 2004), 264.

[141] Hanafi, *Asas-asas Hukum*, 318.

[142] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 332.

2. *Damân al-'Udwân*, yaitu tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab perbuatan yang merugikan (*al-fi'l al-d*ârr) atau dalam istilah Hukum Perdata disebut perbuatan melawan hukum.[143] Ganti rugi ini didasarkan pada undang-undang karena ada perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal ini, terdapat penjelasan lain bahwa ada dua sebab terjadinya ganti rugi, yaitu a. Tidak melaksanakan akad. b. Alfa dalam melaksanakan akad.[144]

Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

Ganti rugi merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata. Oleh karena itu, patut didefinisikan terlebih dahulu apa itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainya. Pengertian menjelaskan adanya beberapa unsur, antara lain unsur peraturan hukum, unsur hubungan hukum, dan unsur orang. Peraturan hukum ialah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Hubungan hukum ialah hubungan yang diatur oleh hukum berkaitan hak dan kewajiban orang per orang. Orang ialah subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban, baik berupa manusia pribadi maupun badan hukum.[145]

---

[143] Ibid., 330; Muttaqin, *Sistem Transaksi,* 19-26.
[144] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 330; Hanafi, .*Asas-Asas Hukum*, 318.
[145] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), 1-2.

Secara etimologi, ganti rugi berasal dari dua kata, yaitu ganti yang artinya bertukar atau berganti dan rugi yang artinya sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan. Ganti rugi adalah menukar sesuatu karena hal yang kurang baik.[146] Secara terminologi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menganti kerugian tersebut.[147] Ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata lebih dititikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur karena telah melakukan wanprestasi.[148]

Dalam istilah hukum, ganti rugi timbul dari adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian, wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak, dan adanya perbuatan melawan hukum.[149] Dalam Ilmu Hukum, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu: 1. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 2. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian). 3. perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Ganti rugi berbeda dengan ganti biaya dan ganti bunga. Artinya, seorang yang mengadakan perikatan bisa jadi harus menanggung ketiga sanksi tersebut sekaligus,

---

[146] Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 12.
[147] Ibid., 13-14.
[148] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), cet. 2, 129; Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 153.
[149] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 11.

yaitu menanggung rugi, biaya, dan bunga ketika terjadi wanprestasi.[150] Konsekuensi hukum dari adanya wanprestasi adalah bahwa pihak yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara.[151]

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa ganti rugi yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, perkembangan pemikiran para ahli hukum dan yurisprudensi menginformasikan bahwa ganti rugi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil ialah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan, sedangkan kerugian immaterial ialah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, misalnya rasa sakit, dan sebagainya.[152]

Selain ganti rugi, biaya, dan bunga terdapat kategori lain yang dideskripsikan di dalam Ilmu Hukum, yaitu:

1. Ganti rugi nominal.
   Ganti rugi nominal ialah ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang secara nominal, meskipun kerugian tersebut sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang atau bisa jadi memang secara materiil tidak ada kerugian sama sekali.
2. Ganti rugi penghukuman.
   Ganti rugi penghukuman ialah ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya,

[150] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 223.
[151] Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 12-14.
[152] Salim HS., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 100.

ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

3. Ganti rugi aktual.
   Ganti rugi aktual ialah ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiahnya.
4. Ganti rugi campur aduk.
   Ganti rugi campur aduk ialah variasi berbagai bentuk taktik yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan berusaha memperbesar haknya jika pihak debitur melakukan wanprestasi dan atau mengurangi, bahkan menghapuskan kewajibanya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak yang dilakukannya tersebut.[153]

Praktik permintaan ganti rugi akibat adanya wanprestasi atas suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Biasanya yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan ialah hal-hal berikut:

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.[154]

Siapa pun pihak yang merasa dirugikan, baik oleh adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum

[153] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 568.

[154] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 30.

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan oleh korban yang dirugikan ini diatur dalam peraturan warisan Belanda yang masih dipakai di Indonesia, yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Kedua-dua sumber hukum ini masih dijadikan sebagai panduan Hukum Acara Perdata dan Pidana bagi para pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia, HIR untuk masyarakat Jawa dan Madura, sedangkan RBg. untuk masyarakat di luar Jawa dan Madura.

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang digunakan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum acara perdata dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan.[155]

Hukum acara perdata dalam definisi Prof. R. Subekti, S.H., salah satu perumus hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat atau rangkaian peraturan yang mengabdi pada hukum privat materiil. Definisi hukum acara perdata juga dirumuskan dalam Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh

[155] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 1-2.

BPHN Departemen Kehakiman Tanggal 21-23 Desember 1981 di Yogyakarta yang menyebutkan bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditegakkannya atau dipertahankanya hukum perdata materiil.[156]

Penetapan Kadar dan Besaran Ganti Rugi

Di dalam konsep fiqh, objek ganti rugi mestilah berupa harta yang ada, kongkrit, berharga, dan dibenarkan oleh syariat. Penetapan kadar dan besaran ganti rugi diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan kepada *qâḍî*. Apabila seorang *qâḍî* telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besar sekian, maka keputusannya berlaku sah dan tidak dapat dicabut kembali.[157]

Pasca putusan, ketika pihak terhukum ternyata tidak mampu membayar ganti rugi, maka hal ini tidak bisa diganti dengan pemenjaraan dan tidak pula diganti dengan pengampunan. Artinya, ganti rugi tetap harus dibayarkan meski dengan sisa harta atau benda yang dimiliki oleh orang yang harus membayar ganti rugi. Pembayaran diambil dari harta benda tersebut hingga sampai batas dan kadar yang memungkinkan dengan ketetapan qâḍî. Jika ternyata sudah tidak ada lagi harta benda yang dimiliki oleh terhukum, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian diambil ganti rugi darinya dan diserahkan kepada *qâḍî* untuk diberikan kepada korban yang telah dirugikan.[158]

---

[156] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembanganya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 9.

[157] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukuman Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 83.

[158] Al Faruq, *Hukum Pidana,* 83.

Dilihat dari segi penetapan ganti rugi pada perbuatan melawan hukum, ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses penetapannya, yaitu:

1. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berunsurkan kesengajaan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban berupa sejumlah nominal tertentu kepada si korban sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa kerugian yang sebenarnya.
2. Ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada korban sebesar kerugian yang dialaminya.
3. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.[159]

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, terdapat beberapa poin penting sebagai kesimpulan bahwa: ***Pertama***, denda dalam konteks ekonomi seringkali disebut dengan istilah ganti rugi atau kompensasi. Ganti rugi tersebut dalam penerapannya sangat tergantung apakah ia dalam konteks *ta'wîd* (penggantian), *gharâmah* (pembayaran tunggakan hutang), atau *dimân* (penanggungan). ***Kedua***, ketentuan dan kebijakan tentang denda dan ganti rugi tersebut secara fiqh dan perdata ternyata memiliki ruang untuk saling melengkapi dalam kajian hukum dan ekonomi.

[159] Muttaqin, *Sistem Transaksi*, 37.

DAFTAR PUSTAKA

Al Faruq, Asadulloh. Hukum Pidana dalam Sistem Hukuman Islam. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

al-Dahlawî, Muhammad Ya'qûb. Damânât Huquq al-Mar'ah al-Zawjiyyah. Riyâd: Adwâ' al-Salaf. 1424 H.

al-Fawzân, Sâlih bin Fawzân bin 'Abdillâh. al-Mulakhkhas al-Fiqhiyy. Juz 2. Riyad: Dâr al-'Âsimah. 1423 H.

al-Hanafî, Abû al-Ma'âlî Burhân al-Dîn Mahmûd bin Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin 'Umar bin Mâzah al-Bukhârî. al-Muhît al-Burhânî fî al-Fiqh al-Nu'mânî. Juz 8. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2004.

al-Kalwadhânî, Mahfûz bin Ahmad bin al-Hasan Abû al-Khitâb. al-Hidâyah 'Alâ Madhhab al-Imâm Abî 'Abd Allâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybânî. t.tp.: Muassasah Gharrâs li al-Nashr wa al-Tawzî'. 2004.

al-Kâsânî, 'Alâuddîn Abû Bakr bin Mas'ûd bin Ahmad. Badâi' al-Sanâi' fî Tartîb al-Sharâi'. Juz 7. Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah. 1986.

al-Madanî, Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Âmir al-Asbahî. al-Mudawwanah al-Kubrâ. Juz 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994.

al-Mâwardî, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Basrî al-Baghdâdî. al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Madhhab al-Imâm al-Shâfi'î. Juz 6 dan 7. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1999.

Al-Mawardi, Imam. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam. Penerjemah: Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

al-Qurtubî, Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Rushd. al-Bayân wa al-Tahsîl wa al-Sharh wa al-Tawjîh wa al-Ta'lîl Limasâil al-Mustakhrajah. Juz 11. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî. 1988.

al-Sarakhsî, Muhammad bin Ahmad bin Abî Sahl Shams al-Aimmah. al-Mabsût. Juz 11. Beirut: Dâr al-Ma'rifah. 1993.

al-Shâfi'î, Sulaymân bin Muhammad bin 'Umar al-Bujayramî al-Masrî. Tuhfah al-Habîb 'Alâ Sharh al-Khatîb. Juz 3. t.tp.: Dâr al-Fikr. 1995.

al-Sughdî, Abû al-Hasan 'Aliyy bin al-Husayn bin Muhammad. al-Nitaf fî al-Fatâwâ. Juz 2. Ammân: Muassasah al-Risâlah. 1984.

al-Yamanî, Muhammad bin 'Aliyy bin Muhammad bin 'Abd Allâh al-Shawkânî. al-Fath al-Rabbanî min Fatâwâ al-Imâm al-Shawkânî. Juz 7. Sana'a Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadîd. t.th.

al-Zuhaylî, Wahbah. Nazariyah al-Damân. Damsiq: Dâr al-Fikr. al-Zuhaylî, Wahbah. 1998. Nazariyah al-Damân. Damsiq: Dâr al-Fikr. 1998.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Asmuni, A. Rahmad. Ilmu Fiqh 3. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.

Cantika, Anissa. Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di PT Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram. Mataram: UIN Mataram. 2018.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.

Elsanti, Nadia Ananda. "Penerapan Ta'widh pada Pemegang Syariah Card". Thesis Magister. Surabaya: Universitas Airlangga. 2018.

Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. 2005.

Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.

Hanafi, Ahmad. .Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1996.

Hanifuddin, Iza. "Waqf al-Irsâd: Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah "Bengkok" sebagai suatu Fenomena Wakaf Negara", Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas. Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo. Volume 4. Nomor 1. Juni. 2019.

Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni. 1986.

Herawati, Nining. Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah

dalam Perspektif Ekonomi Islam. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil. Jakarta: Kencana. 2010.

HS, Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Ibn Abî Bakr, Zayn al-Dîn Abû 'Abd Allâh Muhammad. Mukhtâr al-Sahhah. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah. 1999.

Kanungo, R.N. dan M. Menconca. Compensation: Effective Reward Management. Kanada: Butterworths. 1992.

LKPP-Unhas. Format Bahan Ajar, Buku Ajar, Modul, dan Panduan Praktik. Makassar: LKPP-Unhas. 2015.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2013.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.

Muttaqin, Aris Anwaril. Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2015.

Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M. Pedoman Umum Penulisan Buku Daras. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2016.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 10. Bandung: Al-Maarif. 1978.

Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015.

Saputra, Arianto. Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

Sarjana, Sunan Autad dan Iza Hanifuddin. "Ijârah Muntahiyah bi al-Tamlîk: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf", Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas. Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo. Volume 3. Nomor 1. Mei. 2018.

Sholihin, Ahmad Ifham. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Suhartini. "Keadilan dalam Pemberian Kompensasi". Jurnal Siasat Bisnis. ISSN 0853-7665, Edisi Khusus JSB on Human Resources. 2005.

Syahru, Ibnu. "Implementasi Ganti Rugi (Ta'wid) dalam Hukum Perdata". Jurnal Ekonomi Islam. Volume 9, Nomor 2, November. 2010.

Taufiqo, Khoiro Aulit. Analisis Pengelolaan Data Ta'wid Di BNI Syariah Kota Semarang. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.

Tjoanda, Merry. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Sasi. Volume 16, Nomor 14. 2010.

Umam, Khotibul. Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembanganya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. 2007.

Wardi, Muslich Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Akuntansi Dalam Metafora *Rasūl*: Formulasi Akuntabilitas dalam Tujuan Dasar Akuntansi Sharī'ah

Oleh: Luhur Prasetiyo

Pendahuluan

Wacana akuntansi sharī'ah akhir-akhir ini semakin menggurita di tengah-tengah himpitan akuntansi modern. Hal ini tidak terlepas dari fenomena negatif yang terjadi dalam kapitalisme yang menjadi spirit akuntansi modern. Para pelaku bisnis semakin terjerumus dalam sifat egoisme dan meninggalkan altruisme. Akibatnya yang berlaku adalah hukum rimba, di mana yang kuat dan pemilik modal akan tanpa peduli melibas dan menindas para karyawan dan kelompok yang lemah. *Stockholders* begitu kuat dan dominan sehingga laporan keuangan lebih banyak diperuntukkan bagi mereka.

Beberapa orang yang peduli dengan akuntansi sharī'ah menyumbangkan sumbangan pemikiran mereka dalam rangka merealisasikan akuntansi sharī'ah baik pada level filosofis maupun mengarah ke level praktis. Triyuwono,

misalnya, menggunakan epistemologi sinergi oposisi biner sebagai alat untuk merumuskan formulasi tujuan dasar laporan keuangan akuntansi sharī'ah. Hasilnya, tujuan dasar laporan keuangan akuntansi sharī'ah adalah memberikan informasi dan akuntabilitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi kekuatan akuntansi sharī'ah.[160] Harahap, dengan pisau analisis yang berbeda, juga menghasilkan akuntansi pertanggungjawaban.[161]

Bermula dari kedua pemikiran tersebut, tulisan ini mencoba merumuskan formulasi pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang merupakan salah satu tujuan dasar laporan keuangan akuntansi sharī'ah dengan menggunakan metafora sifat *rasūl* yang merupakan representasi bagi perilaku *insān kāmil* (manusia ideal).

Akuntansi dalam Formulasi Konvensional

Akuntansi semula muncul sebagai bentuk laporan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi

[160] Lihat Iwan Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner : Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah,* disampaikan dalam Simposium Nasional 1 Ekonomi Islami oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islami FE-UII, 2002.

[161] Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2001), 157-167

sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang konkrit, *tangible* dan *value-free*.[162]

Praktik akuntansi yang dibangun sesuai dengan pengertian tersebut cukup mapan sampai akhir tahun 70-an. Akuntansi yang berbentuk benda mati yang statis dan paten ini cukup dominan dan banyak mendapatkan dukungan. Pendukung praktik akuntansi yang paten ini berargumentasi bahwa akuntansi harus memiliki standar paten yang berlaku umum di semua organisasi. Konsekuensinya, akuntansi harus bebas nilai (*value-free*), karena akuntansi yang tidak bebas nilai/sarat nilai (*non-value-free*) akan terpengaruh oleh kondisi lokal dan berbuah pada model akuntansi yang beragam. Tentu saja keberagaman ini –menurut pendukung *value-free-* akan menyulitkan dalam memahami informasi akuntansi yang disampaikan. Oleh karena itu, pendukung akuntansi yang *value-free* lebih memilih untuk melakukan harmonisasi praktik akuntansi.[163]

Akuntansi *value-free* inilah yang kemudian menjadi ruh dari akuntansi modern.[164] Akuntansi modern berlaku di berbagai belahan dunia dan menjadikan akuntansi ala Amerika Serikat yang nota bene adalah pengusung kapitalis sebagai standar. Sehingga tidak heran jika corak kapitalis cukup kental dalam akuntansi modern. Hal ini bisa dilihat dari tujuan laporan akuntansi modern yang dirumuskan.

---

[162] Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia,* vol I no. 1, Mei 1997, 3-4

[163] Ibid., 27

[164] Sebenarnya akuntansi modern ini tidak bebas nilai. Karena kalau kita lihat dengan seksama, akuntansi modern juga sarat nilai, yaitu nilai kapitalis.

Semuanya mengarah pada pemberian informasi semata tanpa ada spirit tanggung jawab.

Contohnya adalah laporan keuangan menurut APB Statement no. 4 yang berjudul *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises.* Tujuan umum laporan keuangan menurut APB statement nomor 4 ini adalah:

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan
2. Memberikan inormasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba
3. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

Dari kelima tujuan umum tersebut semuanya berorientasi pada pemberian informasi kuantitatif yang berguna bagi pemakai, khususnya pemilik dan kreditur dalam proses pengambilan keputusan.[165]

Sedangkan dalam *Trueblood Committee Report*, tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan. Tujuan yang

[165] Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 1999), 98-99

sama juga terdapat dalam *Conceptual Framework* dari FASB, PSAK, dan lain-lainnya.

Dari beberapa tujuan laporan keuangan tersebut, nampak bahwa akuntansi sangat terpengaruh oleh konsep kapitalis yang diusungnya, karena perhatian utama akuntansi adalah memberikan informasi yang bertumpu pada kepentingan *stockholders* dan atau *entity*nya,[166] tanpa mengindahkan aspek masyarakat dan alam sekitarnya. Mungkin masih ada setitik akuntabilitas yang dimiliki, namun itu pun hanya bersifat horisontal, karena memang tidak berpijak pada etika bisnis yang berbasis sharī'ah.

Dalam dasa warsa 1980-an, Islamisasi sains menjadi topik kajian penting di kalangan cendekiawan. Gagasan islamisasi sains ini berangkat dari adanya suatu kesadaran teologis dan etis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atas dasar spirit Islam, setelah disadari bahwa paradigma sains modern yang *value-free* banyak mendatangkan dampak negatif terhadap perkembangan peradaban manusia modern. Dampak ini sebagai konsekuensi logis dari dasar filsafat keilmuan yang meliputi aspek metafisika, epistemologi, dan aksiologi yang secara eksplisit tidak mempunyai keterkaitan dengan kepentingan moralitas manusia. Keringnya nilai-nilai etik dan moral inilah yang menjadikan sains modern dalam tataran aksiologinya seringkali menafikan kemaslahatan manusia.[167]

---

[166] *Stockholders* adalah pemilik perusahaan atau pemegang/pemilik saham perusahaan. *Entity* adalah perusahaan sebagai sebuah entitas yang terlepas dari *stockholders.*

[167] Syamsul Arifin, Agus Purwadi, dan Khoirul Habib, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta : Sipress, 1996), 76-77

Usaha untuk memberikan warna religius itu menyebar ke segala bidang ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya adalah akuntansi. Islamisasi akuntansi inilah yang kemudian banyak dikenal dengan sebutan akuntansi sharī'ah. Dengan akuntansi sharī'ah berarti akuntansi tidak lagi *value-free*, tetapi berubah menjadi sarat dengan nilai-nilai sharī'ah.

Akuntansi dalam Formulasi Shari'ah

Akuntansi sudah mengalami banyak evolusi sejak kemunculannya sesuai dengan perkembangan organisasinya. Setelah muncul dan berkembang, ada beberapa teori yang terkait akuntansi. Teori pertama adalah akuntansi dengan metafora Mesin. Morgan mengatakan bahwa akuntansi menjadi alat informasi bagi organisasi modern yang kebanyakan dibangun, dikembangkan dan dioperasikan atas dasar metafora mesin. Artinya, semua bagian organisasi didesain layaknya mesin yang dirangkai sedemikian rupa untung saling melengkapi demi tercapainya satu tujuan, yaitu memaksimalkan laba untuk *stockholders*. Oleh karena itulah, organisasi dengan metafora mesin ini dikenal juga dengan *stockholders theory*. Dengan pemahaman seperti ini, manusia menjadi objek yang dibentuk dan direkayasa bagai mesin. Potensi manusia yang bersifat inovatif dan konstruktif yang tidak sesuai dengan tujuan utama dianggap merugikan dan akhirnya dikebiri tanpa bisa dikembangkan lagi.[168]

Akuntansi dengan metafora mesin ternyata banyak menimbulkan persoalan, baik sosial, ekonomi, maupun

[168] Triyuwono, *Akuntansi Syariah*, 14-15

lingkungan. Oleh karena itulah, kemudian muncul pemikiran baru sebagai tesis yang berusaha mengatasi dan memperbaiki masalah tersebut. Evan dan Freeman kemudian mengajukan *stakeholders theory*, yaitu sebuah organisasi, di samping memperhatikan *stockholders*, juga harus memperhatikan *stakeholders. Stakeholders* bagi sebuah organisasi terdiri dari semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan, atau klaim terhadap, sebuah organisasi tersebut. Unsur-unsur yang tercakup dalam *stakeholders* bisa pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat lokal, pihak managemen, dan lain-lainnya.[169]

Stakeholders theory lahir dari metafora organisme. Organisasi dalam teori ini layaknya organisme yang harus selalu berinteraksi, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan lingkungannya agar tetap bisa *survive*. Tidak heran kalau organisasi yang berlandaskan pada metafora organisme atau menggunakan *stakeholders theory* ini lebih humanis dibanding organisasi yang dibangun atas dasar metafora mesin.

Dari dua teori tersebut nampak bahwa organisasi atas metafora mesin sangat dekat dengan *proprietary theory* ataupun *entity theory*. *Proprietary theory* memahami perusahaan sebagai sebagai sebuah organisasi yang menjadikan *proprietor* sebagai pusat perhatian. Sedangkan *entity theory* memahami perusahaan sebagai entitas tersendiri yang terlepas dari pemiliknya. Walaupun ada perbedaan antara dua teori ini, namun jika ditelusuri tujuannya maka akan berakhir pada satu tujuan yang sama,

[169] Ibid., 16-17

yaitu memaksimalkan laba untuk pemilik perusahaan atau pemilik saham. Hal ini berarti organisasi dalam *proprietary* ataupun *entity theori* dipahami sebagai sebuah mesin yang berlaku paten untuk satu tujuan.

Berbeda dengan organisasi atas dasar metafora mesin, organisasi yang dibangun atas dasar organisme yang lebih humanis sangat dekat dengan *enterprise theory*, di mana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan. Banyak pihak yang turut memberikan andil bagi keberlangsungan hidupnya, seperti pelanggan, kreditor, manajemen, pegawai, pemerintah, pemasok, dan lain-lainnya. Atau lebih jelasnya, keberlangsungan hidup organisasi ditentukan oleh *stakeholders*.

Akuntansi dalam formulasi sharī'ah atau yang lebih dikenal dengan akuntansi sharī'ah lebih dekat dengan teori yang terakhir ini. Harahap, misalnya, melihat bahwa *enterprise theori* lebih relevan dengan sharī'ah dibandingkan dengan *proprietory* ataupun *entity theori.*[170] Pendapat senada juga dilontarkan oleh Triyuwono. Namun Triyuwono melihat bahwa walaupun *enterprise theory* sangat dekat dengan sharī'ah, namun ada partisipan lain yang belum tercakup dalam *enterprise theory*. Partisipan yang belum tercakup itu adalah partisipan yang secara tidak langsung (*indirect participant*) memberikan kontribusi ekonomi. Oleh karena itu, Triyuwono mengajukan konsep *sharī'ah enterprise theory* yang memasukkan kepentingan *indirect participant*

[170] Harahap, *Akuntansi Islam*, 154-155

dalam distribusi nilai tambah dan juga memasukkan unsur alam.[171]

Di samping itu, Triyuwono berpendapat bahwa akuntansi sharī'ah menjadikan al-Qur'an dan Sunnah serta ayat kauniyyah sebagai dasar nilainya. Dengan begitu, akuntansi selalu berpijak pada sharī'ah dan perilaku para akuntannya selalu berdasarkan etika bisnis yang berdasar sharī'ah.

Dengan formulasi akuntansi yang berlandaskan sharī'ah itu, Triyuwono dan Harahap melihat bahwa tujuan akuntansi sharī'ah, di samping memberikan informasi, adalah memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Selanjutnya Triyuwono menambahkan bahwa akuntabilitas dalam akuntansi sharī'ah bukanlah sekedar akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada sesama manusia, namun akuntabilitas tersebut harus memuat akuntabilitas vertikal, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan. Hal ini merupakan suatu keniscayaan, karena manusia di bumi ini adalah sebagai wakil Tuhan (*khalifat Allah fi al-arḍ*). Sebagai wakil sudah seharusnya dia memberikan pertanggungjawaban kepadaNya.[172]

Rasul: Representasi Insan Kamil

Disadari atau tidak, wujud Tuhan pasti dirasakan oleh jiwa manusia, baik redup atau benderang. Manusia menyadari bahwa suatu saat dirinya akan mati. Kesadaran ini mengantarkan manusia kepada pertanyaan apa yang terjadi setelah mati, bahkan menyebabkan manusia

[171] Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner*, 6
[172] Ibid., 10-11; Harahap, *Akuntansi Islam*, 157-167

berusaha untuk memperoleh kedamaian dan keselamatan di negeri yang tak dikenal itu.

Wujud Tuhan yang tak terindera serta hal ihwal kematian merupakan salah satu faktor pendorong manusia untuk berhubungan dengan Tuhan dan memperoleh informasi yang pasti. Sayangnya, tidak semua manusia mampu melakukan hal itu. Dengan kebijaksanan Tuhan, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia kebingungan dan terombang-ambing tanpa petunjuk dan bimbingan. Karena itu, diutuslah orang-orang pilihan untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Orang-orang pilihan yang mendapatkan tugas ini dinamai *Rasūl* (utusan Tuhan).

Berbeda dengan alur berpikir di atas, Thabathaba'i menjelaskan bahwa karena Allah menciptakan segala makhluk, maka Dia-lah yang harus memelihara mereka. Oleh karena itu, Allah membimbing setiap makhluk agar mempunyai seperangkat peran dalam kehidupan. Namun manusia yang dianugerahi akal oleh Allah seringkali menyerah kepada kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu sehingga kadang-kadang melakukan kekeliruan. Untuk meluruskannya, Allah kemudian memperkuat pemahaman manusia atas perintah-perintahNya dengan mengirim utusan yang membawa pesan-pesan risalat. Utusan inilah yang dinamakan *Rasūl*.[173]

Rasūl berfungsi sebagai mediator antara Tuhan dan manusia. Manusia sebagai makhluk seringkali terjebak pada persoalan yang membutuhkan bimbingan. Sedangkan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Maha Bijaksana tidak

[173] Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam,* terj. Ahsin Mohammad (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), 64-65

akan membiarkan makhluknya terombang-ambing dalam kebingungan. Di sinilah *Rasūl* berperan sebagai mediator antara Tuhan dan manusia.

Di samping sebagai mediator, *rasūl* adalah manusia pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, *rasūl* menjadi model terbaik bagi manusia yang patut diteladani agar manusia menemukan jati dirinya dan memperoleh kebahagian yang sesungguhnya. Sebagai model terbaik, *rasūl* memiliki beberapa sifat yang menjadi ciri khasnya dan sifat itu tidak akan pernah terlepas dalam dirinya. Beberapa sifat itu adalah *al-ṣidq, al-tablīgh, al-amānah,* dan *al-faṭānah.*

1. *al-Ṣidq*

Kata *al-ṣidq* secara bahasa berarti jujur dan berkata benar lawan kata dari bohong. Sifat ini selalu dimiliki oleh para *rasūl*, bahkan menjadi sifat suci bagi mereka. Tidak mungkin seorang rasūl memiliki sifat bohong, dusta, dan penipu. Semua perkataan *rasūl* -baik berupa berita, janji, ramalan masa depan, dan lain-lain- selalu mengandung kebenaran. Semua ini merupakan keniscayaan terkait dengan misi ilahi yang diembannya. Allah berfirman terkait dengan sifat *ṣidq* para *rasūl* ini :

> ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
>
> *Seandainya dia (Muhammad) mengada-ada sebagian perkataan atas (nama) Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya.*[174]

[174] al-Qur'an, 69 : 44-46

Dari ayat tersebut, nampak jelas bahwa jujur adalah sifat wajib bagi *rasūl* yang tak mungkin digantikan atau dibumbui dengan kebohongan.

Manusia harus meneladani sifat *al-ṣidq* ini dan sifat ini harus menjadi visi hidup bagi setiap muslim, karena manusia hidup bermula dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kejujuran akan membawa manusia hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan tanpa ada rasa was-was dan saling curiga.

2. *al-Tablīgh*

Kata ini secara bahasa berarti menyampaikan. Artinya, *rasūl* akan selalu menyampaikan *risālah* dan misi Allah yang diembannya. Tidak akan ada satupun yang disembunyikan. Tidak akan ada satupun bujukan atau ancaman yang dapat mempengaruhinya dan menyebabkan seorang *rasūl* menyembunyikan wahyu yang wajib disampaikan kepada umatnya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an:

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون

Aku sampaikan kepada kalian risālāt Tuhanku dan aku memberi nasehat kepada kalian. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui.[175]

يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك

Wahai Rasūl, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.[176]

[175] Ibid., 7 : 62
[176] Ibid., 5 : 67

3. *al-Amānah*

Kata ini secara bahasa memiliki tiga arti,[177] yaitu:

1. Beban yang harus dijaga oleh seseorang
2. Lawan kata dari khianat
3. Titipan

Dari ketiga arti tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-amānah* adalah titipan yang harus dijaga oleh seseorang tanpa boleh berkhianat. Dalam konteks sifat *rasūl*, *al-amānah* berarti seorang rasūl selalu menjaga dan menunaikan titipan *risālāt* yang dipikulkan ke pundaknya oleh Allah dan tidak boleh berkhianat atas *risālāt* yang dibebankan tersebut. Dia akan selalu menjaga *al-amānah* kapan dan di manapun. Oleh sebab itu, mustahil seorang *rasūl* berkhianat dan melanggar amanat. Berulang kali al-Qur'an menuturkan :

إني لكم رسول أمين

Sesungguhnya saya adalah Utusan Tuhan untuk kalian.[178]

Al-amānah harus menjadi misi hidup setiap muslim. Dengan *al-amānah*, manusia akan bertanggung jawab terhadap beban yang dipikulnya dan jika konsisten akan bisa mendapat kepercayaan dari orang lain. Dalam ayat lain al-Qur'an menegaskan:

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون

Yaitu orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka.[179]

---

[177] Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut : Dar al-Mashriq, 1986), 18

[178] Ayat ini dalam al-Qur'an surat al-Shu'arā' diulang sebanyak lima kali. Lihat al-Qur'an, 26 : 107, 125, 143, 162, 178.

[179] Ibid., 23 : 8

4. *al-Faṭānah*

Al-Faṭānah berarti cerdas. Sebagai manusia pilihan dan mediator antara Tuhan dan manusia, seorang *rasūl* harus seorang yang cerdas, memiliki pikiran yang jernih dan bijaksana. Dengan kecerdasannya, seorang *rasūl* akan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dialah tempat mengadu dan bertanya bagi umatnya. Tidak mungkin seorang *rasūl* yang merupakan manusia pilihan dan menjadi mediator antara manusia dan Tuhan terpilih dari orang yang bodoh dan tidak cepat tanggap terhadap suatu persoalan.

Kecerdasan sering diasumsikan sebagai kelebihan akal dalam menghapal sesuatu. Sebenarnya, kecerdasan bukan berarti hanya kecerdasan secara akal dengan banyak memiliki pengetahuan, namun seseorang dikatakan cerdas jika memahami dan mengerti secara komprehensif kerangka ontologis, epistimologis, dan aksiologisnya. Nabi pernah bersabda :

> ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر انما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه
>
> *Bukanlah termasuk orang yang pandai seseorang yang mengetahui perbedaan kebaikan dan keburukan. Namun orang yang pandai adalah orang yang mengetahui kebaikan untuk diaplikasikan dan mengetahui keburukan untuk ditinggalkan* (HR. Ibn Abi 'Asim).

Dari hadits tersebut nampak bahwa kecerdasan tidak hanya terkait dengan pengetahuan, tetapi terkait pula dengan pemahaman.

Formulasi Akuntabilitas dalam Metafora Sifat Rasul

Dari paparan sifat *rasūl* tersebut, formulasi akuntabilitas dalam akuntansi dapat dimetaforakan dengan sifat *rasūl* tersebut. Artinya, laporan keuangan akuntansi sharī'ah harus mengandung empat sifat pokok *rasūl* agar *accountable* dan bisa diterima sebagai laporan pertanggungjawaban secara horizontal maupun vertikal.

Pertama, laporan keuangan harus bersifat *al-ṣidq* (jujur). Kejujuran dalam laporan keuangan mutlak diperlukan, karena kejujuran inilah pangkal dari sebuah kepercayaan. Sekali laporan keuangan tidak bersifat jujur dan menyimpan kecurangan, maka suatu organisasi tidak akan dipercaya lagi dan akan ditinggalkan oleh mitranya.

Kedua, laporan keuangan harus bersifat *al-tablīgh*. Artinya, semua informasi dalam laporan keuangan harus disampaikan secara obyektif, tanpa ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Laporan keuangan yang tidak bersifat *al-tablīgh* berarti laporan tersebut tidak *accountable*, karena ada hal-hal yang disembunyikan. Biasanya, organisasi yang ingin mencari keuntungan semata sering mengubah suatu laporan akuntansi agar dianggap baik oleh *stockholders* atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan seperti ini sama sekali tidak bersifat *al-tablīgh* dan tidak *accountable* karena telah menyimpang dari sharī'ah.

Ketiga, laporan keuangan harus bersifat *al-amānah*, karena sebenarnya sebuah organisasi merupakan titipan yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh diselewengkan. Organisasi merupakan titipan dari sesama manusia dan juga titipan dari Tuhan. Sebagai sebuah

titipan, organisasi harus dijaga dengan baik dan tidak boleh diselewengkan untuk tujuan tertentu. Akuntansi sebagai sebuah bentuk laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memberikan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, laporan keuangan harus bersifat *al-amānah*.

Keempat, laporan keuangan harus bersifat *al-faṭānah*. Artinya, laporan keuangan harus cerdas dalam memilah dan memilih kewajiban yang harus dilaporkan. Di samping itu, pembuat laporan keuangan juga harus cerdas dalam melakukan pendistribusian nilai tambah, agar kesejahteraan bisa terwujud. Sifat egoisme yang menjadi sifat manusia bisa dipadukan dengan altruisme yang menjadi fitrah manusia dengan kecerdasan ini. Semuanya didudukkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipersandingkan agar saling melengkapi.

Laporan keuangan dengan keempat sifat tersebut niscaya layak untuk dijadikan akuntabilitas yang berorientasi vertikal maupun horizontal. Secara vertikal sebagai pertanggungjawaban *khalīfat Allah fi al-arḍ* dan secara horizontal sebagai makhluk sosial. Dengan keempat sifat tersebut, akuntansi sebagai ilmu sosial akan diisi dengan spirit sharī'ah. Akuntansi dengan spirit sharī'ah tersebut akan mampu membawa *raḥmah li al-'ālamīn* dan membawa kesejahteraan, baik materi, mental, maupun spiritual.

Baru-baru ini, terjadi kasus laporan keuangan ganda oleh salah satu Bank di Indonesia. Laporan keuangan ganda ini tentu saja tidak *accountable*, karena tidak bermuatan sifat rasūl di atas, terutama *al-ṣidq* dan *al-tablīgh*. Laporan

keuangan ganda ini pasti mengandung manipulasi data untuk tujuan tertentu.

Penutup

Manusia adalah *khalifat Allah fi al-arḍ*. Dia ditugaskan untuk hidup di dunia dan merawat dunia dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang wakil, manusia harus tunduk pada rambu-rambu Tuhan yang telah diberikan kepadanya melalui format sharī'ah. Di samping itu, manusia adalah makhluk sosial yang hanya bisa hidup dengan melakukan interaksi dengan sekitarnya.

Berangkat dari pemahaman tersebut, akuntansi sebagai sebuah laporan keuangan harus berupa sebuah informasi yang *accountable*, baik secara vertikal karena manusia adalah *khalifat Allah fi al-arḍ* maupun secara horizontal karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sekitarnya.

Akuntansi sebagai sebuah laporan keuangan bisa dikatakan *accountable* dan bisa diterima secara vertikal maupun horizontal jika memuat empat sifat, yaitu *al-ṣidq, al-tablīgh, al-amānah,* dan *al-faṭānah.*

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an

Arifin, Syamsul dkk. Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan. Yogyakarta: Sipress, 1996.

Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.

----------. Teori Akuntansi. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999.

Ma'luf, Louis. al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam. Beirut: Dar al-Mashriq, 1986.

Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Husain. Inilah Islam, terj. Ahsin Mohammad Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Triyuwono, Iwan. "Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah", Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, vol I no. 1, Mei 1997.

----------. Sinergi Oposisi Biner : Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah, disampaikan dalam Simposium Nasional 1 Ekonomi Islami oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islami FE-UII, 2002.

Analisis Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Return on Invesment terhadap Harga Saham pada Pt. Akr Corporindo Tbk

Oleh: Tiara Widya Antikasari

Pendahuluan

Pasar modal atau dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia merupakan tempat untuk menyalurkan dana dalam bentuk saham, yang nantinya akan memperoleh keuntungan berupa *capital gain* ataupun dividen saham yang tinggi. Harga saham merupakan harga yang terbentuk melalui mekanisme permintaan maupun penawaran yang dilakukan oleh para investor di pasar jual beli saham. Baik harga saham syariah maupun konvensional memiliki nilai yang tidak tetap atau konstan. Harga saham tidak mempunyai pola dan tidak dapat diprediksi serta bergerak sesuai dengan *random walk*, sehingga pemodal harus puas dengan tingkat pengembalian dan keuntungan yang diberikan oleh mekanisme pasar, dimana *actual return* harus sesuai dengan *retun* ekspektasi.

PT AKR Corporindo Tbk. merupakan salah salah satu perusahaan logistik dan rantai pasokan yang bergerak

dalam bidang perdagangan serta sebagai distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar. Dengan jaringan sarana transportasi, pelabuhan, dan penyimpanan yang luas. Mengingat bahwa biaya logistik di Indonsesia masih sangat tinggi dibandingkan negara lain membuka peluang bagi perusahaan logistik dan transportasi dalam merambah di dunia bisnis, hal tersebut dapat dilihat dari indeks sektoral yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk sektor infrastruktur, utilisasi dan tranportasi secara *year to date* naik 13,43% pada tahun 2019.

Dari hal tersebut tentunya bagi para investor penting dalam memperhatikan harga saham yang ditawarkan dengan nilai perusahaan, karena pada mulanya perusahaan akan menawarnakan saham dengan harga tertentu, atau harga awal yang di publikasikan sebagai harga saham penutup *(closing price)* pada periode lalu. Setelah itu terjadi suatu proses transaksi yang kemudian akan menghasilkan harga penutupan lagi. Maka, harga tersebut yang nantinya menjadi pertimbangan para investor untuk membeli saham kembali. Dengan adanya pertimbangan tersebut investor juga dapat memperkirakan tingkat *return* yang didapatkan, apakah besar atau kecil.

Mengingat bahwa harga saham itu selalu berubah-ubah atau tidak tetap, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut, yaitu berasal dari faktor eksternal dan internal perusahaan. Salah satu faktor internal peusahaan yang mempengaruhi harga saham adalah pengumuman mengenai laporan keuangan perusahaan, mulai dari peramalan laba sebelum dan sesudah akhir

tahun fiskal, *Earning Per Share* (EPS), *Price Earning Ratio* (PER), *Dividen Per Share* (DPS), *Return on Assets* (ROA), dan bentuk-bentuk analisis laporan keuangan lainnya.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal.[180] Variabel Price Earning Ratio menunjukkan perbandingan harga saham yang dibeli dengan earning yang akan diperoleh dikemudian hari sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa investor yakin terhadap besarnya earning yang diberikan perusahaan, yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen di masa datang.[181] Return on Investment (ROI) merupakan salah satu rasio dari rasio profitabilitas dimana rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.[182] Berikut tabel perhitungan perkembangan *Debt to Equity Ratio* (DER), *Price Earning Ratio* (PER), *Return on Investment* (ROI) dan Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk.:

---

[180] Andreas R. Wangarry, Agus T. Poputra, and Treesje Runtu, 'Pengaruh Tingkat Return on Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM), Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2016): 1–8

[181] Reza Bagus Wicaksono, 'Pengaruh Eps, Per, Der, Roe Dan Mva Terhadap Harga Saham', *Jurnal Akuntansi* 5 (2015): 1–13.

[182] Wangarry, Poputra, and Runtu, 'Pengaruh Tingkat Return on Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM), Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)'. 3 (2016) 1-8..

Tabel 1 *Debt to Equity Ratio* (DER), *Price Earning Ratio* (PER), *Return on Investment* (ROI) dan Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. Periode 2015-2020

No	Tahun	Periode	DER	PER	ROI	Harga Saham
1.	2015	TW I	1,17	63,70	0,021	5.125
		TW II	1,19	0,029	0,050	5.925
		TW III	1,26	26,37	0,054	5.850
		TW IV	1,08	26,76	0,069	7.175
2	2016	TW I	0,94	105,8	0,017	6.950
		TW II	0,93	41,27	0,040	6.400
		TW III	0,98	31,24	0,052	6.450
		TW IV	0,96	22,87	0,066	6.000
3.	2017	TW I	0,98	86,42	0,017	6.250
		TW II	0,91	38,20	0,041	6.525
		TW III	0,95	25,59	0,065	7.100
		TW IV	0,86	19,50	0,077	6.350
4	2018	TW I	0,89	24,72	0,048	5.675
		TW II	0,95	15,66	0,057	4.300
		TW III	1,14	21,01	0,034	3.670
		TW IV	1,008	10,78	0,080	4.290
5.	2019	TW I	0,86	99,43	0,01	4.720
		TW II	0,92	33,28	0.025	4.090
		TW III	0,95	29,22	0,027	3.800
		TW IV	1,12	22,55	0,032	3.950
6.	2020	TW 1	0,11	50,25	0,011	1.975
		TW 2	0,55	108,48	0,024	2.540
		TW 3	0,78	167,51	0,037	2.550

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah Penulis)

Berdasarkan hasil data yang diolah di atas, menjelaskan perubahan nilai DER pada AKRA mulai dari periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan sebesar 0,12%, yang diikuti harga saham sebesar Rp 1.175, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 juga mengalami penurunan 0,1% yang diikuti menaiknya harga saham sebesar Rp 350. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar

0,14%, yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 2.060, selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 0,11% yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 340.

Data yang diolah di atas, menjelaskan perubahan nilai PER pada AKRA Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan sebesar 3,89%, yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 1.175, selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 juga mengalami penurunan sebesar 3,37% yang diikuti menaiknya harga saham sebesar Rp 350, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 8,72%, yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 2.060, selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,77% yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 340.

Berdasarkan hasil data di atas, menjelaskan perubahan nilai ROI pada AKRA Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan 0,003%, yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 1.175, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,011% yang diikuti menaiknya harga saham sebesar Rp 350, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,003%, yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 2.060, selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 0,048% yang diikuti menurunnya harga saham sebesar Rp 340.

Pada dasarnya penelitian yang serupa pernah dilakukan sebelumnya. Semisal saja dilakukan oleh Amalia

(2016) yang menyebutkan bahwa variabel DER tidak berpengaruh terhadap harga saham.[183] Berbanding dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Dewi dan Suryana (2013) menyebutkan bahwa variabel DER berpengaruh terhadap harga saham.[184] Dalam penelitian Zuliarni (2012) menyebutkan bahwa variabel PER berpengaruh terhadap harga saham.[185] Berbeda dengan hasil penelitian Wicaksono (2015) menyebutkan bahwa variabel PER tidak berpengaruh terhadap harga saham.[186] Dalam penelitian Wangarry, Poputra, and Runtu (2016) menyebutkan bahwa variabel ROI tidak berpengaruh terhadap harga saham.[187] Berbanding dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Amalia (2016) menyebutkan bahwa variabel ROI berpengaruh terhadap harga saham.[188]

Berdasarkan pemikiran di atas, dan teori yang telah ditetapkan maka Penulis tertarik untuk melakukan

[183] Henny Septiana Amalia, 'Analisis Pengaruh Earning per Share, Return on Investment, Dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2016): 1–9.

[184] Putu Dina Aristya Dewi and I. GNA Suaryana, 'Pengaruh EPS, DER, Dan PBV Terhadap Harga Saham', *E-Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2013): 215–29.

[185] Sri Zuliarni, 'Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Mining and Mining Service Di Bursa Efek Indonesia (BEI)', *Jurnal Aplikasi Bisnis* 3, no. 1 (2012): 36–48.

[186] Wicaksono, 'Pengaruh Eps, Per, Der, Roe Dan Mva Terhadap Harga Saham', 1-13.

[187] Wangarry, Poputra, and Runtu, 'Pengaruh Tingkat Return on Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM), Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)'. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.3 (2016):1-8.

[188] Amalia, 'Analisis Pengaruh Earning per Share, Return on Investment, Dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia', 1-9.

penelitian dengan judul "Analisis *Debt To Equity Ratio, Price Earning Ratio,* dan *Return on Invesment* Terhadap Harga Saham Pada PT. AKR Corporindo Tbk."

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk.

H2 : *Price to Earning Ratio* (PER) berpengaruh terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk.

H3 : *Return On Invesment* (ROI) berpengaruh terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk?

H4 : *Debt to Equity Ratio* (DER), *Price to Earning Ratio* (PER),dan *Return On Invesment* (ROI) berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk?

Metode Penelitian dan Konsep Kinerja Keuangan serta Harga Saham

1. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh Penulis secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.[189] Data yang digunakan adalah data PT AKR Corporindo Tbk. diperoleh dari www.idx.co.id. Adapun data sekunder berasal dari laporan keuangan triwulan perusahaan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 2020.

[189] Wicaksono, 'Pengaruh Eps, Per, Der, Roe Dan Mva Terhadap Harga Saham'.

Pada penelitian ini terdapat dua konsep yaitu kinerja keuangan dan harga saham. Penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu DER dengan notasi (X1), PER dengan notasi (X2), ROI dengan notasi (X3)) dan satu variabel terikat yaitu harga saham dengan notasi (Y).

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen DER, PER, dan ROI variabel dependen Harga Saham, maka model analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 25. Model regresi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

Keterangan:

Y = variabel harga saham
α = konstanta
$\beta 1$-$\beta 3$ = koefisien
X1 = *Debt to Equity Ratio*
X2 = *Price Earning Ratio*
X3 = *Return On Invesment*
e = kesalahan residual (error)

2. Konsep Kinerja Keuangan dan Harga Saham

a. **Laporan Keuangan**

Menurut laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.[190] Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan

[190] Aditya, 'Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Pada Apotek K24 Pugeran Yogyakarta)'.

menghitung rasio aktivitas, solvabilitas dan rasio pofitabilitas. Rasio aktivitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asset yang dimiliki serta seberapa eisien perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan alam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba ysng maksimal dalam periode tertentu.

b. **Harga Saham**

Secara umum saham terbagi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (preferred stock). Pemegang saham biasa berhak atas deviden selama perusahaan mendapat keuntungan. Hak suara RUPS sebesar jumlah saham yang dimilikinya.[191] Saat likuidasi perusahaan, pemilik saham biasa berhak atas kekayaan perusahaan sebesar sahamnya setelah melunasi kewajiban. Sedangkan Saham preferen berhak atas deviden dan atau sebagian kekayaan perusahaan saat likuidasi terlebih dahulu daripada pemegang saham biasa, dan juga dapat mengusulkan pencalonan direksi atau komisaris.

c. ***Debt to Equity Ratio (DER)***

[191] Diko Fitriansyah Azhari, Sri Mangesti Rahayu, and Z. A. Zahroh, 'Pengaruh ROE, DER, TATO, Dan PER Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Administrasi Bisnis* 32, no. 2 (2016): 1–5.

Debt to Equity Ratio adalah salah satu jenis rasio solvabilitas yang menunjukan besarnya biaya total aktiva, di mana pembiayaannya berasal dari total utang.[192] Semakin tinggi *debt ratio* berarti semakin besar pula jumlah pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Sebaliknya semakin rendah *debt ratio* berarti semakin kecil jumlah pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Hal ini memberikan dampak kepada para investor. Apabila jumlah pinjaman kecil maka perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya selain itu juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Investor akan berpikir apabila laba perusahaan tersebut tinggi maka dividen yang akan dibagikan juga akan tinggi, sehingga mempengaruhi investor untuk membeli saham perusahaan tersebut serta berdampak pada naiknya harga saham.

d. ***Price to Earning Ratio (PER)***

Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu rasio aktivitas yaitu sebagai ukuran dalam menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pasar saham pada perusahaan.[193] Keinginan investor melakukan analisis saham melalui rasio-rasio keuangan seperti *Price Earning Ratio* (PER), dikarenakan adanya keinginan investor atau calon investor akan hasil (*return*) yang layak

[192] Wicaksono, 'Pengaruh Eps, Per, Der, Roe Dan Mva Terhadap Harga Saham'.5(2015):1-13..

[193] Abied Luthfi Safitri, 'Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio, Return On Asset, Debt To Equity Ratio Dan Market Value Added Terhadap Harga Saham Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index Tahun 2008-2011' (PhD Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2013), 34-42.

dari suatu investasi saham. Apabila jumlah nilai PER tinggi, maka akan mengindikasikan bahwa permintaan atas saham perusahaan juga semakin tinggi, dan dengan adanya permintaan yang tinggi maka harga saham perusahaan juga ikut meningkat, atau *Price Earning Ratio* (PER) berbanding positif terhadap harga saham.

e. ***Return On Invesment*** **(ROI)**

Tingkat pengembalian investasi atau *Return on Investment* (ROI), salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara menyeluruh guna memperoleh laba secara maksimal dari dalam jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.[194] Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dengan nilai pendapatan yang sama, maka tingkat pengembalian investasi akan semakin besar, begitu sebaliknya, atau dapat dikatakan ROI berbanding terbalik dengan penggunaan sumber daya perusahaan. Selain itu, ROI digunakan untuk membandingkan laba atas investasi antara investasi-investasi yang sulit dibandingkan dengan menggunakan nilai moneter. Namun, fenomena yang terjadi di pasar modal ternyata berbeda dengan teori rasio keuangan yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

1. Model Regresi

Tabel 2 Hasil Regresi Linear Berganda

[194] Puspitasari, Gumanti, and Paramawardhani, 'Rasio Keuangan Dan Perubahan Laba Perusahaan Agroindustri Di Bursa Efek Indonesia'.

Model B		Unstandardized Coefficients	
		Std. Error	
1	(Constant)	2546,469	1473,882
	DER	3096,605	1355,167
	PER	-5,887	7,835
	ROI	-44,203	56,804

Sumber : Olah data SPSS 25

Model yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Y=2546,469+3096,605X1-5,887X2-44,203X3

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak normal.[195] Tabel 3 di bawah ini menunjukkan bahwa uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai Asymp.Sig. sebesar 0,200. Maka dapat dilihat bahwa Asymp.sig lebih besar dari 0,05 (50%) sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 3 Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		23
Normal Parametersa,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1283,92566248

[195] Dewi and Suaryana, 'Pengaruh EPS, DER, Dan PBV Terhadap Harga Saham'. E-Jurnal Akuntansi. 4 (2013): 215-229.

Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,102
	Negative	-,142
Test Statistic		,142
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d
a. Test distribution is Normal.		
Sumber : Data diolah SPSS 25.		

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menguji apakah dalam satu model regesi terdapat varians yang berbeda antara residual pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dari gambar diatas maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

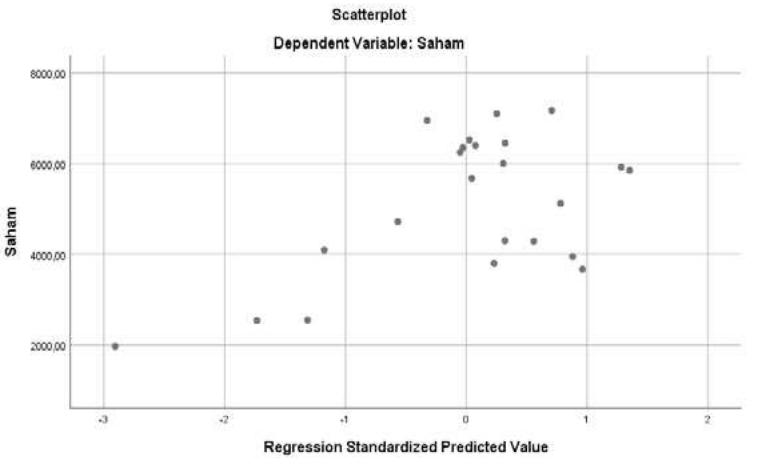

Sumber : Data diolah SPSS 25.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh setiap data dalam pengamatan sebelumnya dari regresi, biasanya menggunkan Uji *Durbin-W.*[196] Tabel 4 dapat dilihat nilai angka Durbin Watson (DW) sebesar 0.495. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai DW $\bar{}$ 1,65, maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi. Meski terjadi autokorelasi namun investor juga cenderung menggunakan analisis yang lain yakni analisis teknikal dengan melihat harga saham sebelumnya.

[196] Debora L. Lintang, Marjam Mangantar, and Dedy N. Baramuli, 'Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Tingkat Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019): 1–10.

Tabel 4 Durbin Watson Test

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,314	2,900	3	19	,062	,495

Sumber : Data diolah SPSS 25.

5. Uji t (Parsial)

Tabel 5 Uji t

Coefficientsa										
Model B		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig. Lower Bound	95,0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta				Upper Bound	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	2546,469	1473,882		1,728	,100	-538,402	5631,340		
	DER	3096,605	1355,167	,467	2,285	,034	260,207	5933,002	,866	1,155
	PER	-5,887	7,835	-,154	-,751	,462	-22,286	10,513	,861	1,162
	ROI	-44,203	56,804	-,148	-,778	,446	-163,096	74,690	,993	1,007
a. Dependent Variable: Saham										

Sumber : Data diolah SPSS 25.

Tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil dari Uji t adalah sebagai berikut :

a. *Debt to Equity Ratio* (DER) menghasilkan tingkat signifikan (sig) atau probabilitas adalah 0,034 ˂ 0,050 maka Ha diterima, yang berarti H0 ditolak. Hal ini berarti *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
b. *Price Earning Ratio* (PER) menghasilkan tingkat signifikan (sig) atau probabilitas adalah 0,462 ˃ 0,050 maka H0 di terima, yang berarti Ha ditolak. Hal ini berarti *Price*

Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

c. *Return On Investment* (ROI) menghasilkan tingkat signifikan (sig) atau probabilitas adalah 0,446 ¯ 0,050 maka H0 di terima, yang berarti Ha ditolak. Hal ini berarti *Return On Investment* (ROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

6. Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji Anova atau F test terlihat bahwa nilai F sebesar 2,900 dengan nilai signifikansi sebesar 0,042. Karena probabilitas atau nilai sig menunjukkan 0,042 lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat gunakan untuk memprediksi *debt to equity ratio* , *price earning ratio*, dan *return on invesment*, secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap harga saham.

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16608482,868	3	5536160,956	2,900	,042[b]
	Residual	36266232,349	19	1908749,071		
	Total	52874715,217	22			

a. Dependent Variable: Saham

b. Predictors: (Constant), ROI, DER, PER

Tabel 6 Hasil Uji F
Sumber : Data diolah SPSS 25.

Tabel 6 Hasil Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	,560a	,314	,206	1381,57485	,314

Sumber : Data diolah SPSS 25.

Disimpulkan bahwa DER, PER, dan ROI secara bersama-sama berkontribusi sebesar 31,4% atas perubahan harga saham, sedangkan 69.6% perubahan harga saham dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Penutup

Dari pembahasan di atas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara parsial, *Return On Investment* (ROI) dan *Price Earning Ratio* (PER), tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
2. Secara parsial, *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
3. Secara bersama sama, *Debt to Equity Ratio* (DER), *Price Earning Ratio* (PER), dan *Return On Investment* (ROI) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
4. Disimpulkan bahwa DER, PER, dan ROI secara bersama-sama berkontribusi sebesar 31,4% atas perubahan harga saham, sedangkan 69.6% perubahan harga saham dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Rian. 'Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Pada Apotek K24 Pugeran Yogyakarta)'. PhD Thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2017.

Amalia, Henny Septiana. 'Analisis Pengaruh Earning per Share, Return on Investment, Dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia'. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2016).

Azhari, Diko Fitriansyah, Sri Mangesti Rahayu, and Z. A. Zahroh. 'Pengaruh ROE, DER, TATO, Dan PER Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia'. *Jurnal Administrasi Bisnis* 32, no. 2 (2016): 1–5.

Dewi, Putu Dina Aristya, and I. GNA Suaryana. 'Pengaruh EPS, DER, Dan PBV Terhadap Harga Saham'. *E-Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2013): 215–29.

Lintang, Debora L., Marjam Mangantar, and Dedy N. Baramuli. 'Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Tingkat Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017'. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019).

Puspitasari, Novi, Tatang Ary Gumanti, and Nindhika Paramawardhani. 'Rasio Keuangan Dan Perubahan

Laba Perusahaan Agroindustri Di Bursa Efek Indonesia', 2019.

Safitri, Abied Luthfi. 'Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio, Return On Asset, Debt To Equity Ratio Dan Market Value Added Terhadap Harga Saham Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index Tahun 2008-2011'. PhD Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Sudana, I. Made. *Manajemen Keuangan Teori Dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Wangarry, Andreas R., Agus T. Poputra, and Treesje Runtu. 'Pengaruh Tingkat Return on Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM), Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)'. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2016).

Wicaksono, Reza Bagus. 'Pengaruh Eps, Per, Der, Roe Dan Mva Terhadap Harga Saham'. *Jurnal Akuntansi* 5 (2015): 1–13.

Zuliarni, Sri. 'Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Mining and Mining Service Di Bursa Efek Indonesia (BEI)'. *Jurnal Aplikasi Bisnis* 3, no. 1 (2012): 36–48.

Bagian III

Pendidikan dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan

Membangun Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Pesantren

Oleh: Rizka Eliyana Maslihah

Pendahuluan

Kalangan birokrasi dan umat beragama sempat dikejutkan oleh hasil penelitian CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*) di tahun 2012, yang menyatakan bahwa sikap intoleransi masyarakat beragama di Indonesia semakin meningkat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bhineka Tunggal Ika layaknya hanya sebatas semboyan semu, sebab warganya masih banyak yang belum mampu toleran terhadap perbedaan.[197] Philips Vermote dalam diskusi di kantornya menyatakan "Masyarakat menerima kenyataan hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama, tapi relatif enggan memberikan kesempatan kepada tetangganya untuk mendirikan rumah ibadah mereka". Penelitian CSIS tersebut dilakukan di 23 provinsi, dan melibatkan 2.213 responden. Hasil penelitian tersebut adalah 59,5% responden tidak keberatan bertetangga dengan orang beragama lain,

[197] "http://indonesia.ucanews.com.," Agustus 2018.

dan 33,7% menolak bertetangga dengan agama lain. Serta, 68,2% responden menyatakan lebih baik tidak dilakukan pembangunan rumah ibadah lain di lingkungannya, dan 22,1% menyatakan tidak keberatan dengan pembangunan rumah ibadah lain di lingkungannya.[198]

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI melalui Survey Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada tahun 2012. Hasil survey yang melibatkan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih dalam tataran toleran. Hasil survey kerukunan umat beragama tersebut adalah Skor untuk persepsi tentang kerukunan beragama 75,2. Skor untuk sikap dan interaksi antar umat beragama 71,9. Serta, skor untuk kerja sama antar umat beragama 72. Berdasarkan pada rata-rata yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kerukunan antarumat beragama di Indonesia sudah berada pada level baik. Namun, hasil tersebut masih perlu untuk terus dipelihara dan ditingkatkan kembali demi tercapainya kehidupan beragama yang rukun, harmonis serta selaras.[199]

Di sisi lain, Pesantren telah dikenal masyarakat luas sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk menyebarkan agama dan memperdalam ajaran-ajaran agama Islam. Pesantren tidak hanya mendidik dan membina pribadi para santrinya, namun pesantren juga

---

[198] "Tabloit Reformata Edisi 155," September 2012, 18.

[199] Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Agama, *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 55.

ikut andil dalam mengadakan perubahan dan perbaikan sosial masyarakat. Sehingga, pesantren diharapkan dapat berperan menjadi agen perubahan (*agent of change*) terhadap masyarakat sekitarnya.[200] Oleh sebab itu, pendidikan pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan rohani yang berorientasi terhadap masalah ibadah dan akhirat saja. Namun, melalui materi-materi keagamaan dan kitab-kitab yang diajarkan, pesantren diharapkan mampu menginterpretasikan berbagai permasalahan sosial masyarakat dan sosial keagaman sekaligus memecahkan masalah-masalah tersebut melalui kegiatan-kegiatan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari santri di asrama.

Pesantren di Indonesia, sebagai negara dengan beranekaragam suku, budaya, bahasa, adat-istiadat, kepercayaan serta agama memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan beragama yang harmonis. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan upaya merealisasikan penerapan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sikap toleransi seseorang dilakukan dengan menerima dan memahami keyakinan orang lain, sebab hak yang paling asasi/privasi adalah agama. Toleransi merupakan wujud nyata dari rasa simpati sekaligus empati seseorang kepada orang lain di luar agamanya. Sebab, sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya untuk mau dan sadar dalam berbuat baik dan menghormati orang lain.[201]

---

[200] HM. Nurdin Syafi'i, "Kontribusi Pesantren dalam Mencetak Generasi Mandiri" (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008), 47.

[201] HM. Muntahibun Nafis, "Pesantren dan Toleransi Beragama," *Jurnal Ta'allum*, No. 2, Volume 2 (Nopember 2014): 167.

Berdasarkan latar belakang tersebut, toleransi antar umat beragama diharapkan dapat berkontribusi dalam melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan bangsa, serta menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat luas. Melalui toleransi hubungan antar umat beragama diharapkan dapat didasarkan pada prinsip persaudaraan, kerja sama serta gotong royong dalam membela kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan pesantren memegang peranan penting dalam membangun toleransi beragama di Indonesia. Dan melalui nilai-nilai pendidikan pesantren, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) terhadap masyarakat sekitarnya. Sehingga, akan tercipta kehidupan berbangsa dan beragama yang tentram dan harmonis. Dan semboyan Bhineka Tunggal Ika akan benar-benar menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural.

Metode Penelitian dan Konsep Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Pesantren

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali informasi secara luas dan mendalam terkait berbagai kondisi yang ada serta situasi yang muncul di masyarakat, sehingga dapat menambah khazanah pengetahuan secara unik tentang berbagai fenomena yang ada. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Iman Putri yang terletak

di Dusun Pondok, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Penulis memilih lokasi tersebut, sebab Pondok Pesantren Al-Iman merupakan salah satu pondok alumni dari pondok modern Gontor yang mengalami perkembangan pesat. Meskipun umur pondok masih belia, namun Pondok ini memiliki jumlah santri yang hampir mencapai angka seribu, serta santri di pesantren ini berasal dari seluruh pelosok Negeri bahkan ada santri yang berasal dari luar Negeri. Adapun yang diteliti adalah pendidikan toleransi di pesantren dan model penerapan toleransi di pesantren. Bentuk pendidikan dapat meliputi penerapan pendidikan di dalam kelas dan di luar kelas. Serta metode pendidikan yang digunakan meliputi kegiatan formal dan kegiatan bidang nonformal.

Teknik penentuan informan dalam artikel ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan informan untuk pengambilan data dengan menetukan orang-orang yang berkaitan erat dengan informasi yang dibutuhkan Penulis. *Key informan* dalam artikel ini adalah Pimpinan Pondok Pesantren Al-Iman Putri yakni Ust. Drs. KH. Imam Bajuri, M.Pd.I. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dan analisis data mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman yakni reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Serta untuk metode keabsahan data digunakan metode triangulasi sumber data.

2. Toleransi Antar Umat Beragama

Toleransi berasal dari bahasa latin yakni *tolerantia*, dengan makna kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.[202] Dan toleransi menurut Webster's New American Dictionary berarti *liberty toward the opinions of others, patience with others*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain, serta berlaku sabar ketika menghadapi orang lain.[203] Sedangkan toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat atau sikap toleran yang tercermin dari interaksi dua kelompok yang berbeda kebudayaan dan dapat saling berhubungan dengan baik.[204] Toleransi haruslah didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, sikap terbuka, dialog interaktif, serta kebebasan berpikir dan beragama. Pendek kata toleransi setara dengan sikap positif untuk menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan hak asasi sebagai manusia.[205] Jadi toleransi merupakan sikap lapang dada terhadap prinsip hidup orang lain, namun bukan berarti mengorbankan prinsip atau kepercayaan yang dianutnya, melainkan sikap yang teguh dan tidak mudah goyah dalam memegani keyakinan dan prinsip hidup.

---

[202] Homby AS, "Oxford Advanced Learner's Dictionary" (Oxford: University Printing House, 1995), 67.

[203] Lely Nisvilyah, "Toleransi Antarumat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa," *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1, Volume 2 (2013): 383.

[204] "Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline," t.t.

[205] Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No. 2, Volume I (Juli 2016): 188.

Toleransi antar umat beragama adalah toleransi yang mencakup berbagai permasalahan terkait keyakinan dalam diri setiap individu yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakini olehnya. Setiap manusia harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan mengimani suatu agama yang dipilihnya serta melaksanakan dan menghormati seluruh ajaran dari agama yang dianutnya.[206] Sehingga, jika seseorang dapat menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari maka ia tidak akan memaksakan keyakinan yang dianutnya kepada orang lain. Sebab, memeluk suatu agama adalah hak dan kebebasan setiap individu. Selain dari pada itu, seseorang yang menerapkan sikap toleransi akan menghormati dan menghargai pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan ibadah ataupun merayakan hari besar mereka.

Menurut Mohammad Daud Ali, Prinsip toleransi antar umat beragama mencakup: (1) Tidak dibenarkan melakukan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, baik paksaan secara halus maupun kasar; (2) Setiap manusia memiliki hak untuk memilih dan memeluk suatu agama yang diyakininya, serta melaksanakan ibadat menurut keyakinannya tersebut; (3) Memaksa seseorang supaya mengikuti suatu keyakinan tertentu akan menjadi suatu hal yang tidak berguna; (4) Tuhan yang Maha Esa pun tidak melarang umatnya untuk hidup bermasyarakat dengan orang yang tidak sefaham dan tidak seagama, hal tersebut ditujukan untuk menghindari

[206] J. Cassanova, *Public Religions In The Modern World* (Chicago: Chicago University Press, 2008), 87.

munculnya sikap saling bermusuhan.[207] Prinsip toleransi antar umat beragam tersebut hendaknya menjadi acuan hidup beragama seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh warga Indonesia dapat hidup bersama dan berdampingan dalam keadaan harmonis dan tentram tanpa adanya konflik antar umat beragama.

Bentuk-bentuk toleransi yang harus ditegakkan di Indonesia adalah: toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah bentuk toleransi yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah, toleransi ini tercermin melalui sikap lapang dada untuk memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain beribadah menurut ketentuan agama yang diyakininya. Sedangkan, toleransi sosial adalah bentuk toleransi yang berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan.[208] Jadi, warga Indonesia hendaknya menerapkan kedua macam toleransi tersebut, lebih-lebih toleransi agama. Sebab, akhir-akhir ini sering kita dapati kabar terkait konflik yang mengatas namakan agama. Bahkan, seringkali konflik tersebut terjadi pada hari-hari besar agama tertentu.

3. Islam dan Toleransi Beragama

Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama dalam agama Islam telah menjelaskan bahwa pluralitas merupakan suatu kenyataan objektif dalam komunitas umat manusia, hal tersebut merupakan *sunnatullah* atau hukum Allah. Sehingga, hanya Allah yang maha tahu dan mampu

[207] Nisvilyah, "Toleransi Antarumat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa," 384.
[208] Nisvilyah, 384.

menjelaskan alasan adanya perbedaan sesama manusia, serta perbedaan jalan manusia dalam menentukan agama dan keyakinannya. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah disebutkan, yang artinya: *"Untuk masing-masing dari kamu (Umat manusia) telah kami tetapkan Hukum (Syari'at) dan jalan hidup yang terang (minhaj). Jika Allah menghendaki, niscaya kamu sekalian akan dijadikan-Nya satu umat yang tunggal (monolitik) saja, tetapi Allah hendak mengujimu dengan karunia yang diberikan-Nya kepadamu. Maka berlombalah kamu sekalian untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali, maka Dia akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang perkara yang pernah kamu perselisihkan*" (QS. 5: 48).[209]

Dalam Surat Yunus Allah juga menjelaskan tentang pluralitas umat manusia, Allah juga menegur Nabi Muhammad SAW yang berkeinginan keras untuk memaksa umat manusia menerima dan mengikuti ajaran agama Islam yang ia sampaikan, dalam ayat tersebut dijelaskan yang artinya: *"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah seluruh manusia di muka bumi ini beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman di luar kesediaan mereka sendiri?"* (QS. 10: 99).[210]

Demikianlah beberapa prinsip dasar menurut Al-Qur'an terkait masalah pluralisme dan toleransi. Setidaknya Al-Qur'an dalam tataran konseptual telah memberikan arahan-arahan bagi umat Muslim untuk memecahkan permasalahan kemanusiaan yang universal, yaitu realitas tentang pluralitas keberagaman umat manusia, serta

[209] Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: dharma art, 2015), 116.
[210] 220.

tuntutan untuk bersikap toleransi terhadap pluralitas dan multikulturalisme demi tercapainya perdamaian di muka bumi ini. Sebab, menurut Islam syarat untuk mencapai keharmonisan adalah pengakuan dan toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman.

Selain dari pada itu, saat ini kita berada di era multikulturalisme dan pluralisme, dimana seluruh masyarakat dari segala unsur kehidupan dituntut untuk saling tergantung dan menanggung nasib secara bersama-sama demi tercapainya perdamaian yang abadi. Demi tujuan tersebut, pendidikan dianggap sebagai sebuah instrumen penting. Sebab, sampai saat ini pendidikan masih diyakini memiliki peran besar dalam membentuk karakter setiap individu yang dididiknya, serta mampu menjadi "*guiding light*" bagi generasi muda penerus bangsa. Dalam konteks inilah pendidikan agama khususnya pesantren diharapkan menjadi media penyadaran umat demi tercapainya harmonisasi agama-agama (yang menjadi kebutuhan masyarakat agama saat ini).

Menurut Alex R. Rodger (1982) dalam Ali Maksum, "Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi membantu perkembangan pengertian yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda agama, sekaligus untuk memperkuat ortodoksi keimanan bagi mereka".Artinya, pendidikan agama mampu menjadi wahana untuk mengeksplorasi sifat dasar keyakinan agama dalam proses pendidikan, sehingga secara khusus dapat mempertanyakan keberadaan pendidikan keimanan dalam masyarakat. Dengan begitu,

pendidikan agama seharusnya mampu merefleksikan persoalan pluralisme dengan cara mentranmisikan nilai-nilai pendidikan yang ada, guna menumbuhkan sikap toleransi, keterbukaan dan kebebasan dalam diri generasi muda.[211]

4. Peran Pendidikan Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.[212] Pondok pesantren berasal dari dua istilah yang mengacu pada satu pengertian. Suku Jawa biasa menggunakan istilah pondok/pesantren atau pondok pesantren, di Sumatra Barat disebut *Surau*, di Aceh disebut *Meunasah, rangkang* dan *dayah*.[213]

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam memiliki lima elemen pokok, yaitu: (1) Pondok/Asrama: sebagai tempat tinggal bagi para santri. Pondok inilah yang menjadi ciri khas pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lainnya, (2) Masjid: menjadi tempat untuk mendidik para santri baik sebagai tempat untuk praktik sholat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dsb., (3) Pengajaran kitab-kitab klasik: merupakan tujuan utama di pondok pesantren,

[211] Ali Maksum, "Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern dan Salaf," *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1, Volume 03 (Mei 2015): 88–89.
[212] Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), 82.
[213] Haidar Putra Dauly, *Historis dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana, 2001), 36.

baik melaui model sorogan, weton maupun bandongan, (4) Santri: merupakan sebutan untuk siswa/murid yang belajar di pondok pesantren, dan (5) Kyai: merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata kyai sendiri merupakan gelar yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam dan menjadi pimpinan pesantren serta mengajarkan kitab-kitab klasik.[214]

Secara umum pesantren diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *pesantren salaf* atau tradisional adalah pesantren yang kegiatan pendidikannya semata-mata berdasarkan pola-pola pengajaran klasik atau lama, yakni melaksanakan pengajian kitab kuning dengan metode pembelajaran tradisional yang belum dikombinasi dengan pola pendidikan modern. *Pesantren khalaf* atau modern adalah pesantren yang disamping tetap melestarikan unsur-unsur utama pesantren, menambahkan unsur-unsur modern ke dalam kegiatan pendidikannya baik melalui sistem klasikal atau sekolah dan penambahan ilmu-ilmu umum dalam muatan kurikulum.[215]

Peran pesantren secara konvensional adalah melakukan proses transfer ilmu agama Islam, mencetak kader ulama' dan mempertahankan tradisi yang ada. Namun seiring berjalannya waktu, pesantren dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan baru terkait proses modernisasi.[216] Hal tersebut mengharuskan pesantren

[214] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1983), 18.

[215] DEPAG RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 8.

[216] Sri Haningsih, "Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi*, No. 1, Volume

mengambil lebih banyak peran dalam mencetak generasi islami dan humanis.

Di era modernisasi seperti saat ini, tuntutan terhadap peran pesantren semakin kompleks. Problem-problem sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti masalah disintegrasi, kemiskinan dan kemunduran akhlak yang merajalela, menuntut peran pesantren menjadi pengurai problem tersebut. Sehingga, pesantren diharapkan kedepannya tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan terkait faham keagamaan semata, namun juga diharapkan dapat terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah terkait problem sosial ekonomi yang terjadi saat ini.

Dengan demikian, esensi peran strategis pesantren mencakup dua hal pokok, yaitu: mencetak kader ulama' yang mendalami ilmu agama, dan pada saat yang bersamaan pesantren diharapkan mampu mengetahui, terampil dan peduli terhadap persoalan *keummatan.* Peran pesantren kedepan adalah sebagai tempat pencetak kader "*faqih fi 'ulum al'din*" dan "*faqih fi mashalih al-ummah*". Lulusan pesantren diharapkan menjadi orang yang baik dari segi agama dan pandai mengadapi persoalan umat yang kompleks. Dengan demikian, dimungkinkan pesantren terlibat maksimal dalam membangun bangsa ini. Sebab, melalui pesantren akan tercetak santri-santri yang siap terjun di masyarakat luas.[217]

1 (2008): 34.

[217] Haningsih, 36–37.

Pendidikan dan Toleransi di Pondok Pesantren Al-Iman Putri

Pondok Pesantren Al-Iman Putri merupakan salah satu Pondok Pesantren yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren ini merupakan Pondok Alumni Gontor, artinya Pondok ini didirikan oleh alumni Pondok Modern Gontor. Kurikulum yang digunakan di pondok ini adalah perpaduan dari kurikulum pondok modern Gontor (*Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah/KMI*), kurikulum pondok pesantren salaf (*Pengajian kitab kuning dengan metode weton dan sorogan*) serta kurikulum Nasional (Mts/MA dan SMK).

Pondok pesantren Al-Iman putri menerapkan penggunaan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa resmi dalam keseharian para santri, serta menggunakan kedua bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar, kecuali mata pelajaran tertentu yang harus disampaikan dengan bahasa Indonesia. Salah satu motto tentang kebahasaan di Pondok ini adalah "Bahasa Arab dan Bahasa Inggris merupakan mahkota pondok". Prinsip penggunaan bahasa Arab dimaksudkan supaya para santri memiliki dasar kuat tentang bahasa Arab, serta mempermudah para santri untuk memperdalam kitab-kitab berbahasa Arab dan belajar ilmu keagamaan mengingat dasar-dasar hukum Islam ditulis dalam bahasa Arab. Sedangkan Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, sehingga dengan memperdalam bahasa Inggris maka para

santri dapat lebih mudah mempelajari ilmu pengetahuan umum.[218]

Harmonisasi antar umat beragama sering menuai permasalahan tatkala masing-masing pihak bersikukuh meyakini kebenaran agama yang dianutnya, bahkan ada sebagian oknum yang bersikukuh memaksakan agamanya kepada penganut agama lain. Untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini, Pondok Pesantren Al-Iman Putri menerapkan pendidikan toleransi melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan rasa toleransi dalam diri setiap santri. Pembelajaran tersebut diajarkan melalui pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan perintah bertoleransi. Ayat-ayat tersebut diajarkan dan dibahas secara mendetail dalam pembelajaran materi Tafsir. Selain itu, pembelajaran toleransi juga dijadikan sebagai salah satu tema dalam kegiatan *fatkhul kutub* dan *imamah & khitobah* dalam program kelas akhir. Dalam kegiatan *fatkhul kutub* santri yang mendapat tema tentang toleransi akan mencari ayat-ayat dan hadits-hadits terkait toleransi, kemudian menuliskannya dalam sebuah *paper* dan mempresentasikan hasil tulisannya dalam *halaqoh-halaqoh* yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian dalam kegiatan *imamah & khitobah* santri yang mendapat tema tentang toleransi akan menuliskan sebuah teks pidato/ceramah tentang urgensi toleransi, kemudian menyampaikan pidatonya di depan teman satu *halaqoh* sesuai dengan pembagian panitia.[219]

---

[218] "Informasi Tahunan Pondok Pesantren Al-Iman," *Ponorogo*, 2011, 8.

[219] Observasi, "Kegiatan Fatkhul Kutub dan Imamah Khitobah Pondok Pesantren Al-Iman," 10 Mei 2017.

Penanaman rasa toleransi dalam diri setiap santri di Pondok Pesantren Al-Iman Putri tercermin dalam materi pembelajaran seperti berikut ini: Islam melalui al-Qur'an dengan tegas malarang setiap orang yang beriman untuk memaksakan agamanya kepada penganut agama lain. Bahkan Al-Qur'an menjamin kebebasan beragama kepada setiap umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah yang artinya: *"Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan terputus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (QS: 01: 256).[220]

Oleh sebab itu, hendaknya umat Islam bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk memeluk Islam. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl disebutkan cara untuk menyebarkan agama atau berdakwah secara santun, yang artinya: *"Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik".* (QS: 16: 125).[221]

Bahkan Al-Qur'an melarang dengan tegas umat manusia untuk berbantah-bantahan mengenai Tuhan (Allah) dan keyakinan dalam beribadat, baik antar pemeluk agama maupun dengan penganut agama lainnya. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah disebutkan, yang artinya: *"Katakanlah wahai (Muhammad) Apakah kamu hendak berdebat*

[220] *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 42.
[221] 281.

dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri". (Q.S: 1: 139).[222] Dan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kafirun disebutkan, yang artinya: *"Katakanlah (Muhammad): Wahai orang-orang kafir!. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yan aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku"*. (Q.S: 109: 1-6).[223]

Dalam perspektif Islam, pendidikan toleransi tidak dapat dipisahkan dengan konsep pluralitas, sehingga muncullah istilah Islam Pluralis-Multikultural. Konstruksi pendidikan semacam ini berorientasi terhadap proses penyadaran umat untuk berwawasan pluralis secara agama, sekaligus memiliki wawasan multikultural. Dalam kerangka yang lebih luas, kontruksi pendidikan semacam ini dapat diposisikan sebagai upaya yang komprehensif dan sistematis untuk mencegah terjadinya konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme dan integrasi bangsa. Adapun nilai dasar dari konsep pendidikan semacam ini adalah toleransi.[224]

Islam inklusif adalah sebuah paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama lain yang ada di dunia ini mengandung kebenaran dan dapat memberikan

[222] 21.
[223] 603.
[224] Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).

manfaat serta keselamatan bagi penganutnya. Paham semacam ini menunjukkan tentang adanya kemajemukan dalam kehidupan. Sebaliknya, paham eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, agama, pikiran, pandangan dan prinsip diri sendirinyalah yang paling benar. Sementara keyakinan, agama, pikiran, pandangan dan prinsip diri yang dianut orang lain adalah salah, sesat, harus dijauhi bahkan harus dimusuhi.[225]

Dalam hal ini, Pondok Pesantren Al-Iman Putri menerapkan pendidikan toleransi melalui penetapan bahasa resmi untuk percakapan sehari-hari serta larangan penggunaan bahasa daerah, sehingga seluruh santri belajar untuk menekan rasa keakuan dan ego diri dengan latar belakang ras atau suku tertentu. Sebaliknya, para santri akan merasakan suasana kekeluargaan di lingkungan asrama pesantren. Mengingat seluruh santri berasal dari daerah yang berbeda, dan seluruh mereka tinggal jauh dari keluarga. Maka mereka diharapkan dapat menjadikan sesama santri sebagai keluarga baru mereka saat ini. Selain dari pada itu, melalui kegiatan-kegiatan yang telah diterapkan, diharapkan para santri dapat memahami keragaman yang ada di Indonesia. Serta tersadar untuk terus ikut menjaga keharmonisan dari keragaman ras, suku, budaya, etnis dan agama yang ada di Indonesia.

[225] Ade Wijdan SZ. dan Dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007).

Model Pendidikan Toleransi di Pondok Pesantren Al-Iman Putri

Pondok Pesantren Al-Iman putri telah menerapkan pendidikan berwawasan toleransi melalui berbagai kegiatan, baik melalui pengajaran formal di dalam kelas maupun melalui pembiasaan diri dalam kehidupan sehari-hari santri di lingkungan pondok pesantren. Pendidikan formal toleransi diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran, yaitu melalui materi Pendidikan Kewarganegaraan, Tafsir dan hadits. Di luar kelas, pendidikan formal toleransi juga diimplementasikan melalui kegiatan program akhir kelas enam, yaitu kegiatan *fatkhul kutub* dan *imamah khitobah.*

Dalam bidang non formal, Pesantren memiliki lebih banyak waktu untuk mengimplementasikan pendidikan toleransi, sebab santri tinggal di pondok pesantren selam 24 jam. Oleh sebab itu, pondok pesantren memiliki banyak kesempatan untuk menyisipkan berbagai macam bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari santri melalui aturan dan disiplin pondok. Salah satu pola toleransi tersebut adalah implementasi sistem pendidikan toleransi dan multikultural melalui penentuan tempat pemodokan (kamar) santri diasrama. Di pondok Pesantren Al-Iman Putri dan nyaris diseluruh pondok modern tidak diberlakukan penempatan permanen untuk kamar santri. Artinya, seluruh santri pasti mengalami perpindahan kamar secara sistematis ke kamar lain, hak tersebut bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial terhadap keragaman mereka. Mengingat santri di Pondok tersebut berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia, bahkan terdapat santri yang berasal

dari luar Negeri. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai media santri untuk belajar bertoleransi terhadap sesama santri. Perbedaan suku, budaya, kewarganegaraan dan latar belakang keluarga yang ada akan berimpliksi pada perbedaan sifat, watak dan karakter setiap santri. Sehingga dengan penempatan yang bergantian secara sistematis, setiap santri akan belajar membiasakan diri untuk hidup di tengah-tengah multikulturalisme dan dapat memupuk sikap toleransi mereka.[226]

Disamping itu, pendidikan toleransi lainnya direalisasikan melalui pemberlakuan aturan dalam penggunaan bahasa dalam percakapan sehari-hari santri. Peraturan pondok melalui bagian bahasa dan pengasuhan pondok mengharuskan santri menggunakan bahasa resmi Arab dan Inggris untuk percakapan sehari-hari, atau menggunakan bahasa Indonesia dalam beberapa kesempatan dan kepentingan tertentu saja, serta melarang santri berbicara menggunakan bahasa daerah. Tujuan pemberlakuan peraturan ini adalah untuk memahamkan santri terkait multikulturalisme dalam hal bahasa, serta mengajarkan santri untuk menjadikan penggunaan bahasa resmi sebagai jalan keluar menyikapi perbedaan dan multikulturalisme bahasa yang ada. Sehingga, seluruh santri dapat hidup berdampingan dengan aman, nyaman, tentram dan tidak ada rasa curiga terhadap perkataan sesama santri di lingkungan pondok pesantren.[227]

---

[226] Wawancara dengan Direktris Pondok Pesantren Al-Iman Putri (Usth. Hj. Sa'iyah Umma Taqwa, MA), pada tanggal 29 Juli 2017.

[227] Wawancara dengan bagian pengasuhan santri (Usth. Maria Ulfah), pada tanggal 29 Juli 2017.

Pendidikan sikap multikulturalistik di Pondok Pesantren Al-Iman Putri juga diimplementasikan dalam kegiatan *khutbatul Iftitah* atau kegiatan pembuka di awal tahun ajaran baru. Dalam kegiatan ini, para santri diberikan wawasan tentang keberagaman kultur dan budaya seluruh santri. Pada permulaan kegiatan ini dilaksanakan kegiatan apel tahunan, dimana seluruh santri dikumpulkan dalam satu lapangan untuk melaksanakan apel, kemudian dilaksanakan parade baris berbaris berdasarkan konsulat/daerah masing-masing. Dalam kegiatan ini, parade baris per-konsulat dilombakan, dengan tujuan meningkatkan rasa solidaritas antar sesama santri yang berasal dari daerah yang sama. Dan pada akhir kegiatan ini dilaksanakan malam puncak *khutbatul Iftitah* yang diberi nama "Panggung Gembira Maestro". Pada acara ini, terdapat berbagai pertunjukan seni, budaya, kreasi dan kreativitas santri. Selain itu, dilaksanakan juga lomba demonstrasi keunikan khazanah dan budaya daerah santri. Kegiatan ini ditujukan sebagai *Takbiratul Ikhram* pondok dalam memulai kegiatan selama satu tahun kedepan, serta melalui kegiatan ini seluruh santri dikenalkan dengan wawasan kebhinekaan yang terdapat dalam miliu pesantren yang mereka huni saat ini.[228]

Berdasarkan temuan tersebut, pendidikan toleransi di Pondok Pesantren Al-Iman Putri diterapkan melalui kegiatan pengajaran formal dan bidang non formal. Sehingga, pendidikan toleransi diberikan melalui pembelajaran di dalam kelas, melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler serta diterapkan melalui kegiatan-kegiatan non formal.

[228] Observasi "Malam Panggung Gembira Maestro" di Pondok Pesantren Al-Iman Putri, pada tanggal 12 Agustus 2017.

Hal tersebut ditujukan, supaya miliu pondok pesantren dapat menjadi gambaran kehidupan bermasyarakat para santri. Dan melalui miliu kecil ini, diharapkan para santri mampu menanamkan rasa solidaritas serta toleransi pada sesama santri, sehingga hal tersebut dapat menjadi bibit dari toleransi antar umat beragama yang tertanam dalam diri setiap santri.

Penutup

Toleransi beragama di Indonesia berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Perbedaan suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama tidak akan menuai konflik, jika toleransi menjadi budaya setiap warga Indonesia. Toleransi dalam menentukan keyakinan, melaksanakan ibadah serta merayakan hari besar setiap agama merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga, sebab kebebasan berkeyakinan dan beribadah merupakan hak setiap manusia. Adapun degradasi kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat diatasi dengan mengimplementasikan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, hendaknya mampu berperan menjadi agen perubahan masyarakat. Melalui penerapan toleransi sosial dan agama, hendaknya pesantren mampu mencetak santri-santri yang terampil dan peduli terhadap persoalan *keummatan*, yakni santri yang "*faqih fi 'ulum al'din*" dan "*faqih fi mashalih al-ummah*".

Pesantren merupakan miliu santri yang menjadi gambaran kehidupan bermasyarakat. Sehingga, penanaman rasa solidaritas dan toleransi terhadap sesama santri

ditujukan untuk menanamkan bibit rasa toleransi antar umat beragama. Dan Proses penerapan toleransi di Pondok Pesantren Al-Iman Putri dilakukan melalui penetapan bahasa resmi untuk percakapan sehari-hari serta larangan penggunaan bahasa daerah. Selain itu, proses penerapan dilakukan melalui kegiatan pengajaran formal di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta melalui kegiatan non formal pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

AS, Homby. "Oxford Advanced Learner's Dictionary." Oxford: University Printing House, 1995.

Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Agama. *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural." *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No. 2, Volume I (Juli 2016).

Cassanova, J. *Public Religions In The Modern World*. Chicago: Chicago University Press, 2008.

Dauly, Haidar Putra. *Historis dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana, 2001.

DEPAG RI. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3S, 1983.

Haningsih, Sri. "Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi*, No. 1, Volume 1 (2008).

"http://indonesia.ucanews.com.," Agustus 2018.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline," t.t.

Kemenag RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Jakarta: dharma art, 2015.

Maksum, Ali. "Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern dan Salaf." *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1, Volume 03 (Mei 2015).

Nafis, HM. Muntahibun. "Pesantren dan Toleransi Beragama." *Jurnal Ta'allum*, No. 2, Volume 2 (Nopember 2014).

Naim, Ngainun, dan Achmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Nasir, Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.

Nisvilyah, Lely. "Toleransi Antarumat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa." *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1, Volume 2 (2013).

Syafi'i, HM. Nurdin. "Kontribusi Pesantren dalam Mencetak Generasi Mandiri." Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008.

SZ., Ade Wijdan, dan Dkk. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007.

"Tabloit Reformata Edisi 155," September 2012.

Literasi Informasi dan Keterampilan Berbahasa dalam Konteks Kurikulum Perguruan Tinggi Islam

Oleh: Lukman Hakim dan Muhammad Heriyudanta

Abstract: *The development of information technology requires everyone, especially the educated, to be able to take advantage of it. The literacy skills of students in Indonesia are still very concerning. They are less able to take advantage of information sources in print and internet media. At the same time, Higher Education applies the KKNI curriculum in which each study program must determine the competence of its graduates. Information literacy competencies are needed to translate the demands of these colleges with students having to be able to find, organize, process, and use information appropriately and responsibly. This paper attempts to describe what information literacy is, the importance of information literacy in higher education, information literacy core competencies, and the relationship between the KKNI curriculum and information literacy.*
Keywords: *Information literacy, College, curriculum*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi mengharuskan semua orang terutama kalangan terpelajar untuk mampu memanfaatkannya. Kemampuan literasi mahasiswa di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Mereka kurang mampu untuk mengambil keuntungan dari sumber informasi media cetak maupun internet. Pada saat yang bersamaan, Perguruan Tinggi menerapkan kurikulum KKNI yang didalamnya setiap prodi harus menentukan kompetensi lulusannya. Kompetensi literasi informasi diperlukan untuk menerjemahkan tuntutan perguruan tinggi tersebut dengan mahasiswa harus mampu untuk mencari, mengorganisasikan, mengolah, dan menggunakan informasi secara tepat dan bertanggungjawab. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan apa itu

literasi informasi, pentingnya literasi informasi di Perguruan Tinggi, kompetensi Inti literasi informasi, dan keterkaitan kurikulum KKNI dan literasi informasi.
Kata kunci: Literasi informasi, Perguruan Tinggi, kurikulum

Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan ini banyak lembaga pendidikan dari berbagai jenjang mulai dasar sampai Perguruan Tinggi sedang berusaha merintis literasi informasi. Dalam istilah lain, literasi informasi merupakan bahasa terjemahan dari *information literacy*. Berbicara mengenari literasi menjadikan istilah literasi informasi sebagai keberaksaraan informasi atau melek informasi. Kemampuan literasi mahasiswa dipandang sangat urgen dalam menyikapi pergerakan dunia global yang begitu masif sehingga ini menjadi bagian dari program pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Untuk istilah yang lebih luas , literasi informasi dimaknai sebagai pemberdayaan manusia kaitannya dengan pemerolehan informasi [229]. Literasi Informasi adalah kemampuan seseorang dalam berliterasi yang diukurdalam indikataor yang ada dalam literasi informasi [230]. Literasi informasi memiliki hubungan yang dengan dengan dunia pendidikan. Dalam perkembangannya, masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan memandang keterampilan yang ingin dimiliki dalam kegiatan litrasi informasi, yaitu berupa keterampilanyang tidak mendatangkan permasalahan.,

[229] Jonner Hasugian, "Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi" 4, no. 2 (2008): 11.

[230] Sitti Husaebah Pattah, "Literasi Informasi: Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam Proses Pembelajaran," *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 2, no. 2 (2014): 108–119.

artinya kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mencari atau menemukan informasi adalah untuk saling bertukar informasi. Baik antara dosen ke mahasiswa, administrasi ke mahasiswa dan dosen,dan sebaliknya.

Mahasiswa diharapkan memeroleh pengetahuan cukup dalam literasi informasi. Kemudian, setelah mahasiswa memiliki itu,diharapkan mereka memiliki kemampuan berpikir kritis. Mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir ilmiah dan akan menambah motivasi untuk giat belajar. Pada gilirannya pelatihan program literasi informasi diperlukan guna memahamkan mahasiswa akan manfaat dari program ini. Wikipedia Indonesia mengatakan bahwa pada dasarnya literasi informasi adalah kemampuan untuk menemukan dan menggunakan informasi dalam kehidupan. Disangkut pautkan dengan era sekarang yang semua berbasis digital tentu sangat dibutuhkan. Informasi tersebar secara bebas tanpa batas di di berbagai media. Kecakapan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan mampu memilah secara kritis harus dimiliki mahasiswa. Meraka harus mampu mengaplikasikan informasi yang dipelajari dengan bertanggungjawab.

Menumbuhkan semangat literasi diperlukan agar mampu terbiasa melakukan akses pada berbagai jenis informasi elektronik. Akses terhaadap berbagai macam sumber elektronik sekarang telah menjadi keharusan meningat era ini informasi dalam bentuk cetaksudah terbatas dan sebaliknya berbagai bentuk informasi sekarang sudah dalam bentuk elektronik dan semua orang mampu dengan mudah mengakses dengan gawainya. Harusnya

dengan demikian proses belajar harus memanfaatkan berbagai informasi berformat elektronik. Untuk dapat belajar lebih efektif dan efisien, keterampilan mencari dan menemukan informasi dapat sangat membantu. Mahasiswa dan seluruh civitas akademika akan sangat terbantu untuk mencari lautan informasi sesuai kebutuhannya. Kemudian juga dapat digunakan sebagai referensi setiap karya yang akan dibuat. Program penguatan literasi informasi akan sangat berguna dan dianggap mampu menciptakan iklim akademik berbasis literasi baik digital maupun non digital. Kemampuan yang diharapkan juga berbentuk memilih bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan dengan cerdas dan menyajikannya kembali secara etis.[231]

Dilihat dari peta perkembangannya, sebenarnya literasi informasi merupakan bukan hal yang baru dalam merefleksikan tuntutan perkembangan jaman dalam era informasi saat ini. Literasi informasi sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak belasan tahun lalu dan sebenarnya jika dilihat dari hakikatnya tidak ada banyak perubahan. Yang membedakan hanyalah jumlah dan bentuk informasi yang tersedia saat ini. Informasi yang ada pada era digital begitu massif dan tak terkira jumlahnya. Semua ora bisa mengakses begitu cepat dan mudah. Kejadia yang berada dibelahan dunia lain sepersekian detik sudah bisa dibaca dalam gawainya. Jika diibaratkan seperti dunia dalam genggaman. Jika ditarik ke belakang sekitar beberapa puluh tahun lalu sumber informasi yang tersedia

[231] B. Webber & Johnston, "Conception of Information Literacy: New Perspective and Implications," *Journal of Information Science* 26, no. 0 (2000): 6.

sebagian besar didapat dari media cetak, seperti surat kabar,jurnal,buku,dan terbitan pemerintah. Akan tetapi untuk era saat ini sumber informasi didominasi oleh media yang lebih cepat dan mudah berbentuk internet. Bahkan jurnal inliah pun, sekarang yang menjadi acuan kualitas dan akreditasinya adalah terbitan onlinnya. Yang menjadi pengecualian adalah buku. Bentuk informasi dalam bentuk buku sepertinya adan bertahan cukup lama karena didasari oleh banyak faktor, semisal kepuasan membaca, kecintaan terhadap buku, prestise, dan banyak faktor lainnya yang membuat buku tidak bisa tergantikan oleh media digital.

Walaupun kebutuhan untuk mencari informasi telah ada sejak dahulu, hamun bentuk informasi yang didapatkan dan cara mendapatkannya tentuk telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga yang kita tau pada era ini semakin kompleks sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi yang ada di era ini menunjukan suatu realita bahwa kemampuan untuk menguasai literasi informasi sangan diperlukan. Literasi informasi sangat diperlukan oleh semua orang karena mereka dihadapkan pada benyaknya pilihan informasi yang ada. Teknologi memungkinkan begitu mudahnya informasi diakses dan digunakan. Kemampuan untuk menguasai literasi informasi tidak hanya diperuntukan bagi mahasiswa dalam mencari dan mengerjakan tugas kuliah, tetap juga sangat berguna di dunia kerja saat mereka telah lulus kuliah.

Pentingnya penguasaan literasi informasi telah disadari oleh banyak pengelola pendidikan tinggi pemerintah

maupun swasta, tak terkecuali di PTKIN. Akan tetapi kemungkinan masih belum disadari. Kurikulum berbasis KKNI yang telah digunakan di perguruan tinggi saat ini menjadikan literasi sangat penting untuk dikuasai oleh dosen dan mahasiswa. Kurikulum KKNI menuntut para stekholder dan pelakunya untuk lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang ada di lingkungan. Penguasaan literasi informasi tidak berhenti pada tujuan membuat mahasiswa menjadi insan yang *information literate*, yang sebagian besar untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas akademiknya, tetapi untuk memberikan pemahaman secara lebih karena ilmu terus berputar sehingga dapat diajarkan kepada orang di lingkungan kerjanya. Tulisan ini berusaha mengorek lebih dalam terkait literasi informasi terutama di perguruan tinggi keislaman yang menarik untuk digali informasinya dengan terlebih dahulu menguraikan tentang apa itu literasi informasi, model, dan urgensinya dalam merefleksikan kurikulum KKNI di Perguruan Tinggi.

Literasi Informasi

Literasi informasi telah banyak yang mendefinisikan berdasar pada kondisi dan perkembangan di lingkungan pelakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, literasi informasi didevinisikan sebagai keterampilan melakukan riset dan menganalisis informasi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan[232]. Sedangkan menurut pengertian lain, literasi informasi adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menelusuri,

[232] Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," *KBBI Indones*, 2012.

menganalisis, memanfaatkan informasi[233]. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi dapat diperoleh dari perpustakaan, internet, video, gambar, dan masih banyak lainnya. Banyaknya informasi yang ada dalam dunia maya disebabkan karena saat ini siapa saja dapat dengan mudah memberikan informasi dalam berbagai format. Hal ini juga didukung dengan hampir semua orang yang sudah memiliki gawai pintar dan PC[234] hadirnya internet yang semakin murah dan menjangkau berbagai macam golongan menjadikan setiap orang menyadari pentingnya *information skil*[235]*l*.Menemukan kembali informasi yang telah disimpan merupakan pengertian menelusur. Dalam dunia internet ada istilah *search engine* untuk menelusur informasi. Dalam lingkup pesantren misalnya informasi dapat diperoleh dari guru ngaji dan kyainya.

Sejak sekitar awal 90an sebenarnya literasi informasi sudah menjadi hal yang familiar dan dilakukan oleh beberapa orang terdidik. Pada waktu itu literasi informasi memiliki beberapa istilah yang berbeda namun sejatinya sama, yaitu study skills, library skills,dan research skills yang sebagian besar digunakan pada lingkungan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran tidak terlepas dari dunia literasi dan informasi. Setiap apa yang menjadi objek study selalu up to date sehingga pembaharuan perlu untuk dipelajari dari waktu ke waktu. Untuk lingkungan kerja baik produksi maupun jasa, istilah literasi informasi

[233] A. Bundy, *For a Clever Country; Information Literacy Diffusion in the 21st, 2001*, 2009.
[234] Sri Melani, "Literasi Informasi Dalam Praktek Sosial," *IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)* 10, no. 02 (2016): 67–82.
[235] Pattah, "Literasi Informasi."

memiliki kesamaan dengan istilah *information competencies* dan *information proficiencies*. Berbagai macam istilah dalam setiap bidang yang berbeda-beda sebenarnya sama,yaitu mengenai kemampuan menemukan, mengidentifikasi, membandingkan, mengevaluasi,dan menggunakannya dengan lebih efektif. Perkembangan literasi informasi telah mengalami pergeseran arah dalam kaitannya dengan sumbernya, misalnya pada awal tahun 90an informasi masih sedikit terbatas dan lambat karena pada waktu itu sebagian besar masih berupa media cetak. Sedangkan untuk golongan yang lebih beruntung dapat memperoleh dari TV dan radio. Akan tetapi pada saat itu juga masih terbatas dan dimonopoli oleh pemerintah. Menginjak akhir 90an dunia sudah berkembang sangat pesat. Diawali dengan adanya internet menjadikan arus informasi kian mudah diperoleh. Era revolusi industri 4.0 yang telah menjadi bagian dari umat manusia menjadikan arus informasi menjadi tanpa batas. Dengan fakta ini yang diperlukan adalah kemampuan untuk memilah-milah dan mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di tinggat perguruan tinggi, istilah literasi informasi telah menjadi banyak perbincangan baik dalam seminar maupun pelatihan sehingga sudah menjadi popular.

Literasi informasi tidak terlepas dari adanya media yang mendukung. Bagi negara maju yang memiliki akses internet kencang dan merata penduduknya cenderung mudah untuk mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan negara berkembang masih didominasi oleh kalangan perkotaan dan terdidik saja. Dunia pendidikan

tinggi dapat menggunakan fasilitas internet untuk dapat memperoleh pelatihan literasi informasi melalui *user education* dengan berbagai macam format. Seperti yang didevinisikan Work Group on Information Literacy yang bersumber di California State University, literasi informasi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan,mengevaluasi,dan menggunakan informasi sesuai dengan yang diperlukan dengan berbagai macam bentuk. Para pencari informasi dapat melakukan beberapa langkah terpadu, yaitu. 1) mengemukakan pertanyaan, masalah, dan isu terkini, 2) menentukan informasi yang dibutuhkan, 3) mencari tempat dan menemukan informasi yang diperlukan, 4) mengorganisasikannya, 5) menganalisis dan mengevaluasi, 6) membuat sintesis dari informasi yang didapat, 7) mengomunikasikan dengan berbagai teknologi, 8) menggunakan teknologi untuk mencari informasi,9) memahami etika, sosial, dan hokum terkait informasi, 10) mengevaluasi informasi secara kritis dari media masa, 11) keahlian untuk memperoleh informasi dapat digunakan untuk belajar sepanjang hayat[236]. Di samping itu, belajar dalam kehidupan mengetengahkan bahwa belajar di dalam lingkungan atau kehidupan merupakan konsep belajar yang sesungguhnya[237]. Dalam menghadapi era digital ini, penguasaan literasi dalam kehidupan sesungguhnya

[236] Kathleen Dunn, "Assessing Information Literacy Skills in the California State University: A Progress Report," *The Journal of Academic Librarianship* 28, no. 1–2 (2002): 26–35.

[237] Hasan Subekt et al., "Mengembangkan Literasi Informasi Melalui Belajar Berbasis Kehidupan Terintegrasi Stem Untuk Menyiapkan Calon Guru Sains Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Revieu Literatur," *Education and Human Development Journal* 3, no. 1 (2018).

sangat penting karena setiap hal saat ini diarahkan menggunakan internet dan alat digital. Maka dari ini penanaman kompetensi literasi informasi pada mahasiswa perlu digiatkan. Kemampuan mahasiswa dalam berliterasi informasi juga akan memudahkan dalam keefektifan belajar[238]

Pada dasarnya beberapa devinisi literasi informasi dari berbagai praktisi, baik dalam bidang pendidikan, praktisi, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kurang lebih sama. Secara garis besar literasi informasi merupakan serangkaian kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencari infomasi yang diperlukan kemudian mengevaluasi dan menggunakannya secara tepat dan efisien. Dilihat dari sumbernya, informasi mengalami perkembangan mengikuti zaman dari cetak hingga digital. Dari terbatas menjadi bebas. Dan dari sulit sampai semua dalam genggaman. Literasi informasi harus melembaga di jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi penerjemah perkembangan zaman dengan mengetahui berbagai informasi teraktual dengan bertanggungjawab. Untuk mengembangkan pengetahuan harus didasari dengan pemahaman ihwal manfaat apa yang dicari dan digunakan. Itulah pentingnya literasi informasi. Abad 21 memberikan pesan pada semua manusia bahwa mereka harus menguasai literasi informasi.[239]

---

[238] Monica Desiria Pangestika, "Pengaruh Literasi Informasi Terhadap Efektivitas Belajar Siswa," *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 15–22.

[239] Subekt et al., "Mengembangkan Literasi Informasi Melalui Belajar Berbasis Kehidupan Terintegrasi Stem Untuk Menyiapkan Calon Guru Sains Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0."

Literasi Informasi dalam Bingkai Perguruan Tinggi

Dunia perguruan tinggi sangat bergantung pada ketersedian informasi. Perkembangan di kehidupan yang modern membuat sumber infomasi tak terbatas di perpustakaan. Dimanapun informasi bisa didapatkan. Terlebih dengan adanya internet semua civitas akademika dapat memperoleh informasi dari belahan dunia manapun. Akan tetapi bila kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya itu tidak dimiliki maka hal yang berdayaguna itu menjadi mubadzir. Lebih dari itu jika kemampuan berliterasi tidak diikuti tanggung jawab, maka hal yang berdaya guna itu bisa menjadi berbahaya. Literasi informasi menjadi sangan penting untuk tetap eksis. Mahasiswa membutuhkan kemampuan literasi untuk belajar,mengengerjakan tugas dan membuat karya ilmiah popular. Sedangkan dosen dan staf kampus membutuhkan literasi informasi untuk memberikan pelayanan maksimal pada mahasiswa dan melaksanakan tridarma. Pelayanan publik saat ini menjadi mudah dengan adanya berbagai macam aplikasi *social networking* dan juga diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk membeli media elektronik,seperti PC Tablet, gawai, laptop, dan perangkat lainnya.[240]

Literasi informasi di perguruan tinggi, khususnya dalam Perguruan Tinggi Islam merupakan keterampilan generik untuk setiap bidang ilmu. Dalam kegiatan belajar mengajar pengelola perguruan tinggi idealnya memberikan

[240] Riana Mardina, "Potensi Digital Natives Dalam Representasi Literasi Informasi Multimedia Berbasis Web Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Pustakawan Indonesia* 11, no. 1 (2011).

pelayanan maksimal untuk kebutuhan mahasiswa dan selalu berpacu menyediakan teknologi informasi terbaik. Fasilitas literasi informasi di Perguruan Tinggi sebagian besar berkaitan dengan untuk memenuhi kebutuhan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Pendidikan yang menjadi aktifitas di perguruan tinggi menekankan keterampilan literasi informasi pada aspek kognitif dan mental. Pendekatan kognitif dan mental merupakan hal yang dilakukan untuk membentuk generasi *21th Of Century*. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai pendekatan Cartes (*Cartesian Approach*), yaitu kegiatan belajar mengajar dikatakan berhasil bilamana ada perubahan mental, sebagai contoh dari anak yang memiliki sikap pemarah menjadi anak yang santun. Dari anak yang kurang pandai menjadi anak yang pandai. KKNI di Perguruan Tinggi harus memberikan profil lulusan sesuai dengan prodinya,yaitu dari yang tidak berkompetensi menjadi berkompetensi dalam bidangnya, dari yang hanya berminat menjadi kompeten.[241]

Fasilitas yang mendukung literasi informasi banyak sekali jika mampu dimanfaatkan dengan maksimal. Fasilitas itu berbentuk cetak,elektronik, gambar, spatial, audio, ataupun kode kode tertentu. Dari banyaknya fasilitas itu harusnya pencari informasi tidak merasa haus akan data-data faktual yang bisa dicari dengan mudah. Fakta ini membuat literasi informasi sangat penting di *21th Of Century.* Permasalahan yang timbul saat ini lebih mengarah pada kemampuan memfilter dari sekian banyaknya informasi yang tersedia.

[241] Imroatus Solikhah, "KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes," *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 12, no. 1 (2015): 1–22.

Mengidentifikasi dan menelaah mana informasi yang benar dan tidak benar/bohong/hoaks. Permasalahan lain dalam informasi, yaitu ketepatan waktu dalam mengakses dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan[242]. Tujuan dari pendidikan adalah mendayagunakan informasi untuk kepentingan pengembangan diri dan dikatakan pula bahwa sumber informasi merupakan hal yang berharga .

Pendidikan semestinya mampu menggerakan dan memberdayakan semua orang sesuai kebutuhannnya. Informasi yang begitu banyak dan tidak terbatas dapat dijadikan sebagai tempat belajar dan memperbanyak pengetahuan. Mengubah informasi menjadi pengetahuan tidaklah mudah. Dari sinilah pendidikan dapat mengambil peran dengan mengarahkan, mengevaluasi, dan menggunakannnya. Dengan memiliki pengetahuan luas dari keterampilan literasi informasi memiliki manfaat yang banyak. Adapun di pendidikan tinggi, literasi informasi memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Mempunyai metode yang sudah terbukti mampu memberikan cara bagi mahasiswa untuk menemukan berbagai sumber informasi yang semakin berkambang. Dengan sumber informasi yang melimpah diharapkan mahasiswa dapat mengakses sesuai dengan yang dibutuhkan.sumber informasi di lingkungan perguruan tinggi dapat berupa perpustakaan, organisasi, komunitas, media, dosen, dan internet.

[242] Leigh Watson Healy, "The Voice of the User: Where Students and Faculty Go for Information," in *EduCause 2002 Conference, Atlanta*, 2002.

2. Meningkatkan pendidikan nasional sebagaimana tujuan pemerintah. Kompetensi literasi menjadi syarat bagi lingkungan perguruan tinggi yang progresif. Perkembangan ilmu yang dipelajari dapat selalu diikuti oleh mahasiswa yang memiliki keahlian literasi informasi.
3. Perkuliahan yang ideal perlu menyertakan technology. Informasi yang menarik dan atraktif akan membantuk mahasiswa tertarik dalam belajar. Selain itu dengan adanya teknologi, mahasiswa mampu dengan mudah mencari informasi dari berbagai sumber dengan mudah sehingga mampu mendukung
4. Melaksanakan pembelajaran yang mengarah pada pendidikan sepanjang hayat. Sebagai generasi intelektual, mahasiswa mewarisi ilmu yang cukup untuk selalu belajar dan menggali informasi dalam setiap perubahan di sekitarnya. Generasi muda yang mewarisi masa depan bangsa memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga konstruktif.

Dunia kerja juga menuntut untuk pelakinya memiliki keterampilan literasi informasi. Ada beberapa hal yang memperlihatkan pentingnya literasi informasi di dunia kerja, diantaranya jumlah informasi yang sangat banyak untuk diketahui oleh pelaku kerja, setiap tahun, kantor menghasilkan dokumen-dokumen informasiyang sangat banyak, setiap pekerja meluangkan waktu untuk membaca terkait publikasi ilmiah yang semakin banyak, ide-ide yang dapat diperoleh dengan melihat perkembangan kebutuhan masyarakat.dari beberapa contoh tersebut telah

memperlihatkan bahwa keterampilan literasi informasi sangat penting dalam dunia kerja.

Kompetensi Inti Literasi Infomasi dan Keterampilan Berbahasa di Perguruan Tinggi

Pendidikan sepanjang hayat merupakan hal yang sama dengan melakukan kegiatan literasi informasi selama hidup. setiap orang akan selalu berusaha meningkatkan taraf hidupnya dengan terlebih dahulu melakukan pengembangan diri. Bagi yang tidak ata merasa malas untuk melakukan pengembangan diri, maka hidupnya akan stagnan. Proses untuk menjadi lebih baik didahului dengan proses belajar. Ada banyak cara untuk belajar. Kompetensi literasi informasi dalam praktiknya adalah kemampuan manusia dalam mengejawantahkan hakikatnya sebagai makhluk pembelajar yang melekat dalam dirinya[243]. Keterampilan literasi informasi akan mempermudah dalam kegiatan belajar mandiri. Kompetensi literasi ini ada hubungan dengan keterampilan berbahasa seseorang. Kita tau bersama, ada empat keterampilan berbahasayang harus dikuasai, yaitu membaca, menyimak, berbicara,dan menulis. Di Perguruan Tinggi, dalam hal ini potret yang diambil adalah Pergruan Tinggi Islam, mahasiswa lebih diarahkan untuk memperbanyak berliteriasi yang terkait membaca dan menulis terlebih dengan memanfaatkan internet. Motivasi berprestasi mahasiswa dalam melakukan

[243] Pawit Muhammad Yusup and Encang Saepudin, "Praktik Literasi Informasi Dalam Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat (Information Literacy Practices in the Process of Lifelong Learning)," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 5, no. 1 (2017): 79–94.

hal ini cukup penting[244]. Terlebih mahasiswa memiliki akses yang luas untuk mendapatkan informasi dari internet.[245] Namun demikian kemampuan untuk memilah mana informasi yang diperlukan dan tidak diperlukan perlu untuk dikuasai terlebih informasi itu dapat dievaluasi dan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar.

Hanya dengan belajar, kemampuan baru dapat diperoleh dan dikuasai. Informasi yang benar dan tepat diperlukan dalam setiap pencarian informasi. Kemampuan literasi informasi bagi mahasiswa sangat penting untuk setiap pekerjaannya, terlebih mahasiswa dituntut untuk kritis dalam menyikapi informasi yang didapatkan kemudian dapat melakukan evaluasi yang memadai sehingga tidak termakan oleh berita yang menyimpang. Untuk tidak larut dalam dinamika arus informasi yang tidak terbatas, mahasiswa harus memiliki kompetensi inti literasi informasi. Masih segar di ingatan kita bahwa banyak mahasiswa dibeberapa perguruan tinggi terkemukadi Indonesia yang tetpapar paham terpapar paham terorisme. Bagaiman itu terjadi,tidak lain dan tidak bukan karena arus informasi dari luar yang begitu berbahaya namun secara agama, mental, dan kepribadian mahasiswa masih lemah sehingga belum bisa mengevaluasi itu sesuai dengan kepribadian mahasiswa Indonesia.

---

[244] Lukman Hakim, "Pengaruh Model Pembelajaran Student Active Learning Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kemampuan Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (Eksperimen Pada Mahasiswa Prodi Muamalah IAIN Ponorogo)," *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 2 (2017): 107–118.

[245] Yusup and Saepudin, "Praktik Literasi Informasi Dalam Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat (Information Literacy Practices in the Process of Lifelong Learning)."

Association of Collage and Research Libraries meminta perumusan standar literasi informasi di perguruan tinggi dari para professor dan pemerhati pendidikan tinggi. Kompetensi literasi informasi untuk perguruan tinggi memiliki kerangka kerja untuk memeroleh informasi mengenai kompetensi setiap individu. Kompetensi inti itu terdapat lima standar dan ada sekitar dua puluh indikator di dalamnya. Kelima standar itu mengacu pada kompetensi mahasiswa di perguruan tinggi yang dibutuhkan. Standar hasil penilaian kompetensi literasi informasi mahasiswa juga dapat diperoleh. ACRL (Association of Collage and Research Libraries) menyatakan mahasiswa yang memiliki kompetensi literasi informasi jika mampu: 1) menentukan karakteristik dan kesesuaian informasi yang diperlukan, 2) mengakses secara efektif dan efisien informasi yang dibutuhkan, 3) mempergunakan informasi sesuai dengan tujuan yang ditentukan, 5) memahami penggunaan informasi dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Kurikulum KKNI dan Literasi Informasi

Pembelajaran yang diilhami dari kurimulum yang dirancang adalah pendidikan sepanjang hayat. Abad 21 memberikan ruang baru bagi setiap orang untuk bersaing dalam dunia kerja. Dengan demikian, lulusan harus disiapkan dengan menanamkan jati diri mahasiswa menjadi manusia yang memiliki kapablitas belajar keberlanjutan dalam merefleksikan tuntutan zaman.[246] Pola pendidikan

[246] Subekt et al., "Mengembangkan Literasi Informasi Melalui Belajar Berbasis Kehidupan Terintegrasi Stem Untuk Menyiapkan Calon Guru Sains Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0."

ini memberikan ruang bagi anak dari berbagai tingkat untuk selalu menyatu dengan lingkungannya sebagai media dan sumber belajar. dengan literasi informasi, seseorang akan memeroleh bantuan dalam belajar dengan pengetahuan teori yang cukup untuk meneliti dan mengevaluasi setiap kegiatan belajar. seseorang juga akan memeliki tanggung jawab terhadap bidangnya karena merasa bahwa kegiatan belajar akan berguna untukdirinya sendiri dan orang lain.

Kurikulum KKNI yang diterapkan di Perguruan Tinggi menjadi jawaban atas kebutuhan akan lulusan yang sesuai dengan tantangan di dunia kerja. KKNI diartikan sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi mahasiswa yang dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikannya pendidikan dan kecapakan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. pihak pelaksana pendidikan memerlukan kepekaan terhadap pemilihan mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan di dunian kerja[247]. . Kerangka kualifikasi yang dibuat berdasakan kebutuhan kualifikasi dunia kerja dan harus diserap dalam kurikulum baik di perguruan tinggi maupun sekolah[248]. Luaran yang diharapkan adalah lulusan yang memiliki kualifikasi mumpuni dalam dunia kerja di berbagai sektor. Sesuai dengan Perpres No. 8 tahun 2012, program studi di perguruan tinggi harus memperjelas profil lulusan. Artinya, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja harus dipahami oleh penyelenggara perguruan tinggi. Profil lulusan nantinya adalah mahasiswa yang siap dan

[247] Muhammad Dedi Irawan, "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Matakuliah Pilihan Pada Kurikulum Berbasis KKNI Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno," *Jurnal Media Infotama* 13, no. 1 (2017).

[248] Solikhah, "KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes."

berkompeten ketika lulus sesuai dengan bidang program studi ketika lulus.

Globalisasi tidak dapat dihindari. Era ini seperti gelombang yang besar dan cepat yang siap menggulung siapa saja yang tidak siap dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam menjembatani modernitas dan dunia pendidikan.[249] Proses perkuliahan harus melakukan upaya penyesuaian dengan memanfaatkan internet,media belajar, teknologi yang mumpuni untuk mempermudah belajar. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat adalah seseorang yang memiliki kemampuan bekerja mumpuni sesuai dengan bidang dan dapat menggunakan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah merespon perubahan ini dengan membuat beberapa aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI, dan masih banyak peraturan lainnya. Kurikulum KKNI menuntut mahasiswa untuk mempunyai dengan kriteria, 1.dalam hal sikap/attitude, 2 bidang kecakapan kerja,3. Pengetahuan, 4. Managerial dan tanggung jawab.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, kemampuan literasi informasi adalah hal yang wajib dimiliki. Mahasiswa harus dapat belajar mandiri, peka terhadap kebutuhan dirinya, dan mampu menerjemahkan pembelajaran sepanjang hayat. Pada akhirnya mahasiswa

[249] Hasugian, "Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi."

juga mampu dalam mencari informasi, mengevaluasi, dan mempergunakan informasi yang dicari sesuai kebutuannya dengan tanggung jawab.

Melek informasi merupakan proses yang diintegrasikan dengan proses pembelajaran. Mahasiswa diminta untuk mandiri dalambelajar. Dosen bukan satu-satunya sumber belajar. melainnya orang yang dianggap mampu untuk mengarahkan proses belajar. Dengan begitu, kecakapan literasi juga harus dimiliki oleh dosen. Proses belajar tidak boleh berlangsung satu arah. Pembelajaan di kelas adalah wahana untuk saling berdiskusi. Dosen dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendorong mahasiswa mengembangkan dan menggali lebih luas materi secara mandiri dengan berdiskusi,observasi, studi literature,dan dokumentasi sebagai pengaplikasian metode inquiri

Literasi informasi sangat dibutuhkan dalam implementasi kurikulum KKNI di perguruan tinggi yang mensyaratkan profil lulusan yang siap dalam dunia kerja sesuai dengan bidangnya. Tantangan dunai kerja saat ini adalah bagaimana manusia nanti dapat bersinergi dengan technology informasi. Lulusan perguruan tinggi mampu memanfaatkan internet sebagai media belajar sepanjang hayat dan sebagai lapangan pekerjaan. Kemampuan literasi informasi muthlak harus dikuasai oleh mahasiswa untuk mampu belajar dan menangkap setiap peluang.

Kesimpulan

Kurikulum KKNI di Perguruan Tinggi memberikan banyak peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kurikulumini didesain sedemikian rupa sehingga setiap program study harus menentukan kompetensi lulusannya. Dalam menerapkan proses ini, keterampilan literasi informasi sangatlah diperlukan. Mahasiswa tidak boleh hanya mengandalkan dosen sebagai sumber informasi melainkan harus mampu secara mandiri mencarinya. Banyak sekali media sebagai sumber informasi, seperti media cetak maupun elektronik. Apalagi pada zaman internet ini masyarakat secara bebas dapat mengakses informasi darimanapun mereka berada. Kompetensi literasi informasi memungkinkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mencari, mengelompokan, mengolah, dan menggunakan informasi yang diperoleh.

Daftar Pustaka

Bundy, A. *For a Clever Country; Information Literacy Diffusion in the 21st, 2001*, 2009.

Dunn, Kathleen. "Assessing Information Literacy Skills in the California State University: A Progress Report." *The Journal of Academic Librarianship* 28, no. 1–2 (2002): 26–35.

Hakim, Lukman. "Pengaruh Model Pembelajaran Student Active Learning Dan Motivasi Berprestasi Terhadap

Kemampuan Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (Eksperimen Pada Mahasiswa Prodi Muamalah IAIN Ponorogo)." *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 2 (2017): 107–118.

Hasugian, Jonner. "Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi" 4, no. 2 (2008): 11.

Healy, Leigh Watson. "The Voice of the User: Where Students and Faculty Go for Information." In *EduCause 2002 Conference, Atlanta*, 2002.

Irawan, Muhammad Dedi. "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Matakuliah Pilihan Pada Kurikulum Berbasis KKNI Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno." *Jurnal Media Infotama* 13, no. 1 (2017).

Mardina, Riana. "Potensi Digital Natives Dalam Representasi Literasi Informasi Multimedia Berbasis Web Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pustakawan Indonesia* 11, no. 1 (2011).

Melani, Sri. "Literasi Informasi Dalam Praktek Sosial." *IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)* 10, no. 02 (2016): 67–82.

Pangestika, Monica Desiria. "Pengaruh Literasi Informasi Terhadap Efektivitas Belajar Siswa." *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 15–22.

Pattah, Sitti Husaebah. "Literasi Informasi: Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam Proses Pembelajaran."

Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan 2, no. 2 (2014): 108–119.

Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." *KBBI Indones*, 2012.

Solikhah, Imroatus. "KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes." *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 12, no. 1 (2015): 1–22.

Subekt, Hasan, Mohammad Taufiq, Herawati Susilo, Ibrohim Ibrohim, and Hadi Suwono. "Mengembangkan Literasi Informasi Melalui Belajar Berbasis Kehidupan Terintegrasi Stem Untuk Menyiapkan Calon Guru Sains Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Revieu Literatur." *Education and Human Development Journal* 3, no. 1 (2018).

Webber & Johnston, B. "Conception of Information Literacy: New Perspective and Implications." *Journal of Information Science* 26, no. 0 (2000): 6.

Yusup, Pawit Muhammad, and Encang Saepudin. "Praktik Literasi Informasi Dalam Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat (Information Literacy Practices in the Process of Lifelong Learning)." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 5, no. 1 (2017): 79–94.

Implementasi Metode *Inquiry* dan *Hypnosis* Perspektif Pendidikan Islam Klasik di Sekolah Menengah Atas

Oleh: Yusmicha Ulya Afif

Pendahuluan

Pusat Kurikulum Kemendiknas menyatakan bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[250]

Berbagai tujuan pendidikan Islam maupun pendidikan agama Islam didasarkan pada al-Qur'ān dan al-Sunnah. Hal ini tidak lepas dari posisi al-Qur'ān dan al-Sunnah yang memuat aturan-aturan dasar atau petunjuk tentang perbuatan-perbuatan yang terpuji dan

[250] Ahmad Munjin Nasih, dkk., *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 7.

tercela, antara yang halal dan yang haram, dan sebagainya. Meskipun demikian, sudah diatur oleh al-Qur'ān dan al-Sunnah sedemikian rupa, namun pada kenyatannya justru banyak orang sering melakukan perbuatan tercela; sedangkan perbuatan terpuji justru sering kali diabaikan. "Pelanggaran" seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak remaja.[251]

Dalam upaya mengatasi fenomena-fenomena yang negatif inilah, diperlukan usaha keras lembaga-lembaga Islam untuk terus-menerus mendidik peserta didiknya agar tetap konsisten pada nilai-nilai positif dan menjauhi nilai-nilai negatif. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki *concern* seperti ini adalah *National Immersion Senior High School*.

National Immersion Senior High School atau yang biasa dikenal dengan nama *Immersion* adalah model sekolah terpadu yang ada di Ponorogo. Latar belakang berdirinya *Immersion* adalah keinginan untuk mendirikan sekolah alternatif untuk masyarakat, karena merasa bahwa pendidikan selama ini belum mampu mencetak *output* yang berdaya saing dan kurang berperan dalam membentuk akhlak peserta didik.[252]

Fenomena yang terjadi dan menimpa para pelajar beberapa tahun ini mengindikasikan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan Islam belum sampai pada tujuannya. Untuk itu, Immersion sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam melakukan berbagai upaya pedadogis

[251] Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 59
[252] Wikan Yustafa, *Wawancara*, 27 Maret 2010.

untuk menumbuhkan akhlak terpuji peserta didiknya. Bahkan, akhlaq terpuji yang dididikkan tidak hanya ditujukan kepada Allah Swt. Rasūl Allah Saw., maupun kepada sesama manusia lainnya, melainkan juga ditujukan terhadap lingkungan.

Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh tenaga didik di Immesion dalam rangka memperbaiki akhlaq pada Allah dan Rasūl-Nya adalah setiap pagi hari, peserta didik diwajibkan membaca al-Qur'ān untuk peserta didik kelas satu, hafalan surat-surat pendek untuk peserta didik kelas dua, dan Asmā al-Husnā untuk peserta didik kelas tiga. Pendidikan akhlaq kepada sesama manusia dilakukan dengan cara melatih sikap toleransi terhadap sesama, melalui metode diskusi. Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik dilatih untuk menghargai pendapat orang lain. Sedangkan pendidikan akhlaq terhadap lingkungan dilakukan dengan cara guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di luar kelas atau langsung terjun ke lapangan, misalnya tugas mencari dan mengamati fenomena alam maupun fenomena yang terjadi di masyarakat.[253]

Kilasan di atas menunjukkan 3 hal penting yang saling terkait, yaitu tujuan pendidikan Islam; materi pendidikan Islam dan metode pendidikan Islam. Bahasan tentang metode pendidikan Islam penting untuk dikaji lebih mendalam. Alasannya, agar pendidikan Islam dapat diketahui, dimengerti, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, maka

[253] *Ibid.*

diperlukan metode yang tepat dalam proses pendidikan Islam.

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efisien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, setiap pendidik dituntut dapat menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Pendidik juga harus terampil dalam menerapkan metode pembelajaran yang dipakai, sehingga peserta didik dapat meresapi, menghayati, mengimani, dan mengamalkan materi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, metode pembelajaran yang tidak tepat guna, justru akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, metode yang diterapkan guru, baru dinilai berhasil jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum, dan tujuan pembelajaran secara khusus. [254]

Hal lain yang patut dipertimbangkan ialah pemilihan metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat, sangat berpengaruh pada efektivitas pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa faktor yang hendaknya dijadikan pertimbangan, yaitu: sifat dari tujuan (pembelajaran) yang hendak dicapai, keadaan peserta didik, bahan pembelajaran, dan situasi belajar mengajar. Selama ini, pada sebagian besar lembaga pendidikan Islam, metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang

[254] M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam "Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdispliner"* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 197.

digunakan cenderung masih berorientasi pada transfer nilai, dan lebih mengutamakan pengkayaan materi. Padahal metode tersebut yang sifatnya *teacher oriented*, hanya sekedar mengantarkan anak didik mampu mengetahui dan memahami sebuah konsep, sementara upaya internalisasi nilai belum dilakukan secara baik.[255]

Demi terjadinya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pendidikan ke dalam diri peserta didik, maka dibutuhkan pola-pola keteladanan dari pihak guru dalam mengajarkan setiap nilai kepada anak didik. Dengan demikian, metode pembelajaran PAI seharusnya diarahkan pada proses perubahan normatif ke praktis; dan dari kognitif ke afektif dan psikomotorik. Perubahan arah tersebut dimaksudkan agar materi PAI dapat ditransformasikan secara sistematik dan komprehensif; bukan hanya dalam sebuah konsep (teori), melainkan bermanfaat dalam kehidupan nyata juga.

Menurut Penulis, Immersion merupakan salah satu lembaga yang menarik untuk diteliti terkait bahasan tentang metode pembelajaran PAI. Alasan ketertarikan peneliti adalah *Immersion* menerapkan metode yang kreatif dan variatif dalam mata pelajaran PAI. Namun, agar penelitian tesis ini lebih fokus, maka Penulis memberikan titik tekan pada implementasi metode *inquiry* dan *hypnosis*. Argumentasinya adalah kedua metode pembelajaran tersebut tergolong jarang dipakai dalam proses pembelajaran PAI.

Metode inquiry. Secara bahasa, *inquiry* berarti menemukan suatu hal yang baru. Metode *inquiry* ini berasal dari Barat,

[255] Ahmad Munjin Nasih, dkk., *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, 33.

walaupun ada yang menyebut bahwa dalam Islam juga dikenal metode yang mirip, yaitu istinbat. Melalui metode *inquiry*, peserta didik diajak untuk berfikir kritis dan diajak mengenal Islam lebih dalam. Dalam proses pembelajaran PAI, metode *Inquiry* ini sering kali diwujudkan dalam bentuk diskusi; sedangkan materi PAI yang biasanya menggunakan metode ini adalah mata pelajaran Fiqih. Dalam penerapan metode *inquiry*, peran seorang guru adalah sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik berlaku sebagai subyek dan obyek. Dengan menerapkan metode *inquiry* ini, peserta didik dinilai lebih mudah memahami dan menguasai materi pelajaran, memiliki pemahaman terhadap materi yang disampaikan dan lebih lama dalam penguasaan (lebih matang); sebagai konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik tidak lagi mudah terprovokasi terhadap wacana yang ada dan berkembang di masyarakat. Bahkan, peserta didik dididik agar mengetahui dan memahami bahwasanya Islam adalah agama *Rahmat li al-Ālamīn*.[256]

Metode yang kedua adalah metode *hypnosis*. Secara sederhana, *hypnosis* adalah penyadaran melalui alam bawah sadar. Dalam metode *hypnosis* ini, peran guru sebagai hipnoterapis, sedangkan peserta didik menjadi penerima hipnoterapis. Dalam implementasinya, ketika materi pelajaran dimulai, peserta didik diminta rileks, tenang dan konsentrasi pada materi yang akan disampaikan guru. Dengan mata terpejam, peserta didik diberikan materi pelajaran. Latar belakang lembaga Immersion ini

[256] Wikan Yustafa, *Wawancara*, 27 Maret 2010.

menggunakan metode *hypnosis* dalam penyampaian materi PAI adalah melalui metode *hypnosis*, peserta didik lebih mudah dalam menerima pelajaran PAI yang disampaikan, khususnya pada materi akhlak, akidah, dan keimanan. Selain itu, melalui metode *hypnosis*, peserta didik mengalami perubahan pada aspek akhlak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru – sebagai hipnoterapis, sehingga peserta didik menjadi lebih mudah bersikap kooperatif dalam proses pembelajaran, bahkan memiliki motivasi belajar yang lebih baik.

Selama ini, implementasi metode *inquiry* dan *hypnosis* belum banyak digunakan dalam pembelajaran PAI. Lebih-lebih metode *hypnosis* yang biasanya memang digunakan untuk terapi, sering juga dipakai untuk tindak kejahatan. Tidak mengherankan jika sebagian orang menganggap *hypnosis* itu mengandung daya magis. Apalagi, dalam teori pendidikan Islam klasik, metode *inquiry* dan *hypnosis* sama sekali tidak dikenal. Mengingat, metode pembelajaran agama Islam yang dominan saat itu adalah metode keteladanan. Dari sinilah, Penulis tertarik untuk mencari data-data terkait metode dan penerapan *inquiry* dan *hypnosis* ini pada lembaga Immersion. Sebagai perbandingan, Penulis juga akan menyajikan teori pendidikan Islam klasik karena pendidikan Islam klasik inilah yang selama ini dikenal sebagai pendidikan Islam yang ideal.

Metode Pembelajaran PAI di SMA Immersion

Pemilihan metode belajar yang tepat guna akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran.

Metode pendidikan Islam pada masa klasik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode perolehan dan metode pemindahan atau penyampaian. Metode perolehan adalah cara yang ditempuh oleh peserta didik dalam proses pendidikan, sedangkan metode pemindahan atau penyampaian adalah metode yang ditempuh oleh guru dalam proses pembelajaran. Kecenderungan dalam pemikiran pendidikan Islam klasik lebih memprioritaskan kepada guru sebagai subjek pendidikan, bukan kepada peserta didik. Guru dijadikan faktor penentu untuk menilai tingkat keberhasilan pendidikan Islam.[257]

Metode pembelajaran yang digunakan di SMA Immersion berbasis pada prinsip *Quantum Learning* atau *Quantum Teaching*. Adapun pembelajarannya menggunakan teknik permainan, diskusi, simulasi, presentasi, tutor sebaya, eksperimen, *inquiry*, dan sebagainya. SMA Immersion memberikan penekanan pada kualitas proses pembelajaran untuk peserta didik. Seluruh program pembelajaran didesain untuk menggerakkan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik dan memberdayakannya untuk meraih sukses dalam kehidupan di masa mendatang. Peserta didik dilatih untuk memahami dan menerapkan prinsip "*learning how to learn*". Mereka difasilitasi oleh guru-guru yang memiliki komitmen tinggi dan didorong untuk meraih sukses.[258]

---

[257] Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 4.

[258] Brosur penerimaan siswa baru di SMA Immersion tahun pelajaran 2010/2011.

SMA Immersion Ponorogo menetapkan bahwa secara bertahap sistem pembelajaran yang dikembangkan adalah model-model pembelajaran yang menggunakan pendekatan non-konvensional di antaranya CTL, Pakem, *cooperatif learning*, dan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) sesuai dengan karakter mata pelajaran dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Model-model pembelajaran di atas dijadikan acuan guru ketika mengembangkan silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Secara umum, pembelajaran di SMA Immersion Ponorogo dilakukan secara klasikal dan guru tunggal. Namun, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan tenaga guru yang ada, pembelajaran *team teaching* dilaksanakan pada mata pelajaran tertentu. Pembelajaran *team teaching* dilaksanakan dengan model guru berkolaboratif mulai dari sisi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai penilaian hasil belajar.

Pendidikan agama mencakup sekelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Muatan kurikulum di SMA Immersion memuat regulasi-regulasi yang wajib ditaati dan mengikat seluruh warga sekolah. Di bawah ini paparan regulasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI):

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. al-Qur'ān dan Hadīth
b. 'Aqīdah
c. Akhlāq
d. Fiqh
e. Tārīkh (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Pendidikan Agama Islam (PAI) menekankan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

2. Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Agama Islam (PAI) diarahkan untuk memahami ajaran agama Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menunjang tercapainya tujuan pelajaran tersebut, sistem pembelajaran dilakukan dengan cara:

a. Ceramah
b. Studi Pustaka
c. Praktik Ibadah
d. Diskusi
e. *Inquiry* [259]

Adapun metode *hypnosis* di sekolah ini merupakan metode yang dikembangkan dan belum masuk dalam

[259] Data Pengembangan Kurikulum SMA Immersion.

muatan kurikulum. Hal tersebut dikarenakan tidak semua guru menguasai, dan metode *hypnosis* masih diimplementasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

3. Sistem penilaian Pendidikan Agama Islam (PAI)

Penilaian dilakukan dalam bentuk tes dan non tes berupa ulangan harian, tes unjuk kerja, portofolio.

Implementasi Metode Inquiry

Kelebihan metode *inquiry* yang diterapkan di SMA Immersion adalah:

1. Peserta didik lebih mampu memahami apa yang sedang dipikirkan atau lebih memahami materi yang ditangkapnya.
2. Peserta didik dapat menyampaikan materi yang telah dipikirkan dan menyampaikan penemuannya.
3. Metode *inquiry* ini membuat ingatan peserta didik lebih lama memahami, karena jawaban dari hasil temuan mereka sendiri.
4. Apabila materi ada kaitannya dengan *fiqh 'ibādah*, maka dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam berpendapat maupun dalam bertanya.
6. Suasana kelas cenderung lebih hidup.
7. Proses pembelajaran menyenangkan, karena peserta didik terlihat lebih bersemangat.

Secara teoretis, beberapa kelebihan metode *inquiry* adalah:

1. Metode *inquiry* merupakan metode pembelajaran yang menekankan kepada kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran berjalan lebih bermakna.
2. Metode *inquiry* dapat memberikan ruang kepada anak peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka.
3. Metode *inquiry* merupakan metode yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman.
4. Metode *inquiry* dapat melayani kebutuhan anak peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar bagus, tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar.[260]

Jika empat (4) kelebihan metode *inquiry* secara teoretis di atas, ditelaah melalui studi komparasi dalam ranah praktis seperti yang dialami oleh Bapak Wikan Yustafa selaku guru PAI yang menerapkan metode *inquiry*, maka kelebihan yang pertama yaitu menekankan pembelajaran pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik terbukti secara empiris. Sedangkan manfaat metode *inquiry* pada ranah kognitif dapat dilacak secara jelas. Beberapa hasil metode *inquiry* adalah adanya pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang cukup matang serta kemampuan mereka untuk menyampaikan hasil penemuannya. Bahkan efeknya

[260] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), 208.

adalah, pemahaman tersebut meletak lebih kuat pada otak peserta didik. Ini semua menunjukkan keberhasilan pada wilayah kognitif pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan penerapan.

Manfaat metode *inquiry* pada ranah afektif terlihat jelas pada antusiasme dan keaktifan (bertanya dan berpendapat) yang ditunjukkan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Jika mengacu pada wilayah afektif, maka apa yang mereka lakukan sudah masuk tingkat menerima (menerima dan mendengar), tingkat repons (mau bergabung), tingkat menilai (berpendapat), bahkan pada tingkat karakteristik, karena peserta didik menjalani proses pembelajaran dengan suka rela sekaligus penuh spirit.Manfaat metode *inquiry* semakin lengkap dengan peningkatan pada aspek psikomotorik yang berupa pelaksanaan materi pelajaran PAI, khususnya *fiqh 'ibādah*. Kelebihan kedua metode *inquiry* adalah dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Letak kelebihan pembelajaran memakai metode *inquiry* kembali terlihat di sini, yaitu memberi peluang kepada peserta didik untuk belajar dengan mengoptimalkan modalitas belajar mereka masing-masing. Seperti implementasi metode *inquiry* di SMA Immersion sebelumnya disebutkan bahwa ketika memberikan pelajaran tentang materi iman kepada Malaikat, guru membawa kantong plastik yang berisi udara, hal tersebut memancing peserta didik untuk bertanya buat apa kantong plastik tersebut (dimensi visual). Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang

apa isi dari kantong plastik tersebut (dimensi auditorial). Sedangkan contoh implementasi metode *inquiry* lainnya, yaitu mengajak peserta didik untuk belajar langsung ke lapangan (*field studies*), sudah barang tentu mengakomodasi dimensi kinestetik.

Keunggulan lain dari metode *inquiry* dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang berasumsi bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Keunggulan ketiga di atas relevan dengan aliran belajar kognitif yang banyak mempengaruhi metode *inquiry*. Menurut aliran ini, belajar pada hakikatnya adalah proses mental dan proses berpikir dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Aliran ini selanjutnya melahirkan berbagai teori belajar, seperti teori belajar Gestalt, teori medan dan teori konstruktivistik. Menurut teori-teori belajar aliran kognitif, belajar pada hakikatnya bukan peristiwa behavioral yang dapat diamati, tetapi proses mental untuk memaknai lingkungannya sendiri.[261]

Melalui teori belajar Gestalt, Koffka menjelaskan bahwa perubahan perilaku itu disebabkan adanya *insight* dalam diri peserta didik, dengan demikian tugas guru adalah menyediakan lingkungan yang dapat memungkinkan setiap peserta didik bisa menangkap dan mengembangkan *insight* itu sendiri. Teori medan yang dikembangkan oleh Kurt Lewin menekankan bahwa belajar merupakan proses pengubahan struktur kognitif, sehingga dia juga

[261] Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, 195.

menekankan pentingnya hadiah dan kesuksesan sebagai faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar.[262]

Di samping itu, pembelajaran melalui metode *inquiry* juga lebih menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Sehingga peran peserta didik adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar.[263]

Pembelajaran melalui metode *inquiry* tergolong tipe belajar *problem solving* (Belajar Memecahkan Masalah). Tipe belajar ini dapat dilakukan oleh seseorang apabila dalam dirinya sudah mampu mengaplikasikan berbagai aturan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. [264]
Dengan demikian, kiranya dapat disepakati bahwa melalui metode *Inquiry* ini, peserta didik diajari sistem belajar *how to learn*, sebuah misi yang memang diemban oleh Immersion.

Kesimpulannya, sisi-sisi positif atau keunggulan metode *inquiry* di atas seolah melegitimasi penggunaan metode tersebut pada berbagai mata pelajaran (khususnya PAI) di Immersion, bahkan patut untuk ditiru dan diterapkan dalam lembaga-lembaga pendidikan (Islam) lainnya, tentunya dengan disertai beberapa variasi dan pembenahan dalam upaya optimalisasi implementasi metode *inquiry* itu sendiri.

---

[262] *Ibid*. 195-196.
[263] *Ibid*., 195-196.
[264] Uno (dkk), *Desain Pembelajaran: Referensi Penting untuk para Guru, Dosen, Mahasiswa, Tutor Kursus dan Trainer Pelatihan* (Bandung: MQS Publishing, 2010), 17.

Sedangkan kelemahan metode inquiry yang diterapkan di SMA Immersion:

1. Kurangnya referensi yang dibaca oleh anak.
2. Desain waktu atau tempat yang tidak kondusif, misalnya jam pelajaran agama di siang hari.
3. Kemampuan yang dimiliki peserta didik berbeda-beda. Peserta didik yang kualitas kognisinya relatif rendah, akan mengalami kesulitan ketika belajar dengan memakai metode *inquiry*.

Untuk menganalisis kelemahan metode *inquiry*, maka Penulis juga berangkat dari data teoretis terkait dengan bahasan tersebut.

1. Jika metode *inquiry* dijadikan strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik.
2. Metode *inquiry* ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, karena terbentur oleh kebiasaan peserta didik dalam belajar.
3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sering menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Selama kriteria pembelajaran ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka metode *inquiry* akan sulit diimplementasikan oleh guru.[265]

Di antara keempat kelemahan metode *inquiry* secara teoretis tersebut, data empirik implementasi metode *inquiry*

[265] Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, 208-209.

di Immersion menunjukkan bahwa poin pertama yang menyebut bahwa metode ini sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik, terkait dengan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya: Peserta didik yang kualitas kognisinya relatif rendah, akan mengalami kesulitan ketika belajar dengan memakai metode *inquiry*.

Jika dirunut lagi, kelemahan pertama dapat dikaitkan dengan poin kedua yang menyatakan bahwa metode *inquiry* ini kerap terbentur oleh kebiasaan peserta didik dalam belajar. Salah satu kebiasaan peserta didik adalah lemahnya minat baca (kurangnya referensi yang dibaca oleh peserta didik). Klaim kelemahan metode *inquiry* ketika terbentur minimnya referensi yang diperoleh peserta didik, sebenarnya tidak relevan ditujukan pada metode *inquiry*, melainkan faktor eksternal-lah yang bertanggung-jawab. Faktor eksternal di sini dapat ditujukan pada kebiasaan peserta didik (yang tidak memiliki semangat membaca dan menggali ilmu), guru-guru yang acuh tak acuh terhadap lemahnya minat baca peserta didik (apalagi sampai tidak mau memotivasi mereka, atau bahkan guru-guru itu sendiri justru enggan membaca buku), bisa juga ditujukan pada kondisi sarana dan prasarana yang memang masih belum memadai.

Kelemahan metode *inquiry* pada dimensi waktu, ditemui dalam implementasinya di Immersion, namun lebih pada desain waktu atau tempat yang tidak kondusif, misalnya jam pelajaran PAI berlangsung di siang hari yang identik dengan menurunnya semangat belajar peserta didik. Hal

tersebut mungkin karena pikiran dan secara fisik anak sudah lelah. Pada dasarnya tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua kondisi.[266] Oleh karena itu, pada situasi-situasi yang memungkinkan metode *inquiry* tidak berjalan optimal, seyogyanya guru segera beralih pada metode-metode pembelajaran lainnya yang relevan, efektif dan efisian.

Metode Inquiry Perspektif Pendidikan Islam Klasik

Apabila analisis ditujukan pada metode *inquiry* dalam bentuknya yang sudah baku, maka pendidikan Islam klasik tidak memiliki akses untuk menilai baik-buruknya metode ini. Namun lain soal, jika analisis ditujukan pada konsep yang terkandung di dalamnya. Melihat data-data yang telah Penulis peroleh, konsep pendidikan klasik cenderung ke arah *teacher oriented*, sedangkan pendidikan modern lebih cenderung ke arah *student oriented* termasuk salah satunya dalam pembelajaran dengan *metode inquiry* dimana menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar dan guru sebagai fasilitator.

Dalam penerapan metode *inquiry*, kegiatan yang telah dilakukan dalam pembelajaran agama di SMA Immersion adalah diskusi (tanya jawab), dan pengamatan di lapangan seperti yang telah diuraikan dalam penyajian data. Tujuan dari penerapan metode tersebut adalah untuk latihan berpikir peserta didik secara sistemik, supaya peserta didik berpikir tentang sesuatu yang baru/menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lainnya. Analisis

[266] Uno, *Desain Pembelajaran*, 12.

terhadap metode *inquiry* dalam perspektif pendidikan Islam klasik ini, Penulis mulai dengan melibatkan al-Qur'**ā**n dan al-Sunnah, karena keduanya juga termasuk sumber utama pendidikan Islam klasik. Baik al-Qur'**ā**n maupun al-Sunnah, sudah sama-sama menyeru kepada umat Islam untuk giat mencari ilmu melalui perbagai pencarian, penelusuran dan penelitian suatu ilmu pengetahuan. Surat al-Gh**ā**shiyah: 17-20 merupakan contoh konkret seruan al-Qur'an agar meneliti unta, langit, gunung dan bumi.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠)[٢٦٧]

Artinya: *Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?*

Adapun *hadīth* yang sering kali dikutip dalam kaitannya dengan penelusuran mencari ilmu pengetahuan adalah *hadīth* riwayat al-Tirmidhi dengan status *Hasan* berikut ini:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٢٦٨

Artinya: *Dari Abū Hurairah berkata: Rasūlullah s.a.w. bersabda: "Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya, jalan menuju surga".*

---

[267] al-Qur'an, 87 (al-Gh**ā**shiyah): 17-20.

[268] Software *al-Maktabah al-Shāmilah* di kitab Sunan al-Tirmīdhī.

Metode pendidikan Islam klasik yang menurut Penulis sepadan dengan metode *inquiry* (yang diimplementasikan di Immersion) adalah metode diskusi, (tanya jawab) dan rihlah. Pada masa Rasūl, metode diskusi ini biasa digunakan oleh para sahābat untuk bertanya kepada Rasūl tentang suatu hukum dan Rasūl menjawab.[269] Metode ini berpengaruh besar dalam perkembangan pendidikan Islam, karena metode ini dapat membantu seseorang meninggikan dan mengembangkan pemikiran serta meluaskan akal. Selain itu, berdialog dapat mengisi otak, membuat argumentasi, melatih diri cepat berpikir, dan membiasakan orang berdialog dan berdebat percaya pada diri sendiri dan berbicara tanpa teks.[270]

Beberapa pakar pendidikan Islam yang setuju menerapkan metode diskusi. Di sini Penulis hanya mengutip satu sampel saja, yaitu Ibn Sīnā (lahir 980 M). Metode pengajaran yang ditawarkan oleh Ibn Sīnā antara lain: metode *talqīn*, demonstrasi, pembiasaan dan teladan, diskusi, magang, dan penugasan. Metode diskusi yang diterapkan oleh Ibn Sīnā dilakukan dengan cara penyajian pelajaran dimana peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yang dapat berupa pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Ibnu Sina menggunakan metode ini untuk mengajarkan pengetahuan yang bersifat rasional dan teoretis.[271] Bentuk implementasi yang seperti ini terlihat mirip sekali dengan metode *inquiry* yang telah diterapkan

[269] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.
[270] Omar Muhammad al-Toumy Al-Shaybānī. *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 566.
[271] Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 75-76.

di Immersion. Dari contoh tersebut juga dapat dilihat tentang fungsi guru sebagai fasilitator dan kedudukan murid sebagai subyek belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pembelajaran pada Islam klasik juga menganut pola *student oriented*.

Keterangan lain yang menyebutkan bahwa metode *inquiry* sepadan dengan metode pendidikan Islam klasik adalah kegiatan peserta didik dalam pendidikan jenjang tinggi. Dalam jenjang pendidikan tinggi seorang guru biasanya memulai pelajaran dengan ceramah, menyajikan materi baru dan mendiskusikan kembali topik-topik yang sulit. Waktu berikutnya digunakan untuk debat, dalam debat, peserta didik terlibat secara aktif.[272]

Metode Lawatan (*Rihlah*), juga dapat dimasukkan dalam kategori metode *inquiry* dalam perspektif pendidikan Islam klasik. Sebagaimana pada bab landasan teori, metode *rihlah* ini digunakan pada pendidikan jenjang tingkat tinggi. Secara praktis, para peserta didik baik secara pribadi atau kelompok datang ke rumah gurunya secara langsung yang biasanya jarak jauh, untuk mendiskusikan tentang suatu topik (keilmuan). Guru yang didatangi adalah guru yang mempunyai keahlian dalam bidangnya.[273] Selain untuk mendengarkan kajian dari gurunya, biasanya peserta didik melakukan rihlah untuk mengadakan penyelidikan. Mereka mencatat apa yang dialami dan dilihat sendiri. Hal tersebut digunakan dalam membuat sebuah buku untuk dijadikan sumber asli.[274] Metode rihlah ini juga mengindikasikan

[272] Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana,2005), 67.
[273] Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, 572.
[274] Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam,* 63.

bahwa pola pembelajaran Islam klasik adalah *student oriented*.

Pendidik Islam sangat menaruh perhatian terhadap lawatan dan perkunjungan ilmiah. Metode *rihlah* ini dianggap sebagai metode paling bermanfaat dalam menuntut ilmu, memperoleh pengetahuan, meriwayatkan Hadith, sejarah, syair, kesusasteraan dan perbendaharaan kata-kata. Hal tersebut merupakan jalan yang baik untuk penelitian ilmiah dan menjalin hubungan dengan ulama', *rāwī*, dan *qurra'* yang terkenal. Begitu juga untuk memperoleh ilmu bahasa Arab dari sumbernya yang asli di pedesaan (*badī'ah*) sebelum bakat asli orang Arab dirusak oleh peradaban.[275]

Dengan demikian, secara garis besar, metode *inquiry* merupakan metode pembelajaran tidak bertentangan dengan nilai-nilai normatif Islam (yaitu al-Qur'ān dan al-Sunnah), serta mendapatkan tempatnya dalam nilai-nilai historis Islam, karena merupakan metode yang diterapkan dalam pendidikan Islam klasik, walaupun bentuknya masih sederhana, seperti dalam bentuk tanya jawab, diskusi, dan metode *rihlah*.

Implementasi Metode Hypnosis

Pada bahasan ini, Penulis menyajikan data empirik terlebih dahulu tentang kelebihan metode *hypnosis* berdasarkan penilaian guru yang mengimplementasikan metode ini dalam pembelajarannya selama ini:

[275] *Ibid*., 579.

1. Guru dapat menguasai kelas dengan baik, karena peserta didik cenderung mengikuti apa yang diminta oleh guru.
2. Kondisi psikologis peserta didik lebih tertata, tidak ramai ataupun mengganggu temannya.
3. Materi pelajaran cepat tersampaikan.
4. Peserta didik mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan.
5. Peserta didik dapat dilihat tingkat kemampuan pemahamannya.

Paparan data di atas sebenarnya hanya menyangkut kelebihaan metode *hypnosis* pada wilayah kognitif. Sisi afektifnya sangat sedikit, sedangnya sisi psikomotoriknya sifatnya pasif, karena peserta didik hanya dijadikan sebagai objek *hypnosis*. Analisis yang patut diketengahkan di sini adalah 'rasionalisasi' atau 'scientifikasi' tentang mengapa metode *hypnosis* lebih memudahkan peserta didik untuk memahami suatu materi pelajaran. Sebagaimana psikolog John Gruzelier melakukan riset dengan menggunakan Fmri, sebuah alat untuk mengetahui aktivitas otak, menemukan bahwa seseorang yang berada dalam keadaan terhipnosis, aktivitas otaknya meningkat. Khususnya di bagian otak yang berpengaruh terhadap proses berpikir tingkat tinggi dan perilaku. Dalam proses belajar mengajar, *hypnosis* juga baik untuk memotivasi peserta didik, meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, kepercayaan diri, kedisplinan, dan keorganisasian.[276] Sandy Mc Gregor menyebutkan bahwa hegemoni pikiran bawah sadar begitu hebat dan

[276] Novian Triwidia Jaya, *Hypnoteaching Bukan Sekadar Mengajar* (Bekasi: D-Brain, 2010), 7.

benar-benar menguasai pemikiran seseorang sebanyak 88%. Pikiran sadar hanya menyisakan sekitar 12% dari total penguasaan. Oleh karenanya, dengan memaksimalkan potensi pikiran bawah sadar, maka akan terjadi peningkatan kecerdasan yang sangat luar biasa dalam diri kita.[277]

Pikiran bawah sadar jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Pikiran bawah sadar mampu menangani 2.300.000 bit informasi dalam satu waktu. Sementara pikiran sadar hanya mampu menangani 7-9 bit informasi dalam satu waktu. Artinya apa yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran sadar dapat dicerna oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar sebenarnya sangat sadar dan responsif terhadap setiap kejadian. Disebut tidak sadar, dalam arti manusia pada umumnya tidak mengetahui keberadaan pikiran bawah sadar. Padahal pikiran bawah sadar selalu sadar dan waspada, bahkan ketika pikiran sadar sedang tidak aktif, pikiran bawah sadar justru mengetahui atau menyadari segala sesuatu yang ada dipikiran sadar.[278] Demikianlah rasionalisasi atau scientifikasi dari efektivitas *hypnosis* sebagai sebuah metode pembelajaran. Sedangkan bukti empirisnya dapat dilihat dari implementasi metode *hypnosis* di Immersion. Observasi Penulis menunjukkan bahwa peserta didik berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru terkait materi yang disampaikan ketika mereka sedang dalam kondisi *hypnosis*.

Sedangkan beberapa kelemahan metode *hypnosis* ketika diimplementasikan di Immersion adalah:

---

[277] *Ibid*., 11.

[278] Abdul Khafi Syatra, *Misteri Alam Bawah Sadar Manusia* (Jogjakarta: Diva Press, 2010), 33-35.

1. Perlu persiapan yang matang dari guru dan peserta didik, terutama dari aspek psikologis.
2. Membutuhkan suasana yang tenang ataupun yang mendukung *hypno-teaching*.
3. Dalam penerapannya, membutuhkan waktu yang lama, karena ada relaksasi dan penyadaran.
4. Tidak baik apabila sering dilakukan, karena akan menghabiskan banyak jam pelajaran.

Kelemahan-kelemahan metode *hypnosis* di atas, cenderung berkaitan dengan kondisi psikologis dan efisiensi waktu. Poin pertama kelemahan implementasi metode *hypnosis* di Immersion, yaitu "perlu persiapan yang matang dari guru dan peserta didik, terutama dari aspek psikologis". Salah satunya dapat berupa: ada peserta didik yang sulit untuk dihipnosis (memasuki *formal trance state*), penyebabnya antara lain: i) Tidak dilengkapi pemahaman yang suportif tentang *hypnosis*, sepeti takut, ekspektasi kurang, miskonsepsi, dan lain-lain. ii) Tidak memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi atau focus. Seperti stress berat, kemampuan konsentrasi yang berkurang (akibat *drugs/alcohol*), paranoid, dan lain-lain. iii) Tidak memahami komunikasi, seperti Gangguan panca indra, intelektual rendah.[279]

Selain beberapa kelemahan di atas, sebenarnya ada juga sisi-sisi rahasia dari *hypnosis* yang dapat dikategorikan sebagai 'kelemahan' metode *hypnosis*. Berikut ini hasil

[279] Tim penyusun *The Society of Indonesian Tranceformers* (EST), *Fast Hypnosis Mastery: Unlocking Hidden Potentials-Mastering Minds-Creating Miracles* yang didownload oleh peneliti pada 4 februari 2011 dari http://hitmansystem.com/fast/DiktatFAST2010.pdf

penelitian Lex dePraxis terkait sisi-sisi rahasia *hypnosis* yang belum banyak terungkap:[280]

1. *Hypnosis* bukan satu pil ajaib untuk semua penyakit dan semua orang. Sama seperti tidak ada satu perawatan yang selalu tepat untuk semua jenis orang. Ada beberapa yang sangat mudah untuk mengalami *hypnosis*, sementara beberapa lainnya sulit sehingga harus ditangani secara unik dan berbeda. Secara teori, *hypnosis* melibatkan penonaktif-an kemampuan logika kritis seorang klien dan penuntunan pada kondisi berpikir yang sangat terfokus sehingga responsif terhadap sugesti. Jika seseorang sulit dituntun pada kondisi demikian, maka *hipnoterapi* (maupun *hypnoteaching*) bukan solusi yang cocok untuknya.
2. *Hypnosis* tidak selalu berhasil. Tidak seperti pergi ke dokter, kesembuhan atau pemulihan seseorang tidak bergantung pada produk ataupun saran yang diberikan oleh hipnoterapis. Agar menjamin efektifitas, berikut persyaratannya: (i) berkomitmen absolut untuk perubahan yang diinginkan, (ii) percaya bisa meraih tujuan tersebut, (c) mempercayai sang terapis dan proses yang dia jalankan, (d) bersedia melakukan apa saja untuk sukses, termasuk mengikuti sugesti, dan (e) memahami bahwa Anda-lah yang menjadi memegang kunci keberhasilan terapi yang bersangkutan.
3. *Hypnosis* bukan alat pengobatan dan tidak menyembuhkan apapun. Terapi apapun yang dilakukan

[280] artikel Lex dePraxis dengan judul *Menguasai Rahasia Tranceformasi: Fast Hypnosis* dalam hitmansystem.com/fast/FASThypno.pdf diakses pada 4 februari 2011

dengan *hypnosis* hanya berfungsi untuk meningkatkan, mendorong, mempercepat sebuah proses pengobatan, bukannya menggantikan proses pengobatan. Dengan kata lain, *hypnosis* merupakan alat komplementer dalam penyembuhan sebuah penyakit. Jika seseorang memiliki sebuah kebiasaan buruk yang ingin dihentikan, *hypnosis* akan menciptakan kondisi di mana seseorang jauh lebih mudah untuk mengendalikan diri sesuai dengan keinginan, namun dia tetap harus mengambil keputusan untuk melakukannya.

4. *Hypnosis* tidak memberikan perasaan yang spesial. Karena banyaknya penggambaran hipnosis yang salah via televisi dan media massa, maka ada yang berekspektasi mengalami perasaan-perasaan unik tertentu ketika sedang dihipnotis. Sama sekali salah! Jika seseorang sudah pernah mengalami perasaan santai, lepas, nyaman dan rileks, berarti dia sudah tahu rasanya dihipnotis.
5. *Hypnosis* bukanlah *sains*, melainkan seni. Sampai saat ini, para ahli psikologi dan kedokteran dunia masih memiliki perdebatan besar tentang *hypnosis*. Masih ada banyak ketidak-sepakatan tentang mekanika sebuah proses *hypnosis* sehingga keilmiahannya belum bisa dipastikan secara sains, walaupun semua mengakui *hypnosis* memiliki efek yang cukup nyata.
6. *Hypnosis* sangatlah mudah dipelajari, bahkan sudah dilakukan setiap orang tanpa sadar. Mempelajari *hypnosis* dapat dilakukan hanya dalam hitungan jam saja. Tidak ada prinsip dan konsep yang terlalu sulit dimengerti

karena pada dasarnya tiap orang sudah tahu, hanya belum pernah menyadarinya bahwa itu adalah Hipnotisme. Itu sebabnya, kursus belajar *hypnosis* seharusnya singkat dan biayanya sangat terjangkau, karena para pelatihnya hanya akan menuntun pesertanya untuk melakukan dan menguasai apa yang sebenarnya sudah dia ketahui.

Metode Hypnosis Perspektif Pendidikan Islam Klasik

Sulit untuk membayangkan adanya relevansi antara metode *hypnosis* dengan metode pendidikan Islam klasik. Bukan hanya karena metode *hypnosis* ini tergolong baru muncul, melainkan juga adanya 'praduga-praduga' dan 'asumsi-asumsi' yang pada akhirnya membuat *hypnosis* semakin misterius, bahkan dinilai sarat dengan unsur *magic* yang dalam bahasa Islam disebut *sihr* yang sudah pasti dihukumi haram. Selain itu fungsi guru sebagai *hypnotherapist* dan kedudukan murid sebagai objek dari hypnoterapi juga tidak ditemukan dalam konsep pendidikan Islam klasik.

Setelah memahami data-data tertulis maupun hasil observasi terkait tema besar *hypnosis*, Penulis mengajukan satu kesimpulan bahwa metode *hypnosis* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengupayakan suatu pembelajaran yang sekondusif mungkin. Melalui *hypnosis*, kondisi kondusif itu didapati pada sisi suasana kelas (yaitu peserta didik tidak ramai) serta pada kejernihan otak peserta didik yang saat itu berada pada kondisi optimal untuk menerima suatu pembelajaran (yakni ketika otak mereka pada kondisi *Alpha* dan *Theta*).

Dalam khazanah pendidikan Islam, ilmu tidak hanya diperoleh melalui otak, melainkan juga melalui hati dan panca indra. Di sini Penulis mencoba untuk membandingkan antara kondisi otak peserta didik yang berada pada level alpha atau thetha melalui metode *hypnosis*, dengan kondisi hati yang jernih setelah melalui proses *tazkiyah* (penyucian jiwa). Jika disepakati bahwa hasil akhir dari *tazkiyah* (yaitu hati yang jernih) itu sedikit mirip dengan hasil metode *hypnosis* (yaitu otak atau pikiran yang jernih), maka ada beberapa ayat yang kiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan, namun bukan argumentasi apalagi justifikasi metode *hypnosis*. Salah satu ayat tersebut adalah Surat Alī 'Imrān: 164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (١٦٤)

Artinya: *Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.*

Dalam ayat di atas, sebelum Rasūl Allah s.a.w. memberikan pelajaran (*ta'līm*) kepada para sahabat, terlebih dahulu beliau melalui beberapa tahapan proses, yaitu *tilāwah* dengan cara membacakan ayat-ayat al-Qur'ān dan *tazkiyah*, yaitu menjernihkan hati mereka. Masih terkait dengan ayat di atas, ada yang memahami ayat di atas dalam pengertian

guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus mulia. Seorang guru merupakan perantara antara manusia (murid) dengan Penciptanya. Rasūl Allah s.a.w. adalah guru pertama dalam Islam. Beliau bertugas membacakan, menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat al-Qur'ān kepada manusia, mensucikan diri dan jiwa dari dosa, menjelaskan antara yang halal dan yang haram, serta menceritakan tentang kehidupan manusia masa silam, mengaitkannya dengan kehidupan di zamannya dan memprediksikan pada kehidupan zaman yang akan datang.[281]

Apabila dipahami agak lebih dalam, maka ada suatu tujuan yang sama antara metode *hypnosis* dalam konteks kekinian, dengan metode *tazkiyah* yang diterapkan oleh Rasulullah Saw. Tujuannya adalah upaya untuk *'conditioning'* atau pengkondisian terhadap orang-orang yang hendak diberi materi pelajaran, sehingga mereka lebih mudah menyerap dan memahami materi pelajaran yang disampaikan.

Namun, ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Berikut ini hasil pemahaman Penulis terhadap kedua 'metode pembelajaran' tersebut:

1. *Hypnosis* lebih dominan ditujukan pada dimensi otak (akal), sedangkan *tazkiyah* lebih ditujukan pada dimensi hati.
2. Pengaruh *hypnosis* bersifat sementara (yakni pada saat peserta didik dihypnosis saja), sedangkan pengaruh *tazkiyah* lebih tahan lama, karena telah menjadi sebuah

[281] Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 64.

karakter (*akhlaq*). Bukti konkretnya adalah keluhuran akhlaq para sahabat yang dididik oleh Rasūl Allah s.a.w. melalui metode *Tazkiyah*.

3. Media *hypnosis* adalah sugesti yang membuat orang berada dalam kondisi *alpha* atau *theta*, sedangkan metode *tazkiyah* memakai media *tilawah*, yaitu pembacaan ayat-ayat al-Qur'ān.

Ada beberapa tokoh pendidikan Islam klasik yang memiliki perhatian terhadap tema ini. Satu contoh yang ingin Penulis ajukan adalah al-Ghazālī, seorang tokoh pendidikan Islam sekaligus sufi besar. Metode pembelajaran yang digaungkan oleh Al-Ghazālī adalah metode keteladanan bagi mental, pembinaan budi pekerti dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Menurut Al-Ghazālī, wujud yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia, dan bagian inti manusia yang termulia adalah hatinya. Guru bertugas menyempurnakan, menghias, menyucikan, dan menggiringnya mendekati Allah Swt. Dengan demikian, mengajar adalah bentuk lain pengabdian manusia kepada Tuhan dan menjunjung tinggi perintah-Nya.[282]

Dengan demikian, tidak ada metode pendidikan Islam klasik yang sepadan dengan metode *hypnosis*. Namun ada metode yang memiliki beberapa kemiripan dengan tujuan yang dibidik oleh metode *hypnosis*. Metode tersebut adalah metode *tazkiyah* (penyucian jiwa).

Konsepsi tentang *tazkiyah* tidak lepas dari padangan Islam bahwa pendidik (guru) adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta

[282] Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, 94-95.

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Selain itu, pendidik bertanggung jawab menolong dan membimbing perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya dan memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi, mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Jadi, pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan akhlak peserta didiknya.[283]

Sebagai penutup kajian ini, Penulis tertarik untuk memberikan saran bagi implementasi metode *hypnosis* di Immersion. Saran tersebut merupakan penggabungan antara metode *hypnosis* dengan *tazkiyah*. Harapannya adalah terwujudnya kondisi optimal pada otak dan hati peserta didik, sehingga terbuka peluang mereka untuk lebih memahami materi pelajaran secara kognitif, namun memiliki bekas-bekas pada ranah afektif (karena keterlibatan *tazkiyah* di dalamnya), sehingga berimplikasi pada ranah psiko-motorik, yaitu semangat peserta didik untuk mempraktekkan materi-materi PAI yang sifatnya aplikatif, karena mereka sudah memahaminya sekaligus menjiwainya, sehingga menggerakkan mereka untuk rajin mengamalkannya.

[283] Abd. Mujib & Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, 167-168.

Penutup

Implementasi metode *Inquiry* di Immersion memiliki banyak kelebihan, antara lain: a) meningkatkan kualitas kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara simultan (serentak), b) kelas lebih hidup, c) daya ingat peserta didik lebih lama, dan 4) proses pembelajaran menyenangkan. Sedangkan kelemahan metode *inquiry* adalah: a) kurangnya referensi yang dibaca oleh anak, b) waktu dan tempat yang kurang kondusif, dan c) kemampuan yang dimiliki peserta didik berbeda, sehingga agak sulit untuk diterapkan pada anak yang tingkat kognisinya rendah.

Implementasi metode *hypnosis* di Immersion memiliki kelebihan dan kelemahan pada posisi yang terlihat seimbang. Sisi kelebihan lebih terlihat pada hasil belajar (seperti pemahaman peserta didik yang meningkat), sedangkan sisi kelemahan lebih banyak terdapat pada proses belajar (misalnya banyak menyita waktu dan kurang memberi ruang terhadap keaktifan peserta didik).

Secara substansial, metode *inquiry* tidak bertentangan dengan metode pembelajaran dalam Pendidikan Islam klasik, baik ditinjau dari sisi normatif (sesuai al-Qur'an dan al-Sunnah) maupun historis (yaitu adanya metode pembelajaran yang hampir identik, seperti metode diskusi dan *rihlah*). Adapun metode *hypnosis*, tidak ditemui padanannya dalam tradisi pendidikan Islam klasik. Namun metode *tazkiyah* (yang menurut konsep al-Ghazālī dapat berupa metode *riyadah*) kiranya dapat dijadikan sebagai alternatif padanan, mengingat sama-sama dimaksudkan untuk optimalisasi hasil belajar peserta didik. Hanya saja,

ada beberapa perbedaan mencolok di antara kedua metode tersebut yaitu:

1. *Hypnosis* lebih dominan ditujukan pada dimensi otak (akal), sedangkan *tazkiyah* lebih ditujukan pada dimensi hati.
2. Pengaruh *hypnosis* bersifat sementara (yakni pada saat anak didik-siswi dihypnosis saja), sedangkan pengaruh *tazkiyah* lebih tahan lama, karena telah menjadi sebuah karakter (*akhlaq*). Bukti konkretnya adalah keluhuran akhlaq para sahabat yang dididik oleh Rasūlullah s.a.w. melalui metode *tazkiyah*.
3. Media *hypnosis* adalah sugesti yang membuat orang berada dalam kondisi *alpha* atau *theta*, sedangkan metode *tazkiyah* memakai media *tilawah*, yaitu pembacaan ayat-ayat al-Qur'ān.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an.

al-Shaybānī, Omar Muhammad al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam "Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdispliner.* Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Jaya, Novian Triwidia. *Hypnoteaching Bukan Sekadar Mengajar.* Bekasi: D-Brain, 2010.

Lex dePraxis dengan judul *Menguasai Rahasia Tranceformasi: Fast Hypnosis* dalam hitmansystem.com/fast/FASThypno.pdf diakses pada 4 Februari 2011

Mujib, Abd. & Muhaimin. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan* Kerangka *Dasar Operasionalisasinya.* Bandung: Trigenda Karya, 1993.

Nasih, Ahmad Munjin dkk.. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Nata, Abuddin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.

Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Kencana, 2007.

Rusn, Ibnu *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Software *al-Maktabah al-Shāmilah* di kitab Sunan al-Tirmīdhī.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suwendi. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Suwito. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.

Syatra, Abdul Khafi. *Misteri Alam Bawah Sadar Manusia*. Jogjakarta: Diva Press, 2010.

Tim penyusun. *The Society of Indonesian Tranceformers* (EST), *Fast Hypnosis Mastery: Unlocking Hidden Potentials-Mastering Minds-Creating Miracles* dari http://hitmansystem.com/fast/DiktatFAST2010.pdf diakses 4 Februari 2011

Uno, Hamzah B. (dkk.). *Desain Pembelajaran: Referensi Penting untuk para Guru, Dosen, Mahasiswa, Tutor Kursus dan Trainer Pelatihan*. Bandung: MQS Publishing, 2010.

Blanded Learning Alternatif Pembelajaran untuk Peserta didik Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi Covid-19

Oleh: Anis Afifah

Pendahuluan

Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dilakukan oleh sektor pendidikan secara tegas dengan adanya kebijakan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid 19).* Salah satu kebijakan dalam edaran tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Ketentuan kegiatan belajar dari rumah sesuai kebijakan tersebut meliputi (1) kegiatan belajar dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh, (2) kegiatan belajar difokuskan pada pengembangan kecakapan hidup, (3) Aktivitas pembelajaran yang bervariasi dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik termasuk diantaranya kesenjangan akses belajar, (4) Evaluasi hasil belajar dilakukan secara kualitatif tanpa ada keharusan

memberikan nilai atau skor.[284] Hal ini diberlakukan pada seluruh jenjang pendidikan, termasuk diantaranya pada pendidikan dasar baik sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah.

Pada jenjang pendidikan dasar kegiatan belajar dari rumah dengan *full daring*, mengalami beberapa hambatan diantaranya beberapa anak tidak memiliki *hand phone* (gawai), beberapa peserta didik mengalami kesulitan akses jaringan internet, kendala waktu belajar karena orang tua membawa gawainya ke tempat kerja dan pulang ketika sore hari, fitur gawai yang terbatas, keterbatasan kemampuan orang tua menggunakan firtur yang digunakan dalam proses pembelajaran daring, kendala pembimbingan dan pembimbingan dalam pembelajaran karena orang tua bekerja sampai sore hari, orang tua kurang menguasi materi pembelajaran yang harus dipelajari putra putrinya, kejenuhan peserta didik dan juga kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas yang tidak dapat terpentau oleh guru.[285]

Sejauh ini kajian tentang kegiatan belajar dari rumah pada masa pandemi cenderung melihat pada kegiatan pembelajaran *online* (*full-daring*) yang dilakukan sekolah meliputi. Efektifitas pelaksanaan pembelajaran online.[286]

---

[284] "Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020," *GTKDIKMENDIKSUS 2020* (blog), May 8, 2020, http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-news/surat-edaran-mendikbud-nomor-4-tahun-2020.

[285] Andri Anugrahana, "Hambatan, Solusi Dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar," *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 10, no. 3 (2020): 282–89.

[286] Acep Roni Hamdani and Asep Priatna, "Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada

Pelaksanaannya hambatan, solusi dalam pembelajaran online.[287] Platform pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran secara online ditinjau peserta didik.[288] Peran orang dalam pembelajaran online.[289] Dari kecenderungan tersebut alternatif pembelajaran selain melalui pembelajaran *full draring* banyak diperhatikan. Padahal beberapa sekolah sudah melaksanakan kegiatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian tentang alternatif pembelajaran pada masa pandemi dengan desain pembelajaran menggunakan *blanded learning* sebagaimana dilaksanakan di MIN 7 Ponorogo. Tulisan ini didasarkan pada argumen tentang pentingnya desain pembelajaran *blanded* pada masa pandemi. Secara lebih rinci desain *blanded learning* ini mengacu pada komponen tujuan, peserta didik, metode, dan evaluasi.

Metode Penelitian dan Konsep *Blanded learning*

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuaitatif fenomenomenologi, yaitu penelitian yang mengaji tentang

---

Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Subang," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 6, no. 1 (2020): 1–9.

[287] Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula, and Din Azwar Uswatun, "Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Masa Pandemi Covid-19 Pada Guru Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 4, no. 4 (2020): 861–70.

[288] Vicky Dwi Wicaksono and Putri Rachmadyanti, "Pembelajaran Blended Learning Melalui Google Classroom Di Sekolah Dasar," 2017.

[289] Yessy Nur Endah Sary, "Cara Asuh Nenek pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (June 20, 2020): 327–33, https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.585.

fenomena pelaksanaan pembelajaran dengan *blanded learning* di MIN 7 Ponorogo. MIN 7 Ponorogo merupakan madrasah yang menerapkan pembelajaran *blanded*, yaitu dengan menggabungkan pembelajaran daring dan luring selama masa pandemi covid-19.

Sumber data penelitian ini adalah kepala madrasah dan guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Ponorogo. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan pengamatan terhadap realitas pada kegiatan pembelajaran dengan *blanded learning* baik secara daring maupun luring, wawancara tentang desain yang diterapkan di MIN 7 Ponorogo meliputi tujuan pembelajaran, peserta didik, metode dan evaluasi, serta dokumentasi dengan melihat arsip kegiatan pembelajarn dengan *blended lerning* yang berupa perangkat pembelajaran selama pandemi covid-19.

Proses analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Analisis data menggunakan model analisis Milles and Hubermen yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan dari data yang tertulis di lapangan yang tidak sesuai dengan desain pembelajaran *blanded learning*. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif sesuai dengan pokok bahasan yang terdiri desain pembelajaran daring dan desain pembelajaran luring masing-masing meliputi tujuan pembelajaran, peserta didik, metode, dan evaluasi. Analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

2. Konsep *Blanded Learning*

Kegiatan belajar dari rumah sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah memaksa lembaga pendidikan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sekolah harus dialihkan dengan pembelajaran dari rumah masing-masing peserta didik. Pembelajaran *full daring* (*on-line*) menjadi pilihan utama dalam proses belajar dari rumah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 64 guru sekolah dasar di kabupaten Bantul Jogjakarta diketahui bahawa 98% guru telah melaksanaan pembelajaran *on-line*, dengan menggunakan berbagai *platfoarm* pembelajaran *on-line* yaitu *WhatsApps, WhatsApp Web, Google Classroom, Google Group, TeamLink, Microsoft Teams, Kaizala Microsoft, Zoom Meeting & Webinar, Youtube, dan Google Hangouts*. Berdasarkan penelitian tersebut factor kesediaan fasilitas HP dan koneksi internet yag tidak dimiliki peserta didik, tetapi dimiliki oleh orang tua yang bekerja sehingga tugas tidak segera tersampaikan kepada peserta didik. Selain hal tersebut anak cenderung patuh jika diajar oleh guru, tetapi tidak ketika diajar oleh orang tua. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesabaran orang tua dalam melakukan bimbingan pada anak.[290]

Sebagai alternatif pembelajaran di era pandemi pelaksanaan pembelajaran daring ternyata belum efektif. Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 80 guru di Kabupaten Subang, tingkat efektifitas pembelajaran daring hanya mencapai 66,97%. Survey ini berdasarkan pada delapan indikator yaitu kenyamanan dalam pelaksanaan

[290] Anugrahana, "Hambatan, Solusi Dan Harapan."

pembelajaran daring, kemampuan literasi digital guru, tingkat adaptasi peserta didik terhadap pembelajaran, kecukupan perangkat, koneksi internet, biaya pembelajaran daring, tingkat kenyamanan aplikasi dan komitmen pasca pandemi. [291]

Hasil penelitian Putria mengungkapkan bahwa pembelajaran daring kurang efektif dilaksanakan di sekolah dasar. Pembelajaran dilakukan melalui *voice note* ataupun *video call*, sehingga guru tidak dapat memberikan penjelasan secara detail. Anak-anak lebih banyak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kebosanan peserta didik pada kegiatan pembelajaran daring mengakibatkan kehadiran peserta didik yang tidak bisa maksimal dalam pembelajaran *on-line*. Tidak semua peserta didik memiliki *handphone,* dan orang tua yang bekerja menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Terlepas dari hal tersebut kesiapan guru dalam segi fasilitas baik *handphone* dan ketersediaan jaringan sebenarnya sudah sangat mendukung pembelajaran daring.[292]

Senada dengan hal tersebut, Cecilia Engko juga menyebutkan bahwa pembelajaran daring belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kendala jaringan yang tidak stabil. Pembelajaran dengan metode daring dilaksanakan melalui *Platform Zoom, Google Classroom* dan *WhatsApp Grub*. Dari ketiga *platform* tersebut

[291] Hamdani and Priatna, "Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Subang."

[292] Putria, Maula, and Uswatun, "Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Masa Pandemi Covid-19 Pada Guru Sekolah Dasar."

Google Classroom dinilai lebih efektif dari pada *Zoom* dan *WhatsApp*. Hal tersebut dikarenakan pada *Google Classroom* peserta didik dapat melaksanakan presentasi melalui fasilitas *Google Meet*. Sedangkan penggunaan somm memerlukan akses jaringan internet yang lebih besar dan stabil, meskipun dapat melakukan presentasi decara online. Sedangkan dengan menggunakan *WhatsApp* tidak peserta didik dan guru dapat melakukan presentasi. Akan tetapi *Google Classroom* juga memiliki kelemahan, yaitu ketika peserta didik mengupload tugas sering terjadi eror aplikasi bawaan. Selain itu tanggapan yang diberikan peserta didik lain juga terkadang sampai malam.[293]

Meskipun pelaksanaan pembelajaran dari belum efektif akan tetapi pembelajaran ini juga memiliki kelebihan diantaranya adalah lebih praktis dan fleskibel. Peserta didik dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru kapan saja dan di mana saja. Penggunaan *Google Form* dalam evaluasi hasil belajar menjadikan guru lebih mudah dalam melakukan peniliaian. Dalam pembelajaran daring orang tua diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk mendampingi anak dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi ini memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi guru, dan orang tua.[294]

Kebijakan belajar dari rumah mengharuskan guru membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan konsisi

[293] Cecilia Engko and Paul Usmany, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online," *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2020): 23–38.
[294] Anugrahana, "Hambatan, Solusi Dan Harapan."

yang ada. Salah satu fungsi desain pembelajaran adalah sebagai acuan dalam melasanakan pembelajaran. Komponen desain pembelajaran meliputi tujuan, peserta didik, metode, dan evaluasi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Morisson bahwa "*These four fundmental components (learner, objectivies*, methods, *and Evaluation) from the framework of systematic instructional planning*.[295] Tahap pertama dalam desain pembelajaran adalah melakuan identifikasi kebutuhan untuk mencari jalan keluar dari permasalah dalam pembelajaran. Salah satu aspek dari sebuah analisis desain pembelajaran adalah mendefinisikan peserta didik meliputi tingkat kecerdasan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman belajar yang telah diperoleh peserta didik. Metode adalah cara dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara kreatif. Metode pembelajaran mempertimbangkan penyampaian materi dan membantu peserta didik belajar mengintegrasikan informasi baru dengan pemahaman mereka sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengassesment penguasaan peserta didik secara objektif.

Kebijakan dan Potret *Blanded Learning* di MIN 7 Ponorogo

Desain *blanded learning* di MIN 7 Ponorogo dilakukan dengan memadukan antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Perpaduan ini dilakukan dengan prosentase 80 % untuk pembelajaran daring dan 20 % untuk pembelajaran luring. Drs Sarip, Kepala MIN 7 Ponorogo menyampaikan bahwa sebenarnya pembelajaran yang

[295] Gary R. Morrison et al., *Designing Effective Instruction* (United States Of Amarica: John Wiley & Sons, Inc., 2011), 15.

resmi selama masa pandemi covid-19 adalah pembelajaran daring. Madrasah memberanikan diri untuk melakanakan pembelajaran secara luring dikarenakan banyak keluhan dari wali murid terkait dengan jaringan internet. Selain hal tersebut mayoritas wali murid tidak melaksanakan *work from home* selama masa pandemi. Pekerjaan wali murid mayoritas adalah petani sehingga tetap harus pergi ke sawah dan pedagang yang harus tetap pergi ke pasar. Keberanian pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala MIN 7 Ponorogo ini disambut antusias oleh wali murid. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh wali murid pada guru dalam WhatsApp Groub di semua kelas. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada Hari Senin sampai dengan Jum'at dengan skema jadwal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19 MIN 7 Ponorogo

	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
Kelompok 1	Daring 1	Daring 2	Daring 3	Daring 4	Luring
Kelompok 2	Daring 1	Daring 2	Daring 3	luring	Daring 4
Kelompok 3	Daring 1	Daring 2	luring	Daring 4	Daing 3
Kelompok 4	Daring 1	luring	Daring 3	Daring 4	Daring 2
Kelompok 5	luring	Daring 2	Daring 3	Daring 4	Daring 1

Peserta didik dalam satu kelas yang terdiri dari 27-28 peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok kecil, masing-masing peserta didik akan mendapatkan jadwal sebagaimana tabel kegiatan pembelajaran dengan *blended learning* yang terdiri dari empat kali pembelajaran daring dan satu kali pembelajaran luring. Sedangkan Hari Sabtu digunakan guru untuk melaksanakan evaluasi proses kegiatan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik selama lima hari tersebut.

Tujuan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19

Penyesuaian tujuan pembelajaran pada kegiatan belajar dari rumah dilakukan dengan meninjau kembali kompetensi pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Peninjuan komptensi untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Jasmani, dan Seni Budaya didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembagan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus. Sedangkan mata pelajaran Qur'an Hadits, Akidah, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab tetap mengacu pada Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurrikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah

Dengan adanya penyesuaian Kompetensi Dasar tersebut maka tujuan pembelajaran juga mengalami penyesuaian. Selain hal tersebut penyesuaian tujuan pembelajaran juga disesuaikan dengan kondisi selama masa pandemi. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dijalankan pada masa pandemi dimaksukan dalam tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Tujuan pembelajaran yang telah disusun selanjutnya dipilah oleh guru dengan mengelompokkan pada tujuan dalam pembelajaran daring dan tujuan pebelajaran luring.

Dikarenakan keterbatasan dalam pelaksanaan pembelajaran luring, maka tujuan pembelajaran yang benar-benar memerlukan dampingan guru diprioritaskan dalam pembelajaran luring. seperti halnya pemahaman terhadap konsep-konsep dasar matematika, kegiatan percobaan IPA yang harus dilakukan dalam pengawasan orang dewasa, pemahaman materi PKn dan IPS yang harus disampaikan guru secara detail, kemampuan pelaksanaan ibadah pada materi fiqih yang harus diamati guru sehingga dapat dibetulkan secara langsung, kemampuan makhorijul huruf pada pembelajaran baca al-qur'an yang harus ditunjukkan secara langsung dan sebagainya. Untuk tujuan pembelajaran sifatnya latihan, ketrampilan membaca, pemahaman melalui teks semaksimal mungkin dilaksanakan guru dalam pembelajaran daring. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan meminimalisir pelaksanaan pembelajaran secara luring.

Kesiapan Peserta Didik dalam Pebelajaran Menggunakan *Blanded Lerning*

Komponen peserta didik perlu mendapat perhatian lebih pada kegiatan pembelajaran pada masa pandemic covid-19 ini, baik secara psikis ataupun fisik peserta didik. *Tracing* fisik secara dilakukan berkala terlebih ketika peserta didik terjadwal pada kelompok pembelajaran luring. Tracing fisik peserta didik tersebut meliputi 1) peserta didik tidak dalam keadaan demam, 2) peserta didik tidak melakukan kegiatan bepergian pada hari-hari sebelumnya, 3) peserta didik tidak melakukan kontak dengan pasien terindikasi Covid-19 pada hari-hari sebelumnya. *Tracing* ini dilakukan sebelum

pelaksanaan pembelajaran luring. Tracing dilakukan melalui *google foarm* yang diberikan guru pagi sebelum pembelajaran secara luring. Bagi peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran secara luring. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran luring guru benar-benar memastikan bahwa peserta didik dalam keadaan sehat dengan melakukan pengecekan suhu tubuh peserta didik. Sebelum masuk peserta didik diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Peserta didik diwajibkan menggunakan masker selama pembelajaran berlangsung dan menjaga jarak dengan peserta didik yang lain.

Pada kegiatan pembelajaran daring kesiapan peserta didik terkait dengan jaringan, quota internet dipantau secara berkala oleh madrasah, pemberian quota belajar dari kementrian pendidikan dipastikan digunakan untuk proses belajar mengajar secara daring. Kehadiran orang tua yang tidak bisa maksimal menemani peserta didik untuk belajar menjadi kendala utama dalam kegiatan belajar secara daring. Beberapa peserta didik baru dapat mengakses *E-lerning* Madrasah ketika orang tua sudah selesai bekerja. Beberapa faktor penghambat ini menjadi bahan pemikiran bagi madrasah agar pembelajaran secara dapat berjalan lebih efisien.

Implementasi Metode Pembelajaran *Blanded Learning*

Pembelajaran secara daring dilakukan dengan dilakukan melalui *Platform E-lerning* Madrasah disediakan

oleh Direktorat KSSK Madrasah Kementerian Agama RI. *E-learning* Madrasah menggunakan versi 1.4.1. *E-learning* ini dapat diakses melalui perangkat *handphone*, computer ataupun menggunakan laptop. Setiap peserta didik diberikan *user-id* dan *password* untuk dapat mengkases platform ini. Penggunaan *E-lerning* ini dilaksanakan dengan tujuan efisiensi pembelajaran, upaya pemanfaatan teknologi pada kegiatan yang mendukung pembelajaran, sebagai media pelaksanaan ujian madrasah secara *on-line*. Beberapa konten dalam *platform e-lerning* madrasah dikembangakan oleh guru madrasah untuk mengatasi permasalahan kegiatan belajar dari rumah sebagaimana aturan dari kementrian keagamaan daam rangka penanggunangi penyebaran virus covid-19. Beberapa konten dalam platfoarm *E-Learning* madrasah ini antara lain forum madrasah, kelas online, bahan ajar, kalender pendidikan, tugas kelas, guru online, peserta didik online, ujian CBT dan konten lain yang menunjang kegiatan pembelajaran daring.

Implementasi model pembelajaran daring pada anak di usia pendidikan dasar memerlukan persiapan yang lebih dibandingan dengan orang dewasa. Hal inilah sebagaimana disampaikan guru di MIN 7 ponorogo. Kondisi peserta didik yang belum terbiasa dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran memaksa guru membuat konten yang mudah diakses dan dioperasikan oleh anak.. Selain kendala tersebut kendala akses internet dan keberadaan orang tua dalam membimbing peserta didik pada pembelajaran daring belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring tersebut menjadi faktor utama pengambilan keputusan kepala madrasah untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Pembelajaran secara luring yang dilakukan oleh MIN 7 ponorogo tidak bertempat di madrasah, tetapi di rumah peserta didik. Sebelum pembelajaran dengan model luring dilakukan, madrasah selalu berkoordinasi dengan lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan. Izin dari lingkungan menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran secara luring.

Pada pembelajaran luring peserta didik dalam satu kelas yang terdiri dari 27-28 peserta didik dikelompokkan menjadi lima kelompok sehingga dalam satu kelompok terdapat antara 4-6 peserta didik. Pengelompokan peserta didik didasarkan pada kedekatan rumah antara peserta didik satu dengan yang lain. Pertimbangan ini dilakukan agar peserta didik tidak meninggalkan rumah terlalu jauh selama masa pandemi. Protokol kesehatan (pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak) sesuai arahan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 diterapkan semaksimal mungkin oleh madrasah. Semaksimal mungkin diusahakan agar kegiatan dalam pembelajaran dilakukan secara individu sehingga meminimalisir kontak antara peserta didik dengan peserta didik yang lain maupun dengan guru.

Evaluasi Belajar pada Pembelajaran dengan *Blanded Learning*

Seluruh kegiatan evaluasi hasil belajar pada proses belajar dari rumah di era pandemi covid-19 ini. dilaksanakan

oleh madrasah melalui pembelajaran secara daring dengan *Platform E-lerning* madrasah. Instrumen evaluasi yang dikembangkan berupa soal tes yang dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung. Soal tes secara langsung dapat dikerjakan peserta didik pada fitur ujian CBT sedangkan soal yang dikerjakan secara tidak langsung dapat di akses peserta didik pada fitur tugas peserta didik

Penutup

Blanded lerning sebagai alternatif pembelajaran di era pandemi dilaksanakan dengan memberikan porsi yang lebih besar pada pembelajaran daring dibandingkan dengan pembelajaran luring. Pembelajaran secara daring melalui platform *e-lerning* madrasah memerlukan persiapan pada semua asek pembelajaran dalam waktu sangat singkat karena pembelajaran ini wajib dilaksanakan untuk megurangi penyebaran covid-19. Pembelajaran secara luring dilaksanakan madrasah sebagai solusi dari beberapa permasalahan yang ada pada pembelajaran daring. Pembelajaran secara luring dilakukan dengan membentuk kelompok kecil, pembelajaran dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrahana, Andri. "Hambatan, Solusi Dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar." *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 10, no. 3 (2020): 282–89.

Engko, Cecilia, and Paul Usmany. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online." *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2020): 23–38.

Gary R. Morrison, Steven M. Rose, Howard K Kalman, and Jerrold E. Kemp. *Designing Effective Instruction*. United States Of Amarica: John Wiley & Sons, Inc., 2011.

Hamdani, Acep Roni, and Asep Priatna. "Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Subang." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 6, no. 1 (2020): 1–9.

Putria, Hilna, Luthfi Hamdani Maula, and Din Azwar Uswatun. "Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Masa Pandemi Covid-19 Pada Guru Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 4, no. 4 (2020): 861–70.

Sary, Yessy Nur Endah. "Cara Asuh Nenek pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (June 20, 2020): 327–33. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.585.

GTKDIKMENDIKSUS 2020. "Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020," May 8, 2020. http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-news/surat-edaran-mendikbud-nomor-4-tahun-2020.

Wicaksono, Vicky Dwi, and Putri Rachmadyanti. "Pembelajaran Blended Learning Melalui Google Classroom Di Sekolah Dasar," 2017.

Aktualisasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan

Oleh: Wahid Hariyanto

Pendahuluan

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan sebagaimana dalam amanat Permendiknas No. 13 tahun 2007 harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sebagai modal kecakapan untuk mengelola lembaga pendidikannya. Kompetensi yang dimaksud diantaranya adalah kompetensi kewirausahaan kepala sekolah. Kompetensi ini erat kaitannya dengan tugas kepala sekolah dalam mengelola unit kewirausahaan dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan peserta didik. Pengelolaan kewirausahaan dan penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan akan berjalan maksimal apabila kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan minimal berkategori 'baik' dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan. Kategori 'baik' ini akan diketahui manakala seorang kepala sekolah melakukan penilaian kinerja yang disebut dengan Uji Kompetensi Kepala Sekolah. Dari hasil

Uji Kompetensi Kepala Sekolah pada tahun 2015 didapati fakta yang mencengangkan, yaitu nilai kinerja dari kepala sekolah pada aspek kompetensi kewirausahaan hanya pada kategori 'Sedang' yakni masuk ke dalam rentang 51.0-60.9 dari kategori yang ada seperti 'Amat Baik' (91.0-100), 'Baik' (76.0-90.9), 'Cukup' (61.075.9), 'Sedang' (51.0-60.9), dan 'Kurang' (kurang dari 51). Nilai kompetensi kewirausahaan kepala sekolah secara nasional rata-rata 58.75, sedangkan di wilayah di Jawa Timur nilai kompetensi kewirausahaan kepala sekolah rata-rata 48.52.

Kompetensi kewirausahaan bagi kepala sekolah tidak bisa dipandang remeh karena kompetensi memiliki dua makna penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. ***Makna pertama***, kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan prinsip dan nilai kewirausahaan untuk mengelola lembaga pendidikan. ***Makna kedua***, kemampuan kepala sekolah dalam mengelola unit kewirausahaan yang dimiliki. Kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan prinsip dan nilai kewirausahaan untuk mengelola lembaga pendidikan memiliki indikator di antaranya menciptakan inovasi untuk kemajuan lembaga, bekerja keras untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar, memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk selalu melaksanakan tugasnya, serta selalu mencari solusi terbaik dan pantang menyerah dalam menangani setiap masalah yang dihadapi lembaga. Sedangkan indikator dari kemampuan kepala sekolah dalam mengelola unit kewirausahaan adalah memiliki naluri kewirausahaan

dalam mengelola kegiatan produksi ataupun jasa yang dimiliki sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

Potret masih rendahnya kompetensi kewirausahaan kepala sekolah sebagaimana yang tergambarkan pada hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah di atas perlu sebuah penanganan khusus agar ke depan tidak menyebabkan permasalahan lain seperti minimnya tingkat kemandirian lembaga pendidikan ataupun bertambahnya pengangguran karena lemahnya jiwa kewirausahaan peserta didik. Sehingga pada permasalahan ini Penulis berasumsi bahwa salah satu tindakan yang dinilai solutif untuk mengatasi masalah mengantisipasi munculnya masalah di atas adalah dengan adanya sebuah prototipe pemaksimalkan implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah sebagai bagian dari manajemen kepemimpinan pendidikan.

Pada dasarnya, penelitian yang menitikberatkan pada kompetensi kewirausahaan kepala sekolah ini sudah beberapa kali dilakukan. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Muljo Rahardjo, Wiyatno dan Muhyadi, Iswadi, Reni Oktavia, dan Heny. Akan tetapi dari semua penelitian tersebut belum ada yang mengupas secara spesifik implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah khususnya dalam mengelola unit kewirausahaan dan strategi penumbuhan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik. Selain itu, sejauh penelusuran Penulis, secara lokus juga belum pernah ada penelitian yang membahas fokus yang akan diangkat ini. Sehingga penelitian ini sifatnya melengkapi penelitian yang ada agar semakin

komprehensif gambaran aktualisasi dari kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah.

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan, tulisan ini mencoba mengkaji aktualisasi kompetensi kewirausahaan pada dua masalah pokok. ***Pertama,*** langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah untuk mengelola unit kewirausahaan. Sehingga konsep Pengelolaan Kewirausahaan dari Alain Fayolle dan Heinz Klandt serta konsep Piramida Kewirausahaan dari Marilyn L. Kourilsky menjadi sangat penting untuk mengarahkan diskusi tulisan ini sehingga bisa tergambar jelas proses pengelolaan kewirausahaan dan peran yang dimainkan oleh masing-masing pengelola. Selain dua konsep di atas Penulis juga akan menggunakan konsep pendukung yang dinilai relevan dengan pembahasan. ***Kedua,*** strategi kepala sekolah dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik. Pada persoalan kedua ini, konsep pengintegrasian kewirausahaan dari Agus Wibowo serta Barnawi dan Mohammad Arifin akan sangat berarti untuk bisa digunakan memotret strategi apa yang sebenarnya dilakukan kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Penulis mengambil data di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dikarenakan kesesuaiannya dengan tema tulisan yang diindikatori

dengan satu-satunya sekolah di Ponorogo yang memiliki status BLUD karena unit usaha yang dimiliki serta keterserapan lulusannya dalam dunia kerja. Sumber data yang ada pada penelitian ini merupakan fenomena-fenomena kegiatan kewirausahaan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dan para pengelolanya, serta dokumen baik yang berbentuk file, foto, atau yang lain yang merupakan dokumentasi dari kegiatan kewirausahaan tersebut. Sehingga pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis milik Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Potret Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo

1. Langkah-langkah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam Mengelola Kegiatan Kewirausahaan Sekolah

Secara makro Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri dari dua elemen dasar. Elemen pertama berkaitan dengan sosial, sedang elemen kedua berkaitan dengan profit. Elemen sosial berkaitan erat dengan mutu serta hubungan dengan masyarakat. Artinya, sekolah akan selalu meningkatkan mutu diri agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pengolahan dan peningkatan mutu ini dapat dilakukan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO (SMM ISO). Sedangkan pada elemen profit,

SMK mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada keuntungan, dalam hal ini adalah kewirausahaan. Sehingga dengan adanya dua elemen dasar ini sekolah dapat menjadi sekolah yang mandiri (*Selfreliance School*).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang secara khusus mengarahkan peserta didik kepada keterampilan dan keahlian. Peserta didik selain dibekali dengan pengetahuan yang sifatnya teoretis, juga dibekali pengetahuan yang bersifat praktis. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo memberikan pengetahuan yang sifatnya teoretis kepada peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengetahuan yang bersifat praktis diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan produksi di setiap bengkel jurusan.

Dalam mengelola kegiatan kewirausahaan kepala sekolah membentuk IGU (*income generating unit*) yang merupakan bagian dari BC (*business center*). Dalam hal ini tugas dari IGU adalah membawahi dari setiap kegiatan produksi yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Berdasarkan bentuknya kegiatan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo yang masuk dalam IGU ini dibagi menjadi dua macam. Kegiatan kewirausahaan yang bergerak dalam bidang jasa serta kewirausahaan yang bergerak dalam bidang produk. Kegiatan kewirausahaan yang termasuk dalam bidang jasa diantaranya: *community college, career center,* dan *consultan.* Sedangkan yang termasuk dalam bidang produk diantaranya: *teaching factory*, produksi air mineral, technomart, dan ternak lele.

Dari berbagai bentuk kegiatan kewirausahaan di atas jika ditinjau berdasarkan orientasinya maka kegiatan kewirausahaan ini juga dibagi menjadi dua. Kegiatan kewirausahaan yang murni berorientasi profit dan kegiatan kewirausahaan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kegiatan yang murni berorientasi profit adalah *consultan*, produksi air mineral, technomart, dan ternak lele. Sedangkan yang berorientasi pengembangan kompetensi diantaranya *community college, career center,* dan *teaching factory.* Dari kegiatan kewirausahaan yang ada maka *teaching factory* adalah yang termasuk unik. Dikatakan unik karena selain terdapat unsur pengembangan kompetensi juga terdapat nilai profit di dalamnya. Karena dalam *teaching factory* ini terdapat kegiatan produksi sebuah produk. Keluaran dari *teaching factory* (TF) ini adalah pembuatan produk yang disesuaikan dengan program jurusannya, diantaranya gambar desain rumah, pagar, *software*, serta produk lain seperti ekor bom, mesin pencacah daun, laptop, mesin granulator, mesin mixer, sporing, roda pagar, mur dan baut, ragum, serta masih banyak yang lain.

Produk kewirausahaan yang dalam hal ini masuk kategori *teaching factory* dibagi menjadi dua macam. ***Pertama,*** produk yang dihasilkan oleh satu program jurusan. ***Kedua,*** produk yang dihasilkan oleh gabungan beberapa program jurusan. Produk yang dihasilkan oleh satu program jurusan misalnya gambar bangunan oleh Jurusan Teknik Gambar, pagar oleh Jurusan Teknik Las, *Software* oleh Jurusan RPL, meja dan kursi oleh Jurusan Teknik Konstruksi kayu dan mur baut oleh Jurusan Teknik Pemesinan dan lain-lain.

Sedangkan untuk gabungan dari beberapa program jurusan ada mesin pencacah daun, mesin granulator, ekor bom, *hand tractor*, dan *mixer* untuk pengaduk pakan ayam. Dan salah satu contoh kegiatan produksi yang melibatkan beberapa program jurusan adalah dalam pembuatan granulator. Dalam pembuatan granulator ini SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo melibatkan tiga program jurusan, yaitu Jurusan Teknik Pemesinan, Las, dan Listrik.

Dalam memulai kewirausahaan sebagaimana di atas kepala sekolah melibatkan semua pihak. Pihak tersebut terdiri dari Kakomli, ataupun guru mapel, bahkan dapat juga berasal dari peserta didik sendiri. Dalam hal ini kepala sekolah memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berkreasi dalam kewirausahaan. Ide kreatif yang berasal dari guru akan dijadikan bahan pertimbangan kepala sekolah dalam menciptakan atau mengembangkan kewirausahaan. Begitu pula dengan ide kreatif dari peserta didik.

Penciptaan ataupun pengembangan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo secara teknis hampir sama dengan penciptaan sebuah inovasi. Hal ini disebabkan karena inovasi merupakan bagian dari kewirausahaan itu sendiri. Penciptaan kewirausahaan terdiri dari beberapa tahap. Mulai tahap analisis peluang dan kebutuhan, sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Proses kewirausahaan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo secara lebih rinci adalah sebagai berikut: ***Tahap pertama,*** *analisis peluang dan kebutuhan*. Setiap guru ataupun kepala program keahlian mengumpulkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang sedang berkembang

saat ini. sehingga peluang yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Tahap kedua, *menentukan program kewirausahaan*. Pada tahap ini kepala sekolah menentukan program yang akan digunakan dalam memanfaatkan peluang yang ada berdasar pada analisis kebutuhan dan peluang pada tahap pertama. Proses penentuan program kewirausahaan ini SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo mengadakan rapat sebagaimana dalam menciptakan inovasi. Rapat ini dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kakomli, serta wakil guru. Dalam rapat ini diputuskan program kewirausahaan apa yang akan dijalankan, konsep, pelaksana serta dana yang dibutuhkan.

Tahap ketiga, *pelaksanaan*. Tahap ini tim yang ditunjuk melaksanakan program kewirausahaan yang telah disepakati dalam rapat. Baik kewirausahaan yang kaitannya dengan pemroduksian barang yang dilakukan berdasarkan teknik jurusan ataupun kewirausahaan yang sifatnya profit sebagaimana penjelasan sebelumnya. Karena kegiatan kewirausahaan ini dalam lingkup sekolah, yang mana juga sebagai sarana peserta didik dalam belajar kewirausahaan maka pelaksana dari kegiatan ini adalah peserta didik yang dibantu guru. Misalnya dalam pelaksanaan di technomart dan di bengkel program jurusan.

Tahap keempat *adalah evaluasi.* Pada tahap ini kepala sekolah beserta pelaksana mengadakan evaluasi terhadap barang yang telah diproduksi serta pelaksanaan dari unit kewirausahaan. Evaluasi meliputi pencarian kekurangan dan kelemahan serta masalah yang dihadapi dalam unit

kewirausahaan. Sehingga pada sistem operasi selanjutnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Tahap kelima *adalah memasarkan hasil produksi.* Walaupun terdapat kegiatan pemasaran produk akan tetapi kegiatan pemasaran ini bukanlah kegiatan utama. Hal ini dikarenakan kegiatan produksi yang dilakukan peserta didik titik tekannya adalah peningkatan kompetensi peserta didik. Kecuali untuk unit kewirausahaan yang memang sudah disiapkan berorientasi profit.

2. Strategi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Peserta didik

Syarat negara maju adalah apabila negara tersebut mempunyai minimal 2 persen dari total seluruh warga negara. Dan saat ini, jumlah wirausaha Indonesia masih kurang dari 2 persen atau sebanyak 700 ribu orang, masih dibutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru. Kekurangan 4 juta wirausaha ini dapat ditutupi apabila mulai sekarang pemerintah dan segenap pihak baik dari dunia pendidikan ataupun dunia usaha dan industri bekerja bersama menyosialisasikan pentingnya kewirausahaan dalam perkembangan sebuah negara. Tidak hanya sekedar menyosialisasikan akan tetapi juga menggalakkan pelatihan bagi generasi muda dalam hal kewirausahaan. Dengan adanya sosialisasi serta pelatihan akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada generasi muda. Sehingga dalam skala mikro nantinya mereka menjadi wirausaha muda yang

sukses, dan dalam skala makro mereka akan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia.

Berbicara sosialisasi kewirausahaan dalam dunia pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan adalah solusi yang tepat. Karena di SMK memang mengarahkan peserta didik kepada keterampilan dan keahlian yang dapat dimanfaatkan dalam berwirausaha. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga aktif dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didiknya. Dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo n menerapkan sistem teori dan praktik. Sistem teori didapatkan peserta didik ketika di dalam kelas. Baik dari guru mata pelajaran kewirausahaan atau dari guru program jurusan yang lain. Sedangkan praktiknya dilakukan dalam kegiatan produksi sebagaimana Penulis sampaikan di awal.

Selain dengan melalui pembelajaran di kelas, strategi yang digunakan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah membuka wawasan peserta didik mengenai kewira-usahaan. Pembukaan wawasan dilakukan dengan dua cara: ***pertama,*** mengadakan seminar dengan mendatangkan badan diklat kompetensi sebagai narasumber dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. ***Kedua,*** dengan melaksanakan prakerin (praktik kerja industri), atau istilah lainnya adalah magang di dunia usaha maupun industri. Selain dari Badan Pendidikan dan Pelatihan, SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga meminta alumninya yang telah berhasil dalam berwirausaha untuk menjadi narasumber.

Dalam melaksanakan strategi yang kedua, yaitu prakerin atau magang, SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo bekerjasama dengan sekitar enam puluh empat perusahaan baik di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo Negeri 1 Jenangan dalam menumbuhkan jiwa bersaing dalam kewirausahaan pada diri peserta didik juga dilakukan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan, baik tingkat nasional maupun internasional.

Selain memberikan wawasan serta praktik dalam dunia usaha (kewirausahaan), SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga memberikan pengalaman awal kepada peserta didik agar mempunyai naluri dalam berwirausaha. Pengalaman ini diberikan dengan cara melayani pembeli atau konsumen produk yang diproduksi. Selain itu, SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga pernah memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk mencari pelanggan serta memproduksi barang pesanan pelanggan tadi. Dengan sebelumnya peserta didik diberi modal untuk menjalankan tugasnya tersebut. Dari berbagai cara yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan ini diharapkan peserta didik nantinya mempunyai sifat layaknya seorang wirausaha. Mempunyai sifat keuletan, tangguh, pantang menyerah, berani mengambil risiko, disiplin dan tertib.

Diskusi Aktualisasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo

1. Langkah-langkah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam Mengelola Kegiatan Kewirausahaan Sekolah

Aktualisasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah pada dasarnya memiliki dua kaitan elemen dasar. Elemen pertama berkaitan dengan sosial dan elemen kedua berhubungan dengan profit. Elemen sosial berkaitan erat dengan mutu sekolah dan hubungan dengan masyarakat. Artinya, sekolah akan selalu meningkatkan mutu diri agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pengolahan dan peningkatan mutu ini dapat dilakukan kepala sekolah dengan penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan. Sedangkan pada elemen profit, kepala sekolah mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada keuntungan, salah satunya unit kewirausahaan itu sendiri. Sehingga dengan adanya dua elemen dasar ini sekolah dapat menjadi sekolah yang mandiri.

Kemandirian sekolah sebagaimana yang dimaksud di atas dapat tercapai apabila kepala sekolah mengelola unit kewirausahaan secara serius. Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo kepala sekolah mengelola kegiatan kewirausahaan dengan membentuk IGU (*income generating unit*) yang merupakan bagian dari BC (*business center*). Dalam pengelolaan kewirausahaan tugas dari IGU adalah membawahi dari setiap kegiatan produksi yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Berdasarkan bentuknya kegiatan kewirausahaannya, unit kewirausahaan yang

masuk dalam IGU ini dibagi menjadi dua macam. Kegiatan kewirausahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan kewirausahaan yang bergerak dalam bidang produk. Kegiatan kewirausahaan yang termasuk dalam bidang jasa diantaranya: *community college, career center, consultan,* dan menyediakan lokasi mesin ATM. Sedangkan yang termasuk dalam bidang produk diantaranya: *teaching factory*, produksi air mineral, technomart, dan kantin.

Jika ditinjau berdasarkan orientasinya maka kegiatan kewirausahaan ini juga dibagi menjadi dua. Kegiatan kewirausahaan yang murni berorientasi profit dan kegiatan kewirausahaan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kegiatan yang murni berorientasi profit adalah *consultan*, produksi air mineral, technomart, kantin dan menyediakan lokasi mesin ATM. Sedangkan yang berorientasi pengembangan kompetensi diantaranya *community college, career center,* dan *teaching factory.*

Dari kegiatan kewirausahaan yang ada di bawah kepengurusan IGU maka *teaching factory* adalah termasuk yang unik. Dikatakan unik karena selain terdapat unsur pengembangan kompetensi peserta didik juga terdapat nilai profit di dalamnya. Dikatakan sebagai pengembang kompetensi peserta didik karena *teaching factory* dilakukan di program jurusan (menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan keahlian jurusan). Diantara produk kewirausahaan program jurusan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo diantaranya gambar desain rumah, pagar, *software*, serta produk lain seperti ekor bom, mesin pencacah daun, laptop, mesin granulator, mesin mixer, sporing, roda pagar,

mur dan baut, ragum, dan lain-lain. Sedangkan dikatakan memiliki nilai profit karena *teaching factory* menghasilkan produk yang bisa dipasarkan kepada masyarakat.

Kepala sekolah dalam memulai unit kewirausahaan melakukan lima tahapan kegiatan. Adapun lima tahapan tersebut sebagai berikut: ***Tahap pertama,*** *analisis peluang dan kebutuhan* (*scanning opportunity and need*). IGU, guru, dan kepala kompetensi keahlian (kakomli) mengumpulkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang sedang berkembang saat ini. Sehingga peluang yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila pada tahap pertama ini dikaitkan dengan konsep *Jendela* milik Philip A. Wickham maka memperhatikan terhadap peluang serta kebutuhan ini termasuk ke dalam *seeing the window.* Karena pada tahap ini IGU, guru, dan kepala kompetensi keahlian (kakomli) melakukan peninjauan terhadap peluang yang ada.

Tahap kedua, *menentukan program kewirausahaan* (*sets the program*). Pada tahap ini kepala sekolah menentukan program yang akan digunakan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Proses penentuan program kewirausahaan ini SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo mengadakan rapat sebagaimana dalam menciptakan inovasi. Rapat ini dihadiri oleh kepala sekolah, pengurus IGU, wakil kepala sekolah, kakomli, serta wakil guru. Dalam rapat ini dibahas ide apa yang akan direalisasikan, pelaksananya siapa, serta bagaimana rancangannya. Proses penentuan program kewirausahaan ini menurut Philip A. Wickham hal ini masuk ke dalam *locating the window.* Karena pada tahap ini

kepala sekolah memposisikan jenis usaha barunya. Dengan adanya pemosisian ini maka usaha yang dirintis akan memiliki diferensiasi dengan usaha lain. Yang secara tidak langsung akan memperkuat daya saing unit kewirausahaan tersebut.

Berkaitan dengan konsep dari Alain Fayolle maka langkah-langkah pada tahap ini sesuai dengan konsep yang ditawarkan. Karena pada tahap ini terjadi proses pengumpulan ide yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan konsep Alain Fayolle pada tahap *collective dream.* Pada tahapan ini juga termasuk ke dalam *structuring dream,* hal ini dikarenakan pada tahap ini terjadi proses penentuan ide yang akan dijadikan kegiatan kewirausahaan. Dalam konsep Alain Fayolle tahap kedua ini juga masuk ke dalam *activity dream,* dikarenakan pada tahap ini pula konsep atau rancangan usaha baru dirumuskan.

Berdasarkan penjelasan singkat ini dapat diketahui bahwa dalam satu tahapan yang dilakukan kepala sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo memuat satu tahapan alur konsep Philip A. Wickham dan tiga alur konsep dari Alain Fayolle.

Tahap ketiga, *pelaksanaan* (*implementing*). Tahap ini tim pelaksana yang ditunjuk ketika rapat mulai melaksanakan tugasnya, yakni mulai membangun kewirausahaan yang telah menjadi program. Tahap ini dalam konsep Philip A. Wickham termasuk ke dalam *opening the window*. Pada tahap *Opening the window* ini Philip A. Wickham juga menyampaikan akan pentingnya membangun komitmen serta mengadakan kerja sama dengan instansi lain untuk

mengembangkan usaha. Jika dilihat dengan perspektif Alain Fayolle maka tahap ini masuk ke dalam aktivitas *implementation of activity dream* dan *implementation of structuring dream.*

Tahap keempat *adalah evaluasi* (*evaluating*). Pada tahap ini kepala sekolah beserta pelaksana mengadakan evaluasi terhadap jalannya unit usaha. Memperbaiki kelemahan untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Tahap pengadaan evaluasi ini menurut Philip A. Wickham termasuk pada *measuring the window*. Dikarenakan pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap potensi yang ditawarkan untuk menciptakan nilai yang baru.

Tahap kelima *adalah memasarkan hasil produksi* (*selling*). Walaupun terdapat kegiatan pemasaran produk akan tetapi kegiatan pemasaran ini bukanlah kegiatan utama (bagi unit kewirausahaan program jurusan). Kecuali untuk unit kewirausahaan yang memang sudah disiapkan berorientasi profit. Pemasaran bagi unit produksi yang bernilai profit dilakukan kepada masyarakat serta rekan usaha.

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa kepala SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo melaksanakan empat konsep Philip A. Wickham yaitu *seeing the window, locating the window, measuring the window,* dan *opening the window.* Dan mengimplementasikan lima konsep Alain Fayolle yaitu *collective dream, structuring dream, activity dream, implementation of activity dream,* dan *implementation of structuring dream.* Walaupun terjadi perbedaan sebenarnya hal ini saling melengkapi satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan bahwa kepala sekolah dalam mengelola unit kewirausahaan membentuk IGU sebagai induk kegiatan kewirausahaan. Selain itu ditemukan juga bahwa dalam alur pengelolaan kewirausahaan kepala sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo mengadakan analisis peluang dan kebutuhan terlebih dahulu, yang selanjutnya menentukan program kewirausahaan apa yang akan dijalankan. Tahap selanjutnya mengimplementasikan program kewirausahaan. Dan untuk menjaga keberlangsungan dari kewirausahaan yang ada maka kepala sekolah melakukan evaluasi. Dan tahap akhir dari pengelolaan ini adalah menjual produk dari kewirausahaan. Temuan berdasarkan analisis Penulis di atas dapat dikembangkan ini.

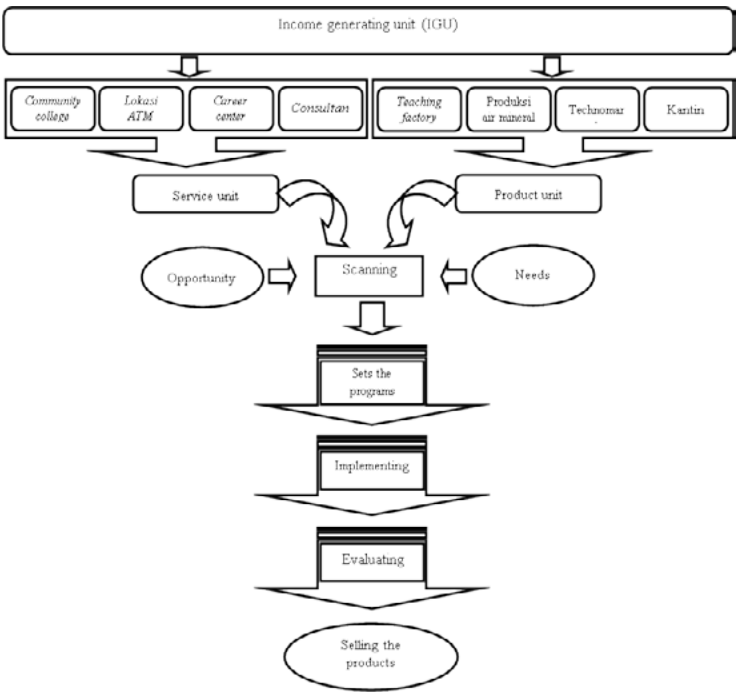

Gambar 1 Struktur dan Alur Pengelolaan Unit Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo

Jika upaya kepala sekolah dalam mengelola kewirausahaan di atas secara keseluruhan dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Marilyn L. Kourilsky maka pada puncak piramida (*initiator*) terdapat kepala sekolah serta tim dari IGU. Dalam pengelolaan unit kewirausahaan ini kepala sekolah lebih memfokuskan pada pengembangan usaha, hal ini dapat dilihat pada banyaknya unit kewirausahaan yang tercipta yaitu pada setiap program jurusan (*teaching factory*) serta pada unit produksi yang lain. Pada posisi ini upaya kepala sekolah dalam kewirausahaan ditunjukkan dengan adanya sikap kreatif dan inovatif untuk membuat sesuatu yang baru, baik berkaitan dengan inovasi produk, penciptaan unit usaha, menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, serta berkaitan dengan konsep pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh tim pada setiap unit produksi.

Pada bagian tengah piramida kewirausahaan terdapat tim pengembang (*development team*), dalam hal ini tim pengembang di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah tim dari masing-masing unit kewirausahaan. Dalam hal ini upaya kepala sekolah dalam kewirausahaan diperlihatkan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan produksi yang dilaksanakan oleh tim masing-masing unit kewirausahaan. Serta pengawasan terhadap program yang sudah direncanakan.

Pada bagian akhir pada piramida terdapat *constituency,* dalam hal ini *constituency* adalah konsumen dari produk (*output*) yang dihasilkan. Upaya kepala sekolah berkaitan

dengan *constituency* ini diwujudkan dengan menjalin relasi yang akan dijadikan rekan dalam menyalurkan produk. Secara lebih jelas upaya kepala sekolah jika dihubungkan dengan piramida kewirausahaan milik Marilyn L. Kourilsky Penulis gambarkan sebagai berikut:

Piramida Kewirausahaan Marilyn L. Kourilsky	Pelaksana	Usaha Kepala Sekolah
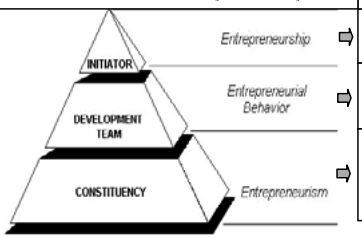	Kepala sekolah dan tim IGU	Sikap kreatif dan inovatif dalam konsep kewirausahaan serta menjalin hubungan dengan rekan kerja
	Tim yang berada pada setiap unit kewirausahaan	Mengawasi serta melaksanakan pengembangan produk unit usaha pada kewirausahaan sekolah.
	Masyarakat serta rekan usaha yang diajak kerja sama	Menjalin kerjasama dengan pihak luar yang akan menjadi konsumen produk yang dihasilkan.

Gambar 2 Implementasi Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah Berdasarkan Piramida Kewirausahaan

Salah satu yang menjadi kekurangan dalam kewirausahaan yang ada, menurut Penulis terletak pada program yang ada pada *teaching factory.* Program yang ada di *teaching factory* hanya bersifat *incidental program* (program yang sifatnya kebetulan), bukan *continuous program* (program yang sifatnya berkelanjutan). Hal ini menurut Penulis perlu adanya perbaikan. Apalagi *teaching factory* pada dasarnya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Apabila program dari *teaching factory* berbasis insidental, maka keterampilan yang dimiliki antara peserta didik satu angkatan dengan angkatan yang lain akan berbeda. Hal ini menurut Penulis perlu adanya program yang paten sehingga lulusan dari SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo memiliki keterampilan dan penguasaan kompetensi yang sama. Misalnya saja dalam jurusan multimedia, dalam

jurusan ini mematenkan program perakitan laptop. Pada implementasinya nanti kelas X mengerjakan poin A, kelas XI mengerjakan poin B, dan kelas XII mengerjakan poin C. Pengerjaan perakitan semakin tinggi jenjang kelas maka kerumitannya juga semakin tinggi. Dengan adanya program yang paten semisal ini, maka setiap satu angkatan dengan angkatan berikutnya akan memiliki keterampilan yang sama. Begitu juga dengan program jurusan yang lain.

2. Strategi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan kepada Peserta Didik

Berbicara tentang pendidikan dasar, Sekolah Menengah Kejuruan adalah solusi yang tepat untuk memberikan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan baik secara teoretis maupun praktis diharapkan bisa memotivasi serta memupuk jiwa kewirausahaan. Selain itu juga juga membentuk karaker berwirausaha. Dalam hal ini senada dengan Sang M. Lee bahwa pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada peserta didik akan memberikan peserta didik motivasi, pengetahuan, dan keterampilan yang bersifat dasar untuk meluncurkan/ membuat perusahaan dengan berhasil. Sehingga nantinya peserta didik mempunyai mental serta karakter seorang wirausaha.

Secara khusus SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo mengajari kewirausahaan melalui mata pelajaran yang bernama Prakarya dan Kewirausahaan. Pada mata pelajaran ini peserta didik diajari bagaimana memulai merencanakan

usaha, melaksanakan dan mempromosikan, menghitung laba, membuat laporan usaha dan sebagainya. Selain ada mata pelajaran yang memang khusus untuk mempelajari kewirausahaan, pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga selalu berusaha untuk mengaitkan mata pelajaran lain dengan kewirausahaan. Hal semacam ini merupakan model integrasi kewirausahaan dengan mata pelajaran. Kegiatan semacam ini akan memberikan nilai positif manakala setiap pendidikan melakukan hal yang sama. Sehingga apabila hal ini dilakukan maka akan tercipta kurikulum yang terintegrasi, yaitu *integrated entrepreneurship curriculum*.

Untuk mendukung pemberian materi di kelas, peserta didik juga melakukan praktik di bengkel industrinya masing-masing sesuai dengan jurusannya. Di bengkel ini peserta didik akan membuat produk yang nantinya bisa dipasarkan di masyarakat. Kegiatan semacam ini bagus untuk mengembangkan potensi peserta didik karena mereka bisa mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat mengeksplorasi kemampuan mereka dalam membuat sebuah produk. Sehingga setelah peserta didik diberi materi di kelas serta praktik di bengkel industri diharapkan peserta didik dapat mahir menangkap peluang yang ada di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ungkapkan G. Page West bahwa modal awal dalam berwirausaha adalah dengan mengidentifikasi dan mengejar peluang yang dapat menciptakan perubahan dan nilai yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Selain melalui pembelajaran di kelas dan praktik di bengkel industri, strategi penumbuhan jiwa kewirausahaan

yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga dilakukan dengan mengundang narasumber yang terkait kewirausahaan untuk memberikan motivasi serta strategi-strategi yang jitu untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Biasanya pemberian motivasi kewirausahaan ini merupakan satu rangkaian dengan kegiatan masa orientasi peserta didik (MOS). Selain itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga menggunakan strategi *magang* ke enam puluh empat dunia usaha dan dunia industri baik di dalam maupun di luar Ponorogo. Pemberian motivasi kewirausahaan dan pelaksanaan magang ini apabila dilihat dengan perspektif Abdul Hakim maka kedua kegiatan ini termasuk ke dalam pembukaan wawasan, sedangkan dalam perspektif Agus Wibowo termasuk dalam pengembangan diri. Pemberian motivasi semacam ini setidaknya memiliki beberapa keuntungan bagi penumbuhan jiwa kewirausahaan peserta didik, ***pertama,*** peserta didik akan tertarik dan semangat dalam hal kewirausahaan; ***kedua,*** membantu peserta didik untuk menemukan mimpinya terkait dengan kewirausahaan; ***ketiga,*** menumbuhkan sikap optimisme pada peserta didik.

Dalam kewirausahaan salah satu karakter yang penting adalah sikap berani bersaing. Berkaitan dengan karakter wirausaha ini SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam menumbuhkan jiwa bersaing dalam kewirausahaan pada diri peserta didik dilakukan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan semacam ini menurut Agus Wibowo termasuk

dalam kegiatan pengembangan diri. Salah satu nilai positif mengikutsertakan peserta didik pada perlombaan adalah peserta didik akan memiliki sikap perfeksionis, yaitu ambisi untuk menciptakan sebuah produk yang dinilai sempurna. Sehingga apabila mereka telah lulus dan membuka usaha sendiri, maka sikap perfeksionis ini akan terus menjadi ruh dari setiap pengerjaannya.

Selain memberikan wawasan serta praktik dalam dunia usaha (kewirausahaan), SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga memberikan pengalaman kepada peserta didik agar mempunyai naluri dalam berwirausaha. Pengalaman ini diberikan dengan cara melibatkan peserta didik di unit kewirausahaan sekolah. Di unit kewirausahaan tersebut, peserta didik akan melayani pembeli atau konsumen produk yang diproduksi. Strategi ini menurut Abdul Hakim termasuk ke dalam penanaman sikap. Sikap seorang wirausaha pada kegiatan ini sangat diasah, terutama yang berkaitan dengan sikap kepada orang lain atau *respecting people*. Sikap ini sangat penting karena salah satu kepuasan dari konsumen adalah dari sikap yang diberikan oleh seorang wirausaha.

Strategi yang juga pernah dilakukan oleh SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah dengan memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk mencari pelanggan serta memproduksi barang pesanan pelanggan tadi. Dengan sebelumnya peserta didik diberi modal untuk menjalankan tugasnya tersebut. Strategi terakhir ini terkadang juga menimbulkan tekanan tersendiri kepada diri peserta didik. Meskipun demikian strategi ini merupakan stratgei yang

sangat baik, karena peserta didik bisa mengeksplorasi secara langsung bagaimana dunia usaha yang sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh gambaran nyata tentang keterampilan masa depan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Sehingga menurut Abdul Hakim hal ini termasuk dalam penanaman sikap. Yaitu menanamkan sikap layaknya seorang wirausaha, mempunyai sifat keuletan, tangguh, pantang menyerah, berani mengambil risiko, disiplin dan tertib.

Gambaran mengenai strategi yang digunakan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagaimana di atas dapat digambarkan berikut ini:

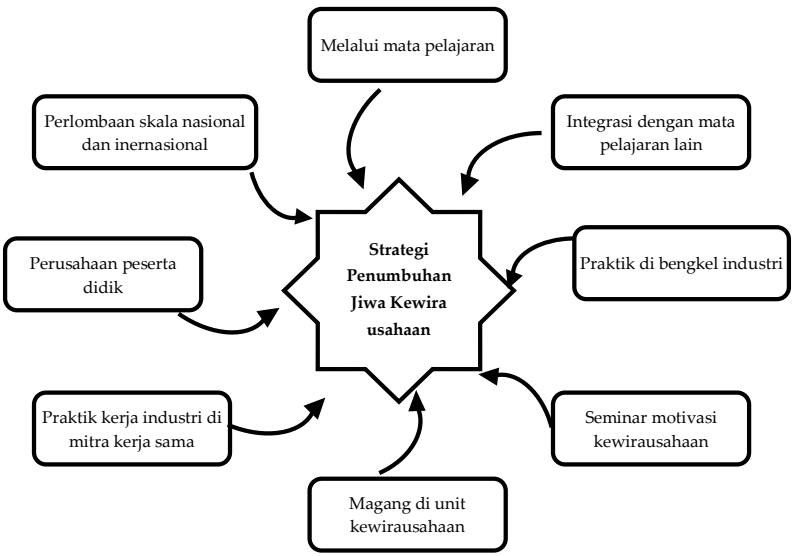

Gambar 3 Strategi Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Peserta Didik di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo

Apabila strategi tersebut dilihat berdasarkan aspek potensi peserta didik, maka strategi penumbuhan jiwa kewirausahaan tersebut sudah mengacu pada aspek

potensi kognitif, psikomotor dan afektif. Aspek kognitif yang berkaitan dengan kewirausahaan ditumbuhkan dan dikembangkan dengan adanya pembukaan wawasan seperti pemberian materi prakarya dan kewirausahaan dan pengintegrasian dengan mata pelajaran lain dalam pembelajaran di kelas, serta seminar motivasi kewirausahaan. Sedangkan aspek psikomotor dan afektif ditumbuhkan sekaligus dikembangkan melalui kegiatan penguatan keterampilan dan karakter seperti praktik di bengkel industri, magang di unit kewirausahaan sekolah, praktik kerja industri di unit kewirausahaan mitra kerja sama, perusahaan peserta didik, dan perlombaan-perlombaan yang bertemakan kewirausahaan.

Penutup

Tulisan ini menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan kepala sekolah memang sangat berperan besar dalam pengelolaan kewirausahaan di lembaga pendidikan. Hal ini terbukti dengan tingkat kompetensi kewirausahaan yang memadai, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo mampu melakukan sejumlah langkah-langkah yang sistematis dalam menjalankan kegiatan unit kewirausahaan yang dimiliki. Di antara langkah-langkah sistematis tersebut adalah menganalisis peluang dan kebutuhan yang ada di masyarakat, menentukan program kewirausahaan yang tepat untuk mengakomodasi peluang yang ada, merealisasikan program kewirausahaan yang disepakati, mengevaluasi jalannya program unit kewirausahaan, dan diakhiri dengan memasarkan produk

hasil unit kewirausahaan. Dan pada saat yang sama, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo juga mengorganisasikan beberapa kegiatan yang diupayakan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan peserta didik melalui sistem pembukaan wawasan serta penguatan keterampilan dan karakter kewirausahaan.

Potret realisasi kompetensi kewirausahaan yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo ini kiranya tidaklah cukup untuk kondisi seperti saat ini. Kondisi yang menuntut untuk selalu berbenah dan mengikuti perkembangan yang terjadi. Sehingga tantangannya ke depan adalah seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan industri saat ini, serta adanya gelombang penggunaan teknologi informasi yang semakin masif, perlu kiranya disiapkan sebuah standar kompetensi lulusan baru, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kewirausahaan berbasis Dalam Jaringan (Daring).

DAFTAR PUSTAKA

Barnawi, dan Mohammad Arifin. *Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2013.

Casson, Mark. *Entrepreneurship: Theory, Network, History*. USA: Edward Elgar Publishing, 2010.

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. *Panduan Kerja Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017.

Fayolle, Alain. *Handbook of Research in Entrepreneurship Education: Contextual Perspectives*. Vol. 2. USA: Edward Elgar Publishing, 2007.

Hakim, Abdul. "Model Pengembangan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Menciptakan Kemandirian Sekolah." *Riptek* Vol. 4, no. 1 (2010).

Hartomo, Giri. "6,88 Juta Orang Nganggur, Paling Banyak Lulusan SMK," *Okezone.com* (blog). Mei 2020. https://economy.okezone.com/read/2020/05/05/320/2209470/6-88-juta-orang-nganggur-paling-banyak-lulusan-smk#:~:text=Lulusan%20SMK%20menyumbang%20Tingkat%20Pengangguran,5%2F5%2F2020)

Harususilo, Yohanes Enggar. "Mendorong Lahirnya Wirausaha Muda lewat Kompetisi Perusahaan Peserta didik." *Kompas.com* (blog), Agustus 2019. https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/13/20524161/mendorong-lahirnya-wirausaha-muda-lewat-kompetisi-perusahaan-peserta didik?page=all.

Heny. "Implementasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Pengorganisasian Business Center 'SMK Mart.'" *Journal of Economic Education* 1, no. 2 (2012): 123–29.

Hidayat, Ali Akhmad Noor. "Jumlah Pengusaha di Indonesia Baru 2 Persen dari Total Penduduk." *TEMPO.CO* (blog), Oktober 2019. https://bisnis.tempo.co/read/1254508/jumlah-pengusaha-di-indonesia-baru-2-persen-dari-total-penduduk.

Iswadi. "Kewirausahaan Kepala Sekolah." *Manajer Pendidikan* Vol. 10, no. 5 (November 2016): 416–20.

Kourilsky, Marilyn L. "Entrepreneurship Education: Opportunity in Search of Curriculum." *Business Education Forum*, Oktober 1995.

Lee, Sang M., Daesung Chang, dan Seong-Bae Lim. "Impact of Entrepreneurship Education: A Comparative Study of the U.S. and Korea." *International Entrepreneurship and Management Journal* Vol. 1 (2005): 27–43.

Oktavia, Reni. "Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok." *Bahana Manajemen Pendidikan: Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol. 2, no. 1 (Juni 2014): 596–605.

"Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 Mengenai Kualifikasi dan Kompetensi Kepala sekolah.," n.d.

Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan. *Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012.

Rahardjo, Muljo. "Aplikasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Mengelola Praktik Kerja Industri pada Sekolah Menengah Kejuruan." *Jurnal Pendidikan Humaniora* Vol. 2, no. 3 (September 2014): 236–45.

Sularto, ST. "Urgensi Pendidikan Kewirausahaan." *Harian Kompas* (blog), 9 April 2010. http://Urgensi Pendidikan Kewirausahaan-Kompas.com.html.

Tim Redaksi. "LPMP Siap Dongkrak Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru di Bojonegoro," *ikilhojatim.com* (blog). Desember 2019. https://ikilhojatim.com/lpmp-siap-dongkrak-kompetensi-kepala-sekolah-dan-guru-di-bojonegoro/.

West III, G. Page, Elizabeth J. Gatewood, dan Kelly G. Shaver. *Handbook of University-wide Entrepreneurship Education*. USA: Edward Elgar, 2009.

Wibowo, Agus. *Pendidikan Kewirausahaan: Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Wickham, Philip A. *Strategic Entrepreneurship 4th Edition*. England: Prentice Hall, 2006.

Wiyatno, dan Muhyadi. "Peran Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 3 Jetis, Bantul." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 1, no. 1 (2013): 162–74.

Meningkatkan Literasi Digital Melalui Perpustakan Sekolah

Oleh: Eny Supriati

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*Information and Communication Technology*) telah menjadi bagian dari perkembangan perpustakaan. Perpustakaan saat ini bukan sekedar mengolah buku dan melayani secara manual, tetapi bergeser ke arah layanan berbasis otomasi. Memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi menjadi penting bagi seorang pustakawan sekolah, agar mampu memberikan program layanan yang dapat mendukung gerakan literasi digital kepada peserta didik. Adanya teknologi informasi yang semakin pesat telah melahirkan

Literasi merupakan satu kemampuan untuk membaca dan menulis, serta kemampuan untuk memahami kemanfaatan dari yang telah dibaca dan ditulis tersebut untuk pengembangan dirinya sendiri. Peserta didik akan mampu menemukan dan menganalisis

bacaan yang ditemukan untuk pengembangan dirinya bila memiliki kemampuan literasi yang baik. Sedangkan literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dari perangkat digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis disertai dengan kemahiran menggunakan teknologi komputer menjadi modal bagi peserta didik untuk menemukan, kemudian memahami segala informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya.

Peningkatan gerakan literasi baca dan digital bisa ditingkatkan melalui program perpustakaan sekolah. Manajemen baik disertai kreativitas pustakawan sekolah (*school librarian*) menghadirkan alternatif-alternatif layanan yang menarik serta menyediakan koleksi referensi bacaan yang variatif. Manajemen perpustakaan merupakan seni dan teknik mengorganisasikan semua sumber daya yang ada di perpustakaan, yang meliputi informasi dan sumber-sumber informasi, baik dalam bentuk tercetak maupun noncetak, dengan tujuan untuk pemanfaatan secara optimal bagi penggunanya. Melalui perpustakaan yang mengorganisasikan sumber-sumber informasi, sumber daya manusia, dan fasilitas sarana prasarana, dapat mendukung budaya literasi di sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukan data tentang jumlah dan persentase kondisi perpustakaan sekolah di 34 provinsi.

Sekolah di Indonesia yang belum memiliki perpustakaan sebanyak 34,19 persen. Kemudian pembaharuan data pada 2018, menunjukkan beberapa provinsi dengan perpustakaan terbanyak mengalami kerusakan baik ringan maupun berat, di antaranya; Provinsi Aceh (74,8 persen), Provinsi Lampung (74,1 persen) Provinsi Sulawesi Barat (72,7 persen) dan Provinsi Papua Barat (72,5 persen). Kemudian di Pulau Jawa kecuali Provinsi Jakarta, rata-rata kerusakan yakni dari 60 hingga 70 persen. Sedangkan di Nusa Tenggara dan Papua, kerusakan lebih dari 70 persen. Dari data ini menunjukkan bahwa banyak perpustakaan sekolah yang belum memiliki tata kelola layanan yang baik.

Perpustakaan MAN 2 Kota Madiun telah mengembangkan layanan manual menjuju layanan berbasis otomasi. Pada bidang layanan sirkulasi telah menggunakan OPAC (*Online Public Acces Catalogue*), sehingga peserta didik dapat menelusur (*searching*) berbagai judul buku yang di miliki perpustakaan dengan lebih cepat dan efektif. Kerjasama antar perpustakaan se Eks karesidenan Madiun, yaitu sinau bareng Senayan library and Management Sistem (SliMS) juga menjadi program unggulan perpustakaan MAN 2 Kota Madiun. Sinau bareng ini diikuti guru, dan pengelola perpustakaan se eks karesidenan Madiun. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk pengembangan literasi digital berbasis masyarakat, yaitu meningkatkan kemapuan teknologi informasi kepada para pengelola perpustakaan sekolah se-eks Karesidenan Madiun.

Perpustakaan MAN 2 Kota madiun juga mengembangkan beberapa layanan seperti: referensi, photocopy,

jasa rental, wakaf buku, display buku baru. Beberapa program yang dijalankan untuk mendukung gerakan literasi di sekolah ini diantaanya; pendidikan perpustakaan (*user education*), perpustakaan kelas (*library class*), internet wifi, pojok buku, lomba resensi, bimbingan literasi, jasa internet, multimedia, dan bulan kunjung perpustakaan. Perpustakaan menyelenggarakan program lomba baca cerpen setiap bulan kunjung perpustakaan. Perpustakaan menyediakan koleksi novel, dan koleksi fiksi, cerita rakyat untuk memberi motivasi kepada peserta didik untuk datang berkunjung dan membaca ke perpustakaan. Pahun 2010 perpustakaan telah menempati gedung luas dan strategis kurang lebih 200 m2. Perpustakaan MAN 2 Kota Madiun memiliki koleksi kurang lebih 4.952 judul/9.350 eks terdiri buku paket novel, ensiklopedia, dan majalah.

Hal inilah mendorong Penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait tata kelola dan manajemen perpustakaan MAN 2 Kota Madiun. Tujuannya untuk mendalami bagaimana efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perpustakaan sekolah dalam mendukung gerakan literasi digital. Penulis juga akan melakukan analisis dan membuat rekomendasi model manajemen perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi digital, supaya dapat dijadikan pedoman pengembangan bagi perpustakaan sekolah lain.

Metode Penelitian dan Konsep Efektivitas Manajemen Perpustakaan dalam Konteks Literasi Digital

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi interaktif dan noninteraktif. Pada metode interaktif termanifestasikan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan noninteraktif diwujudkan melalui hasil riset pustaka dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam ditujukan kepada beberapa informan yang terkait langsung dengan tema penelitian. Sedangkan pengambilan sampel informan dilakukan secara bertujuan (*purposive sample*). Kendala dalam melakukan wawancara Penulis antisipasi dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu Penulis mencari informan baru atas petunjuk dari informan utama. Keabsahan data menggunakan konsep triangulasi. Analisis data mengikuti cara dari Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini Penulis mengambil konsep literasi digital dari Paul Gilster dalam bukunya *Digital Literacy.* Dalam buku ini Paul Gilster menjelaskan literasi digital adalah *"kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer."*Dalam literasi digital khususnya di sekolah terdapat beberapa sasaran, diantaranya sasaran berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis masyarakat.

Pertama, literasi digital berbasis kelas dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pelatihan literasi digital yang

diikuti oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini meningkatkan penggunaan literasi digital dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman warga sekolah dalam menggunakan media digital dan internet. ***Kedua,*** literasi digital berbasis budaya sekolah dapat dilakukan dengan meningkatkan kuantitas variasi bacaan dan alat peraga berbasis digital, peningkatan intensitas peminjaman buku bertema digital, peningkatan kegiatan sekolah yang memanfaatkan teknologi informasi komputer (TIK), penggunaan media digital dan situs laman, adanya kebijakan penggunaan TIK di sekolah, penggunaan TIK dalam setiap layanan sekolah. ***Ketiga,*** literasi digital berbasis masyarakat dengan melakukan tersedianya jumlah sarana yang yang mendukung gerakan literasi digital, dan tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam mengembangkan program literasi digital.

Untuk mewujudkan budaya literasi yang baik, maka harus didukung dengan efektivitas manajemen perpustakaan yang baik juga. Efektivitas merupakan tolak ukur bagi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Ketepatan dalam menggunakan sumber daya yang ada menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tercapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau untuk menggunakan pengaruh spesifik yang bisa diukur. Secara umum efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Gibson memandang keefektifan organisasi atau lembaga dari tiga perspektif, yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi. ***Pertama,*** efektivitas individu berkenaan dengan pelaksanaan dan tanggung jawab tugas dari seorang individu dalam sebuah organisasi. Mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang dimiliki secara maksimal sehingga tujuan organisasi tercapai. ***Kedua,*** efektivitas kelompok merupakan kinerja yang dilakukan keompok guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan ***ketiga,*** efektivitas organisasi adalah hasil dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok. Artinya, efektivitas organisasi merupakan kumulasi dari prestasi individu dalam sebuah organisasi dan hasil kinerja kelompok dalam organisasi tersebut.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan gerakan literasi digital di sekolah. Peran perpustakaan yaitu sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan, tempat rujukan para pencari ilmu, dan pengembangan karya-karya ilmiah. Sebagai pusat sumber informasi perpustakaan menyediakan koleksi bahan pustaka tertulis, tercetak dan terekam yang diatur menurut sistem tertentu dan diberdayagunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian serta rekreasi intelektual bagi masyarakat. Perpustakaan mempunyai peran melakukan layanan informasi literal kepada masyarakat.

Agar efektivitas perpustakaan dalam mendukung gerakan literasi digital dapat dicapai secara maksimal maka terdapat strategi yang bisa dilakukan, di antaranya:

1. Penguatan kapasitas fasilitastor

   Penguatan fasilitator di sini dimaksudkan untuk penguatan kompetensi bagi kepala sekolah, pengawas, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Kompetensi *stakeholder* internal lembaga pendidikan ini perlu ditingkatkan guna memperlancar program literasi digital yang ada. Penguatan kompetensi ini dapat diwujudkan penggunaan media pembelajaran yang bersifat digital bagi para guru, penggunaan sistem pengelolaan berbasis digital bagi kepala sekolah dan pengawas, aplikasi administratif yang berbentuk digital bagi tenaga kependidikan, serta penggunaan sumber-sumber belajar digital bagi para peserta didik. Penguatan-penguatan yang dimaksud di atas dapat ditempuh melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh mandiri dari pihak sekolah atau mengirim anggota sekolahnya ke pelatihan yang diadakan dari pihak luar sekolah.

2. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu

   Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah cepat. Hal ini perlu tindakan sigap oleh pengelola lembaga pendidikan untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. Salah satu cara untuk menjaga agar selalu *up to date* pengetahuan yang dimiliki adalah dengan cara menambah ragam sumber belajar yang ada. Baik sumber belajar yang bersifat digital dalam bentuk file ataupun

dalam bentuk fisik *print out* semacam buku. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan pihak sekolah untuk memperkuat ragam sumber belajar adalah sebagai baerikut: a) penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan, b) penyediaan situs-situs edukatif, c) penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif, d) pembuatan mading sekolah dan kelas

3. Perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar

   Selain penambahan jumlah dan ragam sumber belajar sebagaimana yang dipaparkan di atas, pihak sekolah dapat melakukan cara yang kedua yaitu dengan memperluas akses sumber belajar yang berkualitas. Diantara perluasan akses ini dapat dilakukan dengan menyediakan komputer dan akses internet di lingkungan sekolah, serta penyediaan informasi mealalui media digital.

4. Peningkatan pelibatan publik

   Terdapat tiga strategi dalam peningkatan pelibatan public ini: ***pertama,*** berbagi pengalaman (*session sharing).* Dalam hal ini antara guru, dan pengelola perpustakaan dapat berbagi pengalaman sehari-hari melalui moment khusus semisal kelas inspirasi yang dapat meningkatkan kegiatan literasi digital warga sekolah. ***Kedua,*** pelibatan para pemangku kepentingan, yaitu stakeholder eksternal yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pengelola dunia usaha dan industri, serta para praktisi pendidikan. Melalui kebijakan yang dirumuskan, pemerintah daerah dengan

sarana prasarana yang digunakan dalam pengaplikasian kebijakan tersebut, para pelaku dunia usaha dan industri serta praktisi pendidikan yang yang dapat membagi pengalaman mereka terkait literasi digital melalui pelatihan-pelatihan. ***Ketiga,*** penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Pelibatan aktif forum komite sekolah dalam pengembangan literasi digital penting diperlukan. Diantara yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi aktif menggunakan media teknologi informasi digital yang dapat mempermudah komunikasi antar wali peserta didik. Selain jalinan komunikasi aktif atau fungsi kekeluargaan dari orang tua masyarakat, perlu juga fungsi proteksi dilakukan oleh orang tua dam masyarakat terhadap pemakaian gawai dan akses internet oleh para peserta didiknya.

5. Penguatan tata kelola

   Penguatan tata kelola dapat dilakukan melalui: a) pengembangan sistem administrasi secara elektronik. Apabila sistem administrasi telah dijalankan dengan elektronik maka pegawai atau staf yang berhubungan dengan sistem administrasi juga harus menguasai pengoperasian sistem yang ada. Sehingga apabila sistem administrasi sudah berbasis elektronik seyogyanya dan bahkan mutlak harus didukung sumber daya manusia yang memadai. b) Pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Sebuah program tanpa dibarengi dengan kebijakan maka akan sia-sia. Atau dengan kata lain program tersebut hanya jalan ditempat tanpa ada perkembangan yang signifikan, karena

kebijakan merupakan salah satu cara untuk mendorong pelaksanaan program yang ada. Kebijakan-kebijakan terkait literasi digital misalnya saja guru diwajibkan membuat media pembelajaran dengan berbasis teknoogi informasi, penghimbauan kepada peserta didik untuk menelusuri informasi dengan berbasis internet, serta penggunaan teknologi-teknologi tertentu terkait dengan literasi digital.

Terkait dengan manajemen perpustakaan sekolah Ibrahim Bafadal mengungkapkan bahwa perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku maupun non buku yang dikelola dengan menggunakan aturan yang sistematis.

Perpustakaan sekolah maerupakan lembaga yang mengelola bahan bahan pustaka yang tergabung pada institusi sekolah dan dikelola sepenuhnya oleh sekolah. Tujuan utama perpustakaan sekolah adalah mendukung sekolah mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya.

Berkaitan dengan manajemen perpustakaan, Penulis mengambil konsep dari Jo Bryson yang mengembangkan pendapat Terry. Dalam hal ini Jo Bryson menyatakan bahwa manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan adanya pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran dan keahlian.

Kemudian D. Stuert menyebutkan beberapa hal penting dalam pengelolaan perpustakaan, yaitu:

> *Three components compose all libraries: 1) a physical facility or a group of facilities to house the activities of the library, 2) a collection of resources, and 3) personnel to collect and organize the resources and to retrieve information needed by users. Of the three components only the last – personnel- can bring a library to life and make it a dynamic, vital force for the community it service*

Dari pendapat di atas Penulis simpulkan bahwa manajemen perpustakaan sekolah merupakan kegiatan mengelola sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang ditetapkan sekolah. Dalam hal ini terdapat empat hal penting dalam manajemen perpustakaan sekolah. ***Pertama,*** manajemen pengelolaan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pustakawan sekolah *(school librarian*); ***kedua,*** pengelolaan koleksi referensi baik cetak maupun non cetak sebagai sumber informasi; ***ketiga,*** pengelolaan dana untuk mendukung penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, dan *keempat* pengelolaan sistem layanan perpustakaan sekolah termsuk didalamnya pembuatan program-program literasi sekolah.

Model Efektivitas Perencanaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Digital di Sekolah

Gerakan literasi digital merupakan gerakan yang akan terus berkembang secara massif. Tak terkecuali di lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Gerakan literasi ini semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia informasi dan teknologi yang digunakan di dunia pendidikan. Sebagaimana pemaparan pada bab sebelumnya, tak terkecuali MAN 2 Kota Madiun juga sedang gencar-gencarnya melakukan literasi digital.

Diantara literasi digital yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis internet sehingga proses pembelajaran menjadi semakin menarik dan antusias peserta didik menjadi meningkat. Mengadakan perlombaan-perlombaan literasi tingkat kabupaten yang dapat memacu kreativitas peserta didik dalam berliterasi, serta mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah dan wali peserta didik akan pentingnya budaya membaca bagi peserta didik. Keseluruhan kegiatan yang Penulis paparkan di atas apabila ditinjau dari kategorinya, maka literasi yang dilakukan termasuk dalam kategori gerakan literasi berbasis kelas. Dikategorikan berbasis kelas karena penekanan dari literasi ini adalah ada pada lingkup kelas.Salah satu kegiatan utama yang ada di kelas adalah proses belajar mengajar. Pada praktiknya, MAN 2 Kota Madiun selalu mendorong dan mewajibkan setiap gurunya untuk selalu membenahi proses pembelajarannya dengan meningkatkan kreativitas dalam mengajar, diantaranya dengan menggunakan internet, teknologi informasi, serta penggunaan media pembelajaran yang atraktif.

Pengembangan literasi berbasis budaya selain peserta didik, akan tetapi guru juga merupakan objek utama dalam pengenalan dan pengembangan budaya literasi. Perpustakaan membuat kegiatan yang bersifat mengembangkan potensi berliterasi peserta didik melalui perlombaan-perlombaan, juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam literasi digital. Menyelenggarakan kegiatan

seminar, workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang literasi digital untuk guru. Salah satu imbas positif apabila guru mengikuti kegiatan semacam ini adalah pengetahuan dan keterampilan guru dalam penggunaan teknologi informasi akan semakin bertambah yang nantinya akan berguna dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Pengikutsertaan guru dalam usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait literasi digital melalui seminar, workshop, dan pelatihan juga merupakan salah satu aspek dalam proses mendukung gerakan literasi digital.

Literasi berbasis budaya madrasah ini, MAN 2 Kota Madiun juga menekankan penggunaan TIK dalam setiap pelayanan, sehingga efisiensi waktu dalam pelayanan dapat ditingkatkan.Apabila gerakan literasi berbasis kelas yang dilakukan guru dan berbasis budaya madrasah dari person serta perpustakaan dapat dikolaborasikan secara maksimal maka tidak menutup kemungkinan gerakan literasi digital yang ada di MAN 2 Kota Madiun akan berjalan dengan lancer.

Perpustakaan MAN 2 Kota Madiun juga melakukan penambahan jumlah koleksi bacaan secara berkala. Penambahan jumlah koleksi baik yang bersifat akademis semisal buku-buku pelajaran maupun nonakademis semisal buku-buku cerita, peserta didik dapat menggunakannya untuk memperluas wawasan dan informasi yang dimiliki. Dari sistem perangkat yang digunakan, perpustakan MAN 2 Kota Madiun melakukan pengembangan perangkat layanan yang tadinya manual menjadi sistem otomasi. Pengembangan program yang mendukung gerakan

literasi madrasah, perpustakaan MAN 2 Kota Madiun juga mengembangkan akses perpustakaan yang berbasis android. Sehingga peserta didik dapat menikmati buku-buku atau referensi yang ada di perpustakaan hanya dengan melalui *handphone* pintar.Pelaksanaan program-program semacam ini dalam *Materi Pendukung Literasi Digital* termasuk ke dalam literasi digital berbasis budaya madrasah.

Pengembangan literasi berbasis masyarakat, perpustakaan MAN 2 Kota Madiun melakukan kerja sama dengan pemerintah kota Madiun dalam mengembangkan akses jaringan perpustakaan berbasis android dan belajar bareng SliMS (*Senayan library and Management Sistem*) antar pengelola perpustakaan sekolah se eks karesidenan Madiun. Kerjasama semacam ini, sebagai bentuk penguatan implementasi gerakan literasi termasuk dalam kategori literasi digital berbasis masyarakat. Dikatakan berbasis masyarakat karena dalam pelaksanaan literasi digital, pihak madrasah mengajak pihak lain dari unsur masyarakat untuk bekerja sama guna menyukseskan program literasi yang ada.

Dari beberapa penjelasan di atas, pelaksanaan program literasi digital ini tidak bisa lepas dari peran perpustakaan baik yang berbasis kelas, berbasis budaya madrasah, maupun berbasis masyarakat. Peran perpustakaan dalam program literasi digital berbasis kelas adalah sebagai penyedia bahan pustaka dalam hal ini buku dan referensi yang digunakan dalam proses belajar mengajar serta pelaksana perlombaan literasi. Peran perpustakaan dalam program literasi berbasis budaya madrasah adalah sebagai

pelaksana program pengadaan buku, pemakai sistem layanan perpustakaan berbasis otomasi, dan berbasis android. Sedangkan peran perpustakaan dalam program literasi berbasis masyarakat adalah sebagai pelaksana program kerja sama. Lebih jelas lagi apabila di rinci perencanaan perpustakaan MAN 2 Kota Madiun meliputi yang sesuai dengan panduan pelaksanaan literasi digital. 1. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu yang meliputi: Penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan, Penyediaan situs-situs edukatif, Penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif, Pembuatan mading sekolah dan kelas. 2. Perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar yang meliputi: Penyediaan computer dan akses internet di sekolah, Penyediaan informasi melalui media digital. 3. Peningkatan pelibatan public yang meliputi: *Session sharing,* Pelibatan para pemangku kepentingan, Penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. 4. Penguatan tata kelola yang meliputi: Pengembangan sistem administrasi secara elektronik, Pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital.

Perencanaan program perpustakaan MAN 2 Kota Madiun guna mendukung program gerakan literasi digital MAN 2 Kota Madiun dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran dengan melibatkan pengelola perpustakaan dan pimpinan madrasah. Dalam prosesnya pengelola dan pimpinan madrasah melakukan perencanaan program perpustakaan yang berbasis tahunan ini dengan mendasarkan pada rencana pengembangan madrasah yang telah tertulis di rencana kerja madrasah atau sering disebut

dengan RKM. Salah satu tujuan mendasarkan perencanaan program perpustakaan dengan rencana madrasah agar tercipta kesesuaian antara program yang dilakukan perpustakaan dengan program yang akan dilakukan oleh madrasah. Sehingga program perpustakaan dapat memperkuat dan mempercepat laju pelaksanaan program madrasah. Perumusan perencanaan secara periodik yang dibuat pertahun ini termasuk dalam kategori perencanaan dalam waktu singkat (*short term*).

Perencanaan akan menjadi efektif apabila dalam perencanaan juga didasarkan pada pelaksanaan program-program kerja tahun lalu. Hal ini digunakan untuk bahan evaluasi bagi pengelola perpustakaan agar ke depan perencanaan yang disiapkan bisa maksimal dan dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaanannya nanti. Selain itu agar program literasi digital dapat segera terlaksana dengan baik, perencanaan juga harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal perpustakaan. Hal ini mengandung maksud agar perencanaan nanti memanfaatkan kekuatan yang dimiliki guna menutupi kelemahan yang ada. Disamping itu, peluang, dana operasional madrasah, visi dan misi madrasah juga digunakan pengelola perpustakaan dan pimpinan madrasah sebagai dasar dalam perumusan perencanaan. Sehingga dari pemaparan ini dapat diketahui bahwa pengelola perpustakaan dan pimpinan MAN 2 Kota Madiun dalam merencanakan sebuah program selalu mempertimbangkan kondisi internal dan ekternal madrasah.

Kegiatan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan ini sesuai dengan pemaparan dari Lasa, bahwa penyusunan rencana harus melihat kondisi internal yang meliputi kekuatan kelemahan, visi dan misi, serta kondisi dana yang ada. Selain itu sangat penting untuk memperhatikan peluang pada lingkungan eksternal guna mendorong tercapainya rencana ke depan.

Dari usaha yang dilakukan perpustakaan MAN 2 Kota Madiun dalam mendukung gerakan literasi digital, pada dasarnya pengelola mengembangkan unsur-unsur manajemen yang ada. Unsur yang dikembangkan diantaranya*man, material,* maupun *method.* Pengembangan unsur *man* atau manusia dilakukan perpustakaan dengan memberikan kesempatan bagi stafnya untuk melakukan studi lanjut pada jenjang magister.Selain itu pihak perpustakaan juga mendorong para staf untuk mengikuti seminar, workshop guna meningkatkan wawasan yang dimiliki. Material atau sarpras dikembangkan oleh pihak pengelola perpustakaan dengan cara menambah koleksi buku dan referensi, perbaikan sarana perpustakaan baik rak, gedung dan sarana yang lain. Sedangkan *method* atau pelayanan dikembangkan dengan cara selalu melakukan perbaikan dalam hal manajemen yang ada. Semisal saja dulu pelayanan peminjaman buku dilakukan secara manual. Akan tetapi sekarang peminjaman buku sudah dengan menggunakan program senayan, sehingga peminjaman buku sudah berbasis komputerisasi. Dan perkembangan terakhir ini pelayanan perpustakaan dapat dilakukan

dengan berbasis android. Sehingga peserta didik dan guru tidak perlu lagi ke perpustakaan apabila ingin meminjam buku. Cukup melalui aplikasi perpustakaan di android para guru dan peserta didik dapat menikmati layanan perpustakaan MAN 2 Kota Madiun.

Usaha yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan MAN 2 Kota Madiun ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lasa, bahwasanya untuk mendukung lancarnya sebuah program harus didukung oleh perbaikan komponen-komponen yang ada. Atau dengan kata program akan berjalan secara maksimal apabila diiringi dengan perencanaan pengembangan elemen-elemen yang bersinggungan dengan program yang ada, dalam hal ini manusianya, sarprasnya, dan manajemennya. Selain itu pihak pengelola juga menerapkan prinsip *the right man in the right place*, sehingga pelaksana dari program kerja dapat disesuaikan dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh staf. Hal ini tergambar dalam susunan struktur organisasi perpustakaan MAN 2 Kota Madiun.

Perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan MAN 2 Kota Madiun beberapa diantaranya dilakukan untuk menyongsong masuknya era digitalisasi yang dalam hal ini sudah merambah pada literasi digital.Sehingga pihak MAN 2 Kota Madiun berinisiasi untuk mengembangkan layanan-layanan baik perpustakaan maupun akademik, serta program-program pembelajaran yang berbasis digital sebelum semua sekolah/ madrasah menggunakan digitalisasi.Perencanaan semacam ini menunjukkan karakteristik MAN 2 Kota Madiun

memiliki sikap visioner terhadap perubahan yang akan terjadi.

Selain menunjukkan sikap visioner, MAN 2 Kota Madiun juga menunjukkan sikap tanggap terhadap perubahan yang ada.Sikap tanggap ini diwujudkan dengan dukungan terhadap progam-program literasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui pembuatan program-program kegiatan yang bertemakan literasi.

Perencanaan yang mengedepankan sikap visioner terhadap perubahan yang akan terjadi dan sikap tanggap setelah adanya perubahan ini termasuk dalam perencanaan yang bersifat proaktif dan responsif. Dan hal ini sesuai dengan pemaparan dari Veerabhadrappa.Bahwasanya apabila tujuan perencanaan yang disusun oleh pengelola adalah untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi maka hal ini termasuk dalam perencanaan proaktif.Sedangkan perencanaan yang disusun setelah adanya perubahan yang terjadi di sekitar organisasi adalah perencanaan responsif.

Setelah pengelola perpustakaan MAN 2 Kota Madiun menyusun perencanaan dengan mendasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang yang dapat diambil serta kondisi internal madrasah (perpustakaan), maka salah satu strategi yang digunakan oleh pengelola MAN 2 Kota Madiun adalah membagi program berdasarkan skala prioritas dan waktu. Hal ini mengandung maksud agar program yang lebih siap (sudah didukung dengan sumber daya yang lengkap) dapat dieksekusi terlebih dahulu senyampang menunggu kesiapan eksekusi program

selanjutnya. Strategi ini merupakan cara yang dianggap paling cocok agar program kegiatan madrasah dapat terus berjalan tanpa ada jeda waktu yang terlalu lama antara pelaksanaan program satu dengan yang lain. Senada dengan apa yang dilaksanakan di MAN 2 Kota Madiun, Havinal Veerabadrappa menyampaikan bahwa sebuah perencanaan harus dirumuskan berdasarkan periodisasi waktu yang jelas agar pelaksanaannya nanti dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu Veerabadrappa menambahkan perlu adanya instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur dan monitoring keterlaksanaan perencanaan yang telah dibuat.

Setelah melakukan perencanaan yang matang serta pemilihan strategi pencapaian yang akan ditempuh, pihak Perpustakaan MAN 2 Kota Madiun mendukung perencanaan ini dengan melakukan sosialisasi di kalangan warga madrasahnya serta masyarakat sekitar. Diantara media sosialisasi yang digunakan perpustakaan MAN 2 Kota Madiun meliputi *facebook, instagram*, dan gambar infografis. Dari sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan, materi/konten yang berupa gambar lebih sering digunakan. Hal ini dilakukan karena pengelola perpustakaan berasumsi media gambar lebih menarik perhatian daripada berbentuk tulisan.

Berkaitan dengan tingkat keefektifan perencanaan yang telah dilakukan dapat dilihat dari sisi ketercapaian perencanaan yang ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bulan agustus, perencanaan yang ditetapkan telah terlaksana sampai 80%, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang

dilakukan dapat dikatakan efektif. Karena berdasar pada penuturan Ngalimah, dikatakan efektif apabila sasaran yang direncanakan dapat tercapai dan dilaksanakan secara optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan dalam menggunakan sumber daya secara tepat menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tercapai dan berhasil guna.

Tingkat keefektifan ini didukung oleh kinerja masing-masing pengelola dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya pada awal analisis perencanaan, diketahui pengelola perpustakaan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensi masing-masing, sehingga tugas yang diberikan juga disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.

Tingkat ketercapaian perencanaan selain berdasarkan pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi masing-masing individu, juga merupakan kumulasi dari terselesaikannya tugas dari masing-masing individu yang mendapatkan tugas dalam satu kelompok. Sehingga dapat dikatakan tingkat efektivitas ditentukan oleh terselesaikannya tugas dari masing-masing individu yang berada di dalam kelompok pelaksana program kerja. Hal ini apabila dikaitkan dengan pendapat Gibson maka terselesaikannya tugas individu berdasarkan pembagian yang ditetapkan termasuk ke dalam efektivitas individu. Sedangkan terselesaikannya tugas kelompok pelaksana program merupakan efektivitas kelompok. Dari dua efektivitas ini akan memberikan efek kepada organisasi dalam hal ini efektivitas perencanaan perpustakaan.

Efektivitas perencanaan perpustakaan dalam mendukung program literasi digital di sekolah dapat gambarkan sebagai berikut:

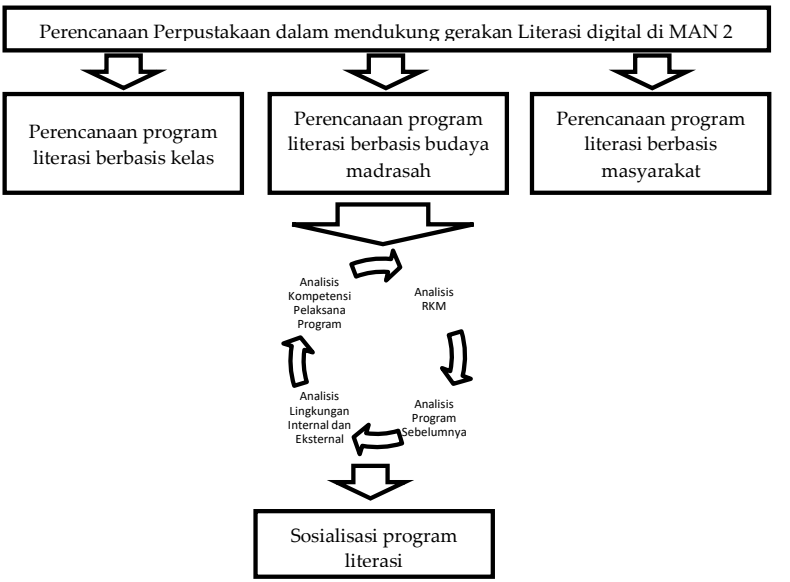

Gambar 1 Model Efektivitas Perencanaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Budaya Literasi Digital di Sekolah

Model Efektivitas Pelaksanaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Digital

Pelaksanaan mrupakan tindak lanjut dari perencanaan yang sudah di tetapkan. Perpustaakaan MAN 2 Kota Madiun dalam pelaksanaannya mendukung gerakan literasi digital bedasar kepada tiga program literasi, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya madrasah, dan berbasis masyarakat. Dari ketiga program tersebut tentunya dilakukan penjabaran kedalam bentuk atau realisasi program.

Dalam pelaksanaan memerlukan tindakan pengorganisasian untuk menciptakan struktur dan sistem kerja agar petugas perpustakaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik guna pencapaian tujuan & program-program literasi di MAN 2 Kota Madiun. Dalam pelaksanaan perpustakaan MAN 2 Kota Madiunmengatur sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang ada melalui pembuatan struktur organisasi secara jelas. Di sana di gambatkan tugas dan tanggung jawab, serta garis koordinasi antar pengelola, dan pimpinan. Hal ini bersesuaian dengan apa yang di sampaikan Lasa Hs. bahwa dalam pengaturan/mengorganisasikan sumber daya-sumber daya menerapkan prinsip-prinsip diantaranya: Perumusan tujuan, pembagian kerja, kesatuan komando, dan koordinasi. [296]

Dalam pelaksanaan program literasi berbasis kelas, perpustakaan MAN 2 Kota Madiun mendukung program madrasah dalam hal pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis internet dan multimedia di kelas. Pembelajaran berbasis internet yaitu guru mengajarkan kepada peserta didik cara menelusur berbagai sumber informasi terkait dengan tema pembelajaran di kelas. Kemudian guru mengajarkan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil penelusuran melalui internet dengan menggunakan LCD proyektor di kelas. Dengan demikian proses pembelajaran ini melatih peserta didik untuk terbiasa menggunakan media digital di kelas.

---

[296] Lasa Hs, *Manajemen Perpustakaan,* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 277.

Untuk mendukung program tersebut perpustakaan menyediakan fasilitas wifi sebagai alat penelusuran peserta didik daam pencarian informasi. Selain itu perpustakaan juga menyediakan koleksi multimedia seperti koleksi video, kaset, CD pembelajaran. Dalam layanannya perpustakaan MAN 2 Kota Madiun telah menerapkan sistem otomasi dengan sofware SliMS (*Senayan Library and Management Sistem*) dengan versi senayan 3-Stable 15 yang dirilis oleh perpustakaan departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan program berbasis budaya madrasah diantaranya menambah koleksi bacaan, mengembangkan perangkat layanan perpustakaan ke arah otomasi, dan pengembangan akses jaringan perpustakaan menjadi berbasis android. Pada saat ini perpustakaan telah memiliki kurang lebih 4.952 judul/9.350 eks koleksi. Bidang layanan yang di kembangkan perpustakaan MAN 2 Kota Madiun adalah layanan sirkulasi, referensi, photocopy, jasa rental, jasa internet, pengembangan sarana multimedia, informasi melalui sosial media (*facebook, instagram*), pendidikan perpustakaan (*user education*), perpustakaan kelas (*library class*), internet wifi, wakaf buku, pojok buku, lomba resensi, display buku baru, cerita perpustakaan (*library story),* dan bulan kunjung perpustakaan.

Kemudian dalam hal program literasi berbasis masyarakat perpustakaan MAN 2 Kota Madiun melakukan kerja sama dengan pemerintah kota Madiun dalam mengembangkan akses jaringan perpustakaan berbasis android dan belajar bareng SliMS (*Senayan library and Management Sistem*) antar pengelola perpustakaan sekolah

se eks karesidenan Madiun. Ini artinya pihak madrasah mengajak pihak lain dari unsur masyarakat untuk bekerja sama guna menyukseskan program literasi yang ada. Di antara kegiatan kerjasama antar perpustakaan sekolah, yaitu melakukan pelatihan SliMS (*Senayan library and Management Sistem*) yang di ikuti oleh guru, dan pengelola perpustakaan se eks karesidenan Madiun. Pelatihan tersebut di lakukan secara rutin 2 bulan sekali di perpustakaan MAN 2 Kota Madiun. Mereka para pengelola saling bertukar informasi dan berbagi pengetahuan tentang otomasi perpustakaan. Dengan demikian dari perpustakaan satu dengan yang lain saling menjalin kerjasama untuk memberi masukan agar tercipta layanan perpustakaan yang baik.

Untuk menciptakan keefektifan dalam menjalankan program literasi ini, kepala perpustakaan selalu memberikan bimbingan arahan dan motivasi. Kepala sekolah selalu menjalin komunikasi, koordinasi dan hubungan baik antara tim pelaksana, guru dan juga pimpinan madrasah utuk menciptakan kesatuan kerja yang baik. Sehingga program ini dapat berjalan efektif dan efisisien. Hal ini sebagaimana pendapat Robert D. Stueart & John Taylor Easlick bahwa pengarahan adalah berkaitan dengan memerintahkan pegawai untuk melaksanakan tugas secara effektif dan efisien sebagai tujuan lembaga dapat tercapai pengarahan mengacu pada hubungan antara pengawas kepada bawahan pada semua tingkatan dalam sebuah lembaga. Selain itu pimpinan juga memberikan motivasi, bimbingan, seingga tercipta hubungan yang harmonis, dengan melakukan

komunikasi dan koordinasi yang baik, dan terus berupaya mengembangkan kompetensi pelaksana program. [297]

Terjadinya kesatuan yang baik dalam pelaksanaan program literasi digital ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif. Berdasarkan pembagian tugas kepada pelaksana yang sesuai dengan kompetensi dan pemberian instruksi kerja berupa pengarahan menjadi pedoman setiap individu dalam melaksanakan tugasnya masing masing sehingga efektifan secara individu tercapai. Kemudian terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala perpustakaan, pelaksana, dan guru dapat menciptakan kerja kelompok yang solid mengarahkan kepada efektivitas kelompok, dan adanya koordinasi antara kepala perpustakaan untuk menyampaikan keseluruhan pelaksanaan program literasi digital kepada kepala madrasah merupakan bentuk efektivitas organisasi.

Hal ini bersesuaian dengan pendapat James L. Gibson, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly bahwa terselesaikannya tugas individu berdasarkan pembagian yang ditetapkan termasuk ke dalam efektivitas individu. Sedangkan terjalinnya kerjasama yang baik antar kepala perpustakaan, petugas perpustakaan sebagai pelaksana program, dan guru merupakan bentuk efektivitas kelompok. Dari hasil efektivitas individu dan efektivitas kelompok dalam pelaksanaan program literasi digital ini menjadi kefektivitas secara organisasi.[298]

---

[297] Robert D. Stueart & John Taylor Easlick, *Library Management* (Colorado: Libraries Unlimited, Inc., n.d.), 90.

[298] Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, 27–30.

Dari hasil analisa efektivitas pelaksanaan perpustakaan dalam mendukung gerakan literasi digital di sekolah ini dapat di gabarkan dalam model berikut:

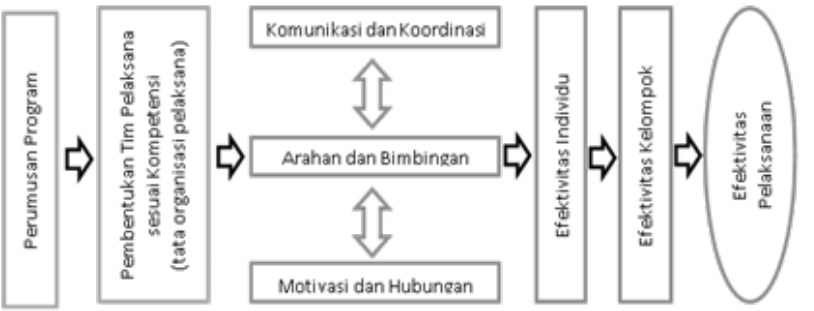

Gambar 2 Model Efektivitas Perencanaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Digital di Sekolah

Model Efektivitas Evaluasi Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Digital di Sekolah

Sebagaimana dalam fungsi-fungsi manajemen pada umumnya, fungsi manajemen selalu diakhiri dengan proses evaluasi. Apabila perencanaan adalah sebagai peta arah jalannya pelaksanaan, maka evaluasi berperan sebagai rambu-rambu yang mengatur agar pelaksanaan tetap dalam posisi yang seharusnya. Atau dengan kata lain evaluasi merupakan alat kontrol jalannya sebuah kegiatan. Yaitu untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi guna dicarikan solusinya agar pelaksanaan program dapat terus berjalan sebagaimana yang diinginkan.

Pelaksanaan evaluasi di MAN 2 Kota Madiun dilaksanakan secara berkala dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan biasanya dilakukan oleh tim pelaksana program yang

pimpin oleh kepala madrasah. Evaluasi yang dilakukan dalam rentang waktu pelaksanaan ini lebih ditekankan pada evalusi kinerja dari masing-masing anggota tim pelaksana. Sehingga selain untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari masing-masing anggota juga sebagai wahana untuk memotivasi apabila diketemukan anggota yang bekerja kurang maksimal.Hal ini senada dengan yang dikemukakan Lasa mengenai tujuan dari evaluasi. Diantara tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi serta sebagai sarana menentukan solusi yang tepat dari penyimpangan yang terjadi.[299]

Selain evaluasi kinerja, MAN 2 Kota Madiun juga mengadakan evaluasi hasil. Jika evaluasi kinerja lebih menekankan pada aspek proses kerja individu, maka evaluasi hasil lebih ditekankan pada aspek keberhasilan atau ketercapaian dari program yang dilaksanakan. Sehingga dengan adanya kinerja yang baik dari setiap anggota pelaksana diharapkan ketercapaian program juga dapat diraih. Kegiatan evaluasi ini bersesuaian dengan teori Gibson terkait efektivitas individu, maka evaluasi kinerja merupakan alat untuk mendorong terciptanya efektivitas individu. Dan efektivitas individu akan menciptakan efektivitas kelompok.[300] Gambaran mengenai efektivitas evaluasi dalam mendukung program literasi digital dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

[299] Lasa Hs, *Manajemen Perpustakaan*, 315.
[300] Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, 27–30.

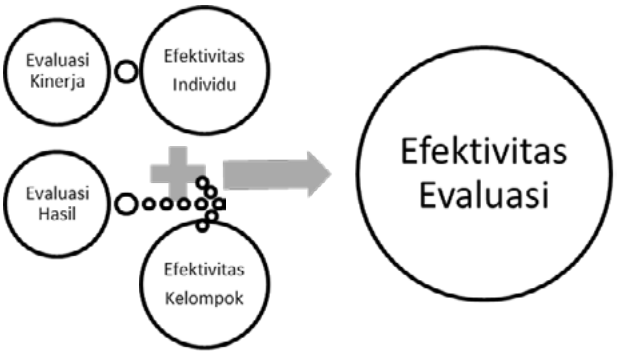

Gambar 3 Model Efektivitas Evaluasi Perpustakaan dalam Mendukung Gerakan Literasi Digital di Sekolah

Setelah meneliti dan menganalisis, Penulis gambarkan secara keseluruhan desain model efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perpustakaan sekolah dalam mendukung literasi digital sebagai berikut:

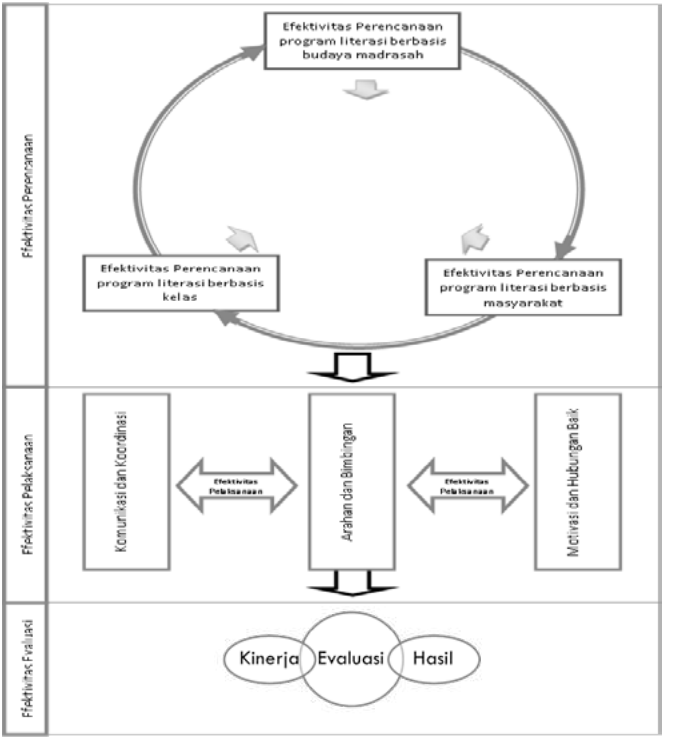

Gambar 4 Desain Model Efektivitas Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Digital di Sekolah

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka Penulis simpulkan bahwa; Efektivitas perencanaan perpustakaan sekolah dalam mendukung program literasi digital melihat kondisi internal yang meliputi kekuatan kelemahan, visi dan misi, kondisi dana, dan memperhatikan peluang pada lingkungan eksternal. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan merujuk pendapat Lasa H.S. dan Havinal Veerabadrappa. Perencanaan juga berdasarkan periodisasi waktu yang jelas agar dapat dilakukan secara maksimal

dengan menggunakan instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur dan monitoring keterlaksanaan perencanaan yang telah dibuat. Perumusan perencanaan perpustakaan sekolah juga menerapkan beberapa analisis, yaitu analisis rencana kerja sekolah, analisis program sebelumnya, analisis faktor internal dan eksternal, analisis kompetensi dan potensi pelaksana program, yang diakhiri dengan sosialisasi. Sedangkan perencanaan terkait program literasi digital yaitu perencanaan literasi digital berbasis kelas, budaya madrasah, dan masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan perpustakaan sekolah dalam mendukung program literasi digital bersesuaian dengan Robert D. Stueart & John Taylor Easlick bahwa dalam pengarahan berkaitan dengan hubungan antara pimpinan kepada bawahan untuk memberi tugas dan wewenang kepada pegawai untuk melaksanakan tugas supaya tujuan dapat tercapai. Selain itu pimpinan juga memberikan motivasi, bimbingan dalam setipa kegiatan,serta melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Pelaksanaan perpustakaan sekolah di lakukan dengan merumuskan program, membagi tim pelaksana literasi sesuai kompetensi, dan menciptakan instruksi kerja melalui pengarahan kepala perpustakaan. Efektivitas pelaksanaan program literasi dapat di capai dengan menjalin koordinasi dan hubungan baik, ***pertama,*** koordinasi antara pelaksana satu dengan pelaksana yang lain sehingga menjadi tim kerja yang solid; ***kedua,*** koordinasi antara kepala perpustakaan, tim pelaksana dan guru; ***ketiga,*** koordinasi antara kepala perpustakaan dengan kepala

madrasah. Dengan demikian tercipta kesatuan kerja dalam pelaksanaan program literasi demi tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Namun demikian, dalam pengarahan belum terdapat instruksi kerja secara tertulis, yang dapat di jadikan pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga rentan terjadi kesalahan.

Efektivitas evaluasi perpustakaan sekolah bersesuaian dengan teori Gibson terkait efektivitas individu, dimana evaluasi kinerja merupakan alat untuk mendorong terciptanya efektivitas individu, yang kemudian akan mendukung terciptanya efektivitas kelompok. Kegiatan evaluasi perpustakaan sekolah dilakukan oleh internal tim pelaksana yang dipimpin kepala perpustakaan dan kepala sekolah sebagai tindak lanjut pada program berikutnya. Efektivitas evaluasi dicapai dengan menerapkan evaluasi kinerja masing-masing anggota tim pelaksana dan evaluasi hasil kinerja untuk melihat ketercapaian program mendukung gerakan literasi digital. Namun demikian evaluasi yang dilaksanakan belum tersusun dalam sebuah laporan kerja. Perlu adanya perbaikan dalam administrasi dokumen hasil kegiatan, sehingga bisa dijadikan pedoman untuk perbaikan pelaksanaan program perpustakaan pada tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Bafadal, Ibrahim. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Basuki, Sulistyo. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Bryson, Jo. *Effective library and information centre management.* Vermon: Gower Publishing Company, 1990.

Christian, Riel, J., S., & Hinson, B., Charting. *Digital Literacy: A framework for information technology and digital skills education in the community college*. Presentado en Innovations, 2012.

Gibson, James L. John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, 1 ed. Jakarta: Erlangga, 1985.

Hs, Lasa. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.

https://beritagar.id/artikel/berita/sepertiga-sekolah-se-indonesia-belum-punya-perpustakaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta: Jakarta, 2017.

Kumala. *Kamus Dornald*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1998.

Ngalimah. *Efektivitas Koleksi di Ruang Layanan Bahan Pustaka Baru Perpustakaan Nasional Jakarta.* Jakarta: FIB UNDIP, 2007.

Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa: Menciptakan Ekosistem Sekolah dan Masyarakat*

Berbudaya Baca- Tulis Serta Cinta Sastra. Jakarta: Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

Stueart, Robert D. dan John Taylor Easlick. *Library Management.* Colorado: Libraries Unlimited, Inc, n.d.

Supriyanto, Wahyu dan Ahmad Muhsin. *Teknologi: Informasi Perpustakaan.* Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Tim Penyusun. *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Veerabhadrappa, Havinal. *Management and Entrepreneurship*. New Delhi: New Age International, 2008.

Yusuf, Pawit M. *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Urgensi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Usaha Peningkatan Layanan Perpustakaan

Oleh: Antis Rachmayanti

Pendahuluan

Perpustakaan adalah pusat layanan informasi yang juga merupakan sarana pendukung yang sangat penting dalam memperoleh keakuratan data dan informasi yang dibutuhkan oleh *user* (pengguna). Dalam konteks Pendidikan Tinggi Islam, informasi dan data sebagaimana dimaksudnya umumnya adalah untuk kepentingan riset/ penelitian yang dilakukan oleh para civitas academica-nya, utamanya mahasiswa dan dosen. Riset yang dilakukan mahasiswa, misalnya, bermula dari tugas-tugas makalah kelas hingga tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi.

Karena itulah, perpustakaan merupakan jantungnya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Dinamika dan pengembangan keilmuan keislamam ditentukan oleh riset, sementara riset itu sendiri bertumpu pada eksistensi

perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi dan data. Pentingnya peran perpustakaan, sayangnya, masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Bahkan sering kita lihat perpustakaan hanya untuk "melokalisasi" orang-orang tertentu yang tidak disukai oleh pimpinan, atau perpustakaan hanya dijadikan syarat formal keberadaan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, berbicara tentang perpustakaan dalam konteks pendidikan tinggi akan selalu menarik dan urgen dalam konteks sosialisasi dan pengembangan lembaga ini.

Sebagaimana yang diketahui, perpustakaan adalah sub sistem dari Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI). Karena itu perpustakaan mempunyai banyak unsur di dalamnya yang harus bersifat padu dalam rangka memaksimalkan tujuan layanan data kepada civitas academica. Sumber daya manusia atau pustakawan adalah unsur pokok perpustakaan. Di pundak pustakawan perpustakaan dikelola dan dikembangkan. Di tangan pustakawan pula, perpustakaan secara setia memberikan layanan kepada para penggunanya secara cepat dan akurat. Perpustakaan yang kaya fasilitas dan literatur tidak akan berdaya guna tanpa keberadaan tenaga pustakawan yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Penting dan strategisnya peran pustakawan akhir-akhir ini diapresiasi dalam bentuk pemberian insentif yang memadahi oleh pemerintah dalam bentuk kenaikan tunjangan fungsional, remon selain gaji yang rutin diterima.

Peran strategis pustakawan sebagaimana tergambar di atas, menuntut adanya kompetensi. Kompetensi tersebut

meliputi *hard* dan *soft skill* terkait dengan tugasnya sebagai pustakawan. Kompetensi *hard skill* meliputi kompetensi terkait dengan pekerjaan kepustakaan, sementara *soft skill* berkaitan dengan standar kepribadiaan dan karakter yang dibutuhkan dalam pelayanan kepustakaan kepada pengguna.

Hal di atas sebagaimana dinyatakan bahwa prinsip kepustakawanan menyatakan bahwa perpustakaan diciptakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka perpustakaan harus memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk pemakai. Dalam hal ini terdapat dua kubu: di satu pihak, pustakawan dengan koleksinya, dan di pihak lain para pengguna dengan berbagai harapannya.[301]

Karena hal di atas, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kepustakawanan pada dasarnya berorientasi pada jasa. Pekerjaan yang berorientasi pada jasa tentu akan sangat berbeda dengan pekerjaan yang berorientasi pada barang. Pekerjaan sektor jasa dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan dan manusia yang tidak sesederhana sebuah pekerjaan yang berorientasi pada produk barang. Jasa tersebut adalah pelayanan informasi kepada para penggunanya, dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peranan perpustakaan sebagai pusat layanan informasi menjadi semakin penting.

Di antara layanan jasa kepustakawanan adalah layanan jasa yang bersifat edukatif. Layanan jasa yang bersifat edukatif ini meliputi edukasi kepada pengguna bagaimana

[301] Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 112.

menggunakan opac, mencari bibliografi, mencari kata dan istilah tertentu, penelusuran informasi dan lain sebagainya. Dalam konteks perpustakaan pendidikan tinggi, apalagi perpustakaan pascasarjana misalnya, layanan edukasi ini semakin kompleks dan rumit karena melibatkan berbagai cabang keilmuan yang sangat terstruktur. Ini berbeda dengan dengan perpustakaan pada level pendidikan dasar dan menengah atau perpustakaan umum. Profesionalisme pustakawan dalam memberikan layanan di perpustakaan pendidikan tinggi sebagaimana penulis sebut di atas sangat dituntut. Pustakawan dalam hal ini ikut mengantarkan para penggunanya untuk menghasilkan riset dengan buku dan acuan yang terstandarisasi sesuai dengan varian sumber informasi sesuai dengan kebutuhan riset.

Di balik peran strategis kepustakawanan dalam pengelolaan perpustakaan menuntut adanya *up grade* dan pengembangan Sumber Daya Manusia perpustakaan (selanjutnya disebut SDM perpustakaan) secara rutin dan berkelanjutan. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang, dan pustakawan seharusnya selalu mengikuti perkembangan tersebut dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada para user-nya. Pengembangan SDM perpustakaan meliputi pengembangan kompetensi teknis kepustakaan dan kompetensi kepribadian sekalipun. Ini dikarenakan sebagaimana Penulis sebut di atas, karena perpustakaan berorientasi pada orang, yakni berorientasi pada jasa kepada kaum terdidik.

Akan tetapi persoalannya kemudian, perpustakaan belum benar-benar mendapatkan perhatian yang sela-

yaknya, utamanya dari pimpinan-pimpinan yang bersifat lokal. Walaupun pemerintah, sudah mulai memperhatikan perpustakaan dan kepustakawanan sebagaimana Penulis singgung di awal latar belakang ini, kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal Perguruan Tinggi umumnya belum berpihak kepada perpustakaan dan kepustakawanan secara maksimal. Bahkan di beberapa tempat, banyak pihak "cemburu" terhadap apresiasi pemerintah terhadap tenaga fungsional kepustakawanan. Akibatnya mereka kembali termarjinalkan dalam peta politik kebijakan kampus. Kalau ini yang terjadi, maka pengembangan SDM perpustakaan secara berkelanjutan tidak akan pernah terealisasi, dan akibatnya pula profesionalisme layanan tidak akan pernah bisa maksimal.

Berdasar hal di atas, kertas kerja ini akan mencoba mengupas pengembangan SDM Pustakawan dan pengelola Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan bagaimana sistem layanannya ditingkatkan. Di banyak tempat, faktor SDM menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan layanan perpustakaan kepada para penggunanya.

Metode Penelitian dan Konsep SDM Perpustakaan dalam Pengembangan Layanan Perpustakaan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif[302] yang memaparkan fenomena-fenomena

[302] Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara holistik yang nantinya akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi data guna menemukan masalah serta solusinya berdasarkan data-data yang terkumpul. Lihat Lexy

terkait dengan posisi strategis SDM perpustakaan dalam peningkatan layanan perpustakaan. Dalam penelitian ini Penulis melakukan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan menganalisis data dengan menggunakan langkah reduksi, display data dan penarikan kesimpulan yang merupakan milik dari Miles dan Huberman.

Pada penelitian ini Penulis menggunakan konsep perpustakaan dari Nurhadi yang menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan sebagai unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu, untuk digunakan secara kontinyu oleh pemakainya sebagai sumber informasi.[303]

Dalam perkembangannya, koleksi bahan pustaka tidak saja bersifat fisik akan tetapi juga bersifat digital. Bahan pustaka yang bersifat digital ini pada satu sisi mempunyai kelebihan, misalnya tidak menyita ruang, bisa di-*share* kepada banyak orang. Bahkan sumber informasi/bahan pustaka yang berbasis web bisa menunjang fungsi edukasi, karena dimungkin sebuah komunitas bisa berinteraksi dan berdiskusi secara maya terkait dengan topik dan sumber bacaan tertentu.

Pustakawan sebagai ujung tombak layanan dituntut untuk menguasai peta bahan pustaka dan model perkembangan pustaka digital. Perpustakaan Perguruan

---

J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 6.

[303] Mulyani Achmad Nurhadi, *Sejarah Perpustakaan dan Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi offset, 1983), 3.

Tinggi, apalagi perpustakaan pascasarjana tuntutannya akan semakin besar. Kebutuhan pengguna dalam hal ini semakin kompleks dan terkait dengan teknis-teknis keilmuan yang pelik.

Di perpustakaan, terdapat dua layanan teknis yang semuanya dipegang oleh pustakawan, yakni layanan teknis dan layanan pembaca. Pelayanan teknis berkaitan dengan pengolahan bahan pustaka, baik buku ataupun nonbuku sejak bahan pustaka tersebut tiba di perpustakaan hingga bahan pustaka tersebut siap disajikan kepada para pengguna. Sedang pelayanan pengguna adalah bentuk layanan kepada pengguna dalam pemanfaatan koleksi bahan pustaka di perpustakaan. Berbeda dengan layanan teknis, layanan pengguna merupakan bentuk yang sangat interaktif antara pustakawan dengan para pengguna.

Layanan pengguna ini akan semakin interaktif tatkala sebuah perpustakaan menerapkan sistem terbuka, yakni pengguna secara bebas menelusuri bahan-bahan pustka yang diinginkan. Umumnya perpustakaan sekarang menggunakan sistem layanan terbuka. Sistem layanan yang bersifat tertutup dinilai membatasi perselancaran pengguna terhadap bahan-bahan pustaka.

Karena layanan pengguna bersifat interaktif, maka layanan ini sangat penting di perpustakaan. Layanan teknis juga sangat penting karena terkait dengan pengolahan buku, akan tetapi ia berada di belakang layar. Layanan teknis dalam bentuk pengolahan buku sepanjang sudah disesuaikan dengan aturan pemetaan klasifikasi buku, maka

tidak banyak persoalan yang muncul. Ini berbeda dengan layanan pengguna yang bersifat manusiawi dan interaktif.

Kualitas layanan pengguna menjadi kata kunci kepuasan pelanggan. Layanan pengguna yang berkualitas adalah pelayanan yang selalu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Optimalisasi kualitas layanan tidak semudah membalik telapak tangan. Paling tidak ada beberapa ukuran dan kriteria konkrit sehingga sebuah layanan bisa dikatakan memuaskan.

Selain, bukti nyata fasilitas yang memadahi dan nyaman, layanan yang bersifat optimal dari perpustakaan adalah adanya respon/daya tanggap, yakni pertama, keinginan atau inisiatif petugas untuk membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan sumber informasi yang dibutuhkan, serta senantiasa tanggap dalam memberikan pelayanan. Kedua, pengetahuan dan kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh pustakawan. Ketiga, empati, yakni berusaha memahami kebutuhan pengguna dengan cara yang ramah. Keempat, keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.[304] Dapat dikatakan secara sederhana bahwa kualitas layanan pengguna mensyaratkan *hard* dan *soft skill* yang memadahi dari pustakawan.

[304] Fandi Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Jakarta: Gramedia, 1992), 26.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Pada dasarnya Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel mempunyai ikatan struktural dengan Perpustakaan Pusat UIN Sunan Ampel. Ini sebagaimana perpustakaan-perpustakaan lain di tingkat fakultas dan unit-unit lain. Hanya saja Perpustakaan Pascasarjana mempunyai tuntutan dan tantangan yang lebih besar, karena Pascasarjana bisa dikatakan mercusuar keilmuan di UIN Sunan Ampel, dan karenanya pula perpustakaannya dituntut untuk memfasilitasi dan mendukung posisi tersebut.

Fungsi Perpustakaan Pascasarjana dalam hal ini menjadi pusat pelayanan informasi di tingkat pascasarjana, dan menjadi bagian penting dalam mendukung keakuratan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Tugas pokok perpustakaan pascasarjana adalah memberikan layanan, utamanya kepada para mahasiswa S2 dan S3, dan umumnya kepada seluruh civitas akademika pascasarjana dan UIN Sunan Ampel, bahkan masyarakat secara umum.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di atas, perpustakaan pascasarjana menggunakan sistem layanan terbuka. Artinya bahwa setiap pengguna dapat leluasa menggunakan dan mencari sendiri bahan pustaka atau informasi yang dibutuhkan dengan memakai sistem yang telah ada. Pustakawan dalam hal ini beritindak sebagai fasilitator dalam penelusuran sumber informasi, jika pengguna menemukan kesulitan.

Fakta Dan Problematika Seputar Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

1. Keadaan Sekarang

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel mulai beroperasi sejak tahun akademik 1994/1995, yakni sejak program magister (S2) untuk pertama kalinya dibuka. Perpustakaan ini semakin menemukan eksistensinya tatkala dibuka program doktor (S3) dalam bidang *Islamic Studies* pada tahun akademik 2001/2002. Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel mengalami dinamika seiring dengan perjalanan dan dinamika lembaga ini, termasuk yang belum lama ini adalalah perubahan status dari institut menjadi universitas.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel bertempat di salah satu Gedung "Greensa" Jalan Juanda Surabaya. Perpindahan ini bersifat sementara, karena kampus utama Jl. Ahmad Yani sedang direnovasi secara total. Gedung Greensa sebagai tempat Perpustakaan pada dasarnya kurang representatif, karena gedung ini pada dasarnya memang tidak didesain untuk perpustakaan. Tata ruang dan sempitnya ruang tidak berimbang dengan jumlah koleksi dan banyaknya pengguna perpustakaan.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel mempunyai staf enam orang. Dari enam orang tersebut yang berijazah S2 satu orang, S1 empat orang, dan SMA satu orang. Dari enam orang tersebut hanya dua orang yang berijazah dan fungsional pustakawan, selebihnya adalah

tenaga staf UIN yang diperbantukan di Perpustakaan Pascasarjana.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan pelayanan kepada utamanya para mahasiswa S2 dan S3 (Program Doktor). Pada tahun akademik 2014/2015, jumlah mahasiswa S2 adalah 222 orang dan S3 berjumlah 59 orang. Perpustakan UIN sunan Ampel menerapkan sistem layanan terbuka. Perpus ini buka secara reguler mengikuti jam kerja. Akan tetapi karena layanan Perpustakaan harus mengikuti jam perkuliahan, perpustakaan ini juga menambah jam layanan pada sore hingga malam hari (jum'at sore hingga malam) dan Sabtu pagi hingga siang. Layanan pada jam-jam ini utamanya diberikan kepada mahasiswa Program Doktor.

Koleksi Perpustakaan UIN Sunan Ampel terdiri dari:

a. Koleksi buku berjumlah 22.000 eks;
b. Tesis dan disertasi 33.220 eks;
c. Jurnal ilmiah baik yang bersifat lokal maupun internasional.

   Jurnal lokal meliputi: Al-Qanun, Nadwa, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Jurnal Dakwah dan Ilmu Sosial, Al-Ahkam, Karsa, Ulumuna, Teosofi dan sebagainya. Sementara itu Jurnal Internasional meliputi: Politics and Policy, International Affair, Educations, Today, Foreign Policy, Journal of Democracy, Foreign Affairs, Insight Turkey dan Journal of Theology;
d. Koran dan majalah.

   Koleksi Perpustakaan UIN Sunan Ampel juga bisa dipilah menjadi koleksi referensi (tidak dipinjamkan),

Indonesian Corner, dan Koleksi Wakaf. Koleksi-koleksi ini umumnya berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Koleksi pustaka yang berbahasa asing (Arab dan Inggris) porsinya cukup banyak, karena sebagai perpustakaan pascasarjana, sumber dan literatur yang bersifat primer (babon) menempati skala prioritas. Koleksi-koleksi yang bersifat digital relatif tidak mengalami perkembangan, bahkan sekarang ini tidak bisa diakses karena komputer yang tersedia tidak terawat dengan baik. Tenaga khusus teknisi untuk menangani komputer dan jaringan belum tersedia di Perpustakaan UIN Sunan Ampel.

Tidak mengherankan bila, penelusuran terhadap koleksi Perpustakaan UIN Sunan Ampel belum dalam bentuk jaringan luas. Penelusuran OPAC masih dilakukan sebatas jaringan LAN dan offline. Ini patut disayangkan karena mahasiswa Program Pascasarjana umumnya datang dari tempat yang jauh, yakni kota-kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, bahkan luar provinsi. Ini penting untuk memastikan keberadaan buku yang dibutuhkan pengguna sebelum mereka datang ke Perpustakaan UIN Sunan Ampel.

Selain layanan koleksi, Perpustakaan UIN Sunan Ampel juga memberikan layanan foto copy, dan layanan internet. Layanan foto copy cukup membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan pustaka mereka. Layanan internet juga cukup membantu pengguna dalam mencari sumber pustaka yang berbasis web. Hanya saja edukasi terhadap hal ini belum dilakukan secara optimal oleh pustakawan. Layanan *print out* merupakan layanan yang banyak ditanyakan pengguna. Akan tetapi layanan ini belum bisa

diberikan karena belum tersedianya komputer dan print yang dikhususkan untuk itu.

Secara lebih detil layanan perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel adalah sebagai berikut:

a. Layanan sirkulasi;
b. Layanan referensi;
c. Layanan koleksi khusus;
d. Layanan koran;
e. Layanan majalah dan jurnal;
f. Layanan foto copy;
g. Layanan bimbingan pemakai;
h. Layanan ruang baca;
i. Layanan permohonan judul buku.

Sebagaimana diterangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, bahwa tidak semua layanan bisa berjalan secara optimal, persoalannya adalah fasilitas dan ketercukupan SDM. Padahal dengan prinsip "harus selalu ada kemajuan" Perpustakaan Pascasarjana UIN harus selalu meningkatkan jenis dan kualitas layanan. Semakin banyak layanan yang bisa diberikan, tentu akan semakin menambah nilai plus.

2. Keadaan Yang Diinginkan

Secara sederhana, harapan Penulis adalah optimalisasi layanan kepada pengguna. Yang pertama, adalah pengguna bisa mendapatkan sumber pustaka yang diinginkan, bahkan jika di tempat lain tidak bisa ditemukan. Karena itu ketercukupan koleksi dengan berbagai modelnya, baik yang hard maupun yang *soft copy* atau digital. Kedua, penelusuran sumber pustaka bisa dilakukan secara

sederhana dan mudah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Ketiga, para pengguna bisa merasakan *at home*, dan *fun* di perpustakaan. Karena perpustakaan bukan hanya tempat untuk meminjam sumber pustaka saja, akan tetapi juga untuk membaca dan rekreasi yang bersifat edukatif. Konsep perpustakaan sebagai wahana rekreasi ilmiah seharusnya dikembangkan. Karena itu perpustakaan harus representatif dan memberikan layanan-layanan skunder yang dibutuhkan pengguna. Dengan model ini, sejauh mungkin pengguna bisa dicukupi kebutuhannya di perpustakaan, mulai dari foto copy, *print out*, kantin, mushalla dan sebagainya.

Karena itu fasilitas dan sarana yang memadahi menjadi prasyarat awal yang harus dicukupi. Selanjutnya adalah pengembangan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas pengelola pasca seharusnya disesuaikan dengan jumlah koleksi buku, jumlah pengguna yakni mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3, dan jenis-jenis layanan yang diberikan. Sementara secara kualitas, SDM pengelola perpustakaan dengan sendirinya, pertama, mempertimbangan tenaga-tenaga yang memang mempunyai *background* kepustakawanan, atau paling tidak pernah diikutkan pelatihan-pelatihan yang terkait. Selanjutnya adalah mempertimbangkan tenaga-tenaga teknis lain yang memang sangat dibutuhkan. Tenaga teknisi misalnya, sangat dibutuhkan untuk mengelola fasilitas-fasilitas yang terkait dengan teknologi informasi, baik pada wilayah *hard* maupun *software*.

3. Masalah dan Solusi

Tanpa menafikan nilai lebih dari Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel, harus diakui masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, bukankah kesempurnaan hanya milik Tuhan. Beberapa kelemahan yang Penulis paparkan dalam bab sebelumnya, pada dasarnya hanyalah akibat dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Di antaranya adalah:

1. Ketercukupan SDM pengelola dengan mempertimbangkan jenis-jenis layanan yang diberikan kepada pengguna. Pertama adalah mencukupi tenaga fungsional pustakawan, dan selanjutnya tenaga-tenaga lain yang sangat dibutuhkan oleh perpustakaan;
2. Pengembangan kualitas dan mutu SDM pengelola. Perkembangan teknologi informasi demikian pesat, maka *up grade* dan *up date* tenaga kepustakawanan menjadi sangat penting. Kegiatan-kegiatan model ini bisa dilakukan secara eksternal, ataupun internal, dalam bentuk pelatihan, workshop maupun seminar serta yang semisal, baik yang menyangkut *hard skill* kepustakawanan maupun *soft skill* kepustakawanan. Kegiatan-kegiatan pengembangan ini seharusnya dilakukan secara rutin. Dengan kualitas SDM yang *up date*, maka layanan kepada para pengguna bisa lebih dioptimalkan;
3. Dengan kualitas SDM yang selalu ditingkatkan, tenaga kepustakawanan bahkan bisa memelihara dan mengembangkan jenis layanan dan bisa secara optimal memerankan fungsi edukatif yang disandangnya.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya, masih banyak jenis layanan yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

4. Di antaranya adalah Perpustakaan Pascasarjana belum terlibat aktif dalam usulan penganggaran untuk menutupi segala kekurangan, baik terkait dengan koleksi maupun fasilitas-fasilitas pendukung. Padahal, kebutuhan-kebutuhan riil hanya bisa diketahui oleh para pengelola perpustakaan sendiri.

Pemecahan masalah di atas sebenarnya bermuara pada satu persoalan pokok, yakni arah kebijakan kampus terhadap eksistensi perpustakaan. Apakah perpustakaan hanya dijadikan sebuah simbol dan formalitas keberadaan PT, ataukah perpustakaan secara subtantif memang dijadikan sebagai ruh bagi segenap kegiatan akademiknya. Pengelola perpustakaan hanyalah insan pelaksana bagi kebijakan yang lebih besar yang datang dari para pimpinan.

> Maka dalam konteks dinamika politik kampus yang pasang surut, maka prinsip pustakawan adalah *do your best.* Pustakawan adalah profesi yang sejatinya adalah panggilan hati, maka pengabdian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan lewat perpustakaan sebagai sumber riset adalah suatu yang maha penting bagi pustakawan atau mereka yang memutuskan untuk bekerja di perpustakaan, atau yang dipaksa ditakdirkan untuk bekerja di tempat ini.

Walaupun seperti itu, pengelola perpustakaan tidak boleh apatis dalam pengembangan perpustakaan. Dalam konteks ini, idealnya pustakawan bisa menjadi sosok negosiator untuk mengarahkan kebijakan kampus yang berpihak pada pengembangan perpustakaan.

Penutup

Berdasar seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel mempunyai koleksi dalam jumlah yang lumayan. Dari sisi ini layanan koleksi cukup menggembirakan, walaupun penambahan koleksi harus secara rutin dilakukan. Koleksi tersebut tidak saja dalam bentuk fisik, akan tetapi sudah saatnya dalam bentuk digital, bahkan yang berbasis web.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel juga seharusnya mengembangkan bentuk-bentuk layanan yang intinya adalah memberikan kenyamanan, kemudahan, kecepatan dan keakuratan pelayanan. Karena itu konsep perpustakaan sebagai tempat dan wahan rekreasi yang bersifat edukatif perlu dikembangkan ke depan.

Untuk hal di atas, maka ketajaman kompetensi pustakawan dan pengelola perpustakaan yang lain harus selalu ditingkatkan dalam bentuk varian program yang bisa menunjang.

DAFTAR PUSTAKA

Nurhadi, Mulyani Achmad. *Sejarah Perpustakaan dan Perkembangan di Indonesia.* Yogyakarta: Andi offset, 1983.

Tjiptono, Fandi. *Manajemen Jasa.* Jakarta: Gramedia, 1999.

Pascasarjana UIN Sunan Ampel. Pedoman Akademik.

Soetminah. Perpustakaan, Kepustakawanan dan Pustakawan. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Sulistyo-Basuki. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Uatama, 1991.

Tentang Penulis

1. **Abid Rohmanu**

   Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah dan Pascasarjana IAIN Ponorogo. Bagian dari tugasnya adalah meneliti dan menulis. Beberapa hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal dan buku yang sebagian besar bisa diakses secara online dalam Online Journal System (OJS) dan Repository IAIN Ponorogo. Publikasi online ini dapat dilihat di database Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sc0mD5YAAAAJ).

   Selain itu, penulis - sampai saat buku ini ditulis - adalah Editor in Chief Jurnal Muslim Heritage Pascasarjana IAIN Ponorogo dan reviewer beberapa Jurnal Ilmiah dan reviewer nasional Litapdimas Kementerian Agama RI. Kontak dengan penulis bisa dilakukan di email: abied76@iainponorogo.ac.id. Web personal/home page bisa dikunjungi di http://abidponorogo.com/.

2. Aksin Wijaya

Aksin Wijaya adalah penulis buku produktif. Buku-bukunya diterbitkan oleh penerbit buku bereputasi nasional, di antaranya Mizan, IRCiSOD, dan Pustaka Pelajar. Selain menulis, Aksin aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah utamanya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Selain itu, Aksin menjadi seminaris dalam berbagai forum ilmiah untuk kajian-kajian pemikiran keislaman.

Aksin, bersama istrinya, Rufi'ah Nur Hasan, S.H.I, dan empat anaknya (Nur Rif'ah Hasaniy, Moh. Ikhlas (*alm.*), Nayla Rusydiyah Hasin, Rosyidah Nur Cahyati Wijaya, dan Tazkiyatun Nafsi) bertempat tinggal di Jl. Brigijen Katamso, 64-C, RT. 4, RW. 3, Kadipaten, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi di HP: 081578168578 atau e-mail: asawijaya@yahoo.com.

3. Anis Afifah

Anis Afifah, lahir di Ponorogo 22 Oktober 1983. Menyelesaikan Studi S1 di STAIN Ponorogo dan S2 di Universitas Negeri Surabaya. Sejak 2016 mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo dengan fokus bidang keilmuan Pendidikan Dasar. Sebelum menjadi dosen, mulai tahun 2008-2016 mengajar di Sekolah Dasar Tarbiyatul Islam Kertosari Babadan Ponorogo. Beralamat di Jl. Jalan Batoro Katong 152 Ponorogo, dapat dihubungi di afifah@iainponorogo.ac.id dan 08113312653.

4. Antis Rachmayanti

Antis Rachmayanti adalah pustakawan IAIN Ponorogo. Hingga draft kumpulan tulisan disusun, penulis ditugaskan di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Ponorogo. Profesi sebagai pustakawan dimulai dan dibangun sejak mengabdi di UIN Sunan Ampel Surabaya (2001-2016). Pada rentang tahun itu pula Antis Rachmayanti ditugaskan di Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2017, Antis dimutasi ke IAIN Ponorogo.

Ibu 4 orang anak ini tinggal di dekat kampus IAIN Ponorogo, tepatnya Perumahan Royal Bukit Asri V/15 Ronowijayan Siman Ponorogo. Komunikasi dapat dilakukan melalui email antisramayanti92@gmail.com

5. Eny Supriati

Eny Supriati adalah pustakawan IAIN Ponorogo. Penulis merupakan alumni Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan UIN Yogyakarta dan Magister S2 Program Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Ponorogo. Penulis di besarkan dengan kasih sayang dari ayah H. Nursaram (alm) dan ibu Hj. Sitin. Tiga bersaudara (1) Yuni Purwantari (alm) dan (2) Supriyanto. Menikah dengan Hari Murbayanto (suami), Ahmad Nurrozaq Murbayanto (anak) sedang menimba ilmu di Pondok Modern Gontor Ponorogo, serta Annisa Nurkholifah Murbayanto (anak) yang saat ini sedang menuntut ilmu di MI Islamiyah Kota Madiun.

Beberapa karya penulis di antaranya: (1) "Membangun Prestasi Belajar dengan Membaca" (*Jurnal Pustakaloka*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2009; (2) "Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak Usia Dini" (*Jurnal Pustakaloka*, Vol.3 No. 1 Tahun 2011; (3) "Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo" (*Muslim Heritage Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2017); (4) "Meningkaatkan Literasi Digital Melalui Perpustakaan Sekolah" (*Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 09 No. 01 2021). Dan beberapa buku, diantara Literasi di Era Digital dan buku Antologi Pascasarjana IAIN Ponorogo yang sedang dalam genggaman pembaca ini. Saat ini penulis tinggal di Jl. Manyar Rt. 52 Rw.09, Kincang Wetan Jiwan Madiun dan dapat dihubungi melalui email: enysupriati@iainponorogo.ac.id

6. **Iza Hanifudin**
7. **Luhur Prasetyo**

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Pascasarjana IAIN Ponorogo. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan publikasi ilmiah sebagai reviewer beberapa jurnal ilmiah di IAIN Ponorogo. Sesuai dengan bidang keahliannya di bidang ekonomi syariah, penulis sudah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa penelitian, buku dan artikel jurnal. Publikasi online bisa dilihat di Google Scholar (https://scholar.google.co.kr/citations?hl=en&authuser=1&user=iDy9M1AAAAAJ).

Kontak dengan penulis dapat dilakukan melalui email: luhur@iainponorogo.ac.id.

8. Lukman Hakim

Penulis adalah Dosen Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo. Ada beberapa artikel yang dapat diakses di google scholar dengan link: https://scholar.google.com/citations?user=OXNu0nkAAAAJ&hl=en . Selain mengajar, penulis aktif dalam kegiatan publikasi jurnal, diantaranya: managing editor di jurnal muslim heritage Pascasarjana IAIN Ponorogo, section editor di jurnal Cendekia, dan beberapa jurnal hasil bentukan dengan mahasiswa. Penulis memiliki istri yang juga dosen di IAIN Ponorogo dan juga editor di jurnal INSECTA. Saat ini penulis memiliki seorang anak. Alamat tempat tinggal di Perum Bumi Bhayangkara No. AB 6, Cokromenggalan, Ponorogo. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: hakim@iainponorogo.ac.id.

9. Nanang Rosyidi

Penulis adalah Staf bagian Akademik pascasarjana IAIN ponorogo, Selain itu penulis adalah pegiat Budaya dan Sejarah di Kota ponorogo, tergabung dalam komunitas Debog Wengker dan Waskita Jawi. Alamat Gmail : narohito.nr@gmail.com
beralamat di Jl.Kokrosono No.59 Brotonegaran Ponorogo

10. Nurkolis

11. Rizka Eliyana Maslihah

Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Hasil penelitiannya dipublikasikan dalam bentuk artikel Jurnal Ilmiah dan buku. Publikasi online ini dapat dilihat di database Google Scholar (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=wftKVGMAAAAJ). Di antara tulisannya telah diterbitkan oleh Penerbit Andaliman Yogyakarta.

Selain itu, penulis adalah editor di beberapa Jurnal di IAIN Ponorogo. Yaitu : Jurnal Tsaqofiyah Jurusan PBA IAIN Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage Pascasarjana IAIN Ponorogo. Serta penerjemah Abstrak bahasa Arab Jurnal Dialogia Fakultas Ushuluddin IAIN Ponorogo. Kontak dengan penulis bisa dilakukan di email : maslihah@iainponorogo.ac.id

12. Tiara Widya Antikasari

Penulis adalah Dosen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo. Hasil penelitian penulis dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal Ilmiah dan proceeding. Ada beberapa artikel yang dapat diakses di google scholar dengan link: https://scholar.google.co.id/citations?user=l7xES8kAAAAJ&hl=id. Selain mengajar, penulis aktif dalam kegiatan literasi investasi diantaranya tergabung dalam Forum Kuliah Saham dan Forum Manajemen Indonesia (FMI). Saat ini alamat tempat tinggal di Jl Sendangmulya Rt. 09

Rw. 02 Ds. Sendangrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: tiara@iainponorogo.ac.id.

13. Wahid Hariyanto

Wahid Hariyanto**,** lahir di Ponorogo 11 Mei 1989. Sejak 2016 Ia mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo dengan fokus bidang keilmuan Manajemen Pendidikan Islam. Sebelum menjadi dosen, mulai tahun 2006-2016 Ia mengajar di beberapa Lembaga Pendidikan Diniyah seperti Madrasah diniyah Dzawil Huda Desa Tranjang, Madrasah diniyah al-Amin Desa Tajug, dan Madrasah diniyah al-Muthahharah Desa Sragi. Selain itu juga di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan di Ponorogo seperti SMK 1 Pemda Ponorogo dan SMK Negeri 1 Ponorogo. Di sela-sela mengajar saat ini, ia menjadi editor di Jurnal Muslim Heritage Pascasarjana IAIN Ponorogo dan mengelola sebuah lembaga pendidikan nonformal di desanya. Saat ini ia tinggal di Jl. Halim Perdana Kusuma Rt. 03/Rw. 01 Tajug, Siman, Ponorogo. Dan dapat dihubungi di wahidhariyanto7@gmail.com dan 085645767472.

14. Yusmicha Ulya Afif

Yusmicha Ulya Afif merupakan dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo. Ia menyelesaikan S2 jurusan Pendidikan Islam di IAIN (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2011. Minat penelitian pada kajian pendidikan Islam dan masyarakat muslim minoritas. Diantara

publikasinya: Implementasi Metode Hypnosis Perspektif Pendidikan Islam Klasik: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Immersion Ponorogo (Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama Vol.10 No.2, 2018); Diaspora Muslim Rohingya di Indonesia: Minoritas, Militansi dan Pencarian Identitas,(El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol.07 No.2, 2019, co-author), Religous and Political Role of Javanese Ulama in Johor, Malaysia (Journal of Islamic Studies and Humanities Vol.4 No.2, co-author); Managing Democracy in Malaysia: Identity, Minorities, and Representation (Aristo, Vol.8 No.1, 2020, co-author); A Religious State: A Study of Hasyim Asyari and Muhammad Iqbal's Thought on the Relation of Religion, State and Nationalism (JUSPI: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, Vol.3 No.02, 2020, co-author), Moderate Islamic Education and Religious Digital Literature: The Making of Children's Moderate Identities Through the NU Kids Application (Proceeding 2nd ICIS, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA